



Atik Hartati - Sarwono

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas XII



Atik Hartati - Sarwono

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas XII

3



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

Atik Hartati - Sarwono

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas XII

3



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

Hak cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas XII

Penulis : Atik Hartati - Sarwono

Ukuran buku : 17,6 x 25 cm

Atik Hartati

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta :
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
2 jil.: foto.; 25 cm.

untuk SMA/ MA Kelas XII

Termasuk bibliografi .

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-679-7 (jil.3)

1. Kewarganegaraan —Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Sarwono

323.607

Hak Cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
dari penulis Atik Hartati - Sarwono

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d November 2025

Diperbanyak oleh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Berkehendak. Atas kehendak-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul Pendidikan Kewarganeraan untuk SMA/MA Kelas XII ini. Penulisan buku ini bertujuan untuk menyediakan buku teks pelajaran bagi Anda, peserta didik SMA/MA Kelas XII, sebagai sarana dalam proses belajar. Buku ini disajikan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Bahasa yang digunakan pun sesuai dengan kematangan emosi dan sosial peserta didik.

Setiap konsep dan subkonsep disajikan dengan melibatkan unsur pengetahuan, sikap, wawasan global, dan keterampilan civic. Hal tersebut bertujuan agar Anda mampu:

1. berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
2. berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi,
3. berkembang secara demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, serta
4. berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyusunan buku ini mempertimbangkan kecenderungan dalam teori belajar, pendekatan pembelajaran, dan kecenderungan global pendidikan kewarganeraan. Namun, tentunya masih banyak kekurangannya. Untuk itu, saran perbaikan sangat kami harapkan dari pengguna buku ini. Kehadiran buku ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik rekan editor, layouter, penata grafis, penata sampul, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik ini.

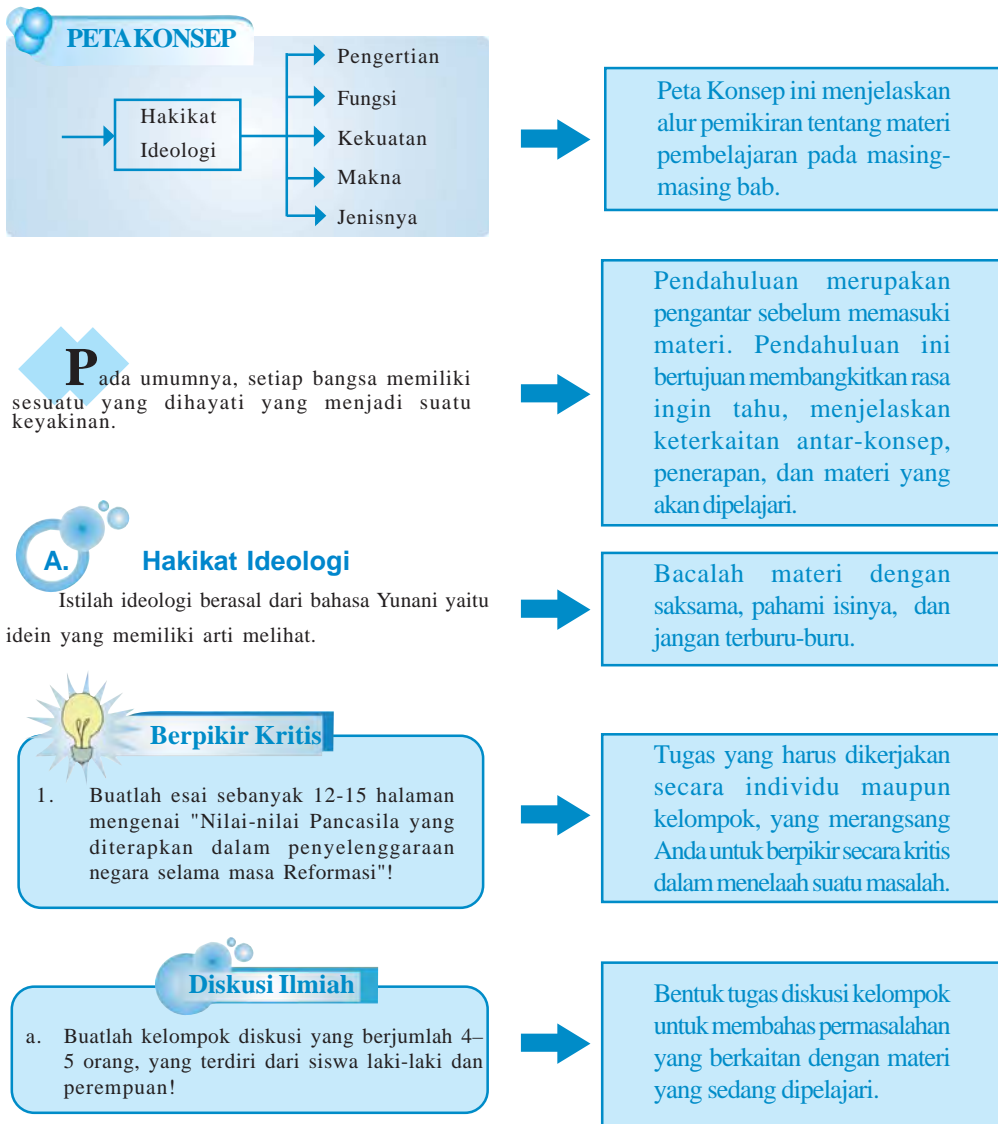
Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat digunakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi khazanah pendidikan di Indonesia. Selamat belajar, semoga sukses!

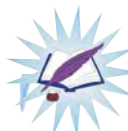
Surakarta, April 2010

Tim Penulis

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini merupakan salah satu bahan ajar yang diharapkan dapat membantu Anda melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien. Cepat atau lambatnya penguasaan kompetensi pada setiap kegiatan belajar, sangat bergantung pada kesungguhan Anda dalam mempelajari materi. Oleh karena itu, pahami petunjuk penggunaan buku ini untuk memudahkan Anda dalam menguasai kompetensi yang diharapkan.





KATA SANG TOKOH

Anda bukan apa yang Anda pikirkan tentang Anda, tetapi apa yang Anda pikirkan itulah Anda.

(Plato)



Selayang Pandang

3. Ideologi memiliki derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.



Ungkapan maupun ucapan sang tokoh yang berkaitan erat dengan materi yang sedang dipelajari.



Istilah ini untuk menggantikan kata "rangkuman", yaitu ringkasan dari uraian materi pada tiap bab. Anda dapat menambahkan kalimat tertentu pada kolom ini jika diperlukan.



UJI KOMPETENSI



3. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah dikukuhkan secara konstitusional pada tanggal
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 29 Agustus 1945
 - d. 27 Desember 1949
 - e. 5 Juli 1959



Kolom ini berisi soal-soal, baik pilihan ganda maupun uraian, yang wajib Anda kerjakan setelah mempelajari materi pada setiap bab. Jangan beranjak mempelajari bab selanjutnya jika Anda merasa kesulitan mengerjakan soal-soal tersebut.



Glosarium

- AFTA : Asean Free Trade Area, wilayah perdagangan bebas ASEAN.
- Bio teknologi : teknologi yang mengangkut jasad hidup. hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum; tetapi tidak boleh tidak harus ada (P. Scholten).



Untuk mengetahui arti suatu kata yang mungkin menurut Anda sulit, Anda dapat melihat pada halaman glosarium. Glosarium ini disajikan menurut abjad untuk memudahkan pencarian. Inventarisasi pada glosarium dapat ditambah jika Anda masih menemukan kata yang sulit. Gunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.



Indeks

- A
Achmad Ali
39
Amendemen
142, 146, 147, 151, 160, 201, 202, 230, 231,



Untuk memudahkan dalam mencari kata atau nama seseorang, disediakan Indeks. Indeks juga disusun menurut Abjad untuk memudahkan pencarian.

Setelah memahami hal-hal di atas, semoga Anda lebih mudah mempelajari buku ini dan memperoleh hasil yang maksimal. Buku ini mengembangkan tiga aspek yang terdapat pada diri Anda, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selamat belajar, semoga sukses.

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Petunjuk Penggunaan Buku	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
BAB 1 Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	1
A. Hakikat Ideologi	2
B. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	9
C. Gagasan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	11
D. Sumber Nilai dan Paradigma Pembangunan	12
E. Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	24
Uji Kompetensi	32
BAB 2 Sistem Pemerintah di Indonesia dan Berbagai Negara	37
A. Hakikat Pemerintahan	38
B. Bentuk-Bentuk Pemerintahan	40
C. Sistem Pemerintahan di Dunia	44
D. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara	51
E. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia	57
F. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan Negara Lain	76
Uji Kompetensi	83
Latihan Ulangan Umum Semester 1	87
BAB 3 Peranan Pers dalam Masyarakat Demokrasi	95
A. Pengertian Pers	96
B. Perkembangan Pers di Indonesia	97
C. Fungsi dan Peran Pers dalam Masyarakat Demokratis	116
D. Keterkaitan Antara Pers dan Jurnalistik	127
E. Kode Etik Jurnalistik serta Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab	128

Uji Kompetensi	148
BAB 4 Dampak Globalisasi	153
A. Globalisasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	154
B. Dampak Globalisasi	168
C. Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	173
D. Menyikapi Adanya Pengaruh Globalisasi	182
E. Implikasi Globalisasi terhadap Indonesia	188
F. Presentasi tentang Pengaruh Globalisasi bagi Indonesia	197
Uji Kompetensi	203
Latihan Ulangan Umum Semester 2	208
Glosarium	214
Daftar Pustaka	216
Indeks	218

Daftar Gambar

BAB 1

Gambar 1.1	Upacara bendera	3
Gambar 1.2	Bung Karno berpidato	6
Gambar 1.3	Kerukunan umat beragama	14
Gambar 1.4	Sidang wakil rakyat	19
Gambar 1.5	Pendidikan	22

BAB 2

Gambar 2.1	Supersemar	64
Gambar 2.2	Sidang pengunduran diri Soeharto	65

BAB 3

Gambar 3.1	Surat kabar Bataviase Nouvelles	98
Gambar 3.2	Surat kabar Bataviasche Koloniale Courant	99
Gambar 3.3	Surat kabar Medan Prijaji	101
Gambar 3.4	Surat kabar Hong Po	103
Gambar 3.5	Surat kabar Soeloeh Ra'jat Indonesia	106
Gambar 3.6	Majalah Merdeka, majalah Adil	108
Gambar 3.7	Etika pers	128
Gambar 3.8	Konferensi pers	131
Gambar 3.9	Warnet	140

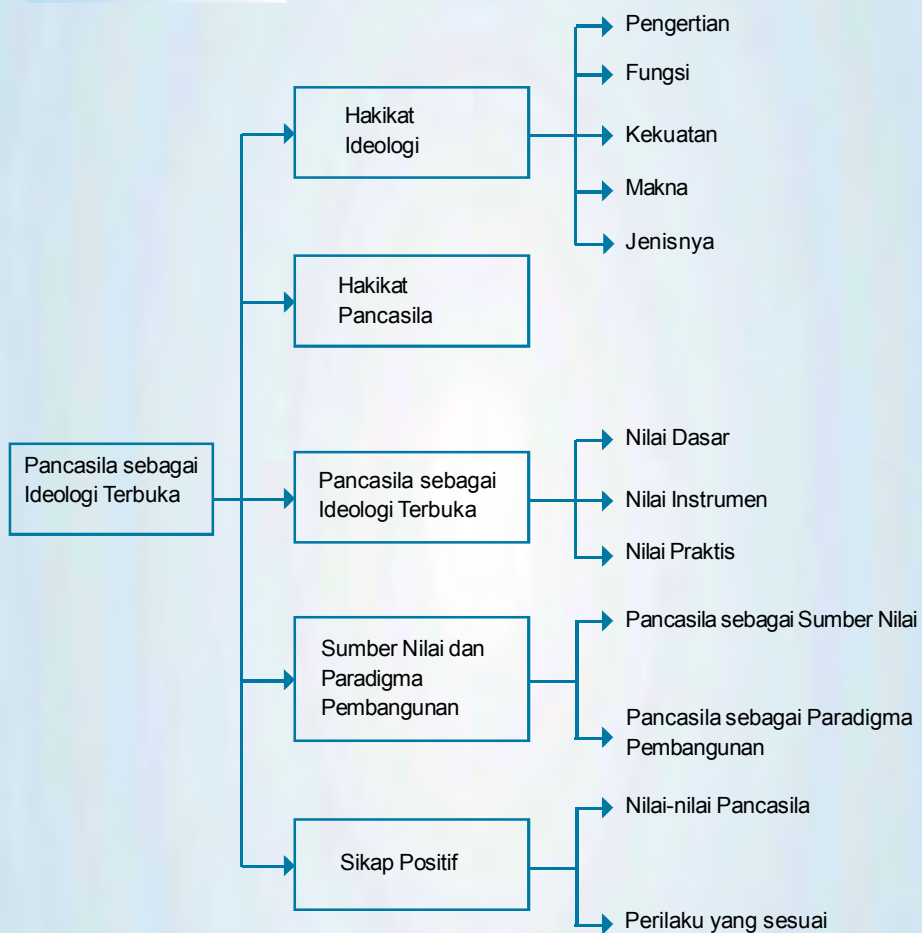
BAB 4

Gambar 4.1	Lembaga kursus	167
Gambar 4.2	Produk dalam negeri	174
Gambar 4.3	Kontingen Pasukan Garuda Indonesia	182
Gambar 4.4	Reog Ponorogo	185
Gambar 4.5	Kemiskinan	186
Gambar 4.6	Alat KesehatanModern	192

BAB 1

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

PETA KONSEP



Pada umumnya, setiap bangsa memiliki sesuatu yang dihayati yang menjadi suatu keyakinan. Itulah yang disebut ideologi. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas dan menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Komitmen tersebut tercermin pada sikap dari bangsa/masyarakat yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan normatif yang harus dipatuhi oleh semua orang dalam hidup bermasyarakat (berbangsa).

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus fondasi utama berdirinya negara Indonesia yang digali dari bumi Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi dapat diterima oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahukah Anda, bagaimana Pancasila memerankan posisinya sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa di tengah situasi globalisasi dunia saat ini? Untuk dapat memahaminya, coba simak uraian berikutnya!



KATA SANG TOKOH

Saya percaya, esok sudah tidak boleh mengubah apa yang berlaku hari ini, tetapi hari ini masih boleh mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok.

(Henry Dunnat)

Sumber: http://id.wikipedia/wiki/Henry_Dunant

A.

Hakikat Ideologi

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *idein* yang memiliki arti melihat. Selanjutnya istilah ideologi ini dalam bahasa Inggris menjadi *idea* yang memiliki arti gagasan, cita-cita, konsep, serta kata *logia* yang berarti ajaran. Istilah ideologi adalah ajaran atau ilmu mengenai gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas*. Istilah ideologi ini pertama kali diciptakan oleh Destuct de Tracy, seorang filsuf Prancis yang mengemukakan bahwa ideologi sebagai ilmu mengenai gagasan-gagasan yang menunjukkan jalan kebenaran menuju masa depan. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan juga sebagai falsafah hidup, yang dalam bahasa Jerman disebut dengan *Weltanschauung*.

Beberapa pendapat mengenai ideologi yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut.

a. Hegel

Dalam bukunya "*An Introduction to Hegel, Freedom, Truth and History*" karangan Stephen Houlgate (2005), mensitir pendapat Hegel bahwa ideologi adalah produk kebudayaan dari suatu masyarakat. Dalam arti tertentu, ideologi merupakan manifestasi kenyataan sosial.

b. Soerjanto Poespowardojo

Dalam bukunya yang berjudul "*Filsafat Ilmu Pengetahuan*" (2000), disebutkan bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.

c. **Dr. Alfian**

Dalam bukunya yang berjudul “*Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*” (1980), Dr. Alfian berpendapat bahwa ideologi adalah pandangan atau sistem bilateral yang menyeluruh dan mendalam mengenai cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil serta mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

d. **Padmo Wijayono**

Dalam bukunya yang berjudul “*Bunga Rampai Sejarah - Sosial - Ekonomi*” (2005), beliau berpendapat bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar.

e. **M. Sastrapratedja**

Dalam tulisannya yang berjudul “*Ide-Ide Menerobos*” (2003), Sastrapratedja memaknai tentang ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi sistem yang teratur.

Dengan demikian, pengertian ideologi secara umum merupakan suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya.

2. Fungsi Ideologi

Setiap bangsa memerlukan ideologi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Oleh karenanya, ideologi sangat menentukan keberadaan suatu bangsa dan negara.



Sumber : <http://endang965.files.wordpress.com>

Gambar 1.1 Upacara bendera dapat melatih kedisiplinan, mempertebal semangat Nasionalisme, dan memperkuat Ideologi negara, yakni Pancasila, bagi setiap warga negara Indonesia.

Begitu pentingnya suatu ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga ideologi dapat berfungsi sebagai berikut.

- a. **Struktur Kognitif**, yaitu keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.

- b. **Orientasi Pasar**, yaitu adalah membuka wawasan sehingga memberikan makna dan menunjukkan tujuan di dalam kehidupan manusia.
- c. Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang atau masyarakat untuk melangkah dan bertindak.
- d. Memberikan bekal dan jalan bagi seseorang atau masyarakat untuk menemukan identitasnya.
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang atau masyarakat untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, dan membuat pola tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.



KATA SANG TOKOH

Anda bukan apa yang Anda pikirkan tentang Anda,
tetapi apa yang Anda pikirkan itulah Anda.

(Plato)

Sumber: <http://rien18.files.wordpress>

3. Kekuatan Ideologi

Kekuatan ideologi tergantung kepada kualitas tiga dimensi yang terdapat dalam ideologi tersebut, yaitu sebagai berikut.

a. Dimensi Realita

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil hidup di dalam dan bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya.

b. Dimensi Idealisme

Nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberikan harapan masa depan yang lebih baik melalui pengalaman di dalam praktik kehidupan sehari-hari secara bersama-sama.

c. Dimensi Fleksibilitas (Pengembangan)

Ideologi tersebut mempunyai keluwesan yang merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung pada nilai-nilai dasar tersebut.

4. Makna Ideologi

Makna ideologi bagi suatu negara dapat diartikan sebagai suatu cita-cita dari negara tersebut.

- a. Ideologi memiliki derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Ideologi dapat mewujudkan satu asas kerohanian pandangan dunia dan pandangan hidup.

Diskusi Ilmiah

- a. Bentuklah kelompok diskusi yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
- b. Diskusikan tema berikut ini!
"Dapatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa menjawab segala permasalahan bangsa pada era globalisasi yang semakin kuat ini?"
- c. Tulislah hasil diskusi bersama kelompok Anda dan presentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain untuk memberikan tanggapannya! (Guru Anda bertindak sebagai moderator)
- d. Kumpulkan hasil diskusi kelompok Anda kepada guru untuk dinilai! Sertakan pula catatan tanggapan dari kelompok lain!

5. Jenis-Jenis Ideologi

Sudahkah Anda memahami berbagai jenis ideologi yang dianut oleh beberapa negara di dunia ini? Untuk mengetahuinya, coba cermati uraian materi di bawah ini!

Ada beberapa jenis ideologi yang dianut oleh beberapa negara, antara lain, sebagai berikut.

a. Liberalisme

Liberalisme merupakan ideologi yang memiliki konsep kebebasan individual. Artinya, adanya kesetaraan bagi semua anggota masyarakat. Untuk itu, ideologi liberalisme menginginkan semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya seperti halnya yang dimiliki orang lain. Dengan demikian, hak-hak individual harus dilindungi dari campur tangan negara dan badan-badan yang lain.

b. Marxisme - Komunisme

Paham ini merupakan ajaran dari Karl Mark. Dalam pandangan komunisme ini mengutamakan kebersamaan manusia (individu) daripada kebebasan individu. Dengan demikian, hak pribadi perseorangan tidak diakui. Prinsip utama dari komunisme adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama.

Menurut Miriam Budiardjo, terdapat nilai-nilai tertentu yang ada dalam komunisme.

- 1) Gagasan Monoisme, yaitu gagasan yang menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat.
- 2) Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah untuk mencapai komunisme.
- 3) Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Oleh karena itu, semua alat negara, seperti polisi, tentara, dan kejaksaan dipergunakan untuk diabdikan kepada tercapainya komunisme.

c. Sosialisme

Ideologi sosialisme berpandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk kreatif, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan harus melalui kerja sama.

Pokok ajaran sosialisme menurut Heuken Sj mencakup beberapa hal berikut ini.

- 1) Penghapusan ataupun pembatasan hak milik pribadi.
- 2) Perlindungan bagi kaum buruh terhadap kemiskinan dan pengangguran dalam bentuk jaminan kerja bagi semua.
- 3) Perubahan struktur ekonomi melalui pengawasan negara terhadap perusahaan monopoli.
- 4) Perubahan struktur kekuasaan yaitu dengan jalan memaksakan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan semua warga negara.
- 5) Perubahan struktur pendidikan melalui perlawanan terhadap privilese pendidikan yang dimiliki kelas menengah dan kelas atas.

d. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan ideologi yang mempunyai suatu kekuatan pengaruh untuk menggerakkan. Pada umumnya, pengantar ideologi ini mengatributkan negara pada suatu bentuk identitas kultural yang khas.

Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan menggerakkan rakyat dengan dilandasi rasa kecintaan dan rasa bela negara terhadap tanah air dan bangsanya. Ideologi nasionalisme ini akan muncul apabila suatu bangsa terusik kemerdekaannya atau terhina harga dirinya oleh bangsa lain.

Ideologi nasionalisme tidak memandang perbedaan agama, ras, suku, ataupun golongan yang ada di negara tersebut. Ideologi nasionalisme lebih mementingkan rasa persatuan dan tekad rela berkorban tanpa pamrih demi membela kepentingan bangsa dan negara.

Ideologi nasionalisme ini akan lebih hebat berkumandang jika disertai munculnya tokoh-tokoh kebangsaan yang kharismatik dan dicintai rakyatnya.. Misalnya: Ki Hajar Dewantoro, Haji Agus Salim, PB. Jendral Soedirman, dan sebagainya.



Sumber : <http://kolomkita.detik.com>

Gambar 1.2 Bung Karno berpidato dalam rangka mengobarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) untuk merebut Irian Barat (Papua) dari cengkraman penjajah Belanda (1962).

e. **Fundamentalisme**

Fundamentalisme merupakan ideologi untuk menetapkan agama sebagai sistem politik dalam dunia modern. Dalam hal ini, agama menjadi sistem organik total yang bersaing di dalam kekomprehensifan serta jangkauan ideologi dan sistem negara.

5. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lain

Sebelum pembahasan Pancasila sebagai ideologi terbuka, coba Anda amati perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang diterapkan di negara-negara di dunia berikut ini.

**Tabel 1. Perbandingan antarideologi
(Liberalisme - Komunisme - Sosialisme - Pancasila)**

IDEOLOGI ASPEK	LIBERALISME	KOMUNISME	SOSIALISME	PANCASILA
Politik dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi liberal - Hukum untuk melindungi individu - Dalam politik mementingkan individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi rakyat - Berkuasa mutlak satu parpol - Hukum untuk melanggengkan komunis 	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi untuk kolektivitas - Diutamakan kebersamaan - Masyarakat sama dengan negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Demokrasi Pancasila - Hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara kecil - Swasta mendominasi - Kapitalisme - Monopolisme - Persaingan bebas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara dominan - Demi kolektivitas berarti demi negara - Monopoli negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara ada untuk pemerataan - Keadilan distributif yang diutamakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli, dan lain-lain yang merugikan rakyat
Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Agama urusan pribadi - Bebas beragama <ul style="list-style-type: none"> · Bebas memilih agama · Bebas tidak beragama 	<ul style="list-style-type: none"> - Agama candu masyarakat - Agama harus dijauhkan dari masyarakat - Atheis 	<ul style="list-style-type: none"> - Agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas memilih salah satu agama - Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

<div> <div>IDEOLOGI</div> <div>ASPEK</div> </div>	LIBERALISME	KOMUNISME	SOSIALISME	PANCASILA
Pandangan terhadap Individu dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Individu lebih penting daripada masyarakat - Masyarakat diabdikan bagi individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Individu tidak penting - Masyarakat tidak penting - Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat lebih penting daripada individu 	<ul style="list-style-type: none"> - Individu diakui keberadaannya - Masyarakat diakui keberadaannya - Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S (Selaras, Serasi, Seimbang)- Masyarakat ada karena ada individu- Individu akan punya arti apabila hidup di tengah masyarakat
Ciri Khas	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan atas HAM- Demokrasi - Negara Hukum- Menolak Dogmatis- Reaksi terhadap absolutisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Atheisme - Dogmatis - Otoriter - Ingkar HAM - Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersamaan - Akomodasi - Jalan tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Keselarasan keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan

Sumber: Franz Magnis Suseno (2000) dan Kansil (2002)

1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila

Menjelang kekalahannya pada akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai.

Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Achmad Soebardjo dan Muhammad Yamin) yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah, melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945.

*Sumber : Drs. Soewarno, melalui situs Yayasan Bung Karno
di <http://www.yayasanbungkarno.or.id>*

B. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pada hakikatnya, Pancasila diangkat dari sistem nilai, kebudayaan, dan kepercayaan yang terdapat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di segala aspek kehidupan. Untuk itu, Pancasila memiliki sifat terbuka, fleksibel, dan tidak kaku (luwes) sehingga dapat diterapkan di setiap generasi. Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka telah memenuhi persyaratan kualitas tiga dimensi.

Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut.

1. Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

2. Pancasila memiliki makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mampu dikembangkan sesuai tuntutan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan bangsa Indonesia secara kreatif dan dinamis.
3. Pancasila mampu memberikan orientasi ke depan dengan menghendaki bangsa Indonesia untuk menyadari situasi dan kondisi dalam menghadapi era globalisasi dan keterbukaan dunia dalam segala aspek kehidupan.

Menurut Frans Magnis Suseno, suatu ideologi dapat disebut sebagai ideologi terbuka jika memiliki dua kategori berikut ini.

1. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri. Artinya, Pancasila bersumber dari budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia, seperti kepercayaan, keyakinan, dan adat istiadat yang terdapat pada setiap aspek kehidupan masyarakat.
Pancasila bukan merupakan ideologi yang berasal dari negara lain, seperti ideologi liberalisme maupun Marxisme Komunisme. Dengan demikian, Pancasila dapat diterima oleh seluruh masyarakat (bangsa) Indonesia.
2. Isinya Tidak Langsung Operasional
Pancasila tidak dapat langsung dioperasionalkan, melainkan diperlukan suatu penjabaran ke dalam nilai instrumental.



Berpikir Kritis

Setelah memahami berbagai jenis dasar negara atau ideologi, coba Anda kerjakan tugas berikut ini!

1. Buatlah esai singkat (10-15 halaman) mengenai dasar negara atau ideologi yang dianut di suatu negara! Anda dapat memilih negara-negara mana pun (selain Indonesia).
2. Isinya meliputi pengertian ideologi tersebut, tokoh-tokoh pencetusnya, penerapan ideologi tersebut dalam berbagai bidang kehidupan di negara tersebut (politik, ekonomi, sosial, budaya, serta tatanan pemerintahannya).
3. Lengkapi esai Anda dengan mencari data di berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau berbagai sumber lainnya. Ketik dengan rapi dan jilidlah!
4. Kumpulkan pada Guru Anda untuk diberi nilai! Sepuluh karya terbaik akan diserahkan ke perpustakaan sekolah.



C. Gagasan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Gagasan ataupun pemikiran pertama mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang dan ditampilkan secara formal sekitar tahun 1985. Akan tetapi, semangatnya sendiri sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1945. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 berikut ini.

"Maka telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-Undang yang lebih mudah cara membuat, mengubah, dan mencabutnya".

Penjelasan UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memiliki unsur keterbukaan. Dasar dari UUD 1945 adalah Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar dari UUD 1945 dan ideologi bangsa Indonesia bersifat terbuka pula. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan nilai-nilai yang memiliki sifat yang tetap, meskipun di dalam penjelasannya dapat secara dinamis dan kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan perkembangan masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung tiga hal fleksibilitas, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Adapun pengertian dari ketiga nilai tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak. Nilai dasar bersumber dari nilai-nilai budaya dan masyarakat Indonesia sendiri, yaitu yang bersumber dari kebudayaan bangsa yang sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural (budaya). Hal ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Nilai Instrumen

Nilai instrumen merupakan pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Pada umumnya, pelaksanaan tersebut dalam wujud norma sosial atau norma hukum untuk selanjutnya terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumen ini kedudukannya lebih rendah dari nilai dasar, tetapi dapat mewujudkan nilai umum menjadi konkret serta sesuai perkembangan zaman. Dalam hal ini terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, keputusan Presiden, dan sebagainya.

3. Nilai Praktis

Nilai praktis merupakan nilai yang sebenarnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai inilah yang sesungguhnya menjadi bahan ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumen dapat benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Dalam hal ini nilai praktis seperti menghormati, kerukunan, dan gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila telah menunjukkan perkembangan bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai saat Reformasi ini. Pancasila menjawab segala masalah-masalah di setiap periode di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang penuh dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbukaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia mampu menjalankan tanpa harus menyinggikan kepribadian dan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.



KATA SANG TOKOH

Jika Anda tidak bisa menjadi orang pandai, jadilah orang yang baik.

(Nelson Mandela)

Sumber: http://id.wikipedia.org/Nelson_Mandella

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi dengan jumlah anggota 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut ini!
"Penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak disalahgunakan."
3. Tulislah hasil diskusi kelompok Anda, lalu presentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan dan catatlah! Guru Anda bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkan kepada guru Anda hasil diskusi tersebut disertai catatan tanggapan dari kelompok lain! Guru akan memberikan komentar dan penilaian.

D.

Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Paradigma Pembangunan

1. Pancasila sebagai Sumber Nilai

Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang ada didalam kehidupan masyarakat sejak dulu.

a. Pengertian Nilai

Nilai yaitu sesuatu yang berharga, indah, bermanfaat, memperkaya batin, serta menyadarkan manusia terhadap harkat dan martabatnya. Terbentuknya nilai atas dasar suatu pertimbangan cipta, rasa, dan keyakinan seseorang, kelompok maupun bangsa. Nilai bersumber dari kebudayaan yang memiliki fungsi untuk mendorong dan mengarahkan sikap serta perbuatan manusia.

Ada beberapa pengertian nilai yang dikemukakan oleh para ahli berikut.

1) C. Kluckhohn

Dalam bukunya yang berjudul “*Culture : A Critical Review of Concept and Definitions*” (1952), ia menyatakan bahwa nilai bukanlah keinginan, melainkan apa yang diinginkan. Artinya, nilai tersebut tidak hanya diharapkan tetapi diusahakan sebagai suatu yang pantas dan benar pada diri sendiri maupun orang lain. Ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk mengatasi keinginan pada saat dan situasi tertentu itulah yang dimaksud dengan nilai.

2) Nursal Luth dan Daniel Fernandez

Dalam bukunya “*Sosiologi*” (2005), mereka menyatakan bahwa nilai adalah perasaan-perasaan yang diinginkan atau tidak diinginkan sehingga mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Dengan demikian, nilai bukanlah soal benar atau salah, melainkan persoalan yang dikehendaki atau tidak dan disukai atau tidak. Kesimpulannya, nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan-perasaan yang selalu diperlihatkan melalui perilaku oleh manusia.

b. Pengertian Pancasila

Istilah Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti dasar atau asas. Pancasila diartikan sebagai lima dasar atau lima asas. Dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular dan Negarakertagama karya Mpu Prapanca terdapat istilah Pancasila yang ditulis dengan istilah Pancasila Krama. Istilah Pancasila yang digunakan bangsa Indonesia sebagai dasar negara pertama kali merupakan usulan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI ketika merumuskan dasar negara Indonesia.

Bagian Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang masing-masing alinea memiliki makna tersendiri. Adapun rumusan Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia adalah sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pada alinea keempat tersebut terdapat tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD, dan dasar negara Indonesia.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yaitu negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Nilai-Nilai dalam Pancasila

Sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila ini merupakan norma dasar yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dan anggota masyarakat, negara, pemerintah dan bangsa lain didunia. Selain itu juga menjiwai, mendasari serta memimpin perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia yang berdaulat penuh serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila yang berisi lima sila pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental, yaitu sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya pengakuan dari bangsa Indonesia terhadap Tuhan, yaitu

- a) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Membina adanya kerjasama dan toleransi diantara umat beragama kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Sumber : <http://images.pujasumarta.multiply.com>

Gambar 1.3 Saling menghormati dan menghargai antarpemeluk umat beragama merupakan wujud pengamalan Pancasila, yaitu sila persatuan Indonesia.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini mengandung pengertian bahwa adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan memperlakukan semua manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya. Contohnya:

- a) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- b) Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia.
- c) Saling menghormati bangsa lain.
- d) Saling bekerja sama dengan bangsa lain.
- e) Memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa membedakan suku bangsa dan warna kulit.

3) Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia mengandung pengertian adanya membina persatuan dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia dengan menghargai keanekaragaman yang terdapat pada bangsa Indonesia. Contohnya:

- a) Menempatkan persatuan dalam kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

- b) Bangga menjadi bangsa Indonesia.
 - c) Menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
 - d) Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa.
 - e) Mewujudkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Nilai dari sila keempat ini mengandung pengertian bahwa adanya paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Contohnya:
- a) Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat.
 - b) Melaksanakan segala keputusan bersama secara penuh tanggung jawab dan itikad yang baik.
 - c) Pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
 - d) Mengakui adanya kedudukan dan hak yang sama bagi semua warga negara Indonesia.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa tujuan negara Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Contohnya:
- a) Adanya kewajiban dan hak yang sama bagi semua rakyat Indonesia.
 - b) Menjunjung tinggi sifat dan suasana gotong royong dengan penuh rasa kekeluargaan.
 - c) Menciptakan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
 - d) Cita-cita masyarakat adil dan makmur serta materiil dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.



Berpikir Kritis

Setelah memahami berbagai jenis dasar negara atau ideologi, kerjakan tugas berikut ini.

1. Buatlah esai sebanyak 12-15 halaman mengenai "Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara selama masa Reformasi"!
2. Anda dapat memilih 2 buah nilai saja dari Pancasila.
3. Isi tulisan meliputi: pengertian nilai tersebut, penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut pada masa Orde Baru dan perbandingannya dengan masa Reformasi sekarang ini, serta dampaknya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Anda dapat melengkapi data-data dengan mencari di berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah surat kabar, atau berbagai sumber lainnya. Tugas diketik komputer dan dijilid rapi, lalu kumpulkan pada guru Anda untuk dinilai!
5. Sepuluh karya terbaik akan diambil dan diserahkan ke perpustakaan sekolah.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai-nilai religius antara lain:
 - (a) keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya Yang Maha sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sifat suci lainnya.
 - (b) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
 - (c) nilai sila I ini meliputi dan menjiwai sila-sila II, III, IV dan V.
- (2) Dalam sila II, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain:
 - (a) pengakuan terhadap adanya martabat manusia;
 - (b) perlakuan yang adil terhadap sesama manusia;
 - (c) pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan;
 - (d) nilai sila II meliputi dan menjiwai sila III, IV, dan V.
- (3) Dalam sila III, Persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain:
 - (a) persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia;
 - (b) bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia;
 - (c) pengakuan terhadap ke-"Bhinneka Tunggal Ika"-an suku bangsa dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah pembinaan kesatuan bangsa;
 - (d) nilai sila III ini meliputi dan menjiwai sila IV dan V.



KATA SANG TOKOH

Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan akan menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan.

(Shintaro Abe)

Sumber: http://id.wikipedia/wiki/Shintaro_Abe

- (4) Dalam sila IV, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, terkandung nilai kerakyatan, antara lain:
 - (a) kedaulatan negara adalah di tangan rakyat;
 - (b) pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat;
 - (c) manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
 - (d) musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
 - (e) nilai sila IV meliputi dan menjiwai sila V.
- (5) Dalam sila V, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial, antara lain:
 - (a) perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia;
 - (b) keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional (Ipoleksosbudhankamnas);
 - (c) cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - (d) keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain;
 - (e) cinta akan kemajuan dan pembangunan;
 - (f) nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila I, II, III dan IV.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hendaknya dikaji secara kritis agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkannya. Pada akhirnya, setiap warga negara tidak akan mudah goyah dengan masuknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa masuk ideologi-ideologi yang lain yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila harus diterapkan pada semua nilai, karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu dengan yang lain.

Diskusi Ilmiah

- a. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
- b. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekolah Anda! Tanyakan pendapat teman-teman, "Apakah pelaksanaan Pancasila sekarang ini benar-benar dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh aparaturnya Pemerintah dan seluruh jajarannya? Lakukan jajak pendapat secara sederhana dengan mencentang kolom contoh tabel kerja yang disediakan!

Tingkat penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
<ul style="list-style-type: none"> - Sangat baik - Baik - Sedang-sedang saja - Mengecewakan - Buruk - Sulit dimengerti / tidak konsisten 										

Catatan : P1 : Pendapat 1

- Buatlah kesimpulan dari hasil jajak pendapat tersebut sebagai bentuk laporannya! Ketik dengan rapi dan serahkan pada guru Anda disertai lembar jajak pendapat!
- Sebelumnya, salah satu wakil kelompok melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan!

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional artinya bahwa Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan yang dijalankan oleh Indonesia. Hal ini juga menjadi konsekuensi bagi bangsa Indonesia yang telah mengakui dan menerima Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

a. Pengertian Paradigma Pembangunan

Pendapat Thomas Kuhn yang terdapat dalam buku "*Pendidikan Pancasila*" (2002) karangannya Kaelan, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah asumsi-asumsi teoretis umum yang merupakan sumber hukum, metode, serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri dan karakter ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan pembangunan menunjuk adanya pertumbuhan atau perluasan ekspansi yang berhubungan dengan keadaan yang harus dibangun demi tercapainya suatu kemajuan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, paradigma pembangunan adalah model atau pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya guna melaksanakan perubahan yang direncanakan dalam mewujudkan tujuan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

b. Hakikat Pembangunan Nasional

Pada hakikatnya, pembangunan Nasional diarahkan sebagai suatu usaha untuk menaikkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan ketuhanan. Intinya, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan Nasional harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup aspek kehidupan manusia. Pembangunan tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Dalam hal ini Pancasila akan menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

c. Asas Pembangunan Nasional

Asas pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional terdiri dari :

1) Asas Demokrasi

Asas demokrasi adalah berdasarkan pada Pancasila, yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, serta terhadap masalah-masalah yang timbul untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Sumber : <http://www.dpr.go.id>

Gambar 1.4 Dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, seorang wakil rakyat hendaknya harus gigih dan berani (vocal) sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2) Asas Perikemanusiaan dan Keseimbangan

Asas ini mencakup keseimbangan dalam segala aspek kehidupan yang meliputi segala kepentingan, seperti kepentingan individu dan masyarakat, kepentingan duniawi dan akhirat, kepentingan material dan spiritual, kepentingan nasional dan internasional, serta kepentingan yang ada di darat, laut, dan udara.

3) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan

Asas ini mencakup usaha bersama dari seluruh komponen bangsa yang dilakukan secara gotong royong serta dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

4) Asas Adil dan Merata

Asas ini mencakup masyarakat (warga negara Indonesia) berhak untuk menikmati hasil-hasil dari pembangunan nasional yang meliputi pembangunan materiil dan spiritual (pembangunan fisik maupun nonfisik) yang diperlukan yang sesuai dengan perannya (dharma baktinya) kepada bangsa dan negara.

5) Asas Manfaat

Asas ini mencakup segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara Indonesia.

6) Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri

Asas ini menyatakan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan harus berlandaskan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta bersendikan pada kepribadian bangsa.

7) Asas Kesadaran Hukum

Asas ini menyatakan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan harus berlandaskan ketaatan hukum setiap warga negara Indonesia serta adanya penegakan dan kepastian hukum.

d. Pengertian Pancasila sebagai Paradigma Nasional

Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapainya diperlukan suatu pedoman demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Pedoman yang digunakan adalah Pancasila.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Berdasarkan hal itu sesuai dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila sehingga pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan ketuhanan.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi alat untuk melaksanakan pembangunan nasional melalui pengamalan sila-sila yang terdapat pada Pancasila, sehingga Pancasila dapat menjadi sumber inspirasi, penggerak, serta pendorong dalam pembangunan nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan akan berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai paradigma pembangunan nasional, Pancasila meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, agama, hukum, serta hankam.

1) Bidang Politik

Berdasarkan pada sistem politik yang menempatkan manusia sebagai subyek maka menurut sila ke IV Pancasila menempatkan pula bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dengan demikian Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik adalah menggunakan sistem demokrasi dan tidak menggunakan sistem otoriter.

Adapun contoh pembangunan Bidang Politik adalah sebagai berikut.

- a) Dalam menyelesaikan permasalahan hendaknya menggunakan musyawarah untuk mufakat.
- b) Menjadikan Pancasila sebagai asas dalam berorganisasi seperti Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, dan sebagainya.

- c) Berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti menyaksikan Pemilu.
- d) Ikut serta berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- e) Ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

2) Bidang Ekonomi

Sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang ekonomi, maka secara khusus harus berlandas pada sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Maksud dari ekonomi kerakyatan adalah ekonomi humanistik yang berdasarkan pada suatu tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian pengembangan perekonomian bangsa Indonesia harus berdasarkan pada kemanusiaan dan moralitas ketuhanan, sehingga dapat menjauhkan dari monopoli dan menguntungkan individu-individu serta dapat menimbulkan berbagai bentuk penindasan ekonomi.

Contoh pembangunan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

- a) Berperan dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi.
- b) Ikut serta dalam menyelamatkan dan memulihkan kondisi perekonomian.
- c) Berpartisipasi dalam mengusahakan dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam.
- d) Berpartisipasi dalam mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Bidang Sosial dan Budaya

Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang sosial dan budaya yaitu berdasarkan pada sila kedua dan sila ketiga, maksudnya pembangunan sosial budaya dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga menjadi manusia yang berbudaya dan beradab serta dikembangkan atas nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang beranekaragam menuju tercapainya rasa persatuan sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Adapun contoh pelaksanaan pembangunan sosial dan budaya antara lain:

- a) Berperan aktif dalam mewujudkan kepedulian sosial seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam, gizi buruk, dan sebagainya.
- b) Mengembangkan dan membina kebudayaan bangsa.
- c) Ikut mengembangkan kebudayaan tradisional sebagai wahana bagi potensi pariwisata nasional maupun internasional

4) Bidang Pendidikan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan dibidang pendidikan adalah mengembangkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan secara merata tanpa membedakan setiap warga negara. Pengembangan pendidikan harus didasarkan pada moral ketuhanan serta kemanusiaan yang adil dan beradab agar diperoleh peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Contoh pembangunan dalam bidang pendidikan antara lain:

- 1) Berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional seperti menyelenggarakan lembaga pendidikan yang bermutu.
- 2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Tidak melakukan diskriminasi pada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.



Sumber : <http://yphk.files.wordpress.com>

Gambar 1.5 Usaha pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional bertujuan mencetak generasi muda Indonesia yang berkualitas.

5) Bidang Agama

Sesuai dengan sila I Pancasila maka kehidupan beragama harus dikembalikan kearah terwujudnya suatu kehidupan bersama yang saling menghargai, menghormati serta adanya toleransi yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan nilai-nilai persatuan Indonesia.

Adapun contoh pelaksanaan pembangunan dalam bidang agama yaitu:

- a) Ikut serta dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.
- b) Pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas bagi kemudahan warga negaranya dalam menjalankan ibadahnya.
- c) Meningkatkan peran serta agama sebagai landasan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

6) Bidang Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah merupakan konsekuensi dari bangsa Indonesia bahwa sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian akan tercipta suatu kesadaran dan kepatuhan serta keadilan dan kebenaran supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia.

Adapun contoh pelaksanaan pembangunan dalam bidang hukum antara lain :

- a) Berperan dalam mengembangkan budaya hukum seperti patuh terhadap hukum, sadar terhadap hukum.
- b) Menegakkan hukum dan menghargai serta menghormati hak-hak asasi manusia.
- c) Tidak ada diskriminasi dalam bidang hukum.
- d) Pemerintah wajib menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan hukum.
- e) Penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dari uraian tersebut maka setiap warga negara, baik warga negara yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara maupun kedudukannya sebagai warga negara adalah merupakan unsur penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaksana sekaligus sebagai tujuan dari pembangunan.

Dengan demikian Pancasila sebagai landasan bagi pembangunan nasional hendaknya mewujudkan pembangunan yang mendatangkan kemakmuran dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia dengan adanya keseimbangan antara bidang-bidang lahiriah dan rohaniah.

7) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Dalam pengembangan iptek, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar moralitas. Dengan kata lain, pengembangan iptek harus mencakup dimensi berikut ini.

- a) Tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya bagi manusia dan lingkungannya.
- b) Harus bersifat beradab dan diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia.
- c) Harus berlandaskan nilai-nilai demokrasi.
- d) Harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.
- e) Hendaknya dapat mengembangkan nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut ini!
"Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang menjadi acuan atau pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, agama, hukum yang diterapkan pada masa Reformasi".
3. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok Anda dan presentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain menanggapi dan catatlah!
4. Kumpulkan kepada guru Anda, hasil diskusi disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!

E.

Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka telah diterima oleh bangsa Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila perlu disampaikan melalui pendidikan dan penerapan secara langsung. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beragama, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, dan sejahtera.

Hal ini memang tidaklah mudah untuk dilakukan, mengingat banyaknya masalah bangsa yang belum terselesaikan dan perkembangan kemajuan teknologi serta arus globalisasi. Meskipun demikian, Anda sebagai anggota masyarakat dapat melakukan hal-hal positif di lingkungan terdekat. Contohnya, melakukan gotong royong, menjalin kerukunan, menerima perbedaan, dan sebagainya.

1. Sikap Positif terhadap Nilai-nilai Pancasila

Sikap positif terhadap Pancasila harus dilakukan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk Anda sebagai pelajar. Sikap positif ini perlu dikembangkan agar setiap warga negara ikut serta menjadikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai budaya keseharian. Contoh sikap positif terhadap nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila dari Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini bermakna adanya keyakinan setiap warga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan negara berdasarkan atas ketuhanan. Dengan demikian setiap warga negara dilarang menganut paham ateisme. Contohnya, adanya kebebasan memeluk agama, toleransi antarumat beragama, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta penghormatan dan sikap saling menghargai antarumat beragama.



KATA SANG TOKOH

Semoga kamu mendapat cukup kebahagiaan untuk membuat kamu bahagia, cukup cobaan untuk membuat kamu kuat, cukup penderitaan untuk membuat kamu menjadi manusia yang sesungguhnya, dan cukup harapan untuk membuat kamu positif terhadap kehidupan.

(Agus Salim)

Sumber: www.indonesia.com/pahlawan-nasional

Pengakuan terhadap hakikat Tuhan ini dapat dikembangkan melalui sikap berikut ini.

- 1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 2) Hormat-menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- 3) Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini bermakna adanya prinsip persamaan harkat dan martabat manusia yang memiliki potensi kultural. Setiap warga negara Indonesia merupakan bagian dari warga dunia yang mengakui adanya prinsip persamaan harkat dan martabat. Contohnya, adanya kebebasan untuk berhubungan dengan individu maupun kelompok maupun adanya hubungan saling menghormati dan menghargai.

Pengakuan terhadap hakikat manusia ini dapat dikembangkan melalui sikap berikut ini.

- a) Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia.
- b) Saling mencintai sesama manusia.
- c) Tenggang rasa terhadap orang lain.
- d) Tidak semena-mena kepada orang lain.
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- f) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- g) Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok diskusi yang berjumlah 4–5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut!
“Penerapan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua di sekolahku”.
3. Buatlah kesimpulan hasil diskusi bersama kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain menanggapi dan catatlah! Guru Anda bertindak sebagai moderator.
4. Serahkan kepada Guru Anda hasil diskusi tersebut disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!

c. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini bermakna adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya dan pertahanan keamanan. Tujuannya untuk mewujudkan persatuan antarwarga warga negara yang memiliki keberagaman budaya sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, kebanggaan, dan cinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia.

Contohnya, memiliki rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa, memiliki kerelaan untuk berkorban demi bangsa dan negara, menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan antarsuku suku bangsa, saling bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pengakuan terhadap hakikat persatuan ini dapat dikembangkan melalui sikap berikut ini.

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- 3) Cinta tanah air dan bangsa.
- 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
- 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini bermakna bahwa negara Republik Indonesia menganut paham demokrasi yang bersumber dari nilai kehidupan bangsa, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Perwujudan dari paham demokrasi tersebut adalah kekuasaan negara berada di tangan rakyat atau disebut dengan kedaulatan rakyat.

Contohnya, memiliki sikap untuk menerima pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan secara bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menyelesaikan semua persoalan secara musyawarah.

Pengakuan terhadap hakikat kerakyatan ini dapat dikembangkan melalui sikap berikut ini.

- 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.
- 5) Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ini bermakna keadilan di segala aspek kehidupan, baik secara material maupun spiritual untuk semua rakyat Indonesia. Contohnya, memiliki sikap berlaku adil kepada setiap individu dalam masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lain, dermawan kepada sesama, hidup hemat dan suka bekerja keras, tidak mengorbankan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat.

Pengakuan terhadap hakikat keadilan ini dapat dikembangkan melalui sikap berikut ini.

- 1) Kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 3) Menghormati hak-hak orang lain.
- 4) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- 5) Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.
- 6) Menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah.
- 7) Rela bekerja keras.
- 8) Menghargai hasil karya orang lain.

2. Perilaku yang Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi dalam Pancasila sangat terbuka sehingga memberikan keleluasaan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan konsep-konsep dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengubah nilai-nilai dasar. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia dan penyelenggara negara Republik Indonesia wajib memiliki sikap positif demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pada era Reformasi ini, ideologi Pancasila diterima sebagai ideologi terbuka, tetapi kadangkala nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dari seluruh kebudayaan masyarakat Indonesia sering ditinggalkan.

Contohnya, rasa kebersamaan yang mulai berkurang, penyelesaian permasalahan tidak secara musyawarah melainkan dengan kekuasaan maupun kekerasan, kurangnya sikap saling menghormati dan menghargai, atau rasa kegotongroyongan yang mulai berkurang. Hal-hal seperti ini hendaknya tidak perlu terjadi apabila setiap warga negara menyadari arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oleh karena itu sikap-sikap positif perlu ditampilkan baik dari diri sendiri, keluarga, lingkungan hingga pada tingkatan yang lebih luas.

Contoh sikap positif tersebut, antara lain, menerima segala perbedaan, menerima pendapat yang ditolak, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapat (aspirasinya), menghormati dan menghargai terhadap sesama, serta berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang suku, budaya, golongan, status, dan sebagainya. Sikap positif dari penyelenggara negara, antara lain, mampu melaksanakan segala peraturan perundangan-perundangan secara baik dan konsekuen, menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan contoh perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila sikap positif dapat diterapkan, kelima sila dari Pancasila bukan lagi hanya suatu bacaan yang dibaca setiap upacara, melainkan telah dihayati serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, akan terbentuk manusia Indonesia yang berketuhanan, menghargai harkat dan martabat manusia, rela berkorban demi bangsa dan negara, menghargai pendapat, serta berkeadilan.

Nilai-nilai Pancasila akan terasa keberadaannya jika ditampilkan dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, antara lain:
 - 1) Membuka diri untuk menerima masukan dari anggota keluarga lain.
 - 2) Menghargai keberadaan pembantu rumah tangga.
 - 3) Beribadah tepat pada waktunya.
 - 4) Terbiasa berdialog dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain serta pembantu rumah tangga.
 - 5) Selalu menonton tayangan televisi yang memberikan kesempatan untuk memperluas cakrawala berpikir, seperti menonton berita.
 - 6) Menerima pendapat yang dikemukakan oleh saudara, jika pendapat tersebut banyak mengandung manfaat bagi kehidupan.
- b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, antara lain:
 - 1) Menghargai hasil karya teman.
 - 2) Tidak berbuat curang ketika ulangan.
 - 3) Terbiasa berdialog dengan guru dan warga sekolah lainnya.
 - 4) Tidak membedakan teman.
 - 5) Menggunakan uang jajan secara bijaksana.
 - 6) Mencari informasi yang berguna untuk memperdalam materi pembelajaran, seperti melalui internet atau membaca buku di perpustakaan.

- c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, antara lain:
 - 1) Bersedia menerima masukan dari orang lain.
 - 2) Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan.
 - 3) Memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat.
 - 4) Bersikap selektif terhadap budaya yang datang dari luar masyarakatnya.
 - 5) Senantiasa terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
- d. Dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara, antara lain:
 - 1) Bekerja sama dengan bangsa lain.
 - 2) Bersikap selektif terhadap budaya asing.
 - 3) Berbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Melaporkan setiap pengeluaran negara kepada masyarakat.
 - 5) Tidak merusak fasilitas negara.



Berpikir Kritis

Setelah memahami berbagai sikap positif dalam memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, kerjakan tugas berikut ini!

1. Susunlah sebuah esai singkat (4–5 halaman) mengenai pelaksanaan sikap positif warga di lingkungan tempat tinggal Anda dalam menyikapi Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka!
2. Anda dapat memilih 3 sikap yang dianggap mewakili.
3. Isi tulisan meliputi: bentuk sikap, pelaksanaan sikap antusias atau keterlibatan warga, serta dampaknya bagi lingkungan.
4. Untuk melengkapi kajian teoretis, carilah data-data dari berbagai sumber, seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau berbagai sumber lainnya! Selanjutnya, kumpulkan pada guru Anda untuk diberi penilaian!
5. Sepuluh karya terbaik akan diserahkan ke perpustakaan sekolah.



Rangkuman

1. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sekaligus fondasi utama berdirinya negara Indonesia yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri dan tidak dari bangsa lain.
2. Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Destuct de Tracy, seorang filsuf Perancis . Menurutnya, ideologi adalah gagasan-gagasan yang menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan.
3. Ideologi memiliki derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
4. Ideologi liberalisme menginginkan semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki seperti halnya yang dimiliki orang lain. Dengan demikian hak-hak individual harus dilindungi dari campur tangan negara dan badan-badan yang lain.
5. Ideologi komunisme mengutamakan kebersamaan manusia (individu) daripada kebebasan individu. Hak pribadi perseorangan tidak diakui. Prinsip utama dari komunisme yaitu materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama.
6. Ideologi sosialisme berpandangan bahwa manusia adalah makhluk kreatif, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan melalui kerja sama.
7. Nasionalisme merupakan ideologi yang mempunyai kekuatan pengaruh untuk menggerakkan. Pengantar ideologi ini mengatributkan negara pada suatu bentuk identitas kultural yang khas.
8. Fundamentalisme merupakan ideologi untuk menetapkan agama sebagai sistem politik dalam dunia modern.
9. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di segala aspek kehidupan. Pancasila memiliki sifat terbuka, fleksibel, dan tidak kaku (luwes) sehingga dapat diterapkan sepanjang zaman.
10. Ideologi dapat disebut ideologi terbuka jika memiliki dua kategori berikut.
 - a. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat.
 - b. Isinya tidak langsung operasional
11. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat tetap. Akan tetapi, di dalam penjelasannya dapat secara dinamis dan kreatif disesuaikan dengan kepentingan perkembangan masyarakat Indonesia.

12. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung tiga hal fleksibilitas, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai adalah sesuatu yang berharga, indah, bermanfaat, memperkaya batin, serta menyadarkan manusia terhadap harkat dan martabatnya.
13. Dalam buku *Sutasoma* karya Mpu Tantular dan *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca terdapat istilah Pancasila.
14. Pancasila sebagai paradigma bagi pembangunan nasional artinya Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan yang dijalankan oleh Indonesia.
15. Paradigma merupakan cara pandang, nilai, metode, dan prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu.
16. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman bagi pembangunan nasional.
17. Asas pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional terdiri dari :
 - a. Asas Demokrasi
 - b. Asas Perikemanusiaan dan Keseimbangan
 - c. Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan
 - d. Asas Adil dan Merata
 - e. Asas Manfaat
 - f. Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri
 - g. Asas Kesadaran Hukum
18. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila menjadi alat untuk melaksanakan pembangunan nasional melalui pengamalan sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila dapat menjadi sumber inspirasi, penggerak, serta pendorong dalam pembangunan nasional.

A. Pilihlah jawaban a, b, c, d, atau e sebagai jawaban yang benar!

1. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia dalam
 - a. kehidupan bernegara
 - b. kehidupan berpolitik
 - c. kehidupan bermasyarakat
 - d. kehidupan bermasyarakat dan berpolitik
 - e. kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka, artinya adalah
 - a. perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain
 - b. dapat menerima kemajuan apabila menguntungkan
 - c. dapat menerima kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kepribadian
 - d. membuka diri menerima sesuai kemajuan yang ada
3. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah dikukuhkan secara konstitusional pada tanggal
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 29 Agustus 1945
 - d. 27 Desember 1949
 - e. 5 Juli 1959
4. Suatu ideologi yang dalam pelaksanaannya menggunakan cara-cara pemaksaan merupakan negara yang menerapkan ideologi
 - a. Liberal
 - b. Komunis
 - c. Sosiolis
 - d. Fundamentalis
 - e. Pancasila
5. Ideologi merupakan suatu manifestasi kenyataan sosial. Hal ini merupakan pendapat dari tokoh ...
 - a. F. Hegel
 - b. Moerdiono
 - c. Max Weber
 - d. Suprpto
 - e. Alfian

6. Istilah ideologi dalam penerapan gagasan-gagasan atau ide lebih banyak berhubungan dengan ilmu pengetahuan bidang
 - a. Politik
 - b. Ekonomi
 - c. Politik
 - d. Sosial budaya
 - e. Pemerintahan
7. Nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan suatu masalah, masih bersifat nilai dasar sehingga perlu dijabarkan dan dioperasionalkan. Nilai-nilai yang operasional ini dinamakan dengan nilai-nilai
 - a. dinamis
 - b. instrumental
 - c. terbuka
 - d. tertutup
 - e. abadi
8. Konsekuensi logis dari bangsa Indonesia untuk mengakui dan menyakini Pancasila sebagai dasar negara adalah
 - a. melaksanakannya
 - b. loyal dan setia
 - c. patuh tanpa syarat
 - d. mampu mengendalikan diri
 - e. tunduk dan hormat
9. Pada suatu ideologi yang bersifat terbuka salah satunya mengandung esensi dimensi realita, artinya
 - a. nilai-nilai yang diyakini benar bersumber dari sosio kultural masyarakat
 - b. nilai-nilai yang ada bersumber dari kebudayaan dan pengalaman sejarahnya
 - c. proses kristalisasi nilai-nilai yang bersumber dari sosial budaya masyarakat setempat
 - d. sejumlah ide dan gagasan yang bersumber dari masyarakat sekitar
 - e. tumbuhnya nilai-nilai yang ada berhubungan dengan masyarakat setempat
10. Nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat diubah merupakan
 - a. penjabaran dan operasional nilai-nilainya
 - b. pengembangan nilai-nilainya
 - c. nilai-nilai dasar
 - d. operasionalisasi nilai-nilainya
 - e. nilai-nilai instrumental

11. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, hal ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan
 - a. pandangan hidup bangsa Indonesia
 - b. jiwa bangsa Indonesia
 - c. kepribadian bangsa Indonesia
 - d. dasar negara
 - e. sumber dari segala sumber hukum
12. Nilai-nilai Pancasila yang memiliki sifat yang abadi adalah nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam ...
 - a. sistem pemerintahan Republik Indonesia
 - b. Pembukaan UUD 1945
 - c. Batang tubuh UUD 1945
 - d. Penjelasan UUD 1945
 - e. Penjelasan UU
13. Didalam suatu kehidupan bermasyarakat wajib menjunjung harkat dan martabat orang lain. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila
 - a. kelima
 - b. pertama
 - c. kedua
 - d. keempat
 - e. ketiga
14. Nilai yang merupakan nilai-nilai dari nilai dasar yang dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan disebut dengan
 - a. nilai objektif
 - b. nilai praktis
 - c. nilai subjektif
 - d. nilai dasar
 - e. nilai instrumen
15. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki makna yaitu
 - a. ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi dan ilmu pengetahuan
 - b. pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan teknologi yang tinggi
 - c. masyarakat Indonesia yang mampu bersaing dengan negara lain
 - d. menciptakan kondisi masyarakat Indonesia yang sesuai dengan kepribadiannya
 - e. membangun masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia

16. Bangsa Indonesia mendambakan pelaksanaan pembangunan berdasarkan paradigma Pancasila. Dengan demikian, pembangunan yang telah dilaksanakan hendaknya
 - a. menghasilkan manusia dan masyarakat yang maju dengan kepribadian Indonesia
 - b. untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang mempunyai kepribadian maju
 - c. untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya
 - d. demi kelangsungan generasi penerus yang bertanggung jawab
 - e. untuk menghasilkan produk-produk yang kompetitif pada pasar internasional
17. Contoh pengamalan Pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat pada lembaga perwakilan rakyat dapat dilihat pada
 - a. pengumuman hasil keputusan sidang
 - b. pemilihan anggota DPR dan DPD
 - c. hasil-hasil keputusan sidang
 - d. proses pengambilan keputusan pada lembaga perwakilan rakyat
 - e. proses pengajuan RUU
18. Fungsi Pancasila dalam hubungannya dengan pengaruh kebudayaan asing serta ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai
 - a. pandangan hidup
 - b. penangkal budaya
 - c. landasan berpijak
 - d. pedoman hidup
 - e. penyaring
19. Sikap positif terhadap nilai-nilai dalam Pancasila adalah
 - a. pantang menyerah terhadap keinginan yang belum tercapai
 - b. senang menerima pujian dari orang lain
 - c. patuh dan taat kepada setiap perintah
 - d. sabar dalam menerima segala cobaan/rintangan hidup
 - e. minta upah setelah mengerjakan sesuatu
20. Suatu perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah
 - a. taat dan tertip pada lalu lintas sebab ada petugas
 - b. sabar dalam menerima kenyataan
 - c. ikut bergotong royong sebab ada suatu kepentingan
 - d. menghormati sang Merah Putih pada waktu upacara bendera
 - e. patuh terhadap perintah sebab takut atasan

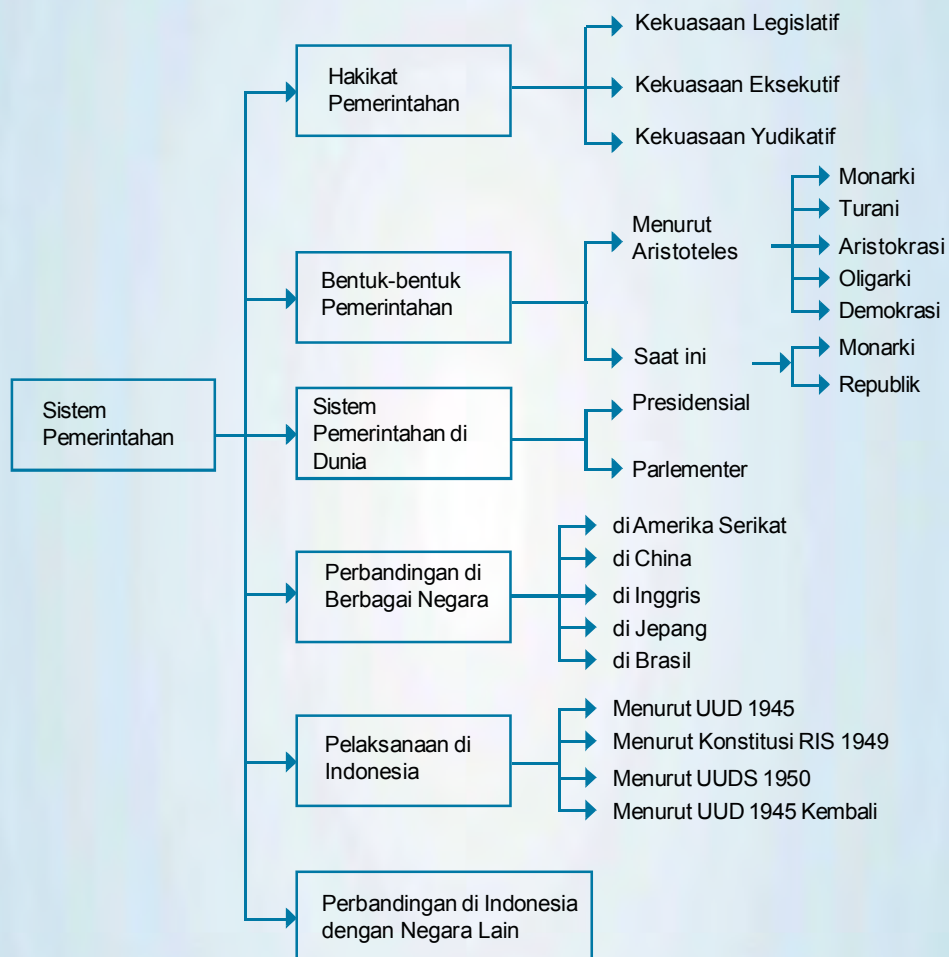
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar!

1. Dalam mengamalkan Pancasila, perlu membedakan antara nilai dasar dan nilai instrumen. Jelaskan yang dimaksud nilai dasar dan nilai instrumen serta berikan contohnya!
2. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara membangun manusia Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia?
3. Jelaskan menurut pendapat Anda pentingnya ideologi yang dimiliki oleh suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Menurut pendapat Anda, apakah Anda sudah bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan dan berikan contohnya!
5. Berikan contoh-contoh sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di lingkungan Anda!

BAB 2

Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Berbagai Negara

PETA KONSEP



Setiap negara di seluruh dunia yang merdeka, berdiri, dan berdaulat, tentu memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini tak terkecuali dengan negara Indonesia. Apakah Anda sudah memahami sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya? Bagaimana pula dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia? Untuk mengetahui lebih jelas, pada bab ini Anda akan diajak mempelajari berbagai jenis sistem pemerintahan yang ada di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Selanjutnya, Anda diharapkan mampu membandingkan berbagai sistem pemerintah di berbagai negara tersebut mengenai kelebihan dan kekurangannya. Ayo, simak materi di bawah ini lebih saksama!



A. Hakikat Pemerintahan

Istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, mempunyai arti berbeda. Untuk memahami lebih detail, terlebih dahulu Anda akan diajak mempelajari tentang hakikat pemerintahan. Hakikat pemerintah memiliki arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut.

1. **Pemerintahan dalam arti luas**, yaitu segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
2. **Pemerintahan dalam arti sempit**, yaitu segala aktivitas yang diselenggarakan hanya oleh eksekutif saja, dalam hal ini presiden, raja, ataupun perdana menteri.



KATA SANG TOKOH

Menyia-nyiakan waktu setiap hari adalah pemborosan hidup, bekerja penuh semangat dan menjadi orang yang berguna adalah membangun kehidupan kita sendiri.

(Mao Tse Tung)

Sumber: www.goodreads.com

Dalam bukunya “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*” (1982), Dr. E. Utrecht, S.H. berpendapat tentang istilah pemerintah yang meliputi 3 pengertian berikut ini.

1. Pemerintah adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan (legislatif), badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama (eksekutif), badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili (yudikatif).

2. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan-kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah sesuatu negara, seperti Raja, Presiden, Badan Soviet Tertinggi.
3. Pemerintah dalam arti Presiden bersama-sama dengan kabinet.

Jadi pengertian pemerintahan mencakup seluruh badan-badan/lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, serta ada yang hanya terdiri satu badan saja yaitu eksekutif. Kekuasaan suatu negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu sebagai berikut.

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang atau disebut dengan *rule making function*. Legislatif ialah badan deliberatif pemerintah dengan kekuasaan membuat hukum. Lembaga Legislatif antara lain, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Pada sistem pemerintahan Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan mengangkat eksekutif. Pada sistem pemerintahan Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak, menetapkan budget, dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif kadangkala melaksanakan perjanjian dan mendeklarasikan perang.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau disebut dengan *rule application function*.

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut dengan *rule adjudication function*.

Ketiga pembagian kekuasaan dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Ketiga kekuasaan itu pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755).

Kesimpulannya, pemahaman tentang pemerintahan hanyalah tentang unsur kekuasaan eksekutif saja (presiden, raja, atau perdana menteri). Meskipun demikian, dalam suatu negara ada kekuasaan yang ada tidak hanya dimonopoli oleh eksekutif. Namun, ada juga unsur-unsur yang lain, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang (*rule making function*) dan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan seperti ini karena merupakan negara demokrasi.



B. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai wewenang/kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum serta undang-undang di suatu daerah tertentu. Pada sistem pemerintahan, biasanya dibahas pula hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif.

Bentuk pemerintahan pada masa Yunani Kuno mengalami puncaknya. Para filsuf, seperti Aristoteles, berpendapat bahwa suatu bentuk pemerintahan digolongkan menurut jumlah orang yang memegang kekuasaan, sebagai berikut.

1. Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada awal kekuasaannya mengatasnamakan rakyat dengan baik dan dipercaya. Akan tetapi, dalam perjalanannya si penguasa (Raja) tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum dan justru menindas rakyat. Oleh karenanya, bentuk Monarki bergeser menjadi Tirani.

2. Tirani

Saat pemerintahan Tirani, timbullah pemberontakan dari kaum bangsawan dan pemerintahan diambil alih kaum bangsawan yang pada awalnya juga memerhatikan kepentingan umum. Akhirnya, pemerintahan Tirani bergeser menjadi Aristokrasi.

3. Aristokrasi

Pada awalnya, Aristokrasi memperhatikan kepentingan rakyat, kemudian tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya sehingga pemerintahan Aristokrasi bergeser ke Oligarki.

4. Oligarki

Oligarki (bahasa Yunani) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang hanya oleh sejumlah elit kecil dari masyarakat, baik menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Sistem pemerintahan Oligarki tidak mempunyai keadilan, kemudian rakyat mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasibnya. Rakyat merebut kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan Oligarki bergeser ke Demokrasi.

5. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk kekuasaan negara tertinggi yang dipegang oleh rakyat dengan cara suatu pemilihan umum (PEMILU). Tujuan Pemilu adalah memilih anggota parlemen maupun kepala negara/kepala pemerintahan. Demokrasi sebenarnya terkait dengan pemenuhan HAM (hak asasi manusia). Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main.

Pembagian bentuk pemerintahan seperti di atas sudah tidak digunakan lagi. Adapun bentuk pemerintahan yang sekarang dipergunakan di berbagai negara adalah sebagai berikut.

1. Monarki

Monarki, berasal dari kata Yunani "*monos*" yang berarti satu, dan "*archein*" yang bermakna pemerintah. Monarki adalah sejenis pemerintahan yang dipegang oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan merupakan sistem tertua di dunia. Pada abad ke-19, terdapat kurang lebih 900 kerajaan di dunia, yang kemudian berubah menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Pada abad ke-20, hanya 40 kerajaan yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Biasanya, penguasa monarki akan mewariskan takhtanya. Dalam sistem monarki demokratis, takhta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan, misalnya: negara Malaysia.

Bentuk pemerintahan Monarki ini dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Monarki Absolut

Seorang raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas (absolut). Pada sistem ini tidak ada satu pun badan/lembaga negara yang dapat membatasi kekuasaan raja sehingga raja akan mudah membuat tindakan yang sewenang-wenangnya.

Sebelum Revolusi Perancis, hampir semua negara di Eropa menggunakan bentuk pemerintahan monarki absolut. Misalnya: Perancis di bawah kekuasaan Louis XIV. Pada zaman modern, ini hanya tersisa tiga monarki mutlak, yaitu :

1. Arab Saudi (Raja Abdullah ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud)
2. Brunei (Sultan Hassanah Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah)
3. Swaziland (Raja Maswati III)
4. Vatikan (Paus Benediktus XVI)

Di Yordania dan Maroko, raja mempunyai banyak kuasa tetapi tidak boleh dianggap sebagai monarki yang mutlak.

b. Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep Trias Politica atau politik tiga serangkai. Hal ini berarti raja adalah ketua simbolis cabang eksekutif.

Saat ini, monarki konstitusional disatukan dengan demokrasi parlementer, yaitu kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi Perdana Menteri-lah yang memerintah negara dan bukan Raja. Beberapa sistem monarki konstitusional mengikuti keturunan, misalnya: di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja setiap lima tahun.

c. Monarki Parlementer

Monarki Parlementer adalah kekuasaan parlemen yang besar. Kekuasaan tidak lagi dipegang oleh raja, melainkan seorang perdana menteri. Bentuk pemerintahan Monarki Parlementer berdasarkan dua asas berikut ini.

- 1) Raja tidak dapat diganggu gugat, yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah ialah menteri, baik secara bersama-sama maupun secara perorangan pada bagiannya sendiri.
- 2) Bila sebagian besar dari Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui suatu kebijaksanaan politik seorang menteri, maka menteri tersebut harus meletakkan jabatannya.

Saat ini hampir semua negara yang bentuk pemerintahannya monarki menggunakan monarki parlementer.

Semangat Kebangsaan

Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu Negara terhadap Negara-negara Lain

Sistem pemerintahan setiap negara di dunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan serta keadaan bangsa dan negaranya. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.

Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (*mixed parliamentary presidential system*). Contohnya, negara Prancis. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan.

Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sumber : POLITEA Jurnal Ilmu Politik. Vol.I No.1. (2005)

2. Republik

Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja, melainkan Presiden. Seorang Presiden bertindak sebagai kepala negara tidak berdasarkan warisan turun-temurun, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh suatu lembaga/badan yang dikuasakan untuk itu. Bentuk pemerintahan Republik dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Republik Absolut

Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, inilah Republik Absolut. Mereka disebut dengan Diktator, sama seperti pada Monarki Absolut. Pada Republik Absolut juga mudah sekali timbulnya tindakan yang sewenang-wenang.

b. Republik Konstitusional

Kekuasaan seorang Presiden dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian segala aktivitas presiden harus berdasarkan pada konstitusi.

c. Republik Parlementer

Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dilaksanakan oleh perdana menteri.

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi dengan jumlah anggota 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut ini!
"Mengapa pemerintahan diktator seiring dengan perkembangan zaman banyak berubah menjadi pemerintahan Demokrasi?"
3. Tulislah hasil diskusi bersama kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan dan catatlah! Guru Anda akan bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkan kepada guru Anda, hasil diskusi tersebut disertai catatan tanggapan dari kelompok lain! Guru akan memberikan komentar dan penilaian!



Sistem Pemerintahan di Dunia

1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Kata *sistem* berarti keseluruhan perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan serta memiliki hubungan fungsional antarbagian tersebut atau secara struktural membentuk mekanisme kerja yang berkesinambungan. Sistem sebagai suatu kesatuan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terikat dalam suatu unit yang saling berkaitan dan fungsional.

Arti kata *pemerintah* adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial dalam suatu negara. Jadi, sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan menyangkut sistem hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai keseluruhan dari susunan yang teratur dan saling berkaitan dari lembaga-lembaga negara, baik secara langsung atau tidak langsung, menurut rencana untuk mencapai suatu tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat.

2. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan digolongkan ke dalam dua jenis yaitu sistem pemerintahan presidetil dan sistem pemerintahan parlementer. Klasifikasi dari kedua sistem pemerintahan tersebut berdasarkan pada hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

Disebut sistem presidensial jika lembaga eksekutif berada di luar pengawasan secara langsung oleh lembaga legislatif. Disebut sistem parlementer jika lembaga eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan secara langsung dari lembaga legislatif.

Inggris adalah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, bahkan disebut sebagai induk parlementer (*Mother of Parliaments*), sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara ini merupakan negara yang benar-benar menerapkan sistem pemerintahannya di negaranya masing-masing dan sampai sekarang masih konsisten dalam menjalankannya.

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif). Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Pada sistem pemerintahan presidensial yang murni, eksekutif dan legislatif tidak berhubungan secara langsung. Antara eksekutif dan legislatif tidak dapat saling mempengaruhi, karena kedua badan/ lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama-sama merdeka.

Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres.

Adapun ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah:

- 1) Presiden sebagai badan penyelenggara negara. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif)
 - 2) Presiden tidak dipilih parlemen, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat (PEMILU) atau oleh suatu badan khusus yang dikuasakan.
 - 3) Hubungan antara Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan, karena presiden dan parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga keduanya bertanggung jawab kepada rakyat.
 - 4) Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri yang terdapat dalam suatu kabinet oleh presiden.
 - 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
 - 6) Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen sebelum masa jabatannya berakhir. Apabila terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan konstitusi atau hukum, presiden dapat dikenakan impeachment (pengadilan parlemen) yang dilakukan oleh hakim tinggi.
 - 7) Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.
- Sistem pemerintahan presidensial ini memiliki kelebihan dan kelemahan.

Adapun kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

- 1) Kedudukan presiden cukup kuat dan stabil karena tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- 2) Penyusunan program kerja dapat disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- 3) Masa jabatan presiden lebih jelas sehingga memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program kerjanya.

Kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

- 1) Presiden berada pada posisi di luar pengawasan langsung legislatif serta pengawasan rakyat yang kurang memiliki pengaruh terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan kekuasaan yang mutlak.
- 2) Hasil dari keputusan yang kurang tegas, karena keputusan yang diambil merupakan hasil tawar-menawar (*lobbying*) antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- 3) Sistem pertanggungjawaban presiden kurang jelas.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Tujuan negara dapat diwujudkan apabila pembagian kekuasaan negara dilakukan secara berimbang dan saling mengawasi (*check and balances*) di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, daerah otonom, dan lembaga negara berposisi independen lainnya.
- 2) Demi kesejahteraan warga daerah yang adil dan merata, demokrasi pemerintahan lokal, dan demi integrasi nasional, maka daerah otonom diberi kewenangan yang sangat luas dalam rangka negara kesatuan.

- 3) Untuk menjamin stabilitas dan kapabilitas pemerintahan, kekuasaan eksekutif diselenggarakan mengikuti bentuk pemerintahan presidensial yang berarti presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- 4) Dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial pada suatu pihak maka kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh dua mahkamah yang secara fungsional dan personil berbeda walaupun dalam sekretariat yang sama. Mahkamah Agung menjamin kepastian hukum dan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin tertib hukum dalam arti mencegah kebuntuan konstitusional dan menyelesaikan persengketaan perundang-undangan.
- 5) Revitalisasi lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Lembaga eksekutif lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan daripada legislasi dan anggaran.
- 6) Saling mengecek di antara penyelenggara kekuasaan negara dalam bentuk:
 - a) Pembuatan undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, DPD dan Presiden yang masing-masing memiliki kewenangan veto.
 - b) Pengawasan dan pendakwaan (*impeachment*) oleh lembaga legislatif terhadap Presiden.
 - c) *Judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU dan produk di bawahnya.
 - d) Pemerintah pusat dapat membatalkan keputusan daerah otonom jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi daerah otonom dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pusat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
 - e) Pengangkatan menteri memerlukan pertimbangan DPR.
- 7) Kekuasaan negara yang dibagi secara berimbang dan saling mengecek sebagian berasal dari rakyat melalui pemilihan umum, yakni kekuasaan legislatif dan ekektif baik tingkat nasional maupun daerah otonom, dan melalui referendum apabila hendak mengadakan perubahan UUD, sedangkan sebagian secara tidak langsung melalui kekuasaan legislative dan eksekutif, yaitu kekuasaan yudikatif.

b. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintah parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri-menteri (kabinet). Mereka bertanggung jawab atas segala aktivitas (tindakannya) kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam tiga fase peralihan, meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas.

Pertama, pada awalnya, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan.

- Kedua, muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja.
- Ketiga, majelis mengambil ahli tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen sehingga raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya. Oleh sebab itu, keberadaan sistem parlementer tidak lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia, dan Swedia.

Dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat hubungan erat antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif (parlemen). Badan eksekutif atau pemerintah yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri dinamakan dengan kabinet-kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika kabinet dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kehendak parlemen, maka kabinet ini mendapat dukungan. Jika tidak sesuai dengan kehendak parlemen, maka parlemen dapat membubarkan kabinet dengan meminta pertanggungjawaban dari perdana menteri dengan mosi tidak percaya. Begitu pula kekuasaan parlemen dapat dibubarkan oleh kekuasaan eksekutif melalui kepala negara jika kabinet memiliki pandangan bahwa parlemen tidak mewakili kehendak rakyat.

Kedudukan kepala negara sebagai simbol kekuasaan negara. Hal ini memiliki arti bahwa kepala negara tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer terdapat adanya prinsip/asas *the king can do no wrong* (raja tidak dapat dipersalahkan).

Berdasarkan uraian di atas, sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan legislatif. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan saling memengaruhi.
- 2) Badan legislatif (parlemen) memiliki kekuasaan yang besar sebagai badan perwakilan dan legislatif. Hal ini karena anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan merupakan badan satu-satunya yang dipilih rakyat.
- 3) Pemerintah (kabinet) terdiri atas perdana menteri dan para menteri.
- 4) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan penuh dari mayoritas anggota parlemen. Apabila tidak mendapat dukungan, maka parlemen dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
- 5) Kabinet dapat membubarkan parlemen melalui kekuasaan kepala negara.
- 6) Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban konstitusional.
- 7) Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah raja (monarki), presiden (republik).

Sistem pemerintahan parlementer memiliki kelebihan dan kelemahan.

Adapun kelebihan dari sistem parlementer adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam pembuatan kebijaksanaan mudah tercapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
- 2) Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen, sehingga dapat merepresentasikan kehendak rakyat.
- 3) Sistem pertanggungjawaban jelas dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- 4) Dalam menjalankan tugasnya, para menteri akan berhati-hati karena adanya pengawasan dari parlemen.

Sedangkan kelemahan dari sistem parlementer adalah sebagai berikut.

- 1) Kedudukan eksekutif (kabinet) tidak stabil, karena tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh parlemen.
- 2) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para menteri merupakan anggota parlemen dari partai mayoritas.
- 3) Kebijakan politik negara menjadi labil karena sering terjadi pergantian kabinet apabila kabinet dalam bentuk koalisi.
- 4) Masa jabatan badan eksekutif (kabinet) tidak dapat ditentukan sesuai dengan akhir masa jabatannya, karena sewaktu-waktu dapat bubar.

Pada sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hampir seluruh negara yang menganut sistem ini dapat dipastikan seorang kepala pemerintahan dipilih dari keanggotaan parlemen. Tahukah Anda, bagaimanakah cara pengisian jabatan kepala negara pada sistem ini? Di negara yang menganut paham monarki dapat dipastikan kepala negaranya seorang raja. Di negara yang berbentuk republik yang kepala negaranya adalah Presiden pada setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda dan Presiden memiliki masa jabatan yang telah ditentukan. Pengisian jabatan Presiden di negara republik pada sistem parlementer di sebagian negara diatur di dalam konstitusi. Beberapa negara memilih secara langsung Presiden mereka, dipilih oleh parlemen atau oleh suatu badan pemilihan. Masa jabatan Presiden sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun.

Dari penjelasan mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, ada negara-negara yang berupaya untuk memperbaiki kedua sistem pemerintahan tersebut dengan cara mengombinasikan di dalam sistem pemerintahannya. Contohnya pada sistem presidensial yang ada di Amerika Serikat dengan diadakan mekanisme *checks and balance*. Dalam suatu negara, baik yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlemen, wajib membentuk suatu kabinet.

Diskusi Ilmiah

- Buatlah kelompok yang jumlah anggotanya 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
- Diskusikan tema berikut!
"Persamaan dan perbedaan antara bentuk pemerintahan Republik Perlementer dengan Monarki Parlementer".
- Tulislah hasil diskusi bersama kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain menanggapi dan catatlah! Guru Anda akan bertindak sebagai Moderator.
- Serahkan pada guru Anda, hasil diskusi tersebut disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!

3. Jenis-Jenis Kabinet

Coba Anda simak penjelasan tentang mengenai jenis-jenis kabinet berikut ini!

a. Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial adalah kabinet yang pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan dipegang oleh presiden. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab atas segala jalannya pemerintahan. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada presiden.

Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal dan belum mampu melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil dinamakan "presidensial/presidentil" karena setelah kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem presidensil di mana Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.



KATA - KATA SANG TOKOH

Sebelum mengkritik orang lain, pikirkan dahulu apakah kita sendiri telah sempurna dan bebas dari kesalahan.

(Ho Chi Minh)

Sumber: <http://id.wikipedia/wiki/Ho-Chi-Minh>

b. Kabinet Ministerial

Kabinet ministerial adalah kabinet yang pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan dipegang oleh menteri-menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun bersama-sama, bertanggung jawab kepada parlemen.

Berdasarkan cara pembentukannya, kabinet ministerial dibagi menjadi dua.

1) Kabinet Parlementer

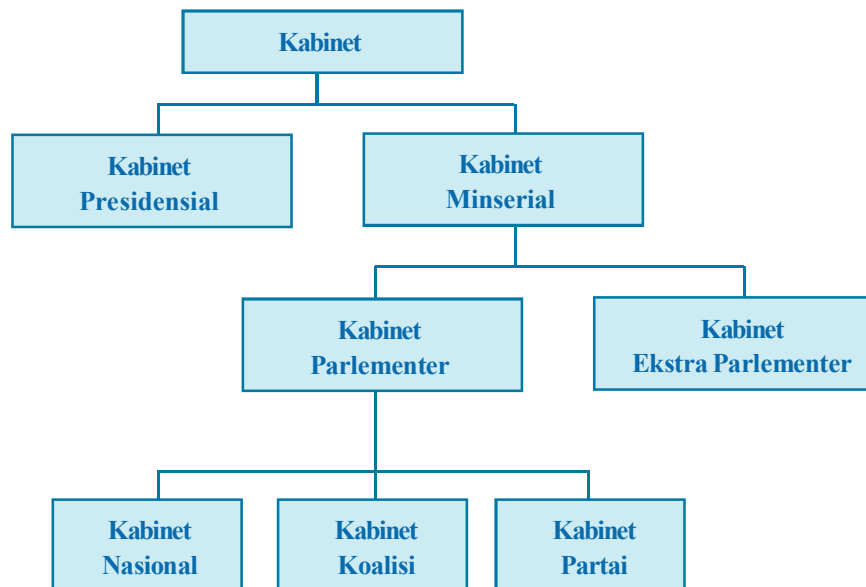
Cara pembentukan kabinet ini dengan campur tangan dari parlemen. Artinya, dengan memerhatikan serta memperhitungkan suara yang ada di parlemen. Pada umumnya, suara mayoritas di parlemen akan mendapatkan kedudukan kuat dalam kabinet yang akan dibentuk.

Berdasarkan ukuran susunan kabinet, maka kabinet parlementer dibagi menjadi tiga.

- a) Kabinet Nasional, yaitu kabinet yang anggota-anggotanya (para menteri) berasal dari seluruh partai yang memiliki perwakilan dalam parlemen.
- b) Kabinet Koalisi, yaitu kabinet yang anggota-anggotanya (para menteri) berasal dari beberapa partai yang memiliki perwakilan dalam parlemen.
- c) Kabinet Partai, yaitu kabinet yang anggota-anggotanya (para menteri) berasal dari satu partai yang menguasai suara mayoritas di parlemen.

2) Kabinet Ekstra Parlementer

Cara pembentukan kabinet ini tanpa campur tangan dari parlemen. Artinya, tanpa memerhatikan serta memperhitungkan suara yang ada di parlemen. Coba Anda perhatikan pembagian jenis-jenis kabinet pada skema di bawah ini!



Bagan 2.1 Bentuk kabinet yang dianut pada sistem pemerintahan di berbagai negara.



Perbandingan Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Pada pembahasan ini, Anda akan diajak mempelajari sistem pemerintahan yang diterapkan di beberapa negara, baik mengenai kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara republik yang berbentuk Federasi (federal) dan terdiri dari 50 negara bagian. Amerika Serikat menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan teori Trias Politica dari Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya mekanisme check and balance untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang besar di antara ketiga badan (kekuasaan) tersebut.

a. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Congress yang terdiri dari Senat dan DPR (*The House of Representative*). DPR (*The House of Representative*) terdiri dari para anggota yang dipilih setiap 4 tahun sekali oleh rakyat dari berbagai negara bagian. Sedangkan Senat terdiri dari 2 anggota senat dari setiap negara bagian yang dipilih untuk selama 6 tahun oleh badan legislatif negara bagian.

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden dengan masa jabatan 4 tahun, dengan syarat tidak boleh lebih 2 x masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket oleh rakyat secara langsung. Penempatan menteri-menteri ditentukan oleh Presiden terpilih yang sesuai dengan rule of the game dari Demokrasi di Amerika Serikat. Para menteri terdiri dari orang-orang yang sama partainya dengan Presiden dengan syarat harus mendapat persetujuan dari anggota senat yang hadir.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (Supreme Court). Mahkamah Agung Amerika Serikat atau nama resminya Supreme Court of the United States, adalah pemegang kekuasaan yudisial tertinggi di Amerika Serikat. Mahkamah ini terdiri dari seorang Ketua Mahkamah Agung dan delapan orang anggota Hakim Agung, yang dinominasikan oleh Presiden Amerika Serikat dan dapat menjabat setelah mendapat persetujuan Senat.

d. Check and Balance

- 1) Rakyat memilih presiden yang akan memimpin pemerintahan yang akan menjalankan Undang-undang dan memilih anggota Congress yang akan mengawasi tindakan-tindakan presiden dan membuat undang-undang.

- 2) Dalam Congress terdapat dua kamar, yaitu DPR dipilih oleh rakyat secara nasional menurut sistem distrik dan senat dipilih oleh Badan legislatif negara bagian. Setiap keputusan yang diambil oleh Congress harus memperoleh persetujuan dari DPR dan Senat. (*check and balance* antara DPR dengan Senat)
- 3) Undang-undang yang dibuat oleh Congress harus memperoleh persetujuan dari presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden ikut serta dalam urusan legislatif. Undang-undang yang tidak memperoleh persetujuan (ditolak) oleh Presiden tidak dapat diundangkan, sehingga terjadi veto Presiden. Dalam keadaan seperti ini, Presiden harus memberikan alasannya. (*Check and balance* antara Presiden/eksekutif dengan Congress/legislatif).
- 4) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila Presiden melanggar Undang-undang dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan yang tercantum dalam *Declaration of Independence* atau melakukan suatu kejahatan besar, Congress memiliki hak untuk memberhentikan (memecat) Presiden. (*check and balance* antara congress dengan Presiden).
- 5) Presiden dalam membentuk suatu kabinet dengan cara mengangkat menteri-menteri harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota senat, padahal kabinet di Amerika Serikat adalah kabinet presidensil dan bukan kabinet parlementer. (*check and balance* antara presiden dengan congress)
- 6) Presiden dengan persetujuan dari 2/3 anggota senat mengangkat jaksa Agung. (*check and balance* antara congress, presiden, mahkamah agung)
- 7) Mahkamah Agung (*Supreme Court*) memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian terhadap undang-undang yang dibuat oleh congress. (*check and balance* antara mahkamah agung dengan congress)



KATA SANG TOKOH

Ada dua hal yang tidak bisa ditunda dalam kehidupan: berbakti pada orang tua dan melakukan kejahatan.

(Mahatma Gandhi)

Sumber: <http://arief.ngeblog.com>

2. Republik Rakyat Cina

RRC secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949, merupakan negara besar di wilayah Asia yang memiliki bentuk pemerintahan Republik. RRC adalah negara demokrasi dengan sistem komunis yang menganut asas sentralisme. Pelaksana kedaulatan rakyat yaitu Kongres Rakyat Nasional yang merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai badan legislatif dengan sistem unikameral.

Anggota dari Kongres Rakyat Nasional terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh provinsi-provinsi, daerah otonom, dan kotamadya yang langsung tunduk pada pemerintahan pusat dan angkatan bersenjata. Kongres Rakyat Nasional memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut.

- a. Mengubah UUD (Konstitusi)
- b. Mengawasi pelaksanaan konstitusi
- c. Menyusun dan merivisi atau meninjau kembali UU pokok tentang susunan kenegaraan, kejahatan, dan perdata sipil
- d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
- e. Memutuskan pemilihan perdana menteri atas calon yang diajukan oleh presiden
- f. Memilih ketua Mahkamah Agung
- g. Memilih ketua Kejaksaan Agung
- h. Memilih pimpinan Angkatan Perang Pusat
- i. Menilai dan menyetujui anggaran belanja negara dan laporan pelaksanaannya.
- j. Menyatakan perang dan damai.

Dengan demikian, Kongres Rakyat Nasional memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan kehidupan ketatanegaraan RRC. Kepala negara dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan lima tahun, sedangkan kepala pemerintahan dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang diusulkan oleh presiden dengan persetujuan dari Kongres Rakyat Nasional. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh *Supreme Peoples Court, Local Peoples Court, Special People Court*.

3. Inggris

Inggris merupakan negara pelopor sistem parlementer atau disebut dengan istilah *The Mother of Parliaments*. Bentuk pemerintahannya adalah Kerajaan dengan sistem pemerintahan Parlementer.

Adapun sistem pemerintahan di Inggris adalah sebagai berikut.

- a. British Parliament (Parlemen) adalah pemegang kekuasaan legislatif. Parlemen Inggris menganut sistem bikameral yang terdiri dari *House of Commons* (Majelis Rendah) dan *House of Lords* (Majelis Tinggi). *House of Commons* yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum dengan sistem distrik untuk masa jabatan lima tahun. Majelis Rendah (*House of Commons*) ini dikuasai oleh partai-partai politik yaitu sebagian besar oleh Partai Buruh dan Partai Konservatif, meskipun ada partai-partai kecil lainnya. Sedangkan *House of Lords* adalah badan perwakilan yang anggota-anggotanya terdiri atas para bangsawan (*hereditary peers*), Uskup Agung Gereja (*archbishop*) serta orang-orang yang diangkat berdasarkan jasa dan prestasinya terhadap negara (*life peers*). Anggota *House of Lords* ini ditunjuk oleh Raja/Ratu Inggris.
- b. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Raja/Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Prinsip "*The King can do no wrong*" berlaku bagi seorang Raja/Ratu sebagai kepala negara yaitu bahwa Raja/Ratu tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara konstitusional.

Sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, memimpin suatu kabinet. Anggota kabinet yang terdiri dari menteri-menteri pada umumnya berasal dari *House of Commons* yang merupakan partai yang memenangkan pemilu.

- c. *Supreme of Court of Judicature* sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Dalam sistem parlementer ini, Inggris menciptakan parlemen yang workable yaitu parlemen yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan negara.

Penerapan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah sebagai berikut.

- a. Parlemen yang terdiri dari *House of Commons* dan *House of Lord*. *House of Commons* sebagian besar terdiri atas dua partai besar, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Partai yang memenangkan pemilu dapat membentuk kabinet, sedangkan partai yang kalah dalam pemilu akan duduk sebagai oposisi.
- b. Pembentukan kabinet dilaksanakan sesudah terbentuknya parlemen dari hasil pemilihan umum. Kabinet yang merupakan kelompok menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri menjalankan tugas pemerintahan. Apabila suatu kabinet gagal dalam menjalankan tugas pemerintahan ataupun telah menyimpang dari kebijakan yang dibuat oleh parlemen, perdana menteri akan mendapat "mosi tidak percaya". Untuk itu, kabinet harus membubarkan diri. Mosi tidak percaya dapat pula jatuh jika kabinet tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen.
- c. Apabila terjadi suatu konflik antara Parlemen dan Kabinet maka Raja/Ratu dapat membubarkan parlemen.
- d. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Namun, badan peradilan tetap memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan tugas peradilan.



KATA SANG TOKOH

Moralitas adalah sebuah pelita dalam peningkatan kepribadian, tidak seharusnya merupakan cambuk penghukum bagi orang lain.

(Thomas Jefferson)

Sumber: Dinas Penerangan dan Kebudayaan Amerika Serikat (2003)

4. Jepang

Jepang merupakan negara dengan sistem demokrasi parlementer dengan bentuk pemerintahannya Monarki Konstitusional. Adapun badan atau lembaga-lembaga negara Jepang terdiri dari Kaisar, Kabinet, Dewan Negara, Dewan Pemerintah. Menurut Konstitusi 1947, Jepang merupakan negara monarki konstitusional di bawah pimpinan kaisar Jepang dan parlemen Jepang. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, bertanggung-jawab terhadap Diet.

Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan pada tiga prinsip: kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan, yaitu badan legislatif (*Diet* atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).

a. Legislatif

Badan ini dijalankan oleh kekuasaan parlemen (*Diet*). Parlemen Jepang memiliki dua kamar yang disebut dengan Kokkai yang terdiri dari Majelis Rendah (*Shuugi-in*) dan Majelis Tinggi (*Sangi-in*). Majelis Rendah beranggotakan 480 dan dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali. Sedangkan Majelis Tinggi beranggotakan 242 anggota yang masa jabatannya 6 tahun sekali juga dipilih secara langsung oleh rakyat.

b. Eksekutif

Badan ini dijalankan oleh kabinet. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri Jepang adalah salah seorang dari anggota parlemen dari partai mayoritas Majelis Rendah. Dengan demikian, seorang Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota parlemen, yang pada umumnya dari anggota partai mayoritas pada Majelis Rendah. Sedangkan menteri-menteri dalam kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang hanya sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik. Kekuasaan Kaisar terbatas pada kedudukan sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang dan memberikan persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah ada pada perdana menteri dan anggota terpilih Parlemen Jepang. Oleh karenanya, seorang Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.

Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam provinsi) dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung-jawab mereka meliputi pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain, serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan

c. Yudikatif

Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, dan 14 Hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Selain itu, ada juga pengadilan sumir, yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan mengenai perbandingan antara sistem pemerintahan Kerajaan Spanyol dan Arab Saudi!
3. Gunakan lembar kerja di bawah ini untuk membantu Anda berdiskusi!

Pokok Bahasan	Kerajaan Spanyol	Kerajaan Arab Saudi
Kepala Negara
Kepala Pemerintahan
Politik yang dianut
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan Yudikatif
Pengaruh di Dunia Internasional

5. Brasil

Brasil adalah negara yang terletak di Amerika Latin. Bentuk negaranya adalah Federal, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Dalam sistem pemerintahannya menggunakan sistem presidensial. Dengan demikian, Presiden adalah berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Brasil meraih kemerdekaannya dari Portugis pada tanggal 7 September 1822. Negara yang terletak di bagian tengah dan timur Amerika Selatan ini menjadi wilayah jajahan Portugis sejak 1494. Pada 1889, sistem pemerintahan Brasil berubah dari monarki menjadi republik. Brasil terdiri dari 26 negara bagian (*estado*) dan 1 distrik federal (*distrito federal*).

Adapun sistem pemerintahannya adalah sebagai berikut.

a. Legislatif

Badan ini dijalankan *National Congress (Congresso Nacional)* merupakan parlemen yang terdiri atas Federal Senate (Senat Federal) dan *The Chamber of Deputies or Camara dos Deputados*. Anggota dari Federal Senate adalah perwakilan dari tiap negara bagian dan distrik. Setiap negara bagian dan distrik masing-masing terdiri dari 3 orang untuk masa jabatan 8 tahun, dengan cara sepertiga anggota dipilih untuk masa jabatan 4 tahun selanjutnya. Sedangkan anggota dari *The Chamber of Deputies or Camara dos Deputados* dipilih secara langsung melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun. Jumlah anggota dari The Chamber of Deputies adalah 513 orang.

b. Eksekutif

Konstitusi 1988 memberikan kekuasaan yang besar pada pemerintah federal. Presiden Brasil memegang kekuasaan eksekutif yang besar seperti menunjuk kabinet dan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih bersamaan dalam pemilihan umum 4 tahun sekali. Badan ini dijalankan oleh Presiden. Kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kabinet yang terdiri dari menteri-menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

c. Yudikatif

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh *Supreme Federal Tribunal, Higher Tribunal of Justice*, serta *Regional Federal Tribunals*.



Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia

Sudahkah Anda memahami bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia? Berikut ini Anda akan diajak mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia sesuai dengan berlakunya UUD yang pernah diterapkan dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

1. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Dengan demikian, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Pada Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, sistem pemerintahan adalah presidensial.

Pada awal kemerdekaan, pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial tidak berlangsung lama. Hal ini karena saat negara Republik Indonesia berdiri, beberapa badan/lembaga negara belum terbentuk meskipun Presiden dan Wakil Presiden sudah dipilih. Dengan aturan peralihan pasal IV UUD 1945 yang berbunyi, "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional."

Dengan adanya peraturan tersebut, Presiden memperoleh kekuasaan yang luar biasa, yang meliputi:

- a. kekuasaan pada lembaga eksekutif,
- b. menjalankan kewenangan MPR,
- c. menjalankan kewenangan (tugas-tugas) DPR,
- d. menjalankan kewenangan (tugas-tugas) DPA.

Dengan kondisi dan situasi saat itu, maka pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang isinya sebagai berikut.

- a. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, Komite Nasional Pusat disertai kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis-garis besar haluan negara.
- b. Berhubungan dengan gentingnya keadaan, pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Pusat dijalankan oleh Badan Pekerja yang dipilih oleh mereka serta bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Selanjutnya Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengusulkan kepada Presiden tentang Sistem Kabinet Ministeril (Parlementer), yang saat itu pada kalangan pemimpin Indonesia timbul keinginan untuk mengganti Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Ministerial. Presiden akhirnya menyetujui dan diumumkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam Maklumat No. 5 tanggal 11 November 1945. Sejak saat itu sistem pemerintahan yang dijalankan telah menyimpang dari sistem pemerintahan yang dikehendaki UUD 1945. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini, kekuasaan DPR adalah besar, sehingga berdampak pada stabilitas politik pemerintahan, yaitu seringnya terjadi pergantian pemerintahan. Kabinet parlementer yang pernah ada sampai berlakunya konstitusi RIS 1949 adalah sebagai berikut.

- 1) Kabinet Sutan Sjahrir I, II, dan III
- 2) Kabinet Amir Syarifudin I dan II
- 3) Kabinet Moh. Hatta I
- 4) Kabinet Darurat
- 5) Kabinet Moh. Hatta II.



KATA - KATA SANG TOKOH

Hendaknya bersaing untuk menjadi siapa yang lebih dicintai, bukan siapa yang lebih ditakuti.

(Ratu Elizabeth II)

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Elizabeth_II

2. Sistem Pemerintahan Menurut Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Dalam Konstitusi RIS 1949 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Menurut Konstitusi RIS, sistem pemerintahannya adalah sebagai berikut.

- a. Badan Legislatif terdiri dari dua badan (bikameral), yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Presiden RIS memiliki kedudukan sebagai kepala negara yang kewajibannya tidak dapat diganggu gugat. Pertanggungjawaban pemerintahan dipegang oleh menteri-menteri, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.
- c. Kekuasaan Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung Indonesia.
- d. Badan pemeriksaan dijalankan oleh Dewan Pengawas Keuangan.

Adapun lembaga-lembaga negara di dalam pemerintahan RIS adalah:

- a. Presiden
- b. Menteri-menteri
- c. Senat
- d. Dewan Perwakilan Rakyat
- e. Mahkamah Agung Indonesia
- f. Dewan Pengawas Keuangan

Profil Tokoh

Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwono lahir di Yogyakarta dengan nama GRM. Dorojatun pada tanggal 12 April 1912. Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Raja Kasultanan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia kedua periode 1973-1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Beliau merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, beliau juga mendorong pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa". Sultan bersama Pakualam adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer ke-1.



Sejak tahun 1946, beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah Menteri Utama di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN.

Minggu malam, tanggal 2 Oktober 1988, beliau wafat di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri. Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara tahun 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara tahun 1940-1988. Hamengkubuwana IX diberi gelar pahlawan nasional pada tanggal 8 Juni 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sumber: Tahta untuk Rakyat, Jakarta

3. Sistem Pemerintahan Menurut UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Menurut UUDS 1950, bentuk sistem pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Presiden

Indonesia merupakan negara Republik sehingga kepala negaranya adalah presiden. Menurut Pasal 45 UUD 1950, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden di dalam melakukan tugasnya. Pada Pasal 83 UUDS dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.

b. Dewan Menteri

Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan, baik dilakukan secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing dalam bagiannya sendiri-sendiri.

c. Kabinet

Pada pasal 51 dinyatakan bahwa Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet. Presiden mengangkat seorang Perdana Menteri dan menteri-menteri lain. Setelah kabinet terbentuk, kabinet di hadapan DPR memberikan penjelasan mengenai program-programnya. Apabila DPR menyetujui, DPR mengajukan mosi tidak percaya pada kabinet.

d. Dewan Perwakilan Rakyat

UUDS 1950 menganut sistem unikameral. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 56, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia. Pada Pasal 57 dinyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh Warga Negara Indonesia melalui Pemilu.

Sistem pemerintahan UUDS 1950 mengalami ketidakstabilan. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet yang sering mengalami perubahan. Dalam jangka waktu 9 tahun telah mengalami 7 kali perubahan kabinet.

- 1) Kabinet Natsir
- 2) Kabinet Sukiman
- 3) Kabinet Wilopo
- 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I
- 5) Kabinet Burhanuddin Harahap
- 6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II
- 7) Kabinet Karya (Djuanda)

4. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 (5 Juli 1959 - 21 Mei 1998)

Mengingat keadaan politik yang tidak stabil, pada tanggal 22 April 1959 Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya di depan sidang pleno konstituante. Isi pokok pidato tersebut adalah menganjurkan agar konstituante menerima anjuran Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Atas anjuran tersebut, Konstituante mengadakan sidang dan pemungutan suara sebanyak 3 kali. Hasilnya, suara mayoritas menerima berlakunya kembali UUD 1945. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 bertempat di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan sebuah Dekrit mengenai kembali ke UUD 1945.

Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, terdapat 2 bagian yang penting, yaitu konsiderans dan diktum. Konsideran adalah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Presiden sebelum memutuskan sesuatu dan Diktum adalah keputusan yang diambil Presiden sebagai hasil kesimpulan dari pertimbangan tersebut. Adapun pokok-pokok dari konsiderans dan diktum adalah sebagai berikut.

a. Konsiderans

- 1) Pernyataan Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tidak mendapatkan keputusan dari Konstituante.
- 2) Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya.
- 3) Hal ini menimbulkan keadaan negara yang membahayakan bagi persatuan dan keselamatan negara.
- 4) Dengan dukungan sebagian besar rakyat Indonesia, Presiden menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara.
- 5) Presiden memiliki keyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi tersebut.

b. Diktum

- 1) Pembubaran Konstituante
- 2) Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950.
- 3) Pembentukan MPRS yang anggota-anggotanya adalah DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan DPAS.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945 yang dimulai sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai saat ini, sistem pemerintahan pun sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Meskipun demikian dalam praktek penyelenggaraan negara terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut.

a. Pemerintahan Negara Indonesia 1959-1966

Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 biasa disebut dengan Pemerintahan Orde Lama. Pada masa Orde Lama menggunakan Demokrasi Terpimpin yang secara resmi disampaikan oleh Presiden Sukarno sebagai berikut:

- 1) Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
- 2) Demokrasi Terpimpin bukan merupakan bentuk kediktatoran yang memiliki perbedaan dengan Demokrasi Sentralisme dan Demokrasi Liberal yang telah dipraktikkan dalam penyelenggaraan negara.
- 3) Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi di segala bidang kenegaraan dan kemasyarakatan.
- 4) Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Inilah inti dari pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin.
- 5) Demokrasi Terpimpin adalah alat dan bukanlah tujuan.
- 6) Tujuan dari demokrasi terpimpin adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 7) Dalam Demokrasi Terpimpin terdapat kekuatan oposisi untuk melahirkan pendapat yang sehat dan membangun.
- 8) Dalam Demokrasi Terpimpin terdapat kebebasan berpikir dan berbicara, meskipun dalam batas-batas tertentu.

Hal-hal yang terdapat dalam Demokrasi Terpimpin tersebut di atas tidaklah melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Namun, dalam praktiknya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang secara jelas bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa penyimpangan yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu dalam penyelenggaraan negara adalah sebagai berikut.

- 1) Penggunaan ideologi Nasional, Agama, dan Komunis (Nasakom) yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
- 2) Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" atau "Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)" yang dijadikan sebagai GBHN yang bersifat tetap.

- 3) DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden dengan Penpres No.3 Tahun 1960 dikarenakan DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah.
- 4) MPRS dalam ketetapanannya, yaitu MPRS RI No. III/MPRS/1966 mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup.
- 5) Kekuasaan Presiden sangat luas melebihi yang tercantum dalam UUD 1945, yang meliputi:
 - a) Pembentukan MPRS berdasarkan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yaitu Penpres No. 2 Tahun 1959, yang keseluruhan anggotanya adalah hasil dari pengangkatan dan penunjukan Presiden.
 - b) Pimpinan MPRS adalah melembaga. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Presiden karena pimpinan ini diberi predikat Menteri, yang berarti pembantu Presiden dan ketuanya berpredikat Wakil Perdana Menteri.
 - c) Penyusunan anggota DPR-GR (Gotong Royong) berdasarkan Penpres No. 4 tahun 1960.
 - d) Penyusunan Anggota Majelis ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 dengan komposisi: anggota DPR-GR: 283, utusan daerah: 94, dan wakil Golongan Karya: 232.
 - e) Cara mengambil keputusan pada sidang umum adalah berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi dengan adanya kemungkinan dari Presiden untuk ikut serta (campur tangan). Hal ini diatur dalam ketetapan MPRS No VIII/MPRS/1965.
 - f) Pembentukan DPAS berdasarkan pada Penpres No. 3 Tahun 1959.

Berdasarkan uraian di atas, pada masa itu terdapat berbagai penyimpangan yang pada akhirnya Demokrasi Terpimpin yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak sesuai. Hal ini yang menyebabkan masa Orde Lama jatuh sebagai akibat timbulnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Republik Indonesia. Permasalahan tersebut adalah politik luar negeri yang memiliki kecenderungan ke negara komunis (Cina), konfrontasi dengan Malaysia, permasalahan ekonomi, dan pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965.

b. Pemerintahan Negara Indonesia 1966-1998

Pemerintahan yang dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998 disebut dengan pemerintahan Orde Baru. Tanggal 11 Maret 1966 dijadikan sebagai dasar pemerintahan Orde Baru, yaitu sejak Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau disingkat Supersemar. Isinya adalah memberikan mandat/kuasa kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu.



Gambar 2.1. Surat Perintah Sebelas Maret sebenarnya adalah surat Tugas (Mandat) yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi keadaan pada tahun 1966.

Sumber : <http://i215.photobucket.com>

Pada masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya sesuai dengan UUD 1945 yaitu Presidensial dan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Demokrasi Pancasila juga diterapkan dengan adanya pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Sistem ketatanegaraan pada masa itu sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu memiliki badan-badan negara:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Presiden
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 4) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 6) Mahkamah Agung (MA)

Tujuan awal adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tetapi pada praktik penyelenggaraan negara mengalami penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan adalah sebagai berikut.

- 1) Sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi dan cenderung ke arah otoriter.
- 2) Adanya ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara.
- 3) Kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden, memiliki kewenangan yang besar (dominan).
- 4) Terdapat berbagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dari para pejabat negara.
- 5) Adanya konsep dwi fungsi ABRI.
- 6) Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pemerintah.
- 7) Tidak adanya supremasi hukum.
- 8) Merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 9) Tidak ada kepastian dan keadilan dalam bidang hukum.

- 10) Adanya kontrol atas kehidupan pers.
- 11) Kebijakan ekonomi pemerintah hanya menguntungkan bagi golongan ekonomi tertentu sehingga timbul konglomerasi.

Berdasarkan beberapa hal di atas, kepercayaan masyarakat (rakyat) terhadap pemerintahan Orde Baru ini makin lama makin hilang. Pada akhirnya, timbul demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.



Sumber: <http://upload.wikimedia.org>

Gambar 2.2 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok dengan jumlah anggota 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut ini!
 - (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya gerakan-gerakan Reformasi yang berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru?
 - (2) Mengapa faktor-faktor tersebut muncul?
3. Tulislah hasil diskusi bersama kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan dan catatlah! Guru Anda bertindak sebagai Moderator.
4. Kumpulkan kepada guru Anda, hasil diskusi tersebut disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!

c. Pemerintahan Negara Indonesia 1998-Sekarang

Pemerintahan saat ini dikenal dengan Reformasi. Reformasi lahir sebagai akibat adanya penyimpangan (penyalahgunaan) penyelenggara pemerintah negara Indonesia. Dalam gerakan Reformasi ini, para mahasiswa mengumandangkan enam 6 pilar reformasi sebagai berikut.

- 1) Amandemen UUD 1945
- 2) Reposisi Tentara Nasional Indonesia
- 3) Otonomi yang luas
- 4) Penegakan supremasi hukum
- 5) Masyarakat Madani
- 6) Kebebasan berbicara.

Dalam menata sistem pemerintahan, ditempuh berbagai kebijakan sebagai berikut.

- 1) Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika, dan tuntutan reformasi.
- 2) Meningkatkan peran dan menegaskan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab lembaga-lembaga negara.
- 3) Menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4) Mengembangkan sistem politik nasional dan meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.
- 5) Meningkatkan kemandirian partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi, dan LSM.
- 6) Pembenahan struktur ketatanegaraan, yang meliputi:
 - a) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
 - b) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
 - c) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - d) UU No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

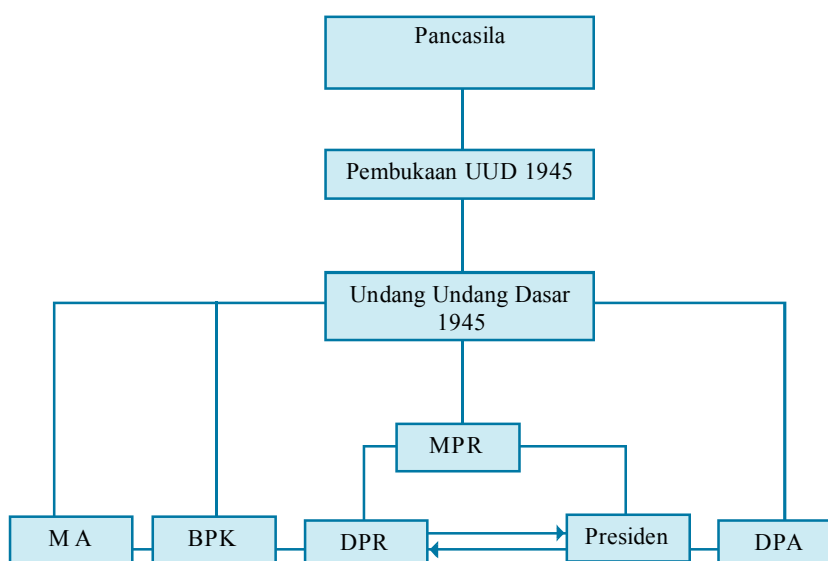
Pada prinsipnya, pemerintahan Republik Indonesia pada masa Reformasi ini berusaha untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dan mencapai kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, berikut ini perbandingan sistem pemerintahan yang dianut oleh Republik Indonesia sesuai UUD 1945 dan Amandemen UUD 1945.

1. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen)

- a. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.
- b. Badan-badan negara (lembaga-lembaga negara) menurut UUD 1945 sebelum amandemen.
 - 1) MPR
 - 2) DPR
 - 3) Presiden
 - 4) DPA
 - 5) BPK
 - 6) MA

- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut.
 - 1) Sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat
 - 2) Menetapkan UUD dan GBHN
 - 3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
 - 4) Mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden apabila Presiden melanggar UUD dan GBHN.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat
DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut.
 - 1) Membentuk undang-undang
 - 2) Mengawasi tindakan Presiden
 - 3) Setiap UU harus mendapat persetujuan DPR
 - 4) RAPBN yang diajukan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR
- e. Presiden
Presiden adalah lembaga tinggi negara yang kedudukannya di bawah MPR memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut.
 - 1) Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah
 - 2) Membentuk UU dengan persetujuan DPR
 - 3) Memiliki kekuasaan pada bidang yustisial, yaitu pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
 - 4) Kekuasaan dalam hubungan luar negeri, yaitu membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari negara lain.
 - 5) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam hal kegentingan yang memaksa.
- f. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
DPA adalah lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai Badan Penasihat Presiden. DPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
 - 1) Berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden.
 - 2) Berhak mengajukan usul kepada pemerintah.
- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) Memeriksa tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) Memberitahukan (melaporkan) kepada DPR mengenai hasil pemeriksaannya.
- h. Mahkamah Agung (MA)
MA adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan Pemerintah.

i. Struktur Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum diamandemen.



Sumber : <http://2.bp.blogspot.com>

Gambar 2.3 Struktur sistem Pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 (sebelum Amendemen)

Keterangan bagan:

- MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kedudukan yang sangat kuat, karena anggotanya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan. Kedudukannya di atas Presiden.*
- Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu memiliki kedudukan yang kuat. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden dan DPR dapat mengajukan Sidang Istimewa kepada MPR.*
- Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mendapat pengaruh pemerintah (Presiden). Hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada DPR. BPK tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.*
- DPA tidak berada di bawah Presiden dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Meskipun anggota DPA diangkat oleh Presiden, tetapi berdasarkan usul dari DPR, DPA memiliki tanggung jawab kepada Presiden.*
- Kedudukan MA dalam melakukan kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan Presiden. Meskipun Ketua MA diangkat oleh Presiden berdasarkan usul dari DPR, badan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.*

j. Kabinet

Kabinet terdiri dari menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri ini sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehingga bertanggung jawab kepada Presiden.



KATA SANG TOKOH

Bertutur dengan kata yang baik, berpikirlah dengan niat yang baik, melakukan perbuatan baik.

(Khalil Gibran)

Sumber: <http://rien18.files.wordpress.com>

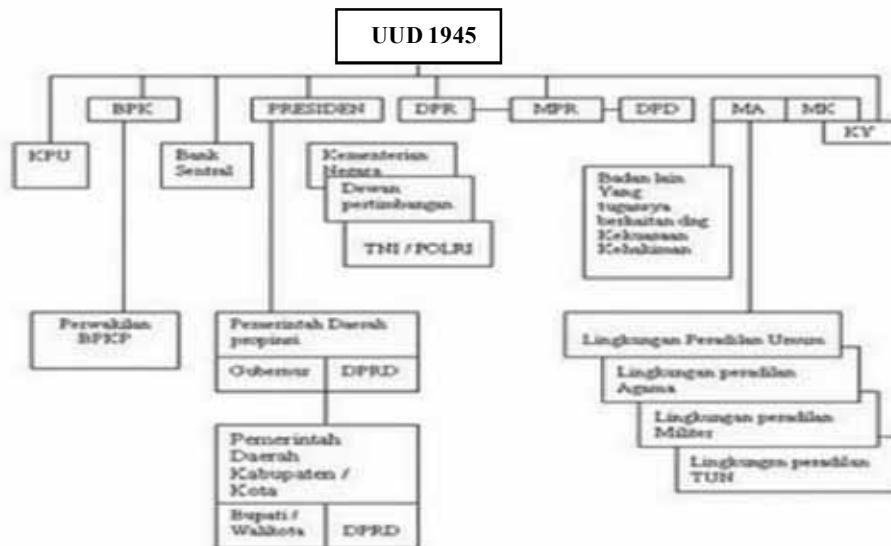


Berpikir Kritis

1. Susunlah esai singkat mengenai dihapuskannya keberadaan DPA pasca Amandemen UUD 1945!
2. Langkah kerja Anda meliputi:
 - a. Mencari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang DPA.
 - b. Tulislah pendapat Anda tentang keberadaan pasal-pasal tersebut dan letak pokok-pokok pikirannya!
 - c. Pendapat yang Anda berikan, misalnya: alasan perlunya penghapusan lembaga DPA, maksud dan tujuan penghapusan tersebut, manfaat dari penghapusan tersebut, serta nilai yang terkandung di dalam tindakan tersebut.
3. Tulislah pendapat Anda sebanyak 3-4 halaman kuarto dengan diketik rapi!
4. Serahkan kepada guru Anda untuk diberi komentar dan penilaian!

2. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Menurut UUD 1945 (Setelah Amandemen)

- a. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Bentuk pemerintahan adalah Republik dan sistem pemerintahan adalah Presidensial.



Sumber : <http://2.bp.blogspot.com>

Gambar 2.4 Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 (Setelah diamandemen)

b. Badan-badan/lembaga-lembaga negara meliputi:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat
- 3) Dewan Perwakilan Daerah
- 4) Presiden dan Wakil Presiden
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan
- 6) Mahkamah Agung
- 7) Mahkamah Konstitusi
- 8) Komisi Yudisial

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Amandemen UUD 1945 berdasarkan kesepakatan dimaksudkan untuk meneguhkan sistem presidensial. Oleh karena itu, cara yang harus dijalankan adalah memberdayakan keberadaan lembaga wakil rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat dengan jalan mengubah sistem dan kelembagaan. Oleh karenanya, lembaga perwakilan menganut sistem dua kamar. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat 1, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang".

Menurut UU No. 22 Tahun 2003 MPR terdiri atas anggota DPR yang beranggotakan 550 orang yang berisi anggota dari Partai Politik dan anggota DPR yang beranggotakan wakil-wakil daerah masing-masing provinsi sejumlah 4 orang. Semua anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

Tugas dan kewenangan MPR berdasarkan Pasal 3, 7, dan 8 UUD 1945 serta UU No. 22 tahun 2003 adalah sebagai berikut.

- a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b) Melantik presiden dan wakil presiden.
- c) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.
- d) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- e) Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam waktu 60 hari.
- f) Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dalam waktu 30 hari.
- g) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR.

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR secara konstitusional tercantum di dalam UUD 1945, yaitu pasal 19, 20, 20A, 21, 22A, dan 22B. Jumlah anggota DPR adalah 550 orang yang berasal dari anggota Partai Politik yang mengikuti Pemilu serta dipilih secara langsung oleh rakyat.

Adapun tugas dan wewenang dari DPR adalah sebagai berikut.

- a) Memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan berhak mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU).
- b) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang/perpu.
- c) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasannya.
- d) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- e) Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- f) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah.
- g) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan DPD.
- h) Memilih anggota BPK.

- i) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
 - j) Memberikan persetujuan kepada presiden dalam pengangkatan Komisi Yudisial.
 - k) Memberikan persetujuan Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial.
 - l) Memilih tiga hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden.
 - m) Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan seorang duta dan penempatan seorang duta, serta dalam pemberian amnesti dan abolisi.
 - n) Memberikan persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD adalah 128 anggota yang mewakili tiap-tiap provinsi, dengan ketentuan setiap provinsi diwakili oleh empat orang.
- Tugas dan wewenang DPD menurut UU No. 22 Tahun 2003 adalah sebagai berikut.
- a) Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan penimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - b) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
 - c) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
 - d) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
 - e) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
 - f) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Diskusi Ilmiah

1. Masih bersama kelompok yang telah Anda bentuk, diskusikan tema berikut ini!
"Perbandingan antara tugas, fungsi, dan kewenangan dari DPR dan DPD"
2. Gunakan tabel di bawah ini untuk membantu Anda menyelesaikan masalah!

Pokok Bahasan	DPD	DPR
Posisi/Kedudukan
Tugas
Fungsi
Kewenangan
Sistem Pemilihan
Pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan Indonesia

3. Tulislah ulasan singkat dari hasil diskusi bersama kelompok Anda dan presentasikan di depan kelas!
4. Serahkan hasilnya pada guru Anda untuk diberi komentar dan penilaian!

4) Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu sebagai kepala pemerintahan. Selain itu Presiden juga sebagai kepala negara. Sejak tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu dalam satu paket. Secara konstitusional, presiden diatur dalam UUD 1945 Bab III Pasal 4 hingga Pasal 16.

Kabinet yang terdiri dari menteri-menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Adapun tugas dan wewenang Presiden adalah sebagai berikut.

- a) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan.
- b) Mengajukan rancangan UU kepada DPR.
- c) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU.
- d) Mengajukan RAPBN (Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara).
- e) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- f) Mengangkat duta dan konsul.
- g) Membentuk dewan pertimbangan yang tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan pada presiden.
- h) Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- i) Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- j) Berhak menyatakan bahaya.
- k) Memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
- l) Memberikan gelar tanda jasa dan lainnya tanda kehormatan.

5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan memiliki tugas serta wewenang berikut ini.

- a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b) Melaporkan hasil pemeriksaan tersebut dan ditindaklanjuti oleh DPR.

Berdasarkan pada UU No. 14 Tahun 2004 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat kepada DPR dan DPD serta Presiden, yang disesuaikan dengan kewenangannya. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD setempat.

6) Mahkamah Agung (MA)

Kedudukan MA secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 2 dan 24A. Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 2004, MA memiliki tugas dan wewenang berikut ini.

- a) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa mengenai kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b) Memberikan nasihat hukum kepada presiden dalam pemberian dan penolakan grasi.
- c) Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
- d) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara baik diminta maupun tidak.

7) Mahkamah Konstitusi (MK)

MK merupakan kekuasaan yudikatif yang baru setelah UUD 1945 mengalami amandemen. Sebelum diamendemen, dalam UUD 1945 tidak ada lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Dalam amandemen UUD 1945 ini, kekuasaan MK ini diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 24 C (ditetapkan pada saat UUD 1945 mengalami perubahan), sedangkan UU yang mengatur tentang MK adalah UU No. 24 Tahun 2003, yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2003). Kekuasaan MK adalah mengadili pada tingkat terakhir dan keputusan dari MK ini bersifat final.

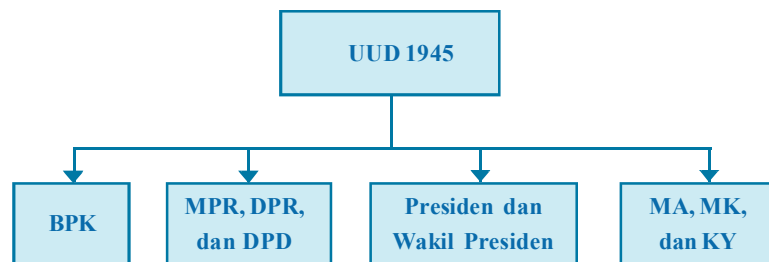
Anggota dari MK terdiri dari 9 anggota hakim, yaitu ketua, wakil ketua, dan anggota. Tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

- a) Menguji suatu UU terhadap UUD 1945.
- b) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c) Memutuskan perselisihan mengenai pemilihan umum.
- d) Memutuskan pembubaran partai politik.
- e) Memutuskan atas pendapat DPR mengenai Presiden dan Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran umum, seperti pengkhianatan, korupsi, tindak pidana, perbuatan tercela.

8) Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah kekuasaan di bidang Yudikatif (kehakiman) dan sebagai lembaga negara yang baru setelah UUD 1945 mengalami amandemen. Secara konstitusional, tugas dan wewenang dari komisi Yudisial diatur dalam Bab IX Pasal 24B UUD 1945 (ditetapkan pada saat UUD 1945 mengalami perubahan ketiga). Komisi Yudisila adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.

Coba Anda perhatikan struktur lembaga negara dalam ketatanegaraan Republik Indonesia berikut ini!



Berdasarkan struktur di atas, terdapat perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

- a. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sebuah lembaga tinggi negara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Parlemen memiliki kekuasaan yang besar dalam membentuk UU dan hak budget (anggaran).
- c. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Dengan demikian, DPR menempati posisi yang kuat dalam sistem ketatanegaraan.
- d. Kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh MA, melainkan timbul lembaga negara yang lain, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- e. Lembaga negara DPA tidak ada (adanya penghapusan DPA).
- f. Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih oleh MPR, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.



Berpikir Kritis

1. Carilah artikel atau berita mengenai keterkaitan kinerja, tugas, dan fungsi antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial melalui internet atau media cetak!
2. Pahami isi berita tersebut dan tuliskan pendapat Anda tentang isi berita tersebut!
3. Ketiklah dengan rapi sebanyak minimal 5 halaman kertas kuarto, lalu jilidlah dengan rapi!
4. Kumpulkan pada guru Anda untuk diberi komentar dan penilaian!



F. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan Negara Lain

Setelah mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia dan di beberapa negara, tentunya Anda dapat membandingkan pelaksanaan antara sistem pemerintahan di negara Indonesia dengan sistem pemerintahan di negara tertentu. Setiap negara tentu memiliki badan-badan negara dalam sistem ketatanegaraannya, yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lain. Namun, ketiga badan tersebut tetap ada di setiap penyelenggaraan negara. Berikut ini Anda akan diajak mempelajari ketiga badan tersebut secara mendalam.

1. Badan Legislatif

Badan legislatif merupakan badan pembuat Undang-Undang, yang dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Badan legislatif terbagi dalam 2 kategori berikut.

- a. Unikameral, yaitu badan legislatif yang terdiri dari satu majelis.
- b. Bikameral, yaitu badan legislatif yang terdiri dari dua majelis

Di negara yang berbentuk federal, biasanya, mengikuti sistem bikameral (dua majelis). Alasannya, salah satu majelis digunakan untuk mewakili kepentingan negara bagian. Di negara kesatuan, ada pula yang mengikuti sistem bikameral. Namun, hanya untuk mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis yang lain. Dalam sistem bikameral terdapat dua majelis yang disebut Majelis Rendah dan Majelis Tinggi.

a. Majelis Rendah

Majelis Rendah merupakan majelis/badan yang mewakili rakyat. Anggota Majelis Rendah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Contoh: Amerika Serikat dikenal dengan *House of Representative Inggris* dikenal dengan *House of Commons*

b. Majelis Tinggi

Anggota Majelis Tinggi ditentukan dengan cara ditunjuk, turun-temurun, dan dipilih.

Contohnya : Amerika Serikat dikenal dengan *Senate*

Inggris dikenal dengan *House of Lords*

Fungsi dari Badan Legislatif adalah sebagai berikut.

- a. Membuat undang-undang dan menentukan kebijaksanaan
- b. Mengontrol atau mengawasi badan eksekutif agar setiap tindakannya sesuai dengan UU atau kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Badan Eksekutif

Di negara yang menganut paham demokrasi, badan eksekutif ini terdiri dari seorang raja atau presiden dan menteri-menteri. Tentunya Anda sudah mempelajari sejak duduk di bangku SD bahwa badan eksekutif dengan sistem presidensial terdiri dari seorang presiden dan para menteri. Para menteri ini bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jadi, para menteri dan perdana menteri disebut sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab sedangkan raja merupakan badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat.



KATA SANG TOKOH

Orang bijaksana mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang sesat. Orang yang rendah hati bisa membangun kehidupan yang indah sempurna.

(Plato)

Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Plato>

Tugas dari badan eksekutif ini adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dan menyelenggarakan undang-undang yang dibuat badan legislatif. Namun, saat ini badan eksekutif memiliki peran dan kewenangan yang luas. Salah satu faktornya adalah badan eksekutif sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

3. Badan Yudikatif

Dalam Trias Politica, baik dalam arti pembagian maupun pemisahan kekuasaan, badan legislatif ini harus bebas dari campur tangan kekuasaan dari badan legislatif maupun badan eksekutif. Tujuannya agar badan yudikatif dapat melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak warga negara. Dengan kewenangannya, bukan berarti bahwa hakim sebagai anggota dari badan Yudikatif bertindak dengan caranya sendiri. Kewenangan tersebut untuk menafsirkan hukum serta prinsip fundamental.

Coba Anda perhatikan perbandingan sistem pemerintah di beberapa negara dengan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia berikut ini!

1. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Amerika Serikat

- a. Bentuk Negara

Indonesia	:	Kesatuan dengan otonomi luas memiliki 33 provinsi
Amerika Serikat	:	Federal dengan 51 negara bagian
- b. Bentuk Pemerintahan

Indonesia	:	Republik
Amerika Serikat	:	Republik
- c. Sistem Pemerintahan

Indonesia	:	Presidensial
Amerika Serikat	:	Presidensial
- d. Legislatif

Indonesia	:	Bikameral, yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR
Amerika Serikat	:	Bikameral, yaitu Kongres yang terdiri dari senat dan <i>House of Representatives</i>
- e. Eksekutif

Indonesia	:	Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta para Menteri
Amerika Serikat	:	Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta para Menteri
- f. Yudikatif

Indonesia	:	Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
Amerika Serikat	:	<i>Supreme Court (MA), United States Courts of Appeal, United States District Courts, State and Country Courts.</i>

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan mengenai perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di negara Filipina dengan Mesir!
3. Tulislah hasil diskusi kelompok Anda, lalu presentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapannya dan catatlah! Mintalah Guru Anda bertindak sebagai moderator!
4. Serahkan kepada Guru Anda hasil diskusi tersebut disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!

2. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Inggris

- a. Bentuk Negara
Indonesia : Kesatuan dengan otonomi luas memiliki 33 provinsi
Inggris : Kesatuan
- b. Bentuk Pemerintahan
Indonesia : Republik
Inggris : Monarki Konstitusional
- c. Sistem Pemerintahan
Indonesia : Presidensial
Inggris : Parlementer
- d. Legislatif
Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR
Inggris : Bikameral yaitu Parlemen yang terdiri dari *House of Commons* (Majelis Rendah) dan *House of Lords* (Majelis Tinggi)
- e. Eksekutif
Indonesia : Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta dibantu para Menteri
Inggris : Perdana Menteri dan para Menteri (Kabinet) sebagai Kepala Pemerintahan
Raja/Ratu sebagai Kepala Negara
- f. Yudikatif
Indonesia : Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Inggris : *Supreme of Court of Judicative* (MA)



KATA - KATA SANG TOKOH

Di dalam kehidupan, kita tidak selalu berada dalam kondisi yang baik-baik. Namun, bagi yang pernah mengalami cobaan dan berhasil mengatasinya, akan sangat mudah menghadapi kondisi sesulit apa pun.

(John F. Kennedy)

Sumber: Dinas Penerangan dan Kebudayaan
Amerika Serikat (2003)

3. Perbandingan Sistem Pemerintah di Indonesia dengan di RRC

- a. Bentuk Negara
 - Indonesia : Kesatuan dengan otonomi luas memiliki 33 provinsi
 - RRC : Kesatuan dengan memiliki 23 provinsi
- b. Bentuk Pemerintahan
 - Indonesia : Republik
 - RRC : Republik dengan sistem komunis berasas sentralisme
- c. Sistem Pemerintahan
 - Indonesia : Presidensial
 - RRC : Presidensial
- d. Legislatif
 - Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR
 - RRC : Unikameral yaitu Kongres Rakyat Nasional
- e. Eksekutif
 - Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR
 - RRC : Unikameral yaitu Kongres Rakyat Nasional
- f. Yudikatif
 - Indonesia : Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yaitu Pengadilan Tinggi, Peradilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
 - RRC : *Supreme Peoples Court, Local Peoples' Court, Special People Court.*

4. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Jepang

- a. Bentuk negara
 - Indonesia : Kesatuan
 - Jepang : Kesatuan
- b. Bentuk Pemerintahan
 - Indonesia : Republik
 - Jepang : Monarkhi konstitusional

- c. Sistem Pemerintahan
 - Indonesia : Presidensial
 - Jepang : Parlementer
- d. Legislatif
 - Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR
 - Jepang : Bikameral yaitu diet (parlemen) yang terdiri dari Majelis Rendah (shuugi-in) dan Majelis Tinggi (sangi -in)
- e. Eksekutif
 - Indonesia : Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta dibantu para menteri
 - Jepang : Perdana menteri dan para menteri (kabinet) sebagai kepala pemerintahan dan raja (kaisar) sebagai kepala negara.
- f. Yudikatif
 - Indonesia : Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan Komisis Yudisial
 - Jepang : Mahkamah Agung dan mahkamah - mahkamah rendahan

5. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan di Brazil

- a. Bentuk Negara
 - Indonesia : Kesatuan
 - Brazil : Federal
- b. Bentuk Pemerintahan
 - Indonesia : Republik
 - Brazil : Republik
- c. Sistem Pemerintahan
 - Indonesia : Presidensial
 - Brazil : Presidensial
- d. Legislatif
 - Indonesia : Bikameral yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota dari MPR
 - Brazil : Bikameral yaitu *National Congress (Congresso Nacional)* yang terdiri dari *Federal Senate (Senat Federal)* dan *The Chamber of Deputies or Camaro dos Deputados*.
- e. Eksekutif
 - Indonesia : Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta dibantu para menteri
 - Brazil : Presidensial sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta dibantu para menteri.
- f. Yudikatif
 - Indonesia : Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikatif

Brazil : *Supreme Federal Tribunal, Highjer Tribunal of Justice, dan Region Federal Tribunals.*



Berpikir Kritis

Tugas dikerjakan secara individu.

1. Carilah artikel yang membahas tentang sistem pemerintahan di negara-negara Timur Tengah (kawasan Asia Barat Daya), lalu perbandingkan dengan sistem pemerintahan di Indonesia!
2. Lengkapi data-data Anda dengan mencari dari berbagai sumber, misalnya internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, dan sebagainya!
3. Berilah ulasan singkat mengenai pendapat Anda dalam hal pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem pemerintahan negara di kawasan Asia Barat Daya yang Anda pilih! (minimal 5 halaman kuarto)
4. Ketik dengan rapi hasil kerja Anda, lalu dijilid! Serahkan pada guru Anda untuk diberi penilaian!
5. Sepuluh karya terbaik akan diserahkan ke perpustakaan sekolah.



Rangkuman

1. Sistem pemerintahan adalah mekanisme dan cara kerja sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.
2. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.
3. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin presiden, sedangkan sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin perdana menteri.
4. Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia melalui berbagai tahap sampai pada masa sekarang ini.
5. Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain untuk lebih memberikan wawasan agar pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia berjalan dengan baik demi mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara, sedangkan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
7. Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi dari dua sistem pemerintahan tersebut.
8. Sistem pemerintahan yang biasanya berlaku, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Ciri utama sistem parlementer adalah kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif dan kedudukan kepala negara (raja, ratu, atau kaisar) sebagai simbol yang tidak dapat diganggu gugat.
9. Ciri yang paling menonjol pada sistem pemerintahan presidensial adalah dikepalai seorang presiden dan presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh karenanya, antara presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan.
10. Sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia sebelum diamendemen, tercantum di dalam Penjelasan UUD 1945. Adanya Amendemen terhadap UUD 1945 (tahun 1999-2002) telah banyak membawa perubahan mendasar terhadap ketatanegaraan, sistem politik, hukum, hak asasi, pertahanan keamanan, dan sebagainya.

○ UJI KOMPETENSI ○

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Bentuk pemerintahan pada saat ini ada dua, yaitu
 - a. Oligarki dan Monarki
 - b. Demokrasi dan Republik
 - c. Republik dan Monarki
 - d. Oligarki dan Republik
 - e. Demokrasi dan Monarki
2. Di bawah ini adalah perbuatan yang menyebabkan Presiden diberhentikan menurut pasal 7A UUD 1945, *kecuali*
 - a. melakukan tindak pidana berat
 - b. melakukan pengkhianatan terhadap negara
 - c. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan publik
 - d. tidak memenuhi syarat-syarat sebagai presiden
 - e. melakukan korupsi

3. Mekanisme dan cara kerja sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat disebut
 - a. sistem politik
 - b. sistem pemerintahan
 - c. sistem negara
 - d. sistem kekuasaan
 - e. sistem demokrasi
4. Kemajuan suatu negara yang sangat penting adalah sistem pemerintahan yang didukung oleh
 - a. wilayah yang luas
 - b. pendukung yang besar
 - c. pemerintahan yang stabil
 - d. kepribadian para pemimpin yang jujur, bersih, dan cerdas
 - e. angkatan perang yang canggih
5. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh
 - a. Raja/Ratu
 - b. Kabinet
 - c. Perdana Menteri
 - d. Presiden
 - e. Kaisar
6. Negara Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat menerapkan sistem pemerintahan
 - a. Parlementer
 - b. Presidensial
 - c. Demokrasi
 - d. Kabinet Ministerial
 - e. Kabinet Parlementer
7. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, seorang presiden adalah
 - a. Kepala Negara
 - b. Kepala Pemerintahan
 - c. Kepala Panglima Tertinggi Angkatan Laut, Darat, dan Udara
 - d. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
 - e. Kepala Kabinet
8. Perwakilan negara bagian pada negara Amerika Serikat dipegang oleh
 - a. House of Commons
 - b. House of Lords
 - c. House of Representative
 - d. Senat
 - e. Senat Federal
9. Di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, *kecuali*
 - a. kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
 - b. kepala negara adalah raja/presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri
 - c. parlemen memiliki kekuasaan yang besar
 - d. terdapat hubungan yang erat adalah legislatif dan eksekutif
 - e. menteri-menteri tidak dapat dibubarkan oleh parlemen

10. Setelah Amendemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan setelah
- atas usul DPR ke MPR dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi
 - MPR atas usul DPR dan DPD
 - rakyat mengadakan demonstrasi
 - tidak ada kepercayaan dari lembaga lain
 - tidak dapat melaksanakan tugas negara
11. Negara yang memakai sistem unikameral dalam badan legislatif adalah negara
- RRC
 - Brazil
 - Jepang
 - Inggris
 - Amerika Serikat
12. Sistem pemerintahan yang pelaksanaan tugas para menteri bertanggung jawab kepada parlemen disebut
- Presidensial
 - Republik
 - Monarki
 - Parlemen
 - Oligarki
13. Sistem pemerintahan dengan kekuasaan legislatif lebih kuat dari kekuasaan eksekutif disebut
- Demokrasi
 - Monarki
 - Presidensial
 - Parlementer
 - Republik
14. Menurut UUD 1945, negara Indonesia menganut sistem bikameral dalam lembaga legislatif, sebagaimana tercantum
- Pasal 2 ayat 1
 - Pasal 2 ayat 2
 - Pasal 2 ayat 3
 - Pasal 3 ayat 1
 - Pasal 3 ayat 2
15. Perwakilan negara bagian pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 adalah
- MPR
 - MPRS
 - DPR
 - DPD
 - Senat
16. Pemerintahan dalam arti sempit adalah
- kekuasaan legislatif
 - kekuasaan legislatif dan eksekutif
 - kekuasaan eksekutif
 - kekuasaan legislatif dan yudikatif
 - kekuasaan eksekutif dan yudikatif

17. Perwakilan negara bagian di negara Amerika Serikat dipegang oleh
 - a. House of Commons
 - b. House of Lords
 - c. House of Representative
 - d. Senat
 - e. Senat Federal
18. Badan kehakiman di negara Brazil dipegang oleh
 - a. State and County Courts
 - b. Supreme Federal Tribunal
 - c. United States Courts of Appeal
 - d. Supreme Courts
 - e. United States District Courts
19. Anggota dari badan perwakilan yang ditunjuk oleh raja/ratu di negara Inggris adalah
 - a. House of Representative
 - b. House of Commons
 - c. Congres
 - d. Senate
 - e. House of Lords
20. Parlemen di negara Jepang terdiri atas dua majelis, yaitu
 - a. Senat dan House of Representative
 - b. Shuugi - in dan Sangi in
 - c. House of Commons dan House of Lords
 - d. Shuugi - in The Chamber of Deputies
 - e. Sangi - in dan Diet

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan 4 kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial! Bagaimana upaya menutup kekurangan tersebut?
2. Sebutkan berbagai kebijakan dan ketentuan hukum dalam upaya menata sistem pemerintahan di Indonesia pasca Reformasi!
3. Jelaskan penyelewengan pada penerapan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan pada masa Orde Baru!
4. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara Senate dengan House of Representative dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat!
5. Jelaskan kedudukan dan hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada sistem parlementer!

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 1

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila hendaknya
 - a. disesuaikan dengan ideologi lain
 - b. ditafsirkan ulang
 - c. dikontraskan dengan ideologi lain
 - d. dipadukan dengan ideologi lain
 - e. dibuatkan penafsiran resmi
2. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer sehingga sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara demokrasi di dunia adalah
 - a. Perdana Menteri dipilih rakyat secara langsung
 - b. pemerintah sering berganti-ganti akibat mosi tidak percaya
 - c. kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
 - d. kekuasaan kepala negara bersifat mutlak
 - e. sistem yang dipraktikkan oleh negara-negara maju
3. Ideologi adalah ilmu tentang gagasan ide-ide yang baik dan sesuai dengan akal budi yang sehat. Pernyataan tersebut adalah pendapat
 - a. Nicollas Machiavelli
 - b. Louis Althusser
 - c. Ernest Renan
 - d. Karl Marx
 - e. Antoine Destut de Tracy
4. Sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah
 - a. Demokrasi Rakyat
 - b. Demokrasi Pancasila
 - c. Demokrasi Liberal
 - d. Demokrasi Parlemen
 - e. Demokrasi Terpimpin
5. Salah satu ciri ideologi terbuka adalah
 - a. berlaku untuk semua aspek kehidupan
 - b. keberlakuan isinya mutlak
 - c. merupakan kerangka gagasan yang beku dan mati
 - d. isinya tidak langsung operasional
 - e. nilai-nilainya dipaksakan dari luar

6. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini merupakan
 - a. cita-cita bangsa
 - b. pemersatu bangsa
 - c. ideologi terbuka
 - d. sumber dari hukum
 - e. kepribadian bangsa
7. Makna asas kebangsaan dalam sila Persatuan Indonesia adalah
 - a. Solidarisme
 - b. Nasionalisme
 - c. Heroisme
 - d. Chauvinisme
 - e. Internasionalisme
8. Persahabatan antarbangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersumber pada ajaran Pancasila, terutama sila
 - a. pertama dan kelima
 - b. kedua dan ketiga
 - c. ketiga dan keempat
 - d. keempat dan kelima
 - e. kelima dan kesatu
9. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya
 - a. ideologi yang dikembangkan oleh negara
 - b. ideologi tentang cara bernegara
 - c. hanya untuk lembaga negara
 - d. ideologi milik negara
 - e. ideologi yang disusun oleh negara
10. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan atas
 - a. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan jiwa bangsa
 - b. mekanisme pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945
 - c. kehidupan bangsa dan negara yang mencerminkan Pancasila dan UUD 1945
 - d. pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
 - e. keberanian mengoreksi secara total penyimpangan pemerintah dari Pancasila dan UUD 1945
11. Pancasila adalah merupakan ideologi terbuka, artinya
 - a. membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada
 - b. perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain
 - c. terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain
 - d. menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian
 - e. dapat menerima kemajuan bila menguntungkan

12. Reformasi pada lembaga kepresidenan, antara lain mencakup
 - a. mekanisme hubungan antara lembaga presiden dengan lembaga negara lainnya
 - b. kekuasaan presiden sebagai kepala negara
 - c. larangan perangkapan jabatan oleh presiden
 - d. masa jabatan presiden dengan jelas dan pasti
 - e. peninjauan kembali hak presiden untuk membentuk kabinet
13. Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas
 - a. eksekutif dan yudikatif
 - b. eksekutif, federatif, dan yudikatif
 - c. legislatif dan yudikatif
 - d. eksekutif, legislatif, dan yudikatif
 - e. eksekutif dan legislatif
14. Latar belakang lahirnya pemerintahan Reformasi adalah
 - a. adanya penyimpangan-penyimpangan pemerintah orde baru
 - b. untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur dan demokratis
 - c. para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Orde Baru
 - d. utang luar negeri yang amat besar hingga tidak terbayar
 - e. jatuhnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia
15. Proses pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dilakukan di depan
 - a. pimpinan DPR
 - b. pimpinan MPR
 - c. Anggota MPR
 - d. tokoh-tokoh reformasi
 - e. pimpinan Mahkamah Agung
16. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam setiap kurun waktu. Pengertian ini mengandung arti bahwa Pancasila sebagai
 - a. ideologi agamis
 - b. ideologi nasional
 - c. ideologi tertutup
 - d. ideologi liberalis
 - e. ideologi terbuka
17. Sidang pertama BPUPKI membahas pokok persoalan tentang
 - a. dasar negara
 - b. wilayah negara
 - c. hubungan negara dengan agama
 - d. bentuk negara

- e. rancangan hukum dasar
18. Nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran dari nilai dasar disebut nilai
- a. dasar
 - b. instrumental
 - c. praktis
 - d. operasional
 - e. estetika
19. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara Malaysia adalah
- a. republik – kesatuan
 - b. monarki – konfederasi
 - c. monarki – federasi
 - d. republik – federasi
 - e. monarki – kesatuan
20. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar parlemen atau presiden tidak bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali melanggar konstitusi UUD tergolong berat. Pernyataan tersebut merupakan ciri pemerintahan
- a. dalam arti sempit
 - b. semi presidensial
 - c. presidensial
 - d. parlementer
 - e. semi parlementer
21. Cara yang paling utama bagi penyelenggara negara untuk menyosialisasikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah dengan
- a. keteladanan
 - b. mengajarkan
 - c. menganjurkan
 - d. mengikuti
 - e. memerintahkan
22. Amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Hal ini karena sebelum era Reformasi, kekuasaan presiden
- a. cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lain
 - b. adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah kepada otoriter
 - c. DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
 - d. pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
 - e. MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif
23. Tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah
- a. demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
 - b. konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya
 - c. munculnya banyak partai politik baru
 - d. setiap keputusan rapat melalui musyawarah/mufakat

- e. adanya tekanan pihak tertentu guna mewujudkan tujuannya
24. Pancasila sebagai sumber nilai, artinya
- a. selalu menunjukkan bangsa dan negaranya
 - b. menjadi sumber ukuran baik atau buruk suatu kepribadian
 - c. kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan kepribadiannya
 - d. keberhasilan kemajuan bangsa Indonesia diukur dengan kepribadiannya
 - e. masyarakat Indonesia yang maju adalah yang tinggi inteletiknya
25. Kemampuan sebuah ideologi untuk menunjukkan realita yang hidup di masyarakat dimana ia muncul pertama kali, paling tidak realita pada awal kelahirannya, disebut dimensi
- a. ideologis
 - b. fleksibilitas
 - c. normativitas
 - d. realita
 - e. idealisme
26. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal ini sesuai dengan kerangka pikir Pancasila sebagai
- a. pedoman bangsa Indonesia
 - b. jiwa dan kepribadian bangsa
 - c. dasar negara
 - d. pandangan hidup bangsa
 - e. perjanjian luhur bangsa Indonesia
27. Tujuan dari munculnya suatu sistem pemerintahan demokrasi adalah untuk
- a. membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang
 - b. membatasi kekuasaan raja yang sewenang-wenang
 - c. mengikutsertakan parpol dalam pemerintahan
 - d. mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan
 - e. membatasi kekuasaan negara
28. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh suatu lembaga resmi, yaitu
- a. BPUPKI
 - b. MA
 - c. KNIP
 - d. MPR
 - e. PPKI
29. Keberadaan cita-cita nasional bangsa Indonesia tercantum dalam
- a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
 - b. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
 - c. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
 - d. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama

- e. Pembukaan UUD 45
30. Status kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan adalah sebuah kepulauan yang pernah disengketakan antara negara Indonesia dengan negara
- a. Filipina
 - b. Vietnam
 - c. Belanda
 - d. Malaysia
 - e. Australia
31. Contoh negara dengan bentuk pemerintahan Republik Parlementer adalah
- a. Belanda
 - b. Inggris
 - c. Prancis
 - d. Amerika
 - e. Belgia
32. Berikut ini prinsip Dasar Negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno, *kecuali*
- a. Nasionalisme
 - b. kesejahteraan sosial
 - c. demokrasi
 - d. kekeluargaan
 - e. Internasionalisme
33. Dalam Konstitusi RIS 1949, bentuk negara Indonesia adalah
- a. kesatuan dengan sistem desentralisasi
 - b. kesatuan dengan sistem parlementer
 - c. federasi dengan sistem desentralisasi
 - d. kesatuan dengan sistem sentralisasi
 - e. federasi dengan sistem sentralisasi
34. Ideologi adalah kesadaran palsu. Pengertian tersebut adalah menurut
- a. Niccolò Machiavelli
 - b. Ernest Renan
 - c. Louis Althusser
 - d. Antoine Destut de Tracy
 - e. Karl Marx
35. Pada dasarnya, ideology merupakan suatu pengetahuan tentang cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan, serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya. Pernyataan tersebut menurut
- a. Karl Marx
 - b. Niccolò Machiavelli
 - c. Antoine Destut de Tracy

- d. Louis Althusser
 - e. Ernest Renan
36. Nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret dan bersifat dinamis, disebut nilai
- a. dasar
 - b. instrumental
 - c. praktis
 - d. operasional
 - e. estetika
37. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan sistem pemerintahan Presidensial adalah
- a. sistem *check dan balance* dapat menghasilkan keseimbangan antara organisasi yang diberi tugas
 - b. kedudukan badan eksekutif lebih stabil
 - c. penyusunan program mudah disesuaikan dengan masa jabatan eksekutif
 - d. dapat mencegah terjadinya kekuasaan absolut
 - e. menteri lebih berhati-hati menjalankan tugasnya karena dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh parlemen
38. Sebagai ideologi tertutup, Pancasila mempunyai ciri
- a. menghargai pluralitas di masyarakat
 - b. isinya tidak langsung operasional
 - c. merupakan kekayaan rohani masyarakat
 - d. nilainya tidak diciptakan oleh negara
 - e. masyarakatnya dituntut memiliki kesetiaan secara totalitas
39. Pancasila menjadi paradigma pembangunan, maksudnya
- a. sebagai ukuran keberhasilan pembangunan dengan adanya penyerapan teknologi
 - b. pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai, yaitu Pancasila
 - c. bangsa Indonesia maju dan mampu bersaing dengan bangsa lain
 - d. menciptakan kondisi bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadiannya
 - e. pembangunan harus mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi
40. Pada ideology terbuka, salah satunya mengandung esensi dimensi realita, karena
- a. nilai-nilai yang ada bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya
 - b. sejumlah ide dan gagasan yang ada bersumber dari masyarakat sekitar
 - c. semua nilai yang diyakini kebenarannya bersumber dari sosiokultural masyarakatnya

- d. tumbuhnya nilai-nilai yang berhubungan dengan masyarakat sekitar
- e. proses kristalisasi nilai-nilai bersumber dari sosial budaya setempat

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan bentuk-bentuk keunggulan dan kelemahan sistem pemerintahan semi presidensial dengan menggabungkan sistem presidensial dengan parlementer!
2. Bagaimana UUD 1945 mengatur sistem pemerintahan presidensial di negara Republik Indonesia ini? Jelaskan dengan singkat!
3. Jelaskan hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 menurut pendapat Anda!
4. Mengapa sistem pemerintahan di negara-negara berkembang pada umumnya menerapkan sistem pembagian kekuasaan?
5. Jelaskan secara singkat hubungan kerja dan fungsi antara MPR, DPR, dan DPD!
6. Sebutkan tiga macam kelemahan bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi!
7. Bagaimanakah posisi (kedudukan) keanggotaan MPR menurut UUD 1945 sebelum diamandemen? Jelaskan!
8. Apakah sebenarnya tujuan asas pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan negara?
9. Jelaskan beberapa perubahan pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia dalam menjalankan UUD 1945 pada masa Reformasi!
10. Jelaskan perbedaan penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dengan di Amerika Serikat!

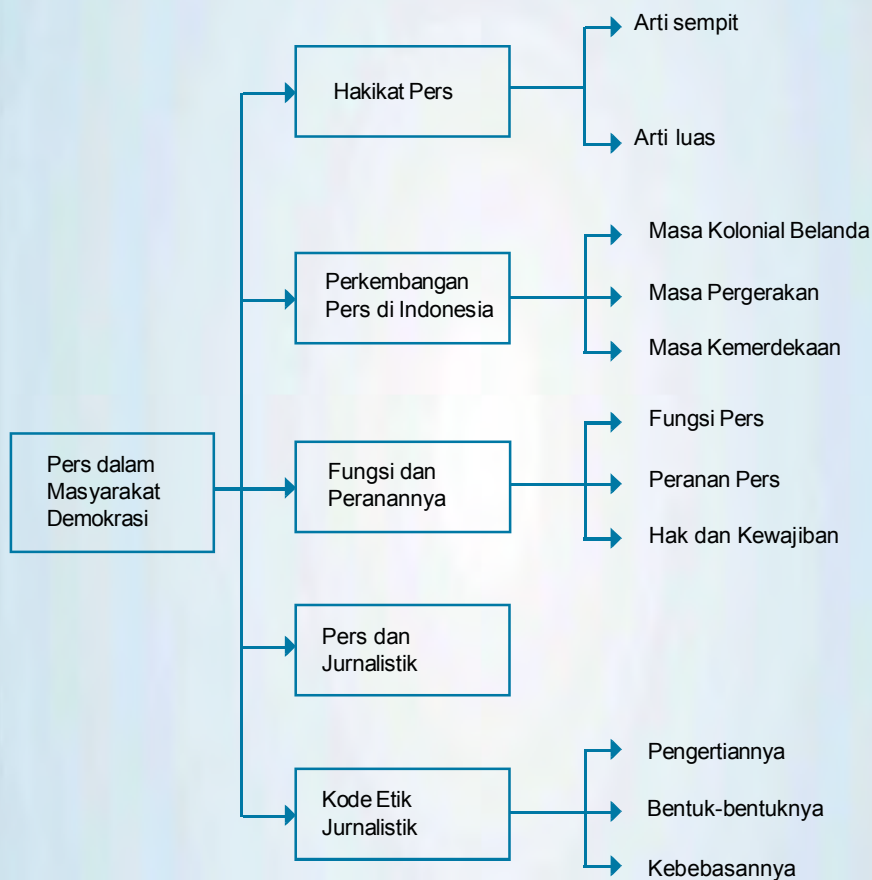
BAB

3

Peranan Pers dalam Masyarakat Demokrasi



PETAKONSEP



Saat ini Anda memasuki semester 2, tentu harus lebih rajin dan giat untuk mempersiapkan ujian pada akhir tahun nanti. Pada bab ketiga ini Anda diajak mempelajari tentang berbagai peranan pers dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Apakah Anda telah memahami pengertian pers dan yang dimaksud dengan kebebasan pers? Coba Anda pahami uraian singkat sebagai pendahuluan sebelum Anda memasuki materi selanjutnya.

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, keberadaan pers mempunyai peran yang amat penting. Salah satu ciri suatu negara demokrasi adalah memiliki kebebasan pers. Masyarakat mampu menggunakan haknya untuk memperoleh informasi, berbicara, dan mengemukakan pendapat sebagai perwujudan keikutsertaan setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui pers. Pers bertindak selaku saluran informasi, opini publik, sarana investigasi, saluran kebijakan publik, dan suatu wahana guna lebih mencerdaskan warga negara.

Pers yang bebas di dalam suatu negara demokrasi merupakan pers yang bersifat mendidik dan bertanggung jawab atas kebenaran di dalam hal pemberitaan.



KATA SANG TOKOH

Untuk menulis dengan baik, ekspresikan dirimu seperti orang kebanyakan, tapi berpikir bak orang bijaksana.

(Aristoteles)

Sumber: www.goodreads.com

A.

Pengertian Pers

Berdasarkan sejarah bahasanya, pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu *press*, sedangkan menurut bahasa Perancis, yaitu *presse* yang berarti tekan atau cetak. Menurut Undang-Undang Pers, istilah pers dibedakan dengan istilah jurnalistik, hubungan kemasyarakatan (humas), atau reporter. Jadi, pers merupakan usaha percetakan atau penerbitan, yang mencakup surat kabar, majalah, buku, atau pamflet-pamflet. Pers juga diartikan sebagai usaha pengumpulan dan penyiaran suatu berita lewat surat kabar, majalah, radio, atau televisi.

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa pengertian pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi. Kegiatan jurnalistik ini dapat dilakukan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan memakai media cetak, media elektronika, maupun jenis media lain yang tersedia.

Berdasarkan aspek kegiatannya, pers bersifat lebih luas dari jurnalistik, humas, atau reporter. Namun, masyarakat memahami pers sebagai salah satu media massa, yaitu usaha percetakan atau penerbitan atau bentuk usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Jadi, secara umum pengertian pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas.

1. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin kantor berita. Oleh karenanya, pers hanya terbatas pada media yang tercetak.
2. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan internet.

B. Perkembangan Pers di Indonesia

Setelah memahami pengertian pers sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas, selanjutnya Anda diajak memahami perkembangan pers yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, coba simak uraian tentang sejarah singkat pers di Indonesia berikut ini.

1. Pers pada Masa Kolonialisme Belanda (Pers Kolonial)

Pada masa kolonial, pers diterbitkan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan Belanda (sekitar tahun 1942). Saat itu, pers berwujud surat kabar, majalah, dan koran yang menggunakan bahasa Belanda atau bahasa daerah yang ada di Indonesia. Fungsinya untuk membela kepentingan penjajah Belanda dan membantu usaha-usaha propaganda pemerintah penjajah Belanda. Namun, saat itu pers juga melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda.

Perkembangan kehidupan pers pada zaman penjajahan Belanda adalah sebagai berikut.

a. Pada Tahun 1624

Latar belakang munculnya pers Indonesia berawal dari pers pada masa kolonialisme Belanda. *Verenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie* (VOC) menyadari bahwa peran pers sangat berguna untuk mencetak aturan-aturan hukum atau perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintahannya. Oleh karena itu, pada tahun 1624 VOC mulai mendatangkan alat percetakan dari Belanda. Ironisnya, saat itu tidak ada tenaga percetakan yang mampu mengoperasikan dan merawat mesin-mesin percetakan tersebut. Akhirnya, VOC mulai melakukan kontrak kerja dengan Percetakan Hendrik Brant. Hasil cetakan percetakan Hendrik Brant, antara lain, sebagai berikut.

- 1) *Tijtboek*, yaitu sejenis almanak atau buku waktu.
- 2) *Perjanjian Bongaya*, yaitu perjanjian damai yang ditandatangani oleh Laksamana Cornells Speelman (VOC) dan Sultan Hasanuddin di Makassar.
- 3) Literatur-literatur penginjilan.
- 4) Kitab-kitab keagamaan dan traktat-traktat lain.



Sumber : <http://www.nationaalarchief.nl>

Gambar 3.2 Surat Kabar *Bataviasche Koloniale Courant* (1810).

e. Pada Tahun 1770

Pada tahun 1770, lahirlah surat kabar kedua, yang bernama *Vendu Nieuws*. Surat kabar ini pun dihentikan pada tahun 1809, tepatnya pada masa pemerintahan Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) karena dianggap merugi.

f. Pada Tahun 1810

Pada tanggal 5 Agustus 1810, lahirlah surat kabar *De Bataviasche Koloniale Courant*. Seperti koran-koran Belanda sebelumnya, *Bataviasche Koloniale Courant* juga didominasi kolom-kolom iklan untuk berbagai jenis barang. Surat kabar ini tutup setelah kota Batavia jatuh ke tangan Kerajaan Inggris pada tanggal 2 Agustus 1811.

g. Pada Tahun 1812

Pada tanggal 29 Februari 1812, terbitlah *The Java Government Gazette* (*Java Gazette*) atas perintah Gubernur Jendral Raffles dan berhenti pada tahun 1816 saat penjajah Belanda berkuasa kembali di Hindia Belanda.

h. Pada Tahun 1816

Koran *Java Government Gazette* resmi diubah namanya menjadi *Bataviasche Courant* pada tanggal 20 Agustus 1816.

i. Pada Tahun 1828

Koran *Bataviasche Courant* diubah menjadi *Javasche Courant*.

j. Pada Tahun 1831

Pada tahun 1831, terbitlah surat kabar swasta pertama. Keterlambatan surat kabar swasta ini dibandingkan dengan milik pemerintah Hindia Belanda disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

- Tidak ada tenaga terampil di bidang percetakan.
- Sulitnya mendapatkan alat untuk membuat huruf timah.
- Sedikitnya anak-anak pribumi yang berpendidikan.

Sekolah Belanda baru dapat dimasuki oleh anak-anak pribumi setelah tahun 1816.

k. Pada Tahun 1836

Pada bulan Maret 1836, lahirlah surat kabar pribumi yang pertama di Indonesia. Surat kabar tersebut terbit di Surabaya dengan nama *Soerabaijas Advertentie-Blad*.

l. Pada Tahun 1853

Pada tahun 1853, surat kabar tersebut berganti nama menjadi *Soerabaijas Nieuws & Advertentie Blad*. Surat kabar tersebut boleh memuat warta berita, namun diawasi secara ketat oleh pemerintah penjajah Belanda. Jadi, kota cikal bakal terbitnya surat kabar Indonesia (pribumi) adalah Soerabaija (Surabaya), bukan Batavia (Jakarta). Namun, beberapa surat kabar tersebut tidak boleh dibaca oleh kaum pribumi karena tidak diperuntukkan bagi anak negeri (pribumi).

m. Pada Tahun 1854

Pada tahun 1854, mulailah terdapat sedikit kelonggaran kebijakan pemerintah Belanda terhadap penerbitan surat kabar pribumi. Akhirnya, terbitlah harian berita mingguan yang bernama *Bromartani*, yang terbit di Surakarta (Solo) setiap hari Kamis. Nama *Bromartani* mengandung nama ke-Indonesia-an sekaligus ke-Jawa-an. Tenaga dan para pemikirnya adalah orang-orang Indonesia (pribumi). Namun, modalnya berasal dari modal asing, yaitu dari usaha kongsi Belanda yang bernama *Harteveldt & Co*. Oleh sebab itu, sejarawan, *Bromartani* sulit dimasukkan dalam penggolongan pers Indonesia. Bagaimanapun juga, *Bromartani* yang berbahasa Jawa dan Melayu, dengan mempekerjakan tenaga teknis berasal dari orang-orang Indonesia (pribumi), sudah bisa disebut sebagai Surat Kabar Pelopor dalam perkembangan pers nasional Indonesia.

n. Pada Tahun 1956

Sebelum tahun 1856, tidak kurang dari 16 surat kabar, baik yang diterbitkan pemerintah maupun swasta muncul di Hindia Belanda. Sepuluh surat kabar dimiliki swasta, lima penerbitan berkala, dan beberapa surat kabar ditangani oleh para misionaris Belanda seperti *Bianglala* pada tahun 1884 di Batavia (Jakarta).

2. Pers pada Masa Pergerakan

a. Sebelum Masa Budi Utomo

Pada masa pergerakan ini, pemerintahan kolonial Belanda bertindak sangat keras terhadap pers sehingga mematikan dunia pers. Banyak surat kabar yang muncul, tetapi dalam perjalanan selanjutnya *dibredel* karena dianggap membahayakan kondisi pemerintahan kolonial. Dengan adanya pengawasan dan pemberlakuan sensor yang ketat, justru makin membangkitkan semangat perjuangan kaum jurnalis pribumi untuk turut menggerakkan roda pers sebagai alat perjuangan.

Menjelang awal tahun 1870-an, pers dalam bahasa Indonesia/Melayu dan Jawa telah meneguhkan pijakannya di kota-kota penting di Jawa dan luar Jawa. Perkembangannya lebih bersifat komersial dan berorientasi misi. Segmen pasarnya dengan cepat berkembang di kota-kota pesisir, terutama pada kawasan permukiman para pembaca multirasial dan di lingkungan kaum urban kosmopolitan. Bahasa Melayu rendah berkembang dan menjadi medium pers, meskipun bahasa Jawa tetap berfungsi sebagai bahasa untuk sejumlah surat kabar yang terbit di Yogyakarta dan Surakarta.

Surat kabar *Bromartani* merupakan surat kabar berbahasa Jawa pertama yang terbit di Surakarta dengan peluncuran pertama tanggal 25 Januari tahun 1855. Selain itu, surat kabar berbahasa Melayu di Surabaya terbit tahun 1856 dan di Batavia Jakarta tahun 1858. Peran para editor *Indo* saat itu sangat penting dalam mengelola surat kabar dan menggunakannya sebagai agen perubahan sosial.

Surat kabar *Medan Prijaji*, sebuah mingguan berita yang terbit di Bandung pada tahun 1907 tercatat sebagai surat kabar nasional pertama yang menyandang predikat Surat Kabar Pribumi. Pemilik surat kabar ini bernama **Raden Mas Tirtohadisoerjo**.



Sumber : <http://angscript.files.wordpress.com>
<http://desaingrafitisindonesia.files.wordpress.com>

Gambar 3.3 Surat kabar *Medan Prijaji* dan Raden Mas Tirtohadisoerjo, pemilik sekaligus pendirinya.

b. Pada Masa Pergerakan Budi Utomo (1908)

Setelah munculnya pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan orang-orang Pribumi lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pada waktu itu, pers berfungsi sebagai corong/terompet dari organisasi-organisasi pergerakan kaum pribumi. Saat itu surat kabar nasional menjadi semacam “parlemen” bagi orang Indonesia yang terjajah. Pers selalu menyuarakan kepedihan, penderitaan, serta pencerminan isi hati suatu bangsa yang terjajah. Pers juga menjadi roket pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

Sejak terbitnya beberapa surat kabar pribumi di bumi Nusantara, muncul pula beberapa wadah persatuan wartawan. Misalnya, wartawan *Indische Jaornalisten Bond* (1919) dan *Perkumpulan Kaoem Journalist* (1931), yang muncul lima bulan setelah kantor berita Antara berdiri.



SEKILAS INFO

Pers Tempo Doeloe

Sendjata Indonesia

Sendjata Indonesia adalah surat kabar mingguan dengan ciri khas banyak memuat berita-berita kriminal. Surat kabar ini beredar di Surabaya pada tahun 1929, dan diterbitkan oleh Komite Sendjata Indonesia. Surat kabar berukuran broadsheet empat halaman tersebut disajikan dalam bahasa Indonesia.

Dalam setiap penerbitannya, surat kabar dengan slogan “Mengejar ke arah kemerdekaan Indonesia bersandar pada keadilan, kebenaran, dan persamaan” itu, banyak mengangkat berita kriminal, perkelahian, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam artikel-artikelnya surat kabar Sendjata Indonesia juga memuat tulisan untuk mengobarkan semangat perjuangan yang sejalan dengan slogannya.

Sumber : (Tim EPI/TS; Sumber: Perpustakaan)

Beberapa surat kabar Pribumi yang ada dan tetap eksis pada saat itu, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Harian *Sedio Tomo* sebagai kelanjutan harian *Budi Utomo* yang terbit di Yogyakarta didirikan bulan Juni 1920.
- 2) Harian *Darmo Kondo* terbit di Solo dipimpin oleh Sudaryo Cokrosisworo.
- 3) Harian *Utusan Hindia* terbit di Surabaya dipimpin oleh H.O.S, Cokroaminoto.
- 4) Harian *Fadjar Asia* terbit di Jakarta dipimpin oleh Haji Agus Salim.
- 5) Majalah mingguan *Pikiran Rakyat* terbit di Bandung didirikan oleh Ir. Soekarno.
- 6) Majalah berkala *Daulah Rakyat* dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

Lama-kelamaan sifat dan isi pers pergerakan semakin jelas, yaitu antipenjajahan. Akhirnya, pers memperoleh tekanan-tekanan dan intimidasi dari pemerintah penjajah Belanda. Salah satu bentuk penekanan pemerintah penjajah Belanda saat itu adalah memberikan hak kepada pemerintah untuk memberangus dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan jika dipandang membahayakan keberadaan pemerintahan penjajah Belanda. Di masa pergerakan itulah berdirilah Kantor Berita Nasional *Antara* pada tanggal 13 Desember 1937.

Surat kabar *Soeara Kaoem Boeroeh* yang terbit di Purworejo pada tahun 1921 dan *Rakyat Bergerak* yang terbit di Yogyakarta pada tahun 1923 adalah surat kabar pribumi yang dibredel oleh pemerintah penjajah Belanda. Alasannya, kedua surat kabar tersebut isi beritanya memprovokasi rakyat untuk melawan (memberontak) pemerintah Belanda. Peraturan tentang sensor terhadap pers oleh pemerintah Belanda, dimulai sejak berlakunya *Persfreidel Ordonantie* pada tahun 1931 dan *Haatzaai Antikelen* terhadap pers yang antikolonial.

c. Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan penjajah Jepang, semua jenis pers baik radio, majalah, surat kabar maupun kantor berita, dikuasai oleh Jepang. Beberapa surat kabar pribumi memang diperbolehkan. Namun, harus di bawah kontrol pengawasan yang sangat ketat oleh Jepang melalui Undang-Undang Penguasa (*Osamu-Sairi*) No. 16 tentang Pengawasan Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan serta Pemilikan Pengumuman dan Penerangan. Jepang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Guna meraih simpati rakyat Indo-nesia, Jepang melakukan propaganda tentang *Asia Timur Raya*. Namun sebetulnya, propaganda itu hanyalah demi kejayaan Jepang belaka. Sebagai konsekuensinya, seluruh sumber daya alam dan sumberdaya manusia di Indonesia diarahkan untuk kepentingan dan kemenangan perang Jepang.



Sumber : <http://www.Google.com/>

Gambar 3. 4 Hong Po, Koran etnis Tiong Hoa yang menyuarakan “Perlawanan” pada masa penjajahan Jepang, namun akhirnya Koran ini juga di bredel oleh pemerintah penjajah Jepang.

Pers masa penjajahan Jepang, negara Indonesia mengalami kemunduran yang sangat besar. Pers nasional yang pernah hidup pada zaman pergerakan secara sendiri-sendiri dipaksa bergabung untuk tujuan yang sama, yaitu mendukung kepentingan dan kemenangan Jepang.

Pers di masa pendudukan Jepang, surat kabar semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan bersifat pro-Jepang. Beberapa harian yang muncul pada masa itu adalah sebagai berikut.

- a) Harian *Asia Raya* di Jakarta;
- b) Harian *Sinar Baru* di Semarang;
- c) Harian *Suara Asia* di Surabaya;
- d) Harian *Tjahaya* di Bandung.

Pers nasional masa pendudukan Jepang memang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang melebihi penderitaan dan pengekangan kebebasan zaman Belanda. Namun dibalik itu, ada beberapa manfaat yang didapat para wartawan atau insan pers Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang, yaitu sebagai berikut.

- a) Pengalaman yang diperoleh para karyawan pers Indonesia bertambah dan fasilitas serta alat-alat yang digunakan lebih banyak daripada masa pers zaman Belanda. Para karyawan pers mendapat pengalaman banyak dalam menggunakan berbagai fasilitas tersebut.
- b) Pemakaian bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin luas. Penjajah Jepang berusaha menghapuskan bahasa Belanda dengan kebijakan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan seluas-luasnya. Kondisi ini sangat membantu perkembangan bahasa Indonesia saat itu, yang akhirnya menjadi bahasa nasional.
- b) Pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang. Selain itu, kekejaman dan penderitaan yang dialami pada masa pendudukan Jepang memudahkan para pemimpin bangsa memberikan semangat untuk melawan penjajahan.



SEKILAS INFO

Pers Tempo Doeloe

Sejarah Pers Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, turut mewarnai wajah pers Indonesia. Tugas wartawan Indonesia waktu itu adalah ikut berjuang mempertahankan proklamasi. Wartawan-wartawan pergerakan pun tetap bekerja sama melancarkan pemberitaan dan penerangan mendukung proklamasi.

Surat kabar pertama setelah kemerdekaan terbit di Jakarta adalah Berita Indonesia (6 September 1945), dengan susunan penyelenggara Suraedi Tahsin, Sidi Mohammad Sjaaf, Rusdi Amran, Suardi Tasri, f dan Anas Ma'ruf. Surat kabar berikutnya yang terbit adalah surat kabar Merdeka yang terbit pada tanggal 1 Oktober 1945 dipimpin oleh BM Diah dan Koran Rakyat yang dipimpin oleh Syamsuddin Sutan Makmur dan Rinto Alwi.

Di Aceh, Ali Hasjmy, Abdullah Atif, dan Amelz menerbitkan Semangat Merdeka (18 Oktober 1945). Di Medan surat kabar Pewarta Deli kembali terbit. Di Medan terbit koran Kita Sumatra Simbun pimpinan Adinegoro, di Padang terbit Padang Nippo, di Palembang terbit Palembang Shimbun, di Kota Tanjung Karang terbit Lampung Shimbun, di Ambon terbit Sinar Matahari. Di Medan terbit Mimbar Oemoem dengan redaktornya Abdul Wahab Siregar, Mohammad Saleh Umar dan M Yunan Nasution (November 1945). Di Medan terbit pula Sinar Deli, Buru, dan Islam Berjuang. Di Padang terbit Pedoman Kita dipimpin Jusuf Djawab dan Decha, serta Kedaulatan Rakyat dipimpin Adinegoro dibantu Anwar Luthan, T. Syahril, Zuwir Djamal, Zubir Salam, Syamsuddin Lubis, Darwis Abbas, Maisir Thaib, dan sebagainya. Di Palembang terbit Soematera Baroe dipimpin Nungcik Ar. Di Bandung terbit surat kabar Tjahaya (kemudian berganti nama Soeara Merdeka) dengan susunan redaksi antara lain Burhanuddin Ananda, Muhammad Kurdi, Rohdi Partaatmadja, Djamal Ali, Ace Bastaman, Hiswara Dharmaputra, dan Darmosoegito. Di Jogjakarta terbit Kedaulatan Rakyat. Di Surabaya terbit Soera Asia dengan redaksinya R. Toekoel Surohadinoto dan RM Azis.

Surat kabar Soeara Asia dan Tjahaya adalah koran yang menyiarkan berita proklamasi pada edisi 18 Agustus 1945. Atas prakarsa Abdul Azis dan Sulaeman Hadi, di Makassar terbit surat kabar Soeara Indonesia pimpinan Manai Sophiaan, di Manado terbit Menara (Desember 1945) pimpinan GE Daulay. Di Ternate, Arnold Monohutu menerbitkan mingguan Menara Merdeka (Oktober 1945) dibantu Hasan Bissri. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga menerbitkan koran seperti Soeloeh Merdeka di Medan (Oktober 1945).

Sumber : Perpunas

3 Pers pada Masa Kemerdekaan

a. Pada Masa Revolusi Fisik

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, pers Indonesia berperan sebagai corong pemerintah Republik, yaitu pers yang mendukung perjuangan dan melawan strategi pecah-belah Belanda. Jurnalisme politik berkembang lagi, begitu pula organisasi wartawan. Kesatuan Wartawan Indonesia (PWI) lahir pada tanggal 9 Februari 1946. Selanjutnya, disusul dengan munculnya serikat perusahaan surat kabar (sekarang penerbit) pada tanggal 8 Juni 1946.

Pada saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan berikut ini.

- 1) Pers yang dimunculkan dan dibiayai oleh tentara pendudukan Sekutu dan Belanda yang selanjutnya dinamakan pers Nica (Belanda).
- 2) Pers yang dimunculkan dan dibiayai oleh orang-orang Indonesia yang disebut pers republik.

Kedua kelompok pers tersebut sangat bertolak belakang. Pers Republik disuarakan oleh kaum pejuang kemerdekaan yang memuat berita-berita atau tulisan-tulisan semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan Belanda-Sekutu. Pers Republik ini nyata-nyata berfungsi sebagai alat perjuangan. Sebaliknya, pers Nica berusaha memengaruhi dan melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia supaya dapat menerima kembali kehadiran Belanda untuk berkuasa (menjajah) kembali di Indonesia.

Beberapa contoh koran republik yang muncul pada masa itu antara lain harian *Merdeka*, *Sumber*, *Pemandangan*, *Kedaulatan Rakyat*, *Nasional* dan *Pedoman*. Jawatan penerangan Belanda menerbitkan pers Nica, antara lain *Warta Indonesia* di Jakarta, *Persatuan* di Bandung, *Suluh Rakyat* di Semarang, *Pelita Rakyat* di Surabaya, dan *Mustika* di Medan. Pada masa revolusi fisik inilah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan serikat pengusaha surat kabar (SPS) lahir. Kedua organisasi ini mempunyai kedudukan penting dalam sejarah pers Indonesia.

b. Pers pada Masa Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada waktu itu, Indonesia menganut sistem parlementer yang berpaham liberal. Pers nasional saat itu menyesuaikan diri dengan alam liberal yang sangat menikmati adanya kebebasan pers. Pada umumnya, pers nasional mewakili aliran politik (ideologi) yang saling berbeda. Fungsi pers dalam masa pergerakan dan revolusi sebagai alat perjuangan rakyat dan bangsa dalam mencapai kemerdekaan telah berubah menjadi pers sebagai perjuangan kelompok-kelompok partai atau aliran politik (ideologi). Artinya, tiap surat kabar memosisikan diri berafiliasi dengan partai politik tertentu.



Sumber: <http://2.bp.blogspot.com>

Gambar 3.6 Koran *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, koran propaganda Partai Nasional Indonesia (PNI)

Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) sejak tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia memasuki era demokrasi liberal yang diwarnai dengan kebebasan pers. Saat itu, kebebasan pers benar-benar berperan dalam pembentukan pranata sosial. Akan tetapi, pers tersebut lemah dalam permodalan.

Kebebasan pers disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu yang tidak bertanggung jawab, seperti kepentingan-kepentingan politik praktis. Misalnya PSI memiliki surat kabar *Pedoman*, NU memiliki surat kabar *Duta Masyarakat*, PKI memiliki surat kabar *Harian Rakyat*, PNI memiliki surat kabar *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, dan Masyumi memiliki surat kabar *Abadi*. Bahkan, pada tahun 1957 jumlah surat kabar mencapai jumlah 120 buah.

Kehidupan pers liberal yang berkembang pada masa itu tidak seperti kehidupan pers yang ada di negara-negara liberal. Pers di negara liberal merupakan akumulasi modal dari perusahaan pers sehingga pers nasional tidak berkembang. Hal ini karena bangsa Indonesia bekas penjajahan Jepang dan Belanda, yang tidak memiliki golongan menengah yang cukup.

Masa partai politik merupakan konsumen tertinggi pada waktu itu. Koran umum yang terbit, antara lain Merdeka dan Indonesia Raya. Sementara itu terjadi 300 lebih kasus pemberangusan pers oleh pemerintah tahun 1957. Misalnya, penahanan terhadap wartawan, interogasi, peringatan, dan penyitaan percetakan yang mengacu kepada undang-undang ciptaan Belanda. Puncaknya, Kodam V Jakarta Raya memberlakukan ketentuan *surat ijin terbit* (SIT) tanggal 1 Oktober 1957 yang mengawali era kematian pers Indonesia.

c. Pers pada Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin adalah masa kepemimpinan Presiden Sukarno (1959-1965). Masa ini berawal dari keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk mengakhiri masa demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sejak itu mulailah masa demokrasi terpimpin dengan mendasarkan kembali pada UUD 1945.

Sejalan dengan demokrasi terpimpin, pers nasional menganut konsep otoriter. Pada saat itu, pers nasional merupakan terompet penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi presiden serta mengindoktrinasikan kebijakan pemerintah (*manipol-USDEK*). Pers bertugas menggerakkan aksi-aksi massa yang revolusioner dengan jalan memberikan penerangan serta membangkitkan jiwa dan kehendak massa agar mendukung pelaksanaan manipol dan ketetapan pemerintah lainnya.

Pada masa demokrasi terpimpin, pers sebagai alat revolusi melalui Ketetapan MPRS Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penerangan Massa. Melalui Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10/1960, SIT diberlakukan secara terbatas dan ketat. Penerbit yang telah ada diwajibkan mengajukan permohonan SIT lagi. Beberapa ketentuan yang diberlakukan, di antaranya, sebagai berikut.

- a) Pers berbahasa Cina dilarang.
- b) Diarahkan kepada pemulihan berlakunya UUD 1945.

- c) Pers digiring menjadi alat perjuangan politik ideologi.
- d) Pers diharuskan menjadi alat atau kepanjangan pemerintah dalam mengawal perjuangan revolusi yang belum selesai.
- e) Mengeluarkan peraturan untuk lebih menegatkan pengawasan terhadap pers dengan kewajiban seluruh penerbitan pers agar mengajukan permohonan Surat Izin Terbit (SIT) dengan mencantumkan 19 pernyataan mendukung Manipol-Usdek.

Akibat peraturan tersebut, banyak institusi yang memilih tutup, seperti harian *Abadi* yang antikomunis, *Pedoman Nusantara*, *Keng-Po*, atau *Pos Indonesia*. Jumlah surat kabar hanya sekitar 60 buah. Redaktur *Indonesia Raya* tahun 1956-1961, kantor berita Antara, organisasi PWI, dan SPS (Serikat Perusahaan Surat kabar) dikuasai komunis. Pers yang semula bebas/liberalis berubah menjadi alat propaganda politik. Aktivis pers seperti B.M. Diah, Adam Malik, Wonohito mencetuskan manifesto kebudayaan dan badan pendukung Soekarnoisme yang anti-PKI dengan mendirikan majalah *Merdeka*, namun kemudian ditutup (dibredel).



Sumber : [http://3.bp.blogspot.com](http://3.bp.blogspot.com/http://koleksibarangjadoel.blogspot.com)
<http://koleksibarangjadoel.blogspot.com>

Gambar 3.7 Dua surat kabar yang menyuarakan “Anti-Komunis”, majalah *Merdeka* pimpinan B.M Diah dan majalah *Adil* milik Muhammadiyah, berakhir dengan pembredelan oleh pemerintah.

d. Pers pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Suharto (1966-1998). Pemerintahan Orde Baru berawal dari keberhasilannya menggagalkan G-30-S/PKI yang bertujuan membentuk negara Indonesia yang komunis. Sejak saat itu, Orde Baru bertekad kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Orde Baru disebut juga sebagai Orde Pembangunan.

Pada masa awal Orde Baru (tahun 1964), pers sempat menikmati kebebasannya. Saat itu sempat muncul beberapa surat kabar harian yang diterbitkan para mahasiswa, antara lain surat kabar harian *KAMI*, *API*, atau *Trisakti*. Dengan keluarnya UU No. 11/1966, telah meletakkan kembali sendi-sendi kelembagaan pers nasional sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 32 tanggal 12 Desember 1966, pers mendapatkan angin segar dari pemerintah, di antaranya, sebagai berikut.

- Pasal 4 : Pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.
- Pasal 5 : Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dan dijamin.
- Pasal 8 (2) : Pendirian surat kabar tidak perlu SIT dari pemerintah, hanya saja kebebasan pers berlaku hingga 15 Januari 1975.

Pers selalu merefleksikan situasi dan kondisi masyarakatnya. Pers nasional di masa Orde Baru tumbuh dan berkembang menjadi salah satu unsur penggerak pembangunan. Pemerintah Orde Baru sangat mengharapkan pers nasional sebagai mitra dalam rangka menggalakkan pembangunan sebagai jalan memperbaiki taraf hidup rakyat.

Setelah masa-masa awal orde baru terlewati, kemudian terjadi berbagai tekanan-tekanan terhadap Pers. Bahkan, harian *Abadi*, *Indonesia Raya*, *Pedoman*, *Pemuda* Indonesia dibredel oleh pemerintah Orde Baru untuk dilarang terbit selamanya. Pers mahasiswa juga tak luput dibredel setelah penerapan NKK/BKK (Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kampus). Kebijakan Orde Baru membungkam Pers nasional pada dasarnya dipicu oleh peristiwa Malari (Malapetaka 1 Januari) I & II di Jakarta (tahun 1974/1976), dan tak luput juga di wilayah kampus lainnya, seperti Gelora Mahasiswa UGM, almamater IPB, Media IT, Kampus ITB, dan Salemba UI.

Saat itu, pers menjadi media vital dalam mengomunikasikan pembangunan. Oleh karenanya, pers yang mengkritik pembangunan akan mendapat tekanan dan intimidasi. Pada awalnya, Orde Baru bersikap terbuka dan mendukung pers. Namun, dalam perjalanan berikutnya mulai menekan kebebasan pers. Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau terlalu berani mengkritik pemerintah dibredel atau dicabut Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP).

Perumusan konsep pers Pancasila mulai dilakukan tanggal 7-8 Desember 1984 di Solo. Selanjutnya, muncul istilah “pers bebas yang bertanggung jawab”. Namun demikian, pers tetap sering dibredel dengan alasan meresahkan masyarakat dan menyinggung *sara* (suku, agama, ras, dan antargolongan), seperti *Prioritas* (1987), *Monitor* (1990), *Tempo*, *Editor*, *De-Tik* (1994), dan *Simponi* (1994).

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) dimasukkan dalam keluarga besar pers Indonesia bersama PWI, SGP, dan SPS. Ketika Peraturan Menteri Penerangan No. 10 Tahun 1984 diberlakukan, sejak itulah keluar aturan tentang SIUP. Terjadilah persaingan ketat pers secara bisnis. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 membuka peluang modal asing masuk pers. Pers mulai terjebak antara idealisme politik dan pragmatisme ekonomi.

Kesimpulannya, pada era Orde Baru, pers diperlakukan sebagai berikut.

- 1) Pengamalan Pancasila di bidang jurnalistik menjadi jantung kelembagaan pers, manifestasi peranan, tugas, dan kewajiban pers sebagai lembaga.
- 2) Dibentuknya Departemen Penerangan sebagai alat kontrol terhadap pers.
- 3) Diharuskannya penerbitan pers dengan SIUPP yang diberikan oleh Departemen Penerangan.
- 4) Meletakkan sendi-sendi kelembagaan pers nasional sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 1966 tentang Pers.



Berpikir Kritis

Setelah memahami uraian materi di atas, coba Anda lakukan tugas berikut ini!

1. Buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri yang menonjol dari pers pada masa Kolonialisme Belanda, masa Pergerakan, dan masa Kemerdekaan!
2. Tulislah hasil kegiatan Anda dan sampaikan pada guru untuk dinilai!
3. Guru Anda akan memilih tiga hasil terbaik untuk dibacakan di depan kelas.
4. Jika teman Anda ditunjuk, coba berikan tanggapan atas hasil kerjanya!

Profil Tokoh

Goenawan Mohammad (GM)

Goenawan Soesatyo Mohamad, yang lahir di Karangasem, Batang, Jawa Tengah, pada tanggal 29 Juli 1941, seorang sastrawan Indonesia terkenal. Beliau seorang intelektual yang berwawasan luas, mulai pemain sepak bola, politik, ekonomi, seni dan budaya, dunia perfilman, dan musik. Pandangannya sangat liberal dan terbuka. Pendiri dan mantan Pemimpin Redaksi Majalah Berita Tempo, ini pada masa mudanya lebih dikenal sebagai penyair. Beliau menulis sejak berusia 17 tahun. Pendidikan formal dilaluinya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, walaupun tidak selesai. Sang penyair ini adalah sosok intelektual muda yang selalu gelisah menjelang keruntuhan Orde Lama. Beliau ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan (1964) yang berakibat dilarang menulis di berbagai media umum.

Pada tahun 1971, Goenawan bersama rekan-rekannya mendirikan majalah Mingguan Tempo, sebuah majalah yang mengusung karakter jurnalisme majalah Time. Di sana beliau menulis kolom tentang agenda-agenda politik di Indonesia. Jiwa kritisnya membawanya untuk mengkritik rezim Soeharto yang pada waktu itu menekan pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Lirik-lirik puisinya membuat pembaca seperti menghadapi alam yang terumenerus melepaskan isyarat, religius, halus, dan terselubung. Sosok yang low profile ini akhirnya tersengat juga ketika Tempo bersama Detik dan Editor diberangus oleh SK Menteri Penerangan No. 123 tanggal 21 Juni 1994. Beliau turun ke jalan untuk memprotes pembredelan itu.

Sejak saat itu, GM mengubah haluannya. Kendati majalah yang dipimpinnya sejak tahun 1971 lahir kembali pada tahun 1998, GM memutuskan lengser dari kursi pemimpin redaksi. Tempo dianggap sebagai oposisi yang merugikan kepentingan pemerintah sehingga dihentikan penerbitannya pada tahun 1994. Goenawan Mohammad kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), asosiasi jurnalis independen pertama di Indonesia. Beliau juga turut mendirikan Institusi Studi Arus Informasi (ISAI) yang bekerja mendokumentasikan kekerasan terhadap dunia pers Indonesia. Secara sembunyi-sembunyi, di Jalan Utan Kayu 68H, ISAI menerbitkan serangkaian media dan buku perlawanan terhadap Orde Baru. Oleh karena itu, di Utan Kayu 68H bertemu banyak elemen, aktivis pro-demokrasi, seniman, dan cendekiawan, yang bekerja dalam perlawanan itu.



Ketika majalah Tempo kembali terbit setelah Soeharto diturunkan pada tahun 1998, berbagai perubahan dilakukan seperti perubahan jumlah halaman dengan tetap mempertahankan mutunya. Tidak lama kemudian, Tempo memperluas usahanya dengan menerbitkan surat kabar harian bernama Koran Tempo. Dari ikatan inilah lahir Teater Utan Kayu, Radio 68H, Galeri Lontar, Kedai Tempo, Jaringan Islam Liberal, dan terakhir Sekolah Jurnalisme Penyiaran, yang meskipun tak tergabung dalam satu badan, bersama-sama disebut “Komunitas Utan Kayu”. Semuanya meneruskan cita-cita yang tumbuh dalam perlawanan terhadap pemberangusan ekspresi.

Sumber :

<http://www.tamanismailmarzuki.com/tokoh/goenawan.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Goenawan_Mohamad

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 4–5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikan sebuah tema “Pemerintah Orde Baru di bawah Departemen Penerangan sering melakukan pembredelan terhadap pers, padahal pembredelan tersebut bertentangan dengan undang-undang pers”!
3. Tiap kelompok boleh membuat judul berbeda sepanjang sesuai dengan yang dipilih!
4. Salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan. (Guru bertindak sebagai moderator)
5. Kumpulkan kepada guru, hasil diskusi kelompok Anda beserta catatan tanggapan dari kelompok lain!

e. Pers pada Masa Reformasi (Pasca Orde Baru)

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan sangat besar dan cukup mendasar. Seluruh komponen bangsa bergerak dan bergejolak layaknya sebuah revolusi yang telah diberi format dan saluran reformasi. Ketegangan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Konflik horizontal dan vertikal pun pecah, baik yang terjadi secara spontan ataupun yang dimobilisasi.

Reformasi tahun 1998 sungguh menyentuh sendi dan tata nilai kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Perangkat-perangkatnya juga ikut disentuh, dirombak, diubah, dan direposisikan kembali sehingga benar-benar bersosok demokrasi. Partai-partai berdiri dan pers bebas sudah tidak lagi memerlukan izin terbit. Pemilu yang demokratis diselenggarakan pemerintahan baru dengan memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Pemerintahan masa Presiden B.J. Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers, meskipun merugikan posisinya dalam pemilihan presiden. Urusan izin terbit dipermudah dan diperlancar oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, pers nasional melaksanakan peranan berikut ini.

- a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi
- b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia. serta menghormati kebinekaan;
- c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e) Menperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers nasional wajibewartakan peristiwa serta opini dengan tetap menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Kini, pers di dalam masyarakat yang sedang menuju demokratisasi yang seutuhnya berusaha mencari kejelasan tentang kebijakan yang paling baik dari setiap permasalahan. Pers sebagai media penyaluran aspirasi, saran pendapat, reformasi, atau evaluasi sari suatu informasi kebijakan pemerintah. Jadi, masyarakat pun tidak boleh bersikap acuh. Dari setiap perubahan dan perkembangan, pers Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Berita yang disampaikan tidak hanya sekadar kriminal, seks, sensasi, dan peristiwa besar lainnya yang termasuk *spotnews*, melainkan lebih menonjol mengenai berita atau analisis di bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam euforia kebebasan pers ini, dapat dimungkinkan ada pemberitaan yang kebablasan. Namun, masyarakat semakin kritis menghadapi pers. Pers yang tidak bermutu dan berbobot akan mudah ditinggalkan oleh pembacanya.

Kesimpulannya, kondisi pada masa reformasi yang berpengaruh terhadap perkembangan pers di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Pers tumbuh sebagai pengawal jalannya reformasi.
- b. Dicabutnya surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).
- c. Lahirnya undang-undang pers yang baru, yaitu UU No. 40 Tahun 1999.
- d. Dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Membangkitkan Kembali Penerbitan Berbahasa Daerah

Penerbitan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu penerbitan pers (majalah dan surat kabar) dan penerbitan buku. Sekarang tidak ada sebuah pun surat kabar yang terbit dalam bahasa daerah. Pada masa sebelum perang ada beberapa surat kabar yang terbit dalam bahasa Jawa dan Sunda seperti *Sipatahoenan*, *Siliwangi*, dan *Sinar Padoendan* dalam bahasa Sunda, *Express* dan *Bromortani* dalam bahasa Jawa. Pada masa pendudukan Jepang semua penerbitan dalam bahasa daerah dilarang, termasuk penerbitan surat kabar dan majalan. Tapi pada tahun 1950-an sampai 1990-an, bahkan awal tahun 1970-an masih ada yang mencoba menerbitkan surat kabar dalam bahasa daerah (Sunda), walaupun hidupnya merana.

Yang masih ada adalah penerbitan majalan atau tabloid. Dalam bahasa Jawa ada *Panjebar Semangat*, *Joyoboyo*, *Djoko Lodang*, dan lain-lain. Dalam bahasa Sunda ada *Mengle*, *Kalawarta Kudjag*, *Galura*, *Cupumanik*, dan lain-lain. *Panjebar Semangat* yang didirikan oleh Dr. Soetomo terbit sejak tahun 1930-an, *Joyoboyo* yang mula-mula terbit di Kediri kemudian pindah ke Surabaya terbit sejak tahun 1940-an (Pada masa revolusi). Keduanya berupa majalah. *Djoko Lodang* berupa tabloid. *Mangle* terbit mula-mula bulanan, sekarang mingguan terbit sejak tahun 1957. *Cupumanik* terbit bulanan sejak Agustus 2003, keduanya berupa majalah. Sedangkan *Kalawarta Kudjang* terbit mingguan sejak 1950-an dan *Galura* terbit mingguan sejak 1970-an berupa tabloid. Di samping itu banyak majalan dan tabloid yang pernah terbit dalam bahasa Jawa dan Sunda tetapi hanya beberapa tahun atau beberapa bulan.

Umumnya penerbitan itu lebih didorong oleh rasa cinta terhadap bahasa daerah sehingga kebanyakan tidak dilakukan secara profesional, baik redaksional maupun (apalagi) pemasarannya. Jumlah tirasnya sekarang cenderung menurun. Umumnya juga mereka bukan saja membayar honorarium tulisan dari luar (sangat) rendah, melainkan juga gaji para karyawannya pun lebih rendah daripada penerbitan dalam bahasa nasional. Umumnya kelangsungan hidup penerbitan-penerbitan itu tergantung kepada langganan, sedangkan iklan tak dapat diharapkan, karena para pemasang iklan cenderung lebih suka memasang iklan dalam penerbitan bahasa nasional. Isinya umumnya berupa cerita, baik cerita pendek maupun cerita bersambung, di samping itu banyak membuat puisi, terutama sajak (atau *geguritan* dalam bahasa Jawa). Tulisan-tulisan yang lain kebanyakan tentang agama, sejarah, atau legenda, kepercayaan akan adanya yang gaib-gaib, perimbon, pengobatan tradisional dan semacamnya.

Ada juga berita, tetapi umumnya jauh terlambat dibandingkan dengan pers bahasa nasional. Kadang-kadang ada tulisan populer mengenai hukum, pertanian, kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lain.

Bahasa Jawa dan Sunda yang dahulu pernah menjadi bahasa budaya yang dipergunakan untuk menulis mengenai apa saja tentang kehidupan dan kebudayaan masing-masing, sehingga melahirkan karya seperti *Serat Centhini* dalam bahasa Jawa, sekarang hanya dipergunakan sebagai bahasa lisan (itu pun sekedar berkomunikasi sehari-hari karena begitu hendak mengemukakan hal yang lebih rumit secara otomatis pindah kode ke dalam bahasa Indonesia) dan bahasa tulisan berupa artikel pendek, di samping digunakan untuk penulisan cerita dan sajak. Tidak ada yang menulis karya ilmiah yang serius dalam bahasa daerah.

Bentuk penerbitan lain adalah berupa buku. Umumnya penerbitan buku bahasa daerah dilakukan oleh orang-orang yang merasa terdorong untuk memelihara kelanggengan bahasa daerahnya. Penerbit komersial umumnya hanya menerbitkan buku-buku bahasa daerah yang dipergunakan di sekolah-sekolah, terutama buku-buku tes. Biasanya menghadapi keadaan penerbitan bahasa daerah yang menyedihkan itu, para ahli bahasa dan sastra Indonesia daerah menghadapkan pemerintah baik di pusat maupun di daerah turun tangan, misalnya dengan menerbitkan buku-buku bahasa daerah oleh penerbit pemerintah Balai Pustaka seperti pada masa sebelum perang, atau menyediakan perpustakaan di sekolah-sekolah. Ayo kita kembangkan Penerbitan Berbahasa Daerah dengan selalu membaca dan memberi koran dan majalah berbahasa daerah.



Berpikir Kritis

1. Bentuklah kelompok kerja sejumlah 4-5 orang, yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan!
2. Berikan gambaran singkat tentang pers pada masa kepemimpinan masing-masing Presiden Republik Indonesia dan sebutkan pula kebijakan yang dihasilkannya berkaitan dengan perkembangan pers pada masa kepemimpinannya!

3. Untuk lebih memudahkan perbandingan, Anda dapat mengisi lembar kerja yang telah disediakan di bawah ini.

Masa Kepemimpinan	Gambaran Singkat	Kebijakan yang Dihasilkan
Presiden Soekarno
Presiden Soeharto
Presiden BJ Habibie
Presiden Abdurrahman Wahid
Presiden Megawati Soekarnoputri
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

4. Salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan mintalah kelompok lain memberikan tanggapan!
5. Kumpulkan pada guru, hasil diskusi kelompok Anda disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!



C. Fungsi dan Peran Pers dalam Masyarakat Demokratis

Sudah pahamkah Anda mengenai fungsi dan peran pers dalam masyarakat yang demokratis ini? Coba simak uraian materi berikut ini. Pada era demokrasi dewasa ini, pers menjadi salah satu ekspresi kedaulatan rakyat serta unsur komunikasi dan pengawasan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbentuknya masyarakat yang demokratis dalam suatu negara tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers yang ada di negara tersebut. Pers mempunyai fungsi penting bagi perkembangan suatu negara menuju kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Oleh sebab itu, kemerdekaan pers sangat dibutuhkan guna menciptakan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani. Begitu pula dengan kebebasan keadilan serta kebenaran dan usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan wawasan, sebagaimana tercantum pada Pasal 28 UUD 1945.

1. Fungsi Pers

Kemerdekaan pers merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Kemerdekaan pers harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan menggunakan prinsip-prinsip itulah beberapa fungsi pers dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40/ 1999 sebagai berikut.

a. Fungsi sebagai Media Informasi

Masyarakat menikmati pers sebab mereka membutuhkan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya, baik informasi politik, ekonomi (bisnis), hobi, *life skill*, atau bidang-bidang lainnya yang bermanfaat bagi kebutuhan hidupnya. Saat ini dunia pers Indonesia tengah berada dalam optimisme untuk mewujudkan masa depan kebebasan pers yang juga berarti masa depan demokrasi Indonesia. Indonesia tengah menjalankan politik keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pers harus mendukung dengan penampilan yang lebih profesional dalam mengungkap fakta secara transparan, objektif, dan langsung. Pers dengan masyarakat saling membutuhkan. Pers membutuhkan dukungan dari masyarakat karena tanpa dukungan itu pers tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, masyarakat tanpa pers akan ketinggalan informasi atau berita yang sedang berkembang. Contohnya, masyarakat bersedia berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan berbagai informasi.

Diskusi Ilmiah

- Bentuklah kelompok kerja yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan!
- Carilah informasi acara televisi di media cetak, lalu buatlah kesepakatan bersama kelompok Anda untuk menyaksikan sebuah acara berita!
- Simak tayangan berita tersebut dan catat isinya, lalu gunakan sebagai bahan untuk berdiskusi! Pilihlah berita yang memuat isu negatif terhadap masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
- Buatlah ringkasan hasil diskusi kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan! (Guru akan bertindak sebagai moderator)
- Kumpulkan kepada guru, hasil diskusi kelompok Anda disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!

Media menjadi sarana informasi dalam kelompok masyarakat. Media menyebarluaskan berbagai peristiwa, kejadian, dan tindakan dari warga atau kelompok masyarakat sehingga dapat diketahui masyarakat lain. Dalam hal ini, media sebagai sarana komunikasi dari media itu sendiri kepada masyarakat. Fungsi memberi informasi berkaitan dengan kemampuan media massa yang memiliki kecepatan dan jangkauan amat luas dalam menyebarluaskan berita kepada publik. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tentu Anda tidak perlu mendatangi sendiri peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung.

b. Fungsi Pers sebagai Media Pendidikan

Pers juga dapat berfungsi sebagai media pendidikan (*mass education*). Pers dapat memuat informasi-informasi yang berguna dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Dengan adanya pers, rakyat menjadi semakin cerdas karena bertambah wawasan pengetahuannya. Pers dapat memberikan pendidikan, wawasan pengetahuan, dan mencerdaskan masyarakat. Masyarakat yang secara teratur mencari dan mendapatkan berita dari pers akan semakin luas ilmunya, wawasannya, dan pengetahuannya. Misalnya, seorang warga bisa bertanam jambu air dengan hasil menguntungkan karena membaca sebuah majalah atau tabloid tentang pertanian.



KATA SANG TOKOH

Jangan pernah mengorbankan kehidupan Anda demi kerja dan idealisme belaka. Satu hal terpenting dalam hidup adalah hubungan sosial antarmanusia. Saya baru menyadarinya cukup terlambat.

(*Katherine Susannah Prichard*)

Sumber: <http://www.goodreads.com>

c. Fungsi Pers sebagai Media Hiburan

Informasi yang disajikan oleh pers kadangkala bersifat hiburan, baik melalui media cetak ataupun media elektronika. Hal ini sesungguhnya bukan hanya sekedar mengimbangi berita-berita yang berat, tetapi kebutuhan hiburan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Informasi hiburan dalam media cetak, misalnya cerita bergambar, cerita pendek, karikatur, teka-teki silang, dan informasi hiburan yang diselenggarakan oleh media elektronika maupun tempat-tempat hiburan yang tersedia.

d. Fungsi Pers sebagai Media Kontrol Sosial

Pers harus bisa melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran kontrol sosial dari pers untuk memperbaiki keadaan melalui media massa. Kontrol sosial yang dilakukan oleh pers merupakan hal yang sangat penting.

Fungsi kontrol sosial terkandung dalam makna demokratis yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) *Social participation* (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan).
- 2) *Social responsibility* (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat).
- 3) *Social support* (dukungan rakyat terhadap pemerintah).
- 4) *Social kontrol* (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Fungsi kontrol sosial pers dapat dinyatakan sebagai sikap pers dalam melaksanakan fungsinya yang diarahkan terhadap perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk memperbaiki keadaan melalui tulisan-tulisan yang dimuat, baik secara langsung atau tidak langsung, mengkritik aparatur pemerintah atau lembaga-lembaga masyarakat yang terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers mempunyai banyak tujuan, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan perencanaan negara, baik perencanaan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa.
- 2) Melakukan koreksi-koreksi terhadap pemerintah dalam menempatkan pejabat-pejabat berdasarkan aspirasi rakyat dan kualitasnya, baik pendidikan maupun pengalamannya, dalam rangka mewujudkan *clean government* (pemerintahan yang bersih).
- 3) Mengetahui kekuasaan legislatif merupakan bagian kekuasaan dari kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh badan perwakilan publik atau badan perwakilan rakyat yang berupa undang-undang sebagai aspirasi rakyat.
- 4) Menjaga agar undang-undang yang telah dibuat oleh wakil-wakil rakyat dijalankan sebaik-baiknya oleh semua pihak.
- 5) Mewujudkan administrasi negara agar berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan-kepentingan rakyat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi, budaya, hankam, maupun agama.
- 6) Melakukan kontrol secara organisatoris di dalam administrasi negara yang demokratis atau pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat merupakan bagian integral dari kedaulatan itu sendiri.
- 7) Menjaga jalannya pemerintahan agar sesuai dengan UUD, UU, serta kehendak seluruh lapisan masyarakat dan bangsa.
- 8) Menjaga aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan mengabdikan kepada rakyat.
- 9) Melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan-tindakan yang dilakukan sewenang-wenang oleh siapa pun.
- 10) Menjaga penggunaan *budget* negara sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat terwujud tujuannya.
- 11) Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, baik kepentingan politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

- 12) Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat korektif yang berupa *informasi* atau pernyataan-pernyataan yang membantu pemerintah terhadap orang-orang yang akan menjabat atau menempati suatu posisi di dalam badan-badan administrasi negara yang bertalian dengan kualitas pribadi, baik dari sudut akhlak maupun loyalitas terhadap ideologi.
- 13) Mendukung pemerintahan dalam rangka menjalankan *open management* atau pengelolaan pemerintahan secara terbuka, yaitu terwujudnya *social participation* (keikutsertaan atau partisipasi masyarakat terhadap pemerintah) dan terbentuknya *responsibility of government*, baik pertanggungjawaban politik, sosial, budaya, hankam, maupun tegaknya dukungan dari masyarakat (*social support*) yang sehat.
- 14) Membantu tegaknya *rule of law* atau pemerintahan berdasarkan hukum, yaitu tegaknya *supremacy of law* (hukum tertinggi) *equality before the law*, serta tegaknya *protection of human right*.
- 15) Mengoreksi keputusan-keputusan yang dibuat badan yudikatif, baik keputusan tingkat tinggi maupun tingkat menengah agar keputusan-keputusan yang diambil oleh badan yudikatif itu berpihak kepada rasa keadilan itu sendiri, bukan kepada pihak-pihak lain.
- 16) Mendukung pemerintahan yang demokratis sehingga tidak mengarah kepada tiranisme dan nepotisme.
- 17) Melakukan kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan badan administrasi negara.
- 18) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan stabil sehingga mendapat dukungan rakyat.
- 19) Melakukan kontrol sosial agar dapat membantu terselenggaranya pelaksanaan pekerjaan yang sehat dari abdi negara.
- 20) Mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik material maupun spiritual.

Secara prinsip, fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial merupakan fungsi paling elementer dalam sistem pemerintahan demokratis. Tata kehidupan sosial yang demokratis nustahil dapat diraih tanpa adanya kontrol dari masyarakat. Jadi, keberadaan pers dalam masyarakat sangat bergantung pada pelaksanaan fungsi kontrol sosial tersebut. Untuk dapat melakukan fungsi kontrol sosial, pers harus dapat menerjemahkan dan meneruskan aspirasi serta kepentingan rakyat melalui pemberitaan dan pembentukan dewan pers.

e. Fungsi Pers sebagai Media Komunikasi

Pemerintah sangat membutuhkan dukungan dan kepatuhan warga negaranya guna melaksanakan program-program dan kebijakan negara. Warga negara juga mengharapkan negara memberi jaminan perlindungan hukum, keamanan dan informasi, serta kebijakan yang bermanfaat luas. Masyarakat ingin mengetahui program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Demikian pula pemerintah menginginkan masyarakat mengetahui berbagai kegiatan program yang dilakukan sehingga mendapat persetujuan dan dukungan.

Pers menjadi sarana bagi antarpihak untuk melakukan hubungan, menjalin komunikasi, mendapatkan kebutuhan informasi, dan media untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan, tertulis maupun secara visual. Pers atau media massa berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah selaku penyelenggara negara. Pers dalam kehidupan masyarakat yang demokratis mempunyai peranan penting. Dengan adanya pers, masyarakat dapat mengetahui dengan cepat dan mudah suatu informasi atau berita penting yang sedang berkembang.

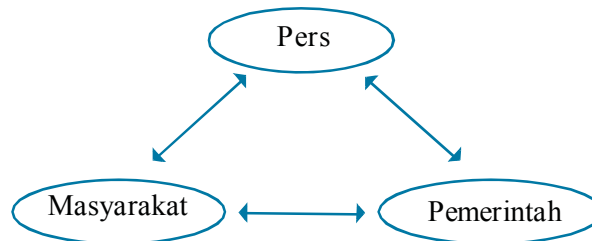
Makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin luas pula hubungan masyarakat dan wilayah jangkauannya serta beragamnya masalah. Oleh karena itu, pers semakin penting sebagai saluran komunikasi. Saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui peran media massa untuk menghubungkan antara keduanya. Bahkan, antaranggota masyarakat pun dapat saling berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat dan efektif.

Media massa dapat menjadi media komunikasi dua arah, yaitu dari masyarakat ke negara dan dari negara ke masyarakat. Misalnya liputan televisi tentang pemerintah DKI Jakarta yang akan melakukan razia kartu tanda penduduk dan informasi adanya sekelompok nelayan yang ingin mendapatkan kredit rumah. Penyebarluasan informasi tersebut akan semakin pesat dengan adanya berbagai media massa.

f. Fungsi Pers sebagai Lembaga Ekonomi

Saat ini, pers tidak hanya sekadar media informasi. Namun, sudah merupakan lembaga ekonomi. Artinya, pers tumbuh menjadi industri media yang mampu mendapatkan dan menyerap lapangan kerja yang cukup signifikan serta mendatangkan keuntungan yang sangat memadai. Oleh karenanya, tumbuhnya investasi dalam bidang ini cukup menjanjikan. Contohnya, Media Group dengan Metro TV dan Media Indonesia-nya, serta Kompas Group dengan Gramedia.

UU Pers No. 40/1999 menyebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal itu meliputi pencarian/cara memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik secara tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data demografik dengan menggunakan alat bantu/media cetak, elektronik, atau saluran lain yang tersedia.



Gambar 3.1 Bagan korelasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

Selain itu, pers sebagai lembaga ekonomi menyediakan jasa sosial untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh berita positif dan nilai jual atas program-program kerjanya. Misalnya, meliputi kegiatan bakti sosial, acara *open house*, atau kegiatan, lainnya. Ditambah lagi bidang penjualan kolom advertising, kolom artikel, atau kolom berita lainnya.

Dalam perkembangannya, pers dituntut untuk terus-menerus memperbaiki diri. Hal itu berarti perbaikan pada sumber daya manusia dan perangkat keras, yang kesemuanya memerlukan biaya. Biaya itu diperoleh dari hasil penjualan surat kabar, baik langganan dan eceran maupun penjualan ruangan untuk iklan. Karena pertumbuhan ekonomi di mana-mana dan sepanjang sejarahnya cenderung naik, berarti naik pula komponen-komponen ongkos produksinya.

Berdasarkan kegiatan jurnalistik, suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers memiliki bahan baku informasi yang diolah sehingga menghasilkan produk berita. Berita tersebut diminati oleh masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Semakin berkualitas nilai beritanya, semakin tinggi nilai jualnya. Tanpa terlepas dari tindakan ekonomi bahwa suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual, pers sebagai lembaga ekonomi dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya. Misalnya, gelombang tsunami di Aceh adalah kejadian alam yang tidak dapat diperkirakan kejadiannya.

Surat kabar yang hidup dari penghasilannya sendiri, akan dapat menjalankan tanggung jawabnya secara ideal dan memelihara kebebasan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab secara memadai. Namun, bukan berarti pers diperlakukan dan dikelola semata-mata sebagai bisnis atau sebagai perusahaan. Untuk mencari keuntungan yang diusahakan merupakan sisi bisnis dari pers yang tunduk kepada aspek idealnya. Aspek bisnis, termasuk aspek industrinya, dikembangkan dalam bentuk percetakan dan kini juga komputerisasi dengan tujuan untuk menunjang aspek idealnya. Dari segi prinsip perkembangannya, pers sebagai bisnis tidak perlu dengan sendirinya mengubah tujuan pers itu.

g. Fungsi Pers sebagai Media Investigasi

Pers menjadi sarana untuk mengungkap masalah-masalah publik secara luas, seperti kebijakan pejabat, masalah pembangunan, program, dan usaha-usaha pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang sebelumnya tertutup dan terbatas di kalangan pemerintahan dapat menjadi terbuka dan diketahui masyarakat. Pers dapat melakukan laporan dan penyidikan secara mendalam terhadap masalah publik yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat menjadi diketahui masyarakat. Misalnya, menurunkan investigasi berita kasus korupsi di sebuah departemen.

Fungsi investigasi dan informasi media massa diperlukan untuk mengurangi kecenderungan setiap pemerintah untuk merahasiakan berbagai hal. Pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang bersedia memberi tahu rakyatnya mengenai kebijakan yang diambil atau pemerintah dianggap bertanggung jawab jika warganya mengetahui kebijakan yang pemerintah lakukan.

Selain itu warga negara memiliki sarana yang independen untuk menerima dan menilai kebijakan resmi yang dikeluarkan. Dalam hal ini, media massa memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai kebijakan dan kepentingan publik. Sedangkan masyarakat luas berhak untuk mendapatkan informasi itu.

Unjuk Kerja

Setelah memahami salah satu fungsi pers sebagai media investigasi, coba Anda lakukan tugas di bawah ini!

1. Anda berperan sebagai wartawan yang mencari berita.
2. Carilah berita yang Anda sukai dengan menggunakan teknik-teknik pencarian berita dengan baik! Waktu yang disediakan selama 1 minggu.
3. Buatlah laporan hasil investigasi yang Anda lakukan dengan diketik rapi dan dijilid!
4. Guru akan memilih sepuluh hasil investigasi dengan laporan terbaik untuk dibacakan di depan kelas. Silakan memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan oleh teman Anda mengenai layak atau tidaknya berita hasil investigasi teman Anda tersebut!

h. Fungsi Pers sebagai Media Program Sosialisasi dan Kebijakan Publik dari Pemerintah kepada Rakyat

Melalui perantara pers, program, keputusan, kebijakan dan peraturan-peraturan baru dari pemerintah semakin cepat sampai pada masyarakat. Seorang menteri yang mengeluarkan kebijakan baru dapat melakukan konferensi pers dengan mengundang para reporter dan wartawan. Media dapat dijadikan sarana untuk membuka masalah-masalah publik yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan, sangat mendukung untuk menghilangkan ketertutupan informasi. Berbagai pro-gram dan kebijakan pemerintah sesungguhnya merupakan masalah publik yang tidak boleh ditutup-tutupi kepada masyarakat. Melalui media massa, masalah-masalah publik tersebut dapat diketahui secara luas. Media juga dapat melakukan penyidikan dan laporan mendalam suatu masalah publik yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat.

Media dapat berperan menyampaikan kebijakan, program, dan peraturan-peraturan negara secara cepat dan luas kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menggunakan media untuk menyosialisasikan program dan kebijakannya. Media juga menjadi corong pemerintah, yaitu sebagai alat pemerintah untuk mempengaruhi dan mengajak warga negara agar

Sebagai sarana opini dan debat publik, media berperan sebagai sarana komunikasi dari bawah ke atas atau dari masyarakat ke negara. Media juga dapat dijadikan saluran untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, kritik, usul, dan saran. Media menjadi sarana efektif dalam menampung berbagai pemikiran masyarakat. Berbagai pemikiran masyarakat bertemu di media. Fungsi debat publik dari media massa adalah menyediakan forum bagi para pemimpin pemerintah, tokoh partai, dan pejabat publik lainnya agar dapat secara leluasa berdebat, beradu pendapat berdiskusi, atau berpolemik mengenai suatu hal dengan media massa. Debat tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak berpartisipasi di dalam debat publik. Dengan cara tersebut, masalah-masalah yang bersifat publik menjadi makin terbuka dan setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya.

Media massa juga menjadi sarana komunikasi dari atas ke bawah. Artinya, sebagai saluran pemerintah, media berfungsi memberi-tahukan kepada warga negara mengenai segala hal yang dilakukan oleh pemerintah. Pada masa sekarang, meskipun tidak diperintahkan untuk memberitahukan kebijakan pemerintah, media massa akan tetap melakukan perannya tersebut.



KATA SANG TOKOH

Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah; karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti.

(Henri Bergson)

Sumber: <http://www.goodreads.com>

2. Peran Pers

Pers merupakan lembaga infrastruktur politik di negara Indonesia. Pers berada di masyarakat serta memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dan negara. Pers memiliki kedudukan penting dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Media massa adalah salah satu pilar dari demokrasi. Kebebasan berekspresi dan berinformasi merupakan dasar penting dalam sistem demokrasi. Pers adalah suatu media massa, baik elektronik maupun nonelektronik untuk menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat.

Karena pentingnya dalam kehidupan negara demokrasi, pers memiliki peranan sebagai berikut.

a. Saluran Informasi kepada Masyarakat

Pers berperan untuk mencari dan menyebarkan berita secara cepat dan luas kepada masyarakat. Pers menjadi sarana informasi antarkelompok masyarakat. Dalam hal ini, pers sebagai sarana komunikasi dari pers itu sendiri kepada masyarakat dan pertukaran informasi antarmasyarakat.

b. Saluran bagi Debat Publik dan Opini Publik

Pers berperan sebagai sarana komunikasi dari bawah ke atas atau dari masyarakat ke negara. Masyarakat luas dapat menyampaikan beragam aspirasi, pendapat, kritik, usul, dan saran melalui pers. Pers menjadi sarana efektif dalam menampung berbagai aspirasi rakyat.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pers Nasional, pers mempunyai peranan sebagai berikut.

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan menghormati kebhinnekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut ini!
“Apakah keberadaan pers sekarang ini sudah melakukan fungsi dan perannya dengan baik?”
3. Tulislah hasil diskusi kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok menyampaikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain menanggapi dan catatlah! (Guru bertindak sebagai moderator)
4. Serahkan kepada guru, hasil diskusi kelompok Anda disertai catatan tanggapan dari kelompok lain!

3. Hak dan Kewajiban Pers

a. Hak Pers

Dalam menjalankan fungsinya, pers diberikan suatu kemerdekaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu kepada Tuhan, bangsa, negara, dan masyarakat. Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, serta tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Berikut ini merupakan hak pers nasional.

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Maksudnya, pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau tekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
- 2) Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyiarkan gagasan dan informasi.
- 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai *hak tolak*.

b. Kewajiban Pers

Selain mempunyai hak, pers juga mempunyai kewajiban dalam menggunakan haknya. Berikut merupakan kewajiban pers tersebut.

- 1) Pers nasional wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- 2) Pers wajib melayani hak jawab.
- 3) Pers wajib melayani hak koreksi.
- 4) Menghormati privasi.
- 5) Tidak menerima suap.
- 6) Tidak mengumbar kekejaman fisik dan seksual.

Unjuk Kerja

Setelah memahami berbagai jenis peran pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lakukan unjuk berikut ini!

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Tiap kelompok mencari sepuluh judul pemberitaan dari koran, kemudian menentukan dalam klasifikasi dari peranan pers. Apakah pemberitaan tersebut termasuk dalam klasifikasi dari peranan pers?
3. Praktik belajar dilakukan secara kelompok dengan mengisi lembar kerja yang telah disediakan, selanjutnya diskusikan bersama kelompok Anda!
Peran Pers :
 - a. Pers sebagai saluran informasi kepada masyarakat
 - b. Pers sebagai saluran bagi opini publik
 - c. Pers sebagai saluran investigasi
 - d. Pers sebagai saluran kebijakan publik
 - e. Pers sebagai saluran pembelajaran masyarakat

No	Judul Pemberitaan	Sumber Klasifikasi	Peranan (*)				
			1	2	3	4	5
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

D. Keterkaitan Antara Pers dan Jurnalistik

Jika mempelajari tentang pers, pasti Anda tidak akan lepas dari pembicaraan jurnalistik. Apabila Anda ingin memahami tentang pers lebih jauh, tentu harus mempelajari tentang jurnalistik. Hal ini karena pers terkait erat dengan jurnalistik. Selaku media komunikasi massa, pers tidak akan berguna jika semua paparannya jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik. Bahkan, bukan pers namanya apabila materi yang disampaikan-nya di luar prinsip-prinsip jurnalistik.

Sebaliknya, sebuah karya jurnalistik tidak akan berguna bila tanpa disampaikan oleh pers selaku medianya. Kesimpulannya, pers merupakan media khusus yang diinginkan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada publik.

Secara bahasa, jurnalistik berasal dari kata jurnalis. Istilah jurnalis berasal dari kata *diurnorius* atau *diurnarii* (bahasa Latin). Artinya, orang yang mencari dan mengolah (mengutip dan memperbanyak) berbagai informasi untuk selanjutnya dijual kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Secara singkat, pers adalah wadah penyajian karya jurnalistik berupa informasi, hiburan, ataupun keterangan dan penerangan.



KATA SANG TOKOH

Prinsip merupakan hukum alam yang tidak dapat dilanggar. Kita tidak mungkin melanggar hukum tersebut, kita hanya dapat menghancurkan diri kita karena melanggar hukum-hukum itu.

Cecil de Mille

Sumber: <http://www.goodreads.com>

Adapun jurnalistik adalah keahlian dalam mewujudkan informasi, hiburan, keterangan, atau penerangan dalam bentuk berita, tajuk, kritik, ulasan, ataupun artikel-artikel lainnya. Pengertian lain dari jurnalistik adalah seni dan keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nuraninya. Jadi pers dan jurnalistik merupakan satu kesatuan (institusi) yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan penerangan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hati nurani sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari.

E.

Kode Etik Jurnalistik serta Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Secara umum, setiap kelompok profesi selalu memiliki kode etik. Kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Kode etik berlainan dengan hukum walaupun keduanya bersifat mengatur serta menjadi pedoman dalam bertindak laku. Adapun ciri dari suatu kode etik adalah sebagai berikut.

- a. Kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok tersebut.
- b. Daya jangkauan suatu kode etik hanya tertuju kepada kelompok yang mempunyai kode etik tersebut.
- c. Kode etik dibuat dan disusun oleh lembaga/kelompok profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar.

Kaum jurnalis dan kaum pers juga membentuk kode etik sendiri sesuai kelompok organisasinya. Kode etik jurnalistik adalah pedoman bagi para insan pers dalam melakukan peran dan fungsinya. Kode etik akan menjadi landasan moral/etika profesi untuk menjamin kebebasan pers dan terpenuhinya hak-hak masyarakat, serta pedoman operasional dalam rangka menegakkan integritas dan profesionalitas para insan pers.



Sumber : <http://foto.detik.com>

Gambar 3.8 Upaya mencari suatu berita oleh insan pers perlu memerhatikan Etika Pers yang diatur dalam Kode Etik Wartawan.

Kode etik jurnalistik merupakan himpunan etika profesi kewartawanan yang disepakati organisasi kewartawanan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Etika pers adalah etika semua orang yang terlibat dalam kegiatan pers, yang merupakan filsafat di bidang moral pers, yaitu kewajiban-kewajiban pers, baik dan buruknya, pers yang benar dan pers yang mengatur tingkah laku pers.

Sumber etika pers adalah kesadaran moral pers mengenai pengetahuan baik dan buruk, benar dan salah, serta tepat dan tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Pers (khususnya wartawan) tidak dapat lepas dari tanggung jawab etis, moral, dan hukum. Seorang wartawan (jurnalis) wajib memelihara hubungan baik dengan sumber berita dan terkadang harus melindungi sumber berita. Seorang jurnalis tidak boleh mencelakakan sumber berita, baik itu karena keterusterangannya yang konyol dan tolol maupun karena tidak tahu situasi dan kondisi sumber berita yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, kode etik jurnalistik sesungguhnya berfungsi sebagai berikut.

- a. Alat kontrol sosial, yaitu tidak hanya mengatur hubungan antara sesama anggota seprofesi, tetapi juga dapat mengatur hubungan antara anggota organisasi profesi tersebut dengan masyarakat.
- b. Mencegah adanya kontrol dan campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.

2. Bentuk-Bentuk Kode Etik

Dalam sejarah pers Indonesia, terdapat jumlah kode etik yang dirumuskan dan diberlakukan oleh organisasi wartawan seperti PWI, AJI, dan kode etik yang dibuat bersama, yaitu KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Dewan pers yang terbentuk pasca Reformasi 1998 juga merumuskan dua kode etik, yaitu kode praktik dan kode bisnis pers. Dengan demikian, jika diklarifikasikan terdapat tiga mode, yaitu kode etik wartawan Indonesia, kode praktik bagi media pers, dan kode etik jurnalistik.

Apabila seorang jurnalis melanggar kode etik jurnalis, Dewan Kehormatan PWI berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik dan sanksi terhadap pelakunya. Dewan Kehormatan PWI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kesalahan dan sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Keputusan Dewan Kehormatan PWI tidak dapat diganggu gugat. Hukuman dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan PWI kepada pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai berikut.

- a. Peringatan biasa.
- b. Peringatan keras.
- c. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya dua tahun.

Anggota PWI yang terkena hukuman karena pelanggaran kode etik jurnalistik dapat membela diri di kongres.

a. Kode Etik Wartawan Indonesia

Kemerdekaan pers merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Wartawan Indonesia perlu menyadari adanya tanggung jawab sosial yang tercermin melalui pelaksanaan kode etik profesi secara jujur dan bertanggung jawab. Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia (HPPI).

Kode etik disusun 26 organisasi wartawan di Bandung tahun 1999 dengan semangat memajukan jurnalisme di era kebebasan pers.

- 1) Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- 2) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan
- 3) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
- 4) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
- 5) Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesi.
- 6) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, serta *off the record* sesuai kesepakatan.
- 7) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan, serta melayani hak jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik.

1) Kode Praktik bagi Media Pers

Di luar kode etik jurnalistik yang telah disusun masing-masing organisasi wartawan. Dewan Pers menyusun Kode Praktik (*Code of Practices*) media sebagai upaya penegakan independensi serta penerapan prinsip pers mengatur sendiri (*selfregulated*). Kode etik yang disusun ini juga berfungsi menjamin berlakunya etika dan standar jurnalis profesional serta media yang bertanggung jawab. Jika semua media patuh pada kode etik yang telah berlaku dan disepakati, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau peraturan khusus. Dewan pers memandang perlu disusun kode praktik yang berlaku bagi media untuk mempraktikkan standardisasi kerja jurnalistik yang meliputi sebagai berikut.

a) Privasi

- (1) Penggunaan kamera lensa panjang untuk memotret seseorang di wilayah privasi tanpa seizin yang bersangkutan tidak dibenarkan.
- (2) Redaksi harus menjamin wartawannya mematuhi semua ketentuan tersebut, tidak menerbitkan bahan dari sumber-sumber yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
- (3) Wartawan tidak boleh bertahan di kediaman narasumber yang telah memintanya meninggalkan tempat, termasuk tidak membuntuti narasumber itu.
- (4) Setiap orang berhak dihormati privasinya, keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan kerahasiaan surat-suratnya. Menerbitkan hal-hal di atas tanpa izin dianggap gangguan atas privasi seseorang.
- (5) Pers wajib berhati-hati, menahan diri menerbitkan/ menyiarkan informasi yang bisa dikategorikan melanggar privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik.
- (6) Wartawan tidak menelepon, bertanya, memaksa, atau memotret seseorang setelah diminta untuk menghentikan upaya itu.
- (7) Wartawan dan fotografer tidak diperbolehkan memperoleh atau mencari informasi dan gambar melalui intimidasi, pelecehan, atau pemaksaan.



Sumber : <http://bulletinmetropolis.com>

Gambar 3.9 Konferensi pers dapat dimanfaatkan para wartawan untuk mendapatkan berita yang selengkap-lengkapny dari sumber berita

Wawasan Konstitusi

Setelah memahami fungsi dan peran pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lakukan kegiatan berikut ini!

1. Cari dan bacalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers! Temukan pasal-pasal yang menyangkut peranan pers dalam kehidupan masyarakat demokrasi!
2. Buatlah ulasan singkat yang berisi pendapat Anda sebagai generasi penerus terhadap pers di negara Indonesia. Untuk memudahkan Anda, coba buatlah tabel berikut ini dan isilah!

No	Pasal-Pasal	Isi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

3. Anda dapat memberikan ulasan dengan mencari data-data dari berbagai sumber, misalnya internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau berbagai sumber lainnya. Jangan lupa cantumkan sumbernya secara lengkap!

4. Kumpulkan hasilnya pada guru untuk dinilai!

b) Diskriminasi

- 1) Pers menghindari penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan isi berita.
- 2) Pers menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau kecenderungan seksual, terhadap kelemahan fisik dan mental, atau penyandang cacat.

c) Akurasi

- 1) Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan. Ketentuan ini juga berlaku untuk foto dan gambar.
- 2) Pers wajib membedakan antara komentar, dugaan, dan fakta.
- 3) Pers kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati.
- 4) Jika diketahui informasi yang dimuat/disiarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau diputarbalikkan, koreksi harus segera dilakukan jika perlu disertai permohonan maaf.

- 5) Pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak.
- 6) Dalam menyebarkan informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok.
- d) Liputan Kriminalitas
 - 1) Pers tidak boleh mengidentifikasi anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun saksi.
 - 2) Pers menghindarkan identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa seizin mereka.
 - 3) Pertimbangan khusus harus diperhatikan untuk kasus anak-anak yang menjadi saksi atau menjadi korban kejahatan.
- e) Pornografi

Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan. Media pornografi tidak termasuk kategori pers. Meski demikian, adakalanya pers menyiarkan informasi atau gambar yang dinilai menyinggung kesopanan individu atau kelompok tertentu. Dalam penilaian pornografi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keragaman masyarakat.
- f) Sumber Rahasia

Pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber-sumber informasi rahasia atau konfidensial. Cara-cara yang dilakukan adalah sebagai berikut.

 - 1) Dokumen atau foto hanya boleh diambil tanpa seizin pemiliknya.
 - 2) Jurnalis tidak memperoleh atau mencari informasi atau gambar melalui cara-cara yang tidak dibenarkan atau menggunakan dalih-dalih.
 - 3) Dalih dapat dibenarkan bila menyangkut kepentingan publik dan hanya ketika bahan berita tidak bisa diperoleh dengan cara-cara yang sewajarnya.
- g) Hak Jawab dan Bantahan
 - 1) Hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati.
 - 2) Kesalahan dan ketidakakuratan wajib segera di-koreksi.
 - 3) Koreksi dan sanggahan wajib diterbitkan segera.
- 2) **Kode Etik Jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalis Independen)**

Kode etik jurnalistik Indonesia merupakan salah satu organisasi wartawan selain PWI, PWI Reformasi, dan sebagainya. Isi kode etik jurnalistik adalah sebagai berikut.

 - a) Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
 - b) Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.

- c) Jurnalis melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
- d) Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- e) Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
- f) Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
- g) Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi latar belakang *off the record* dan embargo.
- h) Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal yang bisa merugikan masyarakat.
- i) Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
- j) Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik. Berdasarkan kode etik di atas, diharapkan kebebasan pers yang diberikan dan dijamin sebagai hak asasi warga negara, tidak semena-mena digunakan untuk alat memojokkan atau menjatuhkan pihak tertentu. Namun, kebebasan pers mengeluarkan pikiran atau pendapat dalam kehidupan demokrasi perlu diarahkan dan dibina agar dapat tumbuh sesuai nilai-nilai Pancasila serta tidak merugikan orang lain atau kelompok tertentu.
- k) Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
- l) Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
- m) Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
- n) Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
- o) Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.
- p) Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.



KATA SANG TOKOH

Pertanda kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi.

Albert Einstein

Sumber: <http://id.wikipedia.org>

Dengan demikian, profesi di bidang pers termasuk di dalamnya jurnalistik, tidak hanya bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pekerjaannya, melainkan bertanggung jawab pula kepada masyarakat dan pemerintahan.

1. Bentuklah kelompok kerja yang berjumlah 4 – 5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Kunjungilah stasiun televisi atau radio yang ada di sekitar sekolah Anda! Jika tidak ada, kunjungilah kantor redaksi surat kabar yang ada di kota Anda!
3. Mintalah salah seorang guru untuk mendampingi jalannya kegiatan tersebut!
4. Bertanyalah tentang proses membuat berita sampai disiarkan atau ditulis dalam surat kabar!
5. Bersama kelompok Anda, susunlah laporan hasil kunjungan tersebut! Laporan diketik rapi dan dijilid dengan bagus. Sepuluh karya terbaik akan diserahkan ke perpustakaan sekolah.

3) Penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini, sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu. Misalnya, Majelis Kode Etik di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Kehormatan di PWI.

Penafsiran Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) adalah sebagai berikut.

- a) Wartawan Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melaporkan dan menyiarkan informasi secara faktual dan jelas sumbernya. Selain itu, tidak menyembunyikan fakta serta pendapat yang penting dan menarik yang perlu diketahui publik sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Misalnya, kasus korupsi dan manipulasi di sebuah instansi pemerintah maupun swasta, konspirasi yang berniat menimbulkan kekacauan, wabah penyakit yang melanda wilayah tertentu, bahan makanan yang mengandung zat berbahaya atau tidak halal yang dikonsumsi oleh masyarakat/publik.
- b) Wartawan Indonesia dalam memperoleh informasi dan sumber berita/narasumber, termasuk dokumen dan memotret, dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, kaidah-kaidah kewartawanan, kecuali dalam hal *investigative reporting*.
- c) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
- d) Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.

- e) Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyuarakan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- f) Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- g) Wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan. Wartawan tidak memasukkan opini pribadinya. Dalam melaporkan dan menyiarkan informasi, wartawan perlu meneliti kembali kebenaran informasi. Dalam sengketa dan perbedaan pendapat, masing-masing pihak harus diberikan ruang/waktu pemberitaan secara berimbang.
- h) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
- i) Wartawan Indonesia tidak melaporkan dan menyiarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasar yang bersifat sepihak, informasi yang secara gamblang memperlihatkan aurat yang bisa menimbulkan nafsu birahi atau mengundang kontroversi publik. Dalam kasus tindak perkosaan/pelecehan seksual, hendaknya tidak menyebutkan identitas korban. Hal ini untuk menjaga dan melindungi kehormatan korban.
- j) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan.
- k) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat. Dalam hal pemberitaan yang merugikan seseorang atau kelompok, pihak yang dirugikan harus diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Pengawasan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini, sepenuhnya diserahkan kepada jajaran insan pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk.
- l) Wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari sumber berita yang berkaitan tugas-tugas kewartawanannya, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- m) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
- n) Wartawan Indonesia melindungi narasumber yang tidak bersedia disebut nama dan identitasnya. Berdasarkan kesepakatan, jika narasumber meminta informasi yang diberikan ditunda pemuatannya, harus dihargai. Hal itu juga berlaku untuk informasi latar belakang

b. Kode Etik Wartawan Internasional

Kode etik wartawan Internasional diterima dalam Kongres Sedunia Deferral Wartawan Internasional ke-2 di Bordeaux pada tanggal 25-28 April 1954 dan diamandemenkan oleh Konggres Sedunia Federasi Wartawan Internasional ke-18 di Helsingor pada tanggal 2-6 Juni 1986. Kode etik federasi wartawan internasional tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam melaksanakan kewajiban ini, wartawan harus membela prinsip-prinsip kebebasan dan pengumpulan publikasi berita secara jujur, dan hak atas komentar, serta kritik yang adil.
- 2) Wartawan sedapat mungkin meralat setiap pemberitaan yang telah dipublikasi yang ternyata tidak benar dan merugikan pihak lain.
- 3) Wartawan hendaknya menganggap pelanggaran-pelanggaran profesi bersifat berat dalam hal-hal berikut ini.
 - a) Penjiplakan/plagiat
 - b) Salah penulisan/pemberitaan secara sengaja.
 - c) Fitnah, pencemaran nama baik, dan tuduhan yang tidak berdasar.
 - d) Suap dalam bentuk apa pun untuk mempertimbangkan pemuatan berita ataupun untuk menyembunyikan fakta.
- 4) Menghormati kebenaran dan hak masyarakat akan kebenaran merupakan kewajiban utama seorang wartawan.
- 5) Wartawan hendaknya sadar akan bahaya diskriminasi yang dikarenakan oleh media. Oleh karenanya, sedapat mungkin berusaha menghindari tindakan diskriminasi yang didasarkan pada ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lainnya, serta asal usul kebangsaan atau sosialnya.
- 6) Wartawan yang berhak menyandang gelar tersebut hendaknya dengan setia menaati prinsip-prinsip tersebut di atas dalam menjalankan tugasnya. Dalam ketentuan umum di setiap negara, wartawan hendaknya hanya mengakui yuridiksi rekan sekerja dalam masalah profesi dan menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.
- 7) Wartawan hendaknya memberi laporan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui sumbernya dan tidak menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen.
- 8) Wartawan hendaknya mengakui kerahasiaan profesional berkenaan dengan sumber berita yang didapatkan karena kepercayaan.
- 9) Wartawan hendaknya menggunakan cara yang wajar/pantas untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.

3. Kebebasan Pers

a. Pengertian Kebebasan Pers

Pers nasional adalah pers Pancasila yang terlahir karena bangsa Indonesia berideologi dan berfalsafah Pancasila. Begitu juga dengan pers liberal, terlahir karena dasar falsafah liberalisme. Menurut Dewan Pers, definisi pers Pancasila adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta melihat segala sesuatunya secara proporsional.

Pers Pancasila hendaknya mencari keseimbangan dalam berita dan tulisannya demi kepentingan semua pihak sesuai dengan konstitusi negara, tata nilai budaya masyarakat, serta mempunyai misi mencerdaskan, masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberantas kebatilan. Dengan demikian, sekalipun mempunyai otonomi (*independence*), bukan berarti pers bersifat bebas dan kebal hukum dan segala kesalahan yang dilakukan secara tidak profesional.

Kebebasan pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers dituntut tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Kebebasan pers harus disertai tanggung jawab sebab kekuasaan yang besar dan bebas yang dimiliki manusia mudah sekali disalahgunakan dan dibuat semena-mena. Demikian juga pers harus mempertimbangkan apakah berita yang disebarkan dapat menguntungkan masyarakat luas atau memberi dampak positif pada masyarakat dan bangsa. Inilah segi tanggung jawab dan pers. Jadi, pers diberi kebebasan dengan disertai tanggung jawab sosial.

Pers yang bebas di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda dan Jerman Barat dituntut tanggung jawabnya sesuai dengan konstitusi undang-undang dasar atau undang-undang yang berlaku di negara-negara itu. Oleh karena itu, pers yang bebas harus sesuai dengan *rule of law*. Artinya, pers harus memerhatikan norma-norma hukum dan norma-norma masyarakat.

Sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi sehingga tidak menganut sistem pers bebas. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan perangkat-perangkat hukum, misalnya *Declaration of Independence*, *Bill of Rights* yang menyatakan bahwa model komunikasi massa di Amerika Serikat terkontrol oleh kekuatan besar, yakni negara. Pers di Amerika Serikat sampai saat ini tetap menganut teori *social responsibility* (teori tanggung jawab sosial) yang berada netral di tengah-tengah antara teori *libertarian* (kebebasan yang sebenar-benarnya) dan *authoritarian* (menghendaki adanya intervensi negara).

Di Inggris, kebebasan pers memiliki ciri tidak merusak *Magna Charta*, *Habeus Corpus Act*, dan *Bill of Right*. Kebebasan pers di Prancis tidak menghancurkan egalite dan fratemite, tetapi memupuknya. Hampir semua negara mencantumkan dalam hukum dasar negara tersebut mengenai jaminan akan adanya kebebasan berbicara dan berpendapat. Oleh karena itu, kebebasan pers merupakan partner yang baik dalam menegakkan *rule of law*. Kebebasan pers dalam negara demokrasi tidak terpisahkan dengan sistem demokrasi itu sendiri, yaitu bersumber dari rakyat, diolah oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat sesuai dengan tanggung jawab kebebasan pers terhadap rakyat. Dengan demikian, pers yang betul-betul bebas tidak ada sebagaimana pula manusia yang bebas sepenuhnya tidaklah ada.

b) Jaminan/Landasan Hukum Kebebasan Pers di Indonesia

Kebebasan pers adalah kebebasan dalam konsep, gagasan, prinsip, dan nilai cetusan yang bersifat naluriah kemanusiaan di mana pun manusia itu berada. Nilai kemanusiaan adalah naluri mengeluarkan perasaan hati kepada orang lain sebagai pribadi yang suaranya ingin diperhitungkan dan timbul dari keinginannya untuk menegaskan eksistensinya. Untuk itu, jenis kebebasan meliputi hal-hal berikut.

- 1) Kebebasan pers (*freedom of the press*).
- 2) Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of the opinion and expression*).
- 3) Kebebasan berbicara (*freedom of the speech*).

Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara di mana pun pers itu berada. Oleh sebab itu, jaminan kebebasan pers bersifat universal. Hal ini dijamin dalam Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut dijamin dalam ketentuan perundang-undangan dan merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga negara. Jaminan kebebasan berbicara dan informasi itu, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pasal 28 UUD 1945
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- 2) Pasal 28 F UUD 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- 3) Tap MPR No. XVII/MPR /1998 tentang Hak Asasi Manusia
Piagam Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang isinya sebagai berikut.
(20) “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”
(21) “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, me-ngolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia
(1) “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”

- (2) “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”



Sumber : <http://www.gotosanur.com>

Gambar 3.10 Keberadaan Warnet (Warung Internet) sangat membantu masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan memperlancar komunikasi dengan media internet.

- 5) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ayat 1 tentang Pers

Pasal 2 berbunyi, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Dengan adanya jaminan hak kebebasan berbicara dan informasi tersebut, warga negara mendapat perlindungan hukum serta bebas dari ancaman dan ketakutan dari pihak lain untuk berbicara dan mendapatkan informasi.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, kebebasan pers atau kemerdekaan pers diartikan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers sangat penting jika dihubungkan dengan salah satu fungsi pers, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

c. Aliran tentang Kebebasan Pers

Kebebasan pers memiliki empat aliran yang menghasilkan teori mengenai pers. Teori tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Teori Pers Totalitarian

Teori ini muncul di Rusia pada abad ke-19. Falsafah teori totalitarian adalah media massa sebagai alat negara untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada rakyat. Pengguna media adalah anggota partai yang setia. Media massa dikontrol secara ketat oleh pemerintah dan dilarang melakukan kritik atas tujuan dan kebijakan.

2) Teori Pers Libertarian

Teori ini muncul di Inggris, kemudian masuk ke Amerika Serikat hingga ke seluruh dunia. Falsafah teori ini adalah pers memberi penerangan dan hiburan dengan menghargai sepenuhnya individu. Teori libertarian menganut paham ideologi kebebasan pers yang sebeb-as-bebasnya tanpa ada campur tangan pengontrol terhadap media di dalamnya. Ideologi inilah yang diterapkan oleh media massa yang bercorak *free press*. Pers menjadi alat kontrol masyarakat kepada pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3) Teori Pers Social Responsibility

Teori ini menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial. Teori ini dikembangkan di Amerika Serikat pada abad ke-20. Falsafah teori ini adalah pers memberikan penerangan, hiburan, dan menjual produk. Namun, pers dilarang melanggar kepentingan orang lain dan masyarakat. Teori ini berada di tengah antara teori authoritarian dan libertarian. Hingga saat ini, dunia pers di Amerika Serikat menganut teori social responsibility yang berada netral di antara kedua kutub yang ada. Di satu sisi mereka menerima ideologi kebebasan pers dan bersamaan dengan itu mereka menerima intervensi pengaturan dan kontrol dari negara. Ide untuk menganut paham ini dipicu dengan kondisi simpang siurnya penggunaan gelombang transmisi elektromagnetik radio oleh dunia pers di Amerika Serikat. Tidak adanya kontrol yang ketat dari pemerintah mengakibatkan kekacauan dalam penggunaannya sehingga negara merasa perlu ikut campur dalam masalah dunia pers ini.

4) Teori Pers Authoritarian

Teori ini dikembangkan di Inggris mulai abad ke-16 dan 17, kemudian ke seluruh dunia. Falsafah teori authoritarian adalah pers menjadi kekuasaan mutlak kerajaan atau pemerintah yang berkuasa guna mendukung kebijakannya. Pers difungsikan untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Dengan demikian, yang berhak menggunakan media komunikasi adalah siapa pun yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah. Teori ini memberikan keleluasaan kepada negara untuk melakukan intervensi kepada pers.

d. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers

Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan, “Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Ini artinya, kemerdekaan pers bukan berarti pers merdeka dan bebas sebeb-as-bebasnya dalam menyajikan berita, melainkan juga harus diikuti dengan kesadaran akan pentingnya penyampaian berita yang santun, berkaidah jurnalistik, dan menjunjung supremasi hukum.

Tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik wartawan harus benar-benar dijalankan, tidak hanya dijadikan “macan kertas” yang harus mengalah demi kepentingan pragmatis.

Inilah makna hakiki kebebasan pers yang bertanggung jawab, masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih pemberitaan. Hal ini penting ditekankan, karena toh sebagian media terutama media-media “tidak jelas” tidaklah selalu benar dalam pemberitaan. Ingat, iklim kebebasan pers dan pemujaan kebebasan berpendapat, secara kontraproduktif kini justru dimanfaatkan oknum-oknum media untuk menyimpang dari orientasi perjuangan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Media massa dalam penyampaian beritanya untuk kehidupan masyarakat memiliki manfaat yang cukup besar. Mereka menggunakan alat atau media seperti koran, radio, televisi, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, namun jika fungsi penyampaian informasi/berita disalahgunakan hal ini dapat berdampak sebagai berikut antara lain:

- 1) Distorsi informasi: lazimnya dengan menambah atau mengurangi informasi, akibatnya maknanya berubah.
- 2) Dramatisasi fakta palsu: dapat dilakukan dengan memberikan ilustrasi secara verbal, auditif ataupun visual yang berlebihan mengenai suatu objek.
- 3) Mengganggu privacy: hal ini dilakukan melalui peliputan yang menggar hal-hal pribadi narasumber.
- 4) Pembunuhan karakter: dilakukan dengan cara terus menerus menonjolkan sisi buruk individu/kelompok/organisasi tanpa menampilkan secara berimbang dengan tujuan membangun citra negatif yang menjatuhkan.
- 5) Eksploitasi seks: media menampilkan seks sebagai komoditas secara serampangan tanpa memerhatikan batasan norma dan kepatuhan
- 6) Meracuni pikiran anak-anak: eksploitasi kesadaran berpikir anak yang diarahkan secara tidak normal pada hal-hal yang tidak mendidik.
- 7) Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*): media menyalahgunakan kekuatannya dalam mempengaruhi opini publik dalam suatu praktik *mass deception* (pembogongan massa).

Dampak negatif dari media berada dalam suatu bisnis yang bebas seperti berkurangnya jumlah media yang independen atau sikap masa bodoh terhadap pemberdayaan khalayak harus diminimilisir. Media yang memberdayakan masyarakat sudah semestinya merujuk pada gagasan normatif dari *social responsibility theory*. Menurut gagasan teori itu, media sudah seharusnya memenuhi kewajiban kepada masyarakat dengan pemenuhan profesionalisme penginformasian, kebenaran, akurasi, objektivitas, dan keseimbangan.

Media juga menolak apapun yang mengarahkan pada kejahatan, kekerasan, ketidakteraturan sosial, dan pelanggaran atas minoritas. Fungsi media massa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi cara yang kuat, penayangan adegan yang tidak layak di media-media elektronik begitulah wajah kebebasan pers Indonesia saat ini. Disatu sisi menanamkan tanggung jawab sosial, namun disisi lain keberadaannya dikhawatirkan menghancurkan moral bangsa ini. Inilah efeknya pers yang dihasilkan wajah pers Indonesia dengan karakter yang beragam seperti sekarang.

e. Upaya Mewujudkan Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan penegakan dan jaminan akan pelaksanaan hak-hak di atas. Salah satu media bagi penyaluran kebebasan berbicara dan mendapatkan informasi adalah pers atau media massa. Untuk dapat melakukan peranannya sebagai media penyaluran hak kebebasan berbicara dan informasi diperlukan adanya kebebasan pers.

Dalam mewujudkan pers yang bebas dan bertanggung jawab diperlukan kemerdekaan pers dalam setiap tindakannya. Akan tetapi, apakah hal itu tidak akan menjadi kebablasan bagi pers itu sendiri? Agar tidak terjadi tindakan penyelewengan bagi insan pers, kemerdekaan pers harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi. Bagaimanapun, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Kebebasan pers bukanlah kebebasan yang tidak ada batasnya. Batasan kebebasan pers adalah kebebasan dari pihak-pihak lain. Pers yang bebas dan mandiri tidak boleh melanggar batas-batas pribadi orang lain serta melanggar hak asasi pribadi pihak lain. Pers dalam negara demokrasi perlu memiliki tanggung jawab dalam pemberitaannya dan bertanggung jawab terhadap publik tentang sesuatu yang telah diberitakan. Pers yang memberitakan sesuatu cara tidak benar dapat dituntut oleh publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaannya. Tidak jarang berbagai pemberitaan yang dianggap merugikan dituntut atau digugat bahkan didemo oleh masyarakat. Masyarakat berhak melakukan penilaian dan menguji terhadap setiap pemberitaan dari media massa. Penyelesaian terhadap pers yang bermasalah dilakukan melalui jalur hukum. Kebebasan yang bertanggung jawab dari media massa pada akhirnya bergantung pada independensi dan profesionalisme para pekerjanya.

1) Ciri-ciri Pers yang Bertanggung jawab

Secara sengaja atau tidak, kebebasan pers yang bertanggung jawab berasal dari istilah *free and responsibility press*. Dalam konsep *free and responsibility press*, terdapat ketergantungan manusia yang semakin besar kepada media massa modern. Hal ini menimbulkan kewajiban baru (tanggung jawab) di pihak pers dan hak yang baru di pihak masyarakat. Ciri-ciri pers yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut.

- a) Memelihara ketertiban umum.
- b) Mengutamakan kejujuran dan fakta serta menghindari kebohongan (*people's rights to know*).
- c) Tidak menyesatkan masyarakat.
- d) Tidak menimbulkan keonaran dan keresahan serta tidak tendensius.
- e) Tidak melakukan pemaksaan.
- f) Tidak merusak kesusilaan (*obscenity*).

Seorang wartawan yang baik harus menghayati tanggung jawabnya dalam berbagai segi, yaitu terhadap:

- a) hati nurani sendiri,
- b) sesama warga negara yang juga memiliki hak asasi,
- c) kepentingan umum yang diwakili pemerintah, dan
- d) sesama rekan seprofesi.

Kebebasan pers harus berlandaskan pada hal-hal berikut.

- a) Pancasila.
- b) UUD 1945.
- c) Ketetapan MPR.
- d) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- e) Tata nilai masyarakat
- f) Etika.

Kebebasan pers terjamin apabila dalam suatu negara terpenuhi tiga syarat berikut.

- a) Tidak ada suatu kewajiban menurut hukum untuk meminta surat izin terbit bagi suatu pemberitaan pers kepada pemerintah.
- b) Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam suatu penerbitan pers.
- c) Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penerbitan pers, baik untuk selama-lamanya maupun untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Dewan Pers, kebebasan pers adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab dan sesuai dengan pers Pancasila. Makna bebas bukan berarti bebas tanpa aturan, tetapi bebas khas Indonesia, yakni tidak menganut kebebasan yang melahirkan negatif, seperti di negara komunis atau liberal dan juga tidak harus bertanggung jawab kepada pemerintah.

2) Jenis Tanggung Jawab pada Kebebasan Pers

Berdasarkan jenisnya, terdapat empat tanggung jawab yang harus dipikul oleh wartawan, yaitu sebagai berikut.

- a) Tanggung jawab terhadap media tempat wartawan itu bekerja dan organisasinya.
- b) Tanggung jawab sosial yang berakibat adanya kewajiban melayani opini publik dan masyarakat secara keseluruhan.
- c) Tanggung jawab dan kewajibannya yang berhubungan dengan keharusan bertindak sesuai dengan undang-undang.
- d) Tanggung jawab terhadap masyarakat internasional yang berhubungan dengan nilai-nilai universal.

Tanggung jawab dapat bersifat formal dan bersifat moral. Tanggung jawab bersifat formal adalah tanggung jawab terhadap hukum. Artinya, tanggung jawab yang dilakukan harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Adapun tanggung jawab yang bersifat moral adalah tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersumber pada nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat yang beradab.

Upaya mengembangkan kemerdekaan pers yang bebas dan bertanggung jawab, dibentuk Dewan Pers yang independen, yang bertujuan sebagai berikut.

- a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
- b) Mengkaji pengembangan kehidupan pers.
- c) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.
- d) Mempertimbangkan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat.
- e) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
- f) Memfasilitasi organisasi-organisasi dalam menyusun aturan pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan.
- g) Menginventaris data-data perusahaan pers.

Dalam mempertanggungjawabkan suatu berita, pers wajib memberikan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Selain itu, pers juga memiliki kewajiban melayani hak jawab, hak koreksi, serta hak jawab dan hak tolak.

1) Hak Jawab

Masyarakat memiliki kesadaran untuk menyampaikan kritik kepada pers melalui surat pembaca dan sejenisnya sebagai salah satu bentuk hak jawab, tetapi mekanisme keredaksian masih memiliki kelemahan sehingga masyarakat sering frustrasi. Dalam UU Nomor 40/1999 Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Pasal 5 Ayat 2 dan juga hampir semua kode etik jurnalistik mewajibkan pers melayani hak jawab. Wajib artinya harus dimuat.

2) Hak Koreksi

Dalam beberapa kode etik jurnalistik, tercantum bahwa wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri berhak dan wajib secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang ternyata tidak akurat dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional pada sumber dan atau objek berita. Adapun isi jawaban harus terkait pokok persoalan dan disampaikan secara *to the point*. Tujuan hak jawab dalam tradisi hukum media Anglo-Saxon adalah untuk mempersingkat penyelesaian perkara pers yang terkait *abuse of press freedom*.

3) Hak Tolak

UU Nomor 40/1999 Pasal 1 Ayat (10) menyebut hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama narasumber dan atau identitas sumber berita yang harus dirahasiakannya. Pertimbangan etis tertentu membuat wartawan harus menolak memberi keterangan dalam proses peradilan dan hakim harus menghormati keberatan itu.

Pembukaan rahasia antara reporter narasumber yang telah disepakati sebelumnya dapat dianggap tindak pidana menurut Pasal 322 KUHP. Dalam praktik penulisan berita, pelaksanaan hak tolak ini dapat diwujudkan. Misalnya, melalui kata-kata “menurut sebuah sumber yang layak dipercaya”, atau “menurut kalangan berwajib”. Belakangan hak tolak itu dipakai secara tidak selektif dan bertendensi melindungi kelemahan reportase wartawan yang bersangkutan, bukan melindungi keselamatan dirinya atau narasumbernya sehingga harus ada batas-batas hak tolak wartawan. Kriteria “rahasia” haruslah diperjelas, yaitu apabila ia dibuka kepada publik akan mengganggu ketertiban umum dan keselamatan negara. Wartawan hendaknya selalu bertanya, adakah risiko keamanan dan ruginya kepentingan umum jika suatu rahasia dari narasumber dipublikasikannya.

Ada dua model penyelesaian kasus pelanggaran kode etik, baik menurut UU Pers maupun aturan main yang disepakati dan dirumuskan oleh dewan pers bersama DPR serta berbagai kelompok masyarakat terkait. Model penyelesaian kasus itu adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelesaian secara formal prosedural.
- 2) Penyelesaian secara mandiri.

Dalam sidang tanggal 6 Juni 2000, Komisi I DPR sependapat dengan saran Dewan Pers agar penyelesaian kasus konflik media dengan publik ditempuh tiga jalur.

- 1) Melalui pemenuhan hak jawab narasumber oleh media pers.
- 2) Jika masih tidak puas, narasumber dapat mengadu/meminta bantuan kepada Dewan Pers sesuai Pasal 15 Ayat 2 UU Pers Nomor 40/1999.
- 3) Jika salah satu pihak tetap merasa tidak puas dengan rekomendasi Dewan Pers, ia dapat menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi dengan jumlah anggota 4-5, yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan masalah berikut ini!
 - a. Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kebebasan pers bagi kepentingan pribadi, masyarakat, dan Negara.
 - b. Manfaat pers dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pers.
3. Tulislah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok Anda, lalu salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapannya dan catatlah! Guru Anda akan bertindak sebagai moderator.
4. Serahkan kepada guru Anda, hasil diskusi kelompok Anda beserta catatan tanggapan dari kelompok lain! Guru Anda akan memberikan catatan komentar dan penilaian.



Rangkuman

1. Salah satu ciri suatu negara demokrasi adalah memiliki kebebasan pers.
2. Menurut UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
3. Secara umum, pengertian pers dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Pers dalam arti sempit, yang meliputi surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin kantor berita sehingga terbatas pada media yang tercetak.
 - b. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan internet.
4. Perkembangan pers di Indonesia terbagi atas tiga masa, yaitu:
 - a. masa Kolonialisme Belanda,
 - b. masa Pergerakan,
 - c. masa Kemerdekaan.
5. Fungsi pers adalah:
 - a. sebagai media informasi,
 - b. sebagai media pendidikan,
 - c. sebagai media hiburan,
 - d. sebagai media kontrol sosial,
 - e. sebagai media komunikasi,
 - f. sebagai lembaga ekonomi,
 - g. sebagai media investigasi,
 - h. sebagai media program sosialisasi dan kebijakan publik dari pemerintah kepada rakyat.
6. Pers memiliki peranan sebagai berikut.
 - a. Saluran informasi kepada masyarakat.
 - b. Saluran bagi debat publik dan opini publik.
7. Dalam penyampaian materi pemberitaan, hendaknya pers tidak lepas dari kaidah-kaidah jurnalistik. Oleh karenanya, pers dan jurnalistik sangat berkaitan erat.
8. Kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Ciri-ciri kode etik adalah sebagai berikut.
 - a. Kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok tersebut.
 - b. Daya jangkauan suatu kode etik hanya tertuju kepada kelompok yang mempunyai kode etik tersebut.
 - c. Kode etik dibuat dan disusun oleh lembaga/kelompok profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar.

9. Ciri-ciri pers yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut.
 - a. Memelihara ketertiban umum.
 - b. Mengutamakan kejujuran dan fakta serta menghindari kebohongan (*people's rights to know*).
 - c. Tidak menyesatkan masyarakat.
 - d. Tidak menimbulkan keonaran dan keresahan serta tidak tendensius.
 - e. Tidak melakukan pemaksaan.
 - f. Tidak merusak kesusilaan (*obsenity*).
10. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan peranannya, pers menghadapi banyak tantangan dan hambatan tersendiri. Pers ditantang untuk bekerja lebih profesional sesuai kode etik, sedangkan di pihak lain pers menghadapi masalah bagaimana cara mendapatkan tenaga yang profesional, cakap, dan terampil.
11. Penerapan pers yang bebas dan bertanggung jawab dikembangkan dan dibina dalam suasana harmonis terhadap lingkungan serta menumbuhkan kreativitas.
12. Melalui organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pers telah memiliki kode etik jurnalistik sebagai aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya.

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Media komunikasi dengar di masyarakat pedesaan yang sampai sekarang masih digunakan adalah
 - a. teriakan
 - b. kentongan
 - c. api unggun
 - d. terompet
 - e. menyalakan api

2. Penafsiran nilai-nilai demokrasi tidak lagi menjadi monopoli pemerintah karena para . . . mampu membandingkan demokrasi di negaranya sendiri dan demokrasi di negara lain.
 - a. pengusaha
 - b. badan usaha swasta
 - c. lembaga pemerintah
 - d. individu
 - e. demokrasi
3. Media cetak dan elektronik dapat memengaruhi pemikiran individu ataupun kelompok tentang kehidupan politik dan hak asasi manusia, terutama tentang
 - a. pemilu
 - b. kebebasan berpendapat
 - c. nasib buruh
 - d. nasib petani
 - e. demokrasi
4. Undang-undang yang mengatur tentang Pers adalah
 - a. UU No. 40 Tahun 2000
 - b. UU No. 40 Tahun 2002
 - c. UU No. 40 Tahun 1998
 - d. UU No. 40 Tahun 1999
 - e. UU No. 40 Tahun 2001
5. Fungsi pers yang memuat tulisan tentang pengetahuan bagi pembaca merupakan fungsi
 - a. menghibur (*entertain*)
 - b. tanggung jawab sosial (*social responsibility*)
 - c. informasi (*information*)
 - d. pendidikan (*education*)
 - e. kontrol sosial (*social control*)
6. Pers Indonesia selain berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial juga sebagai lembaga
 - a. sosial
 - b. seni
 - c. ekonomi
 - d. budaya
 - e. politik
7. Kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu dinyatakan dalam
 - a. Pasal 28 UUD 1945
 - b. Pasal 30 UUD 1945
 - c. Pasal 26 UUD 1945
 - d. Pasal 27 UUD 1945
 - e. Pasal 29 UUD 1945

8. Pers dapat berperan sebagai
 - a. mitra pemerintah yang penting
 - b. lawan pemerintah yang tangguh
 - c. sahabat yang diberitakan
 - d. lawan yang diberitakan
 - e. mitra ataupun lawan yang penting
9. Kebebasan pers memberikan kebebasan para wartawan dalam
 - a. melakukan kritik terhadap pemerintahan
 - b. menyampaikan berita berdasar keinginannya
 - c. menertibkan berita sesuai hati nurani
 - d. menerbitkan gagasan sesuai fakta
 - e. menulis berita sesuai naluri kewartawanannya
10. Media massa berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, media massa berfungsi sebagai komunikasi dari atas ke bawah. Hal itu berarti media massa berfungsi untuk. . . .
 - a. menyampaikan suatu berita
 - b. menginvestigasi suatu kasus
 - c. penyampai opini masyarakat
 - d. menyosialisasikan kebijakan
 - e. arena debat publik
11. Media massa menjadi ajang debat publik dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai saluran aspirasi

a. pusat ke daerah	d. bawah ke atas
b. kota ke desa	e. daerah ke pusat
c. atas ke bawah	
12. Pada masa kemerdekaan Indonesia, demokratisasi dan kebebasan pers pada tahun 1959 mengalami kemunduran karena diberlakukan sistem

a. demokrasi presidensial	d. demokrasi terpimpin
b. demokrasi liberal	e. demokrasi parlementer
c. demokrasi Pancasila	
13. Surat kabar pertama yang ada di Hindia Belanda adalah
 - a. *Tijtboek*
 - b. *Bataviasche Koloniale Courant*
 - c. *Bataviase Nouvelles*
 - d. *Memories der Nouvelles*
 - e. *Vendu Niews*

14. Contoh media seni tradisional yang dapat menjadi alat komunikasi di masyarakat adalah
- a. film
 - b. teater
 - c. radio
 - d. drama
 - e. ludruk
15. (1) Menyebarkan berita, yaitu fakta baru yang menarik dan penting.
(2) Menyampaikan informasi, termasuk latar belakang informasi yang ingin diketahui dan dibutuhkan.
(3) Menyajikan pandangan, analisis, dan komentar atas peristiwa, perkembangan, dan perubahan di segala bidang kemasyarakatan serta kenegaraan.
(4) Memberikan bacaan dan hiburan.
(5) Melakukan kontrol sosial sejauh mungkin.
(6) Membuat keputusan dalam suatu peristiwa.
Pada umumnya, tugas pers dinyatakan pada
- a. nomor 1, 3, 4, dan 6
 - b. nomor 1, 2, 3, dan 6
 - c. nomor 1, 2, 3, dan 6
 - d. nomor 1, 2, 4, dan 6
 - e. nomor 3, 4, 5, dan 6
16. Kemudahan masuknya informasi dari luar ke dalam negara Indonesia dikarenakan peran dari
- a. para wisatawan mancanegara
 - b. penyebar agama
 - c. bangsa asing
 - d. teknologi dan komunikasi
 - e. para nasionaris
17. Media dan pers bagi masyarakat dan negara adalah wahana untuk mewujudkan hak
- a. memiliki sesuatu
 - b. memeluk agama atau kepercayaan
 - c. mendapatkan jaminan hukum
 - d. memperoleh pekerjaan yang layak
 - e. menyatakan pendapat dan berbicara

18. Fungsi kontrol sosial dalam pers mempunyai tujuan
 - a. membantu tegaknya kesejahteraan
 - b. membantu tegaknya “*clean government*”
 - c. membantu tegaknya “*Supremacy of Law*”
 - d. membantu tegaknya keadilan dan keseimbangan
 - e. membantu tegaknya tanggung jawab
19. Berikut ini yang bukan termasuk media komunikasi modern adalah
 - a. internet
 - b. ludruk
 - c. radio
 - d. televisi
 - e. sinetron
20. Hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi telah dijamin dalam Tap. MPR, yaitu
 - a. Tap. MPR No. XVI/MPR/1998
 - b. Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998
 - c. Tap. MPR No. XIV/MPR/1998
 - d. Tap. MPR No. XV/MPR/1998
 - e. Tap. MPR No. XVII/MPR/1998

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Apa manfaat adanya perkembangan teknologi informasi sekarang ini? Jelaskan menurut pendapat Anda!
2. Berikan sebuah contoh opini internasional yang menurut Anda memojokkan nama baik Indonesia!
3. Penulisan berita hendaknya bersifat informatif, kritis konstruktif, dan edukatif. Menurut analisis Anda, haruskah pers mendukung penguasa atau mendahulukan kontak sosial serta membawa hiburan?
4. Bandingkan antara kebebasan pers pada era Orde Baru dan era Reformasi saat ini!
5. Berikan lima contoh media komunikasi tradisional yang masih digunakan masyarakat!

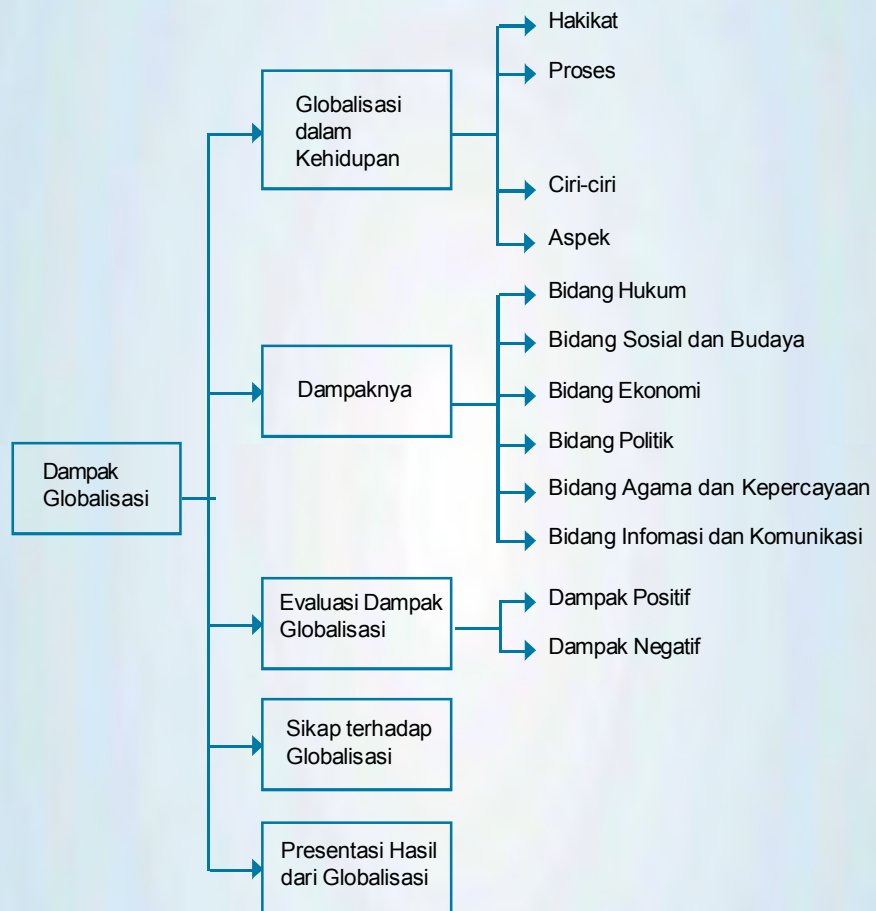
BAB

4

Dampak Globalisasi



PETA KONSEP



Saat ini sedang marak penggunaan jejaring sosial atau lebih dikenal dengan facebook. Situs sosial ini merupakan salah satu media *social network* yang sangat terkenal. Dengan facebook, Anda dapat berinteraksi dengan berbagai macam orang di seluruh dunia. Dengan fasilitas Internet, Anda dapat mengatasi jarak jauh menjadi dekat serta dapat digunakan berkomunikasi antarwarga suatu negara dengan warga negara lain yang saling berjauhan. Internet merupakan salah satu bentuk kemajuan perkembangan teknologi komunikasi. Selain perkembangan di bidang teknologi, saat ini juga terjadi perubahan gaya hidup di sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa makan restoran di McDonald atau di Kentucky Fried Chicken (KFC) lebih enak dan bergengsi daripada makan di restoran padang atau di Warteg merupakan bukti dari proses lokalisasi dari kebiasaan yang datang dari Amerika Serikat. Adanya kecenderungan saat menonton bioskop sambil makan *popcorn* dan minum *soft drink*, juga menjadi contoh dari proses lokalisasi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang datang dari budaya luar.

Kedua contoh di atas muncul akibat adanya pengaruh asing yang masuk dan memengaruhi pola/gaya hidup masyarakat Indonesia. Gejala inilah yang biasa dikenal dengan istilah globalisasi. Globalisasi seakan berubah menjadi “ideologi baru” dalam tatanan dunia sekarang ini. Semua masyarakat dunia telah memaklumi. Karakteristik masyarakat dunia yang super sibuk, serba cepat, berbudaya konsumtif, dan hedonis merupakan pengaruh adanya globalisasi. Globalisasi juga berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku kehidupan masyarakat di suatu negara.

Tahukah Anda tentang globalisasi ini? Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi ini? Akankah berdampak baik atau justru berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia? Untuk lebih memahami tentang globalisasi, pada bab ini Anda akan diajak belajar memahami pengertian dari globalisasi, aspek-aspek yang melingkupinya, dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun negatifnya, serta perlunya menyikapi pengaruh globalisasi ini.



KATA SANG TOKOH

Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda menyukai apa yang sedang Anda kerjakan

(Dale Carnegie)

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Dale_Carnegie

A.

Globalisasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Hakikat Globalisasi

Berdasarkan ilustrasi pada pendahuluan di atas, tahukah Anda yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, globalisasi merupakan proses masuk ke ruang lingkup dunia. Globalisasi berasal dari kata *globe/global* yaitu dunia atau bola dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai hal-hal/kejadian secara umum dan keseluruhan, yang terkait dengan dunia.

Di dalamnya mencakup kebijakan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang layak diperhitungkan. Istilah Globalisasi berasal dari kata “global”, artinya secara umum dan keseluruhan, taksiran secara bulat, secara garis besar. Istilah ini akan melibatkan kesadaran masyarakat dunia adalah kontinuitas lingkungan yang terkonsentrasi sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi juga dipandang sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan mampu membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terkait dan terikat satu sama lain, sehingga mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Globalisasi juga didefinisikan sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, Globalisasi tidak lain sebetulnya adalah suatu kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya (adidaya) praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil (lemah) akan makin tidak berdaya karena mereka tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti politik, sosial-budaya dan agama. Pemikiran **Theodore Levitte** yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “*Who Coined the Therm Globalization is Dead*” (1985), menjadikan ia orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985.

Arus globalisasi semakin lama semakin meningkat dan menyeluruh kepada setiap aspek kehidupan sehari-hari. Globalisasi telah berubah menjadi gaya hidup baru kosmopolitan yang ditandai oleh berbagai kemudahan hubungan dan terbukanya berbagai macam informasi yang akan memungkinkan individu mengikuti gaya-gaya hidup baru yang disenangi.

Globalisasi dewasa ini telah berubah menjadi kekuatan yang terus meningkat serta mampu menciptakan aksi dan reaksi dalam segenap kehidupan manusia di bumi. Globalisasi akan menciptakan dunia yang terdiri dari negara-negara terbuka untuk saling berhubungan terutama dengan ditunjang teknologi informasi yang sedemikian canggih. Topangan teknologi informasi ini pada gilirannya akan mampu merubah segi-segi kehidupan, baik kehidupan material maupun spiritual.

Sebelum dijelaskan lebih dalam tentang Globalisasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan globalisasi menurut pandangan para ahli. Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang globalisasi oleh para ahli :

a. Menurut Selo Sumardjan

Dalam bukunya yang berjudul “*Konflik-Konflik Sosial di Indonesia*” (2002), beliau berpendapat bahwa Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama.

b. Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye

Dalam bukunya yang berjudul “*After the Cold War*” (1993), mereka berpendapat bahwa Globalisasi yakni saling berhubungan, integrasi, dan saling keterkaitan antar masyarakat dan negara-negara seluruh dunia.

c. Menurut Emanuel Richter

Dalam bukunya yang berjudul “*Politische System and Comparative Politics*” (1998), dia menuliskan bahwa Globalisasi ialah suatu jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah ataupun terisolir ke dalam ketergantungan dan peraturan dunia.

d. Menurut Lodge

Dalam bukunya yang berjudul “*The Impact of Globalization*” (1996), Lodge mendefinisikan Globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan hidup.

Memang globalisasi tidak dapat diartikan secara satu per satu dalam bidang kehidupan. Namun masing-masing bidang akan saling berkaitan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Pada era Globalisasi sekarang ini, dapat diartikan bahwa dunia semakin mengecil dan menyempit sehingga proses hubungan antar bangsa dan negara makin dekat, komunikasi dan transportasi semakin cepat serta saling terpengaruh antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, Globalisasi akan melahirkan pandangan baru tentang konsep “*Dunia Tanpa Tapal Batas*” yang akan membawa kepada perubahan-perubahan baru di dunia. Dimana nantinya, secara tidak langsung sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat dan negara di seluruh dunia mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama.



Berpikir Kritis

Setelah memahami tentang pengertian Globalisasi, coba Anda kerjakan tugas berikut ini!

1. Susunlah esai singkat (3–5 halaman) mengenai latar belakang lahirnya globalisasi di suatu negara!
2. Anda dapat memilih studi kasus apa pun dan di negara mana pun.
3. Lengkapi hasil esai Anda dengan mencari data di internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar atau berbagai sumber lainnya.
4. Ketiklah dengan ketentuan font Times New Roman ukuran 12 point. Jilidlah dengan rapid an kumpulkan pada guru Anda untuk dinilai.!
5. Sepuluh esai terbaik akan diserahkan ke perpustakaan sekolah Anda.

2. Proses Globalisasi

Pada penghujung abad ke-20, umat manusia dihadapkan pada gejala baru, yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan proses yang panjang dalam sejarah dan telah mengalami enam tahapan sebagai berikut.

a. Tahap Embrional (tahun 1500-1800)

Pada bulan September 1522, Sevilla telah berada di Spanyol, setelah melakukan pelayaran yang mengelilingi bumi untuk pertama kalinya. Ia memberikan bukti secara eksklusif bahwa bumi itu bulat dengan rute-rute lautan untuk mempermudah pelayaran keliling.

b. Tahap Pertumbuhan (1810-1870)

Setelah tahun 1700-an, Eropa Barat telah keuntungan yang tidak merata dan kaum pedesaan yang miskin memperoleh hasil yang sangat kecil. Apalagi dengan diperkokoh oleh gelombang imperialisme abad ke-19.

c. Tahap *Take Off* (1870-1920)

Selama tahun 1870-an, beberapa kawasan dunia boleh dikatakan mempunyai kedudukan yang sebanding dalam gambaran ekonomi dunia. Cina, India, dan Ottoman Empire memainkan peranan ekonomi penting bersama Eropa Timur. Hal ini hampir sama dengan fenomena ekonomi global saat ini, di mana posisi kunci dari aktor-aktor ekonomi dan politik terletak pada garis segitiga antara Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat

d. Tahap Perjuangan Hegemoni (1920-1960)

Akhirnya, dampak dari Perang Dunia I dan depresi besar setelah itu serta digabungkan dengan gelombang nasionalisme yang mulai marak di negara-negara dunia ketiga, mulai menggerogoti Eropa. Akibatnya, kepemimpinan ekonomi global beralih ke tangan Amerika Serikat yang mulai mendominasi ekonomi global setelah Perang Dunia II. Namun, perusahaan-perusahaan multinasional belakangan ini telah membantu memperluas ekonomi global di luar kemampuan lembaga-lembaga politik, nasional, dan internasional.

e. Tahap Ketidakpastian (1960-1990)

Pada masa sejak periode perang dunia kedua berakhir hingga tahun 1970-an, ekonomi dunia didominasi oleh Amerika Serikat. Sekarang, meskipun produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat masih tetap paling besar, tetapi sekitar 45% dari PDB dunia merupakan peran dari Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara industri baru di Asia Tenggara dan Timur (Korea, Taiwan, dan Singapura) serta Cina sebagai motor penggerak ekonomi.

f. Tahap Kebudayaan Global (setelah 1990)

Banyak pendapat mengatakan bahwa proses globalisasi merupakan proses kehidupan yang serba luas dan tidak terbatas (mendunia) sehingga pengaruhnya dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Awalnya, pengertian globalisasi dipergunakan secara umum dalam bidang ekonomi. Bahkan, secara sederhana, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang semakin berkembang disertai dengan keterlibatan banyak negara dalam kegiatan ekonomi global.

Jadi, proses globalisasi ekonomi sendiri merupakan perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural yang berlangsung terus mengikuti perubahan teknologi dan peningkatan perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia yang semakin cepat. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan antar negara. Tidak hanya dalam perdagangan internasional, melainkan pula dalam bidang investasi, keuangan, dan produksi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), di satu sisi memberikan kemudahan hidup bagi umat manusia, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan berbagai perubahan, di antaranya pergeseran nilai. **Soejatmiko** menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan, yaitu perkembangan iptek, kependudukan, dan ekologi (lingkungan hidup). Penguasaan iptek menjadi kunci perubahan. Dalam konteks ini, menurut **John Naisbitt** dan **Patricia Aburdence** yang tertuang dalam sebuah buku yang berjudul “*Megatrend 2000*” (1990), bahwa negara-negara Barat yang berbahasa Inggris akan mendominasi gaya hidup (*life style*).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini telah banyak mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan, sehari-hari. Misalnya, penggunaan HP (handphone) atau telepon selular tidak hanya digunakan oleh golongan atas saja, melainkan sudah menjadi gaya hidup golongan menengah ke bawah. Fitur HP hampir setiap saat berganti dan menjelma menjadi alat yang dapat diakses dengan internet, games, kamera digital, atau fungsi-fungsi lainnya. Begitu pula komputer dengan program-program canggih mempengaruhi teknologi industri seperti teknologi, industri strategi angkatan perang, agro industri, rekayasa genetika, atau industri-industri lainnya.

Keenam tahapan itu merupakan akibat dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Revolusi ilmu pengetahuan dengan segala perwujudannya telah mendorong meluasnya budaya global dengan ciri mobilitas tinggi dan arus informasi yang tidak terbandung.

Adapun wujud dari arus budaya global ini adalah sebagai berikut.

- a. Arus etnis ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengungsi, tenaga kerja, dan pendatang. Arus manusia ini telah melewati batas-batas teritorial negara.



KATA SANG TOKOH

Seorang intelektual adalah orang yang pikirannya menjaga pikirannya sendiri

(Albert Camus)

Sumber: <http://rien18.files.wordpress.com>

- b. Arus teknologi ditandai dengan mobilitas teknologi munculnya *multinational corporation* dan *transnational corporation* yang kegiatannya dapat menembus batas-batas negara.
- c. Arus keuangan yang ditandai dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi. Pembelian melalui internet penyimpanan uang di bank asing.
- d. Arus media yang ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai peristiwa di belahan dunia seakan-akan berada di hadapan kita karena cepatnya informasi.
- e. Arus ide yang ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Dalam arus ide ini muncul isu-isu yang telah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Isu-isu ini merupakan isu internasional yang tidak hanya berlaku di suatu wilayah nasional negara (isu persamaan gender, isu demokratisasi, isu perbaikan upah buruh, isu HAM, isu lingkungan hidup).

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa arus budaya global terutama arus ide telah memunculkan berbagai isu internasional, Kita sebagai bangsa tidak dapat lagi mengisolasi diri karena batas-batas negara tidak mampu lagi menutup serbuan arus global. Saling ketergantungan dan hubungan antarbangsa mengharuskan bangsa Indonesia berinteraksi dan berkompetisi untuk kemajuan.

Dalam bukunya yang berjudul “*A Globalizing Society?*” (2000), **Cochrane dan Pain** (2000) menjelaskan bahwa dalam Globalisasi, terdapat tiga posisi teroris dalam memandang Globalisasi itu sendiri, yaitu :

1. Para Globalis

Para Globalis menyakini bahwa Globalisasi adalah sebuah realitas yang terjadi di dunia, yang memiliki konsekuensi-konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka yakin bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal lama kelamaan akan hilang akibat diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Namun para globalis tidak mempunyai pandangan sama tentang konsekuensi-konsekuensi terhadap proses Globalisasi tersebut. Dalam memandang Globalisasi, para Globalis terbagi menjadi 2 kategori, yaitu :

a. Para Globalis Optimis

Para Globalis Optimis ini memberikan tanggapan baik terhadap perkembangan Globalisasi semacam itu dan menyatakan bahwa Globalisasi akan mampu menghasilkan masyarakat dunia yang toleran, bertanggung jawab dan sejahtera.

b. Para Globalis Pesimis

Para Globalis Pesimis berpendapat bahwa Globalisasi ialah sebuah fenomena negatif. Mereka beranggapan bahwa Globalisasi sebenarnya adalah suatu bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang nampaknya benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).

2. Para Tradisionalis

Para Tradisionalis adalah sekelompok orang yang tidak percaya bahwa Globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena Globalisasi hanyalah sebuah mitos semata atau, jikalau memang ada dan terjadi, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital.

3. Para Transformasionalis

Para Transformasionalis berada pada posisi di antara para globalis dan tradisionalis. Di suatu sisi, mereka setuju bahwa pengaruh Globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai “seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung”. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

Dalam bukunya yang berjudul “*Knowledge, Wealth and Violence at The Edge of the 21st Century*” (1990), **Alvin Toffler** menyatakan bahwa perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami tiga gelombang berikut ini.

- a. Gelombang I : peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 SM-1500 SM
- b. Gelombang II : peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 SM-1970 M
- c. Gelombang III: peradaban informasi berlangsung mulai 1970 M - sekarang.

Masing-masing gelombang peradaban tersebut dikuasai oleh tingkat teknologi yang digunakan. **Gelombang pertama** (*the first wave*) disebut juga dengan *revolusi hijau*. Dalam gelombang pertama ini, pertanian terbatas pada pengelolaan lahan-lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan manusia.

Gelombang kedua adalah adanya revolusi industri terutama di negara-negara Barat yang dimulai dengan revolusi industri, yakni di Inggris. Penemuan serta selanjutnya penggunaan mesin-mesin industri, mesin uap, mesin-mesin pemintal dalam berbagai industri tekstil, dan industri tambang telah mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Inggris pada khususnya dan bangsa-bangsa Eropa pada umumnya. Namun pada saat itu berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, sejak penerapan “politik pintu terbuka” pada masa Orde Baru, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti : Freeport, Caltex, ARCO dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever & Shell dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon (Simbol) globalisasi hingga saat ini.

Gelombang ketiga merupakan revolusi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang secara cepat sehingga memudahkan orang untuk saling berkomunikasi dalam berbagai bidang. Runtuhnya paham komunisme di daratan Eropa, seakan memberi pembenaran bahwa Kapitalisme ialah merupakan jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Sebagai Implikasinya, negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antar negara pun mulai kabur.

Gelombang ketiga ini melahirkan suatu masyarakat dunia yang dikenal sebutan *the global village* (kampung global). Kita sekarang berada pada gelombang ketiga atau masa revolusi informasi.

Diperkirakan era informasi ini akan mencapai puncaknya pada 10-20 tahun mendatang.

Proses globalisasi terus bergerak menjadi tiga bidang utama dalam kehidupan manusia, yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya, arus globalisasi berkembang ke bidang-bidang lainnya yang lebih spesifik, seperti berikut ini.

- a. Globalisasi keuangan dan kepemilikan modal.
- b. Globalisasi pasar dan strategi ekonomi.
- c. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Globalisasi budaya.
- e. Globalisasi peraturan/undang-undang.
- f. Globalisasi politik internasional.
- g. Globalisasi persepsi dan sosial budaya internasional termasuk pendidikan.

Jika suatu bangsa memperlihatkan ketidakmampuan mengikuti arus globalisasi terutama negara yang tingkat kehidupan dan pembangunannya masih dalam tradisional, hal itu akan menimbulkan kerawanan hubungan internasional dan berpengaruh pula pada kondisi dalam negeri. Misalnya, kerawanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Suatu negara dikatakan masih mengalami tingkat kehidupan tradisional karena kondisi negara itu berawal dari negara agraris dan sedang menuju negara yang lebih modern atau negara industri.

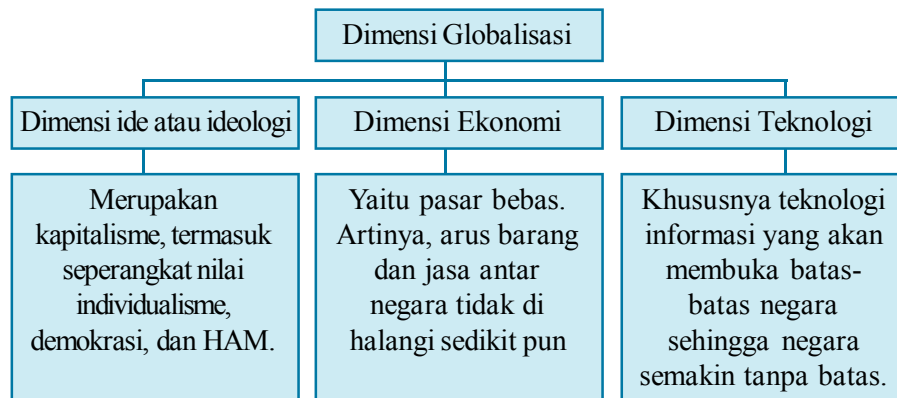


KATA SANG TOKOH

Karakter tidak dapat dibentuk dengan cara mudah dan murah. Dengan mengalami ujian dan penderitaan jiwa karakter dikuatkan, visi dijernihkan, dan sukses diraih

(Helen Keller)

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller



Gambar 4.1 Bagan Dimensi Globalisasi

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 3–4 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Carilah sumber berita (koran, majalah, internet, televisi, dan radio) mengenai sebuah kasus di suatu negara yang menurut Anda telah menjadi kasus internasional karena berkaitan dengan isu global!
3. Gunakan lembar kerja di bawah ini untuk membantu memudahkan Anda!.

Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Isu Internasional

No	Isu Internasional	Contoh Kasus	Sumber
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. Salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan, lalu catatlah!
5. Kumpulkan hasil kerja kelompok Anda beserta catatan tanggapan dari kelompok lain tersebut kepada guru Anda!

3. Ciri-Ciri Globalisasi

Menurut **Thomas L. Friedman**, seperti yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *“The Lexus and The Olive Tree”* (1999), globalisasi mempunyai dimensi ideologi, yaitu kapitalisme dan dimensi ekonomi (pasar bebas). Selain itu, juga memiliki dimensi teknologi, yaitu teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Oleh karena itu, menurut Thomas L. Friedman, kita harus mengenakan “baju baru” atau *“software”* yang cocok untuk dapat mengikuli arus globalisasi.

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia.

- a. Perubahan dalam konstelasi ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam (HP), televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
- b. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization* (WTO).
- c. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode cara berpakaian (fashion), literatur, dan makanan.
- d. Meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional.

Tanda-tanda munculnya globalisasi adalah sebagai berikut.

1) *Menguatnya Ruang Pribadi (Personal Space)*

Ruang kebebasan pribadi untuk mengekspresikan pendapat, jati diri, dan kepribadian semakin menyempit. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesan atau tuntutan-tuntutan dari kehidupan modern yang harus dilaksanakan. Akibatnya, beban moral semakin berat dan seolah-olah tidak ada lagi kemerdekaan pribadi untuk mengembangkan ide-ide aslinya. Ditambah lagi dengan nilai-nilai lama yang dijunjirbalikkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang materialistis.

2) *Sebagai Era Kompetisi*

Globalisasi memberikan tingkat kompetisi ekonomi-politik antar bangsa, baik dari kacamata *struggle of power* (konflik) maupun equilibrium (keseimbangan). Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak.

Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

3) Tingginya Intensitas Hubungan Antarbudaya, Norma Sosial, Kepentingan, dan Ideologi Antarbangsa

Internet dan satelit-satelit komunikasi menghubungkan banyak negara di dunia. Secara sosiologis, hal ini sering disebut sebagai desa buana (*global village*). Konsekuensi yang sangat penting dari adanya globalisasi adalah setiap bangsa dituntut memiliki kesiapan kultur untuk melakukan integrasi terhadap sistem internasional tanpa terkaburkan oleh identitas kesatuan nasionalnya. Selain itu, globalisasi menyebabkan terjadinya kesenjangan yang semakin melebar antara moralitas dengan intelektualitas. Dengan demikian, globalisasi menyebabkan semakin besarnya tantangan atau problem kehidupan.

Menurut **Martin Khor**, seperti yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “Rethinking Globalization” (2001), terdapat dua ciri utama globalisasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam globalisasi terdapat peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional (multinasional). Perusahaan transnasional adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan barang atau melayani pasar di lebih dari satu negara.
- 2) Globalisasi dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional, yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang tadinya berada dalam yurisdiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah negara bangsa, sekarang bergeser menjadi di bawah pengaruh atau proses badan-badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi dan keuangan inter-nasional.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 4–5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Lakukan survei terhadap produk hasil pertanian/perkebunan/industri atau produk lainnya di sekitar tempat tinggal Anda yang telah diekspor ke luar negeri! (Misalnya: perkebunan teh, kerajinan batik, dan sebagainya, yang menjadi ciri produk ekspor dari wilayah Anda)
3. Buatlah laporan singkatnya, lalu presentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain menanggapi dan catatlah!
4. Kumpulkan hasilnya pada guru Anda untuk dinilai!

4. Aspek Globalisasi

Globalisasi adalah suatu perkembangan yang tidak bisa dielakkan ataupun dicegah. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang menghasilkan media massa yang canggih mempermudah terjadinya globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia seluruh dunia menjadi satu sistem komunikasi. Teknologi telah memperlancar terbentuknya budaya dunia, yakni budaya yang dianut oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Budaya tersebut bisa saja berasal dari salah satu bangsa atau ras. Namun, proses globalisasi menjadikannya budaya semua orang diperkenalkan secara sistematis dan intensif ke seluruh pelosok dunia.

Bagi kehidupan bangsa Indonesia, masuknya pengaruh asing dalam era globalisasi ini sudah tidak dapat dibendung lagi. Komunikasi antar bangsa di dunia menjadi semakin intens. Kemajuan teknologi dan sistem informasi bangsa-bangsa lain pun cenderung semakin meningkat. Hal tersebut membawa konsekuensi pengaruh yang luas. Bangsa Indonesia tidak dapat menutup diri atau menerapkan politik pintu tertutup dalam era globalisasi. Jika politik pintu tertutup dilaksanakan, justru akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus melakukan politik pintu terbuka dengan melakukan seleksi yang benar sehingga dapat menguntungkan bangsa Indonesia.

Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang menghuni Nusantara (sebelum bangsa Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Pada hakikatnya bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar. Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak dari luar. Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengaruh dunia luar adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu ditakutkan. Pengaruh tersebut selamanya mempunyai dua sisi, yaitu positif dan negatif.

Jadi, bangsa Indonesia harus dapat mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM-nya) agar mampu menyeleksi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepripadian bangsa. Adanya aspek positif dan negatif dari globalisasi sangat bergantung pada negara yang menerimanya. Bangsa Indonesia tidak akan mendapatkan segi positif dari globalisasi apabila tidak mampu menyiapkan diri dengan baik. Sebaliknya, kita akan mampu menghindari aspek-aspek negatif dari globalisasi apabila kita juga mampu mempersiapkan diri dengan baik pula.

Tabel 4.1 Dampak Positif dan Negatif dari Globalisasi

Aspek Kenegaraan	Positif	Negatif
1. Bidang Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan di banyak negara. b. Terjadinya perubahan lembaga-lembaga negara. Misalnya untuk di Indonesia, lahirnya Mahkamah Konstitusi, dihapuskannya DPA, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau perubahan-perubahan lainnya. c. Meningkatnya kemunculan partai-partai politik baru. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih partai, anggota legislatif, presiden dan wakil presiden secara langsung, tampak antusias dan nampak masyarakat untuk turut menyaksikan kegiatan tersebut. Begitu pula di dalam pemilihan langsung kepala daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Munculnya sikap arogansi politik (kekuasaan dan politik) b. Berkembangnya tradisi <i>money politic</i> dalam kehidupan masyarakat.
2. Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Rakyat secara mudah memperoleh barang konsumtif yang diperlukan. b. Mempermudah proses pembangunan industri. c. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. d. Membuka lapangan kerja yang memiliki keterampilan kerja. e. Suku bunga bank rendah. f. Meningkatkan ekspor terutama barang hasil produksi industri kecil dan besar serta hasil kerajinan rakyat. g. Melaksanakan ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan Pancasila terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 33 UUD 1945. h. Menghindari pola hidup konsumtif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Matinya usaha kecil yang tidak kompetitif. b. Munculnya kebijaksanaan pemerintah yang tidak menguntungkan petani. c. Upah kerja yang belum profesional atau masih rendah. d. Jumlah angka pengangguran masih tinggi.
3. Bidang Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa. b. Terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. c. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesulitan pengendalian dan seleksi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mudah nya memperoleh barang-barang ilegal, seperti barang-barang pornografi dan narkoba. c. Pudarnya rasa kebersamaan menjadi kehidupan individualis. d. Makin meningkatnya budaya kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
4. Bidang Hankam	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama pertahanan dan keamanan b. Diperlukan pasukan bersenjata untuk kepentingan perdamaian negara-negara yang sedang bergejolak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Munculnya gerakan-gerakan separatisme. b. Adanya gejala disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. c. Terjadinya pelanggaran teritorial negara Republik Indonesia. d. Adanya campur tangan pihak asing terhadap kebijaksanaan dalam negeri Indonesia.

Masyarakat dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar dapat memenangkan arus globalisasi ini. Tujuannya untuk mendapatkan segi-segi positif dari globalisasi dan mampu menghindarkan diri dari aspek negatif globalisasi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut.

- a. Pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan.
- b. Pemberian keterampilan hidup (life skill) agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian.
- c. Usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global, seperti mandiri, kreatif, menghargai karya, optimis, dan terbuka.
- d. Usaha selalu menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional.
- e. Usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis.



Sumber : <http://rosakademifesyen.files.wordpress.com>

Gambar 4.1 Didirikannya lembaga kursus-kursus yang memberikan keterampilan hidup (life skill) kepada para angkatan kerja usia produktif termasuk upaya menangkal pengaruh negatif globalisasi.



Dampak Globalisasi

Arus globalisasi mempengaruhi selera, ekspresi, kepercayaan, media, nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepariwisataan seperti yang dijelaskan panjang lebar pada materi proses globalisasi. Pada satu sisi globalisasi telah menciptakan beberapa peluang yang dapat menguntungkan kehidupan manusia. Yaitu suasana kehidupan manusia menjadi makin mudah, nyaman, praktis, berkualitas serta bekerja makin cepat dan efisien. Pada sisi lain, globalisasi dapat menimbulkan tantangan bagi seseorang. Orang secara individu atau masyarakat dan lembaga menjadi sulit, makin menderita, makin terpinggir, dan makin mempunyai masalah yang kompleks.

Secara langsung maupun tidak langsung arus globalisasi melibatkan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat dari prosesnya, globalisasi adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan yang terus tumbuh dan berkembang. Sekarang terserah kepada bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi tersebut. Secara garis besar, dampak globalisasi dapat berpengaruh pada aspek-aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara.

Menurut Baharuddin Darus dalam buku “Ilmu Sosial Dasar” karya Abu Ahmadi (1991), konfigurasi (wujud) globalisasi meliputi beberapa bidang diantara teknologi, hukum, ekonomi politik, ilmu pengetahuan dan teknologi budaya, agama. Berikut akan dijabarkan dampak dari globalisasi itu.

1. Dampak Globalisasi di Bidang Hukum

Globalisasi telah meningkatkan interdependensi antar negara. Salah satu bentuknya adalah berlakunya standar-standar baku internasional di berbagai bidang kehidupan, melemahnya ikatan primordial, nasional dan etnosentrisme. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas kenegaraan dan ada lagi negara yang mengklaim bahwa ia menganut suatu sistem hukum secara absolut. Telah terjadi proses saling mempengaruhi antar sistem hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia misalnya, mengalami proses saling mempengaruhi dengan sistem hukum Anglo Saxon.

Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruh globalisasi hukum. Fenomena ini tampak pada aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya perubahan, keterbukaan, keadilan, dan demokrasi. Kecenderungan perubahan di bidang hukum yang dipengaruhi oleh globalisasi adalah diratifikasinya beberapa perangkat konvensi hukum internasional menjadi hukum nasional Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi membuka pintu terhadap pengawasan internasional dan menginternasionalkan masalah nasional (dalam negeri). Walaupun demikian, Indonesia tetap mempunyai sistem hukum sendiri yang mengakomodasi nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

2. Dampak Globalisasi di Bidang Sosial Budaya

Globalisasi memberikan peluang terjadinya migrasi secara besar-besaran dengan blok budaya berbeda. Beragam budaya, etnis, ras, warna kulit membawa perubahan masing-masing sehingga muncul pluralisme dan multiculturalism. Aspek-aspek positif dapat diambil dari globalisasi budaya.

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Efek globalisasi terhadap budaya nampak antara lain pada budaya konsumsi. Coca Cola dan McDonald's atau makanan siap saji lainnya yang diiklankan melalui televisi diberbagai belahan dunia dikonsumsi dan dinikmati oleh penduduk di berbagai belahan dunia. Hal ini mempengaruhi budaya konsumsi di kalangan masyarakat di berbagai penjuru dunia. Meskipun demikian, tradisi-tradisi masyarakat terus menguat di era ini, seperti berdoa (istigasah), selamatan, dan dakwah.

Dengan berbagai kondisi seperti itu, disadari atau tidak, di era globalisasi ini terdapat kenyataan yang tidak dapat dimungkiri, yaitu terdapat pertarungan peradaban atau pertarungan antara budaya Barat dengan Timur. Sepertinya, budaya Baratlah yang menjadi pemenang dari pertarungan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikasinya bahwa remaja masa kini begitu menggandrungi budaya impor yang datang dari Barat.

Ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan adalah sebagai berikut.

- 1) Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
- 2) Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
- 3) Berkembangnya turisme dan pariwisata.
- 4) Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
- 5) Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
- 6) Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA

3. Dampak Globalisasi di Bidang Ekonomi

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Munculnya globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional dan regional. Dengan demikian, banyak negara yang terlibat menjadi satu proses global / mendunia mengikuti kekuatan pasar global sehingga tidak ada kondisi dari pemerintah.

Begitu pula dengan kedaulatan pemerintahan negara dalam menentukan kegiatan ekonomi negara, secara perlahan mulai terbuka dan aturan-aturan menghilang. Komunikasi dan transpor semakin canggih dan murah, lalu lintas semakin bebas, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan kompetitif, serta metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien. Proses globalisasi diwujudkan dalam bentuk perdagangan bebas tanpa hambatan.

Globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sebuah sistem ekonomi global. Segenap aspek perekonomian, pasokan dan permintaan, bahan mentah informasi dan transportasi, tenaga kerja keuangan, distribusi, serta kegiatan pemasaran menyatu dan terintegrasi serta terjalin dalam hubungan saling ketergantungan yang berskala dunia. Perjanjian internasional di Marekash, Maroko, pada bulan April 1994 telah menghasilkan kesepakatan internasional yang disebut *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). GATT menjadi tonggak awal dimulainya era globalisasi bidang ekonomi.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1995 dibentuk suatu organisasi pengawasan dan kontrol perdagangan global yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO). Selanjutnya, disusun dengan pembentukan blok-blok ekonomi, seperti di ASEAN dibentuk *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang dimulai sejak tahun 2003, di negara-negara Asia-Pasifik dibentuk *Asia Pacific Economic Corporation* (APEC) sejak bulan November tahun 1989, di kawasan Eropa dibentuk *Single European Market* (SEM) dengan berlakunya mata uang Eropa yaitu Euro, serta di negara-negara Atlantik Utara dibentuk *North America Free Trade Area* (NAFTA).

Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut.

- a. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

- b. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (*build-operate-transfer*) bersama mitrausaha dari mancanegara.
- c. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
- d. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi melalui televisi, radio, media cetak, dan sebagainya. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Misalnya: hadirnya makanan siap saji KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger yang melanda pasar. Akibatnya selera masyarakat dunia - baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
- e. Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

4. Dampak Globalisasi di Bidang Politik

Globalisasi mempengaruhi aplikasi kekuasaan, hubungan internasional, kedaulatan negara, dan organisasi internasional. Termasuk di dalamnya adalah perbatasan antar negara tetangga atau bentuk perjanjian-perjanjian / traktat internasional. Misalnya, hubungan Indonesia dan Malaysia yang semula bersahabat, sempat berselisih paham karena masalah TKI ilegal, penyelundupan kayu logging oleh warga Malaysia, serta lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia dan kini menjadi bagian kedaulatan Malaysia.

5. Dampak Globalisasi di Bidang Agama dan Kepercayaan

Proses globalisasi yang imanen dan berdimensi global dapat menyentuh tradisi agama yang mempunyai kekuatan norma, nilai, dan makna yang memberikan dasar etika bagi kehidupan masyarakat. Taraweh di Masjidil Haram pada bulan suci Ramadhan yang ditayangkan sebuah televisi di Indonesia lebih memberikan nuansa religius bagi pemirsanya dan cenderung memberikan motivasi pemirsa untuk melaksanakan taraweh di bulan suci ramadhan.

Namun demikian, akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dapat pula menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, budaya, dan agama. Pengaruh negatif yang mungkin terjadi dapat membuat orang mencari alternatif spiritual lain untuk pemaknaan makna hidupnya. Sesungguhnya, alternatif ini dapat berasal dari filsafat dan sumber-sumber lainnya yang dirangkum sedemikian rupa untuk mengembangkan sistem atau ajaran baru yang dianutnya sendiri. Bahkan bisa jadi berujung terhadap penistaan dan penodaan terhadap agama-agama yang ada.

6. Dampak Globalisasi di Bidang Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang didukung dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan efektivitas dan efisiensi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia.

Proses komunikasi melalui media massa, seperti radio, televisi, surat kabar, dan film yang didukung dengan teknologi canggih dapat mengatasi jarak antara penyampai pesan dan penerima pesan. Media-media massa tersebut dapat dipergunakan untuk berkomunikasi antar warga dan menciptakan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa. Sebagai contoh, barang yang ditawarkan melalui iklan televisi atau surat kabar relatif mudah dinilai orang.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi komunikasi melalui media massa terutama televisi dan surat kabar di era globalisasi mampu mempengaruhi pola pikir individu dan masyarakat.

Industri pariwisata di suatu negara yang ditawarkan melalui media meningkatkan arus wisatawan. Pernyataan seorang elite politik yang disiarkan melalui radio atau ditayangkan melalui televisi dan dimuat di media surat kabar dapat dengan cepat direspons oleh publik dengan cepat

Tabel 4.2 Peluang dan Tantangan dalam Arus Globalisasi

Arus Globalisasi	Peluang	Tantangan
Pasar Bebas	Suatu kesempatan untuk mengeksport hasil produksi ke luar negeri.	Produk yang dipasarkan harus berkualitas dan kompetitif dengan harga dijangkau oleh pasar global
Iptek	Perkembangan iptek menjadi mudah dan cepat diterima	Dampak dari iptek bisa menimbulkan pengangguran yang besar
Budaya	Aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing ke dalam budaya bangsa mudah berinteraksi dan terintegrasi	Harus mampu menciptakan filter terhadap budaya yang berdampak negatif
Bisnis dan pemerintah	Membuka selebar-lebarnya agar investor dapat menanamkan investasinya	Bisnis menjadi terbuka (transparan) dan profesional, banyak wisatawan mancanegara yang datang sehingga menambah pendapatan perkapita
Lapangan kerja	Terbuka dan banyak	Persaingan semakin ketat, inovatif, dan kreatif

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 4 - 5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah masalah bahwa : Globalisasi harus diwaspadai sebagai "Wabah" yang dapat memengaruhi gaya hidup atau budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengaruh negatif harus dicegah dengan memperkuat ketahanan diri serta memegang teguh nilai - nilai luhur Pancasila.
3. Agar lebih mudah kalian berdiskusi sebelum menguraikannya ke dalam bentuk tulisan, pakailah tabel kerja di bawah ini :

Lingkungan	Akibat dari Globalisasi		Alternatif penyelesaian agar tidak berdampak negatif
	Positif	Negatif	
Keluarga
Sekolah
Masyarakat
Bangsa dan Negara

4. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas dan mintalah kelompok lain menanggapi hasilnya!

C.

Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Akibat globalisasi yang melanda dunia, maka mau tidak mau dan atau suka tidak suka, kehidupan berbangsa dan bernegara akan terpengaruhi. Untuk itu, setiap orang harus mempunyai pandangan atau perspektif global yang tepat dan efektif. Negara Indonesia telah mempunyai landasan atau pedoman yang tangguh dan baik, yaitu Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia seharusnya mampu menyaring nilai-nilai budaya luar sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju, tertib, tenteram, adil, makmur tanpa mengurangi atau menghilangkan kepribadian bangsa Indonesia.



KATA SANG TOKOH

Apabila seseorang itu membatasi kemampuannya, pada waktu yang sama dia telah membatasi hasilnya

(Charles M. Schwab)

Sumber: <http://hariansib.net>

Perspektif global adalah cara pandang dan wawasan untuk melihat bahwa dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi dan produk-produk global, sehingga semua bangsa mempunyai ketergantungan. Ketergantungan tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.



Sumber : <http://foto.detik.com>

Gambar 4.2 Dengan mencintai produk dalam negeri, termasuk upaya menangkal dampak negatif globalisasi di bidang sosial-budaya.

Peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi berpengaruh pula pada nilai-nilai dan elemen-elemen kehidupan manusia. Selanjutnya, pergeseran ini mempengaruhi atau menimbulkan pergeseran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perhatikan hal-hal berikut :

1. Pengaruh Globalisasi Teknologi di Indonesia

Pengaruh globalisasi teknologi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu motor penggerak lahirnya globalisasi. Globalisasi di bidang teknologi ditandai dengan pesatnya komunikasi dunia yang sangat tangguh. Hal ini sebelumnya tidak dapat dibayangkan akan terjadi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, aman dan murah menimbulkan proses kegiatan ekonomi berlangsung terus dan kian meningkat pesat.

Kondisi itu membawa dampak bagi sistem politik dan ekonomi nasional semua negara, termasuk Indonesia. Seperti telah dijelaskan pada bagian depan bahwa dengan adanya globalisasi itu dapat dikatakan bahwa negara dan pemerintahan tidak lagi memiliki peran yang benar. Negara dan pemerintahan bukan lagi sebagai satu-satunya pemegang kontrol. Dengan timbulnya masalah yang cukup rumit dan berkembang dengan cepat, negara atau pemerintahan tidak mampu menanganinya dengan cepat. Pada keadaan ini muncullah peran badan usaha swasta dengan berbagai macam titik tolak pemikiran mereka.

Badan usaha swasta yang muncul tidak hanya dari dalam negeri, melainkan justru dari negara asing. Hal inilah yang dimaksud dengan meluasnya hubungan internasional.

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan cepat sehingga dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara seakan-akan menjadi kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Hakikat kedaulatan negara mendapat tantangan karena kewenangan negara berkurang jangkauannya dalam aspek tertentu seperti menghadapi arus informasi negara tidak dapat sepenuhnya mengatur arus informasi, walaupun informasi tersebut dapat mempengaruhi perilaku warga negaranya.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain seakan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan pun dan dimanapun manusia dengan perangkat teknologi tersebut bisa menjalin hubungan, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Teknologi komunikasi informasi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia.

Beberapa perangkat teknologi komunikasi informasi yang ada sekarang, misalnya

- a. media cetak, seperti koran, tabloid, dan majalah
- b. media audio, seperti radio, tape, compact disk
- c. media audio visual, seperti televisi, TV kabel, internet, visual Compact Disk;
- d. komputer, perangkat infra merah, telepon, handphone, mobile phone, LCD, kamera, laptop.

Pada era globalisasi ini, iptek menunjukkan perkembangan spektakuler dengan banyaknya penemuan-penemuan baru, seperti bayi tabung, penetapan jenis kelamin, kloning, kemampuan mengobati leukemia, penggunaan sinar laser untuk mengurangi lemak pada pembuluh nadi, penciptaan kapal selam yang bebas dari radar musuh, perkembangan komputer dan teknologi tinggi dalam menyongsong era informasi dan sebagainya, sampai pada rekayasa genetika dalam pengembangan ilmu biologi, dan masih banyak lagi perkembangan teknologi mutakhir lainnya yang merupakan perwujudan nyata adanya globalisasi.

Perkembangan teknologi komunikasi diawali dengan munculnya satelit komunikasi yang dipasang di ruang angkasa dalam orbit tertentu. Dengan satelit tersebut, dunia terasa semakin sempit dan seolah-olah tanpa batas negara serta dapat menembus ruang dan waktu. Indonesia, melalui PT Telkom, pada bulan November 2005 meluncurkan satelit Telkom B-2.

Melalui televisi, radio, dan internet, segala peristiwa yang terjadi di suatu belahan dunia dalam waktu yang relatif singkat dan cepat dapat dengan mudah diketahui oleh belahan dunia lainnya. Bahkan, dapat disaksikan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, bagaimana penggemar sepakbola di tanah air dengan cepat dan dalam waktu yang sama dapat menyaksikan tayangan yang cukup menarik dan spektakuler berupa permainan sepak bola kelas dunia yang begitu mempesona.

Begitu juga dengan tayangan film, televisi, dan media cetak lainnya yang menyajikan tayangan-tayangan horor (misteri), sadistik, serta adegan pornografi dan pornoaksi membanjiri wilayah seantero negeri ini. Anehnya, tanpa sedikitpun pemerintah berusaha mencegah hal tersebut dengan perangkat hukum yang memadai. Hal tersebut tentu dapat berdampak buruk dan merusak mental, kepribadian, dan tatanan budaya bangsa Indonesia.

2. Pengaruh Globalisasi Budaya di Indonesia

Pengaruh globalisasi budaya terhadap kehidupan bangsa Indonesia, dirasakan atau tidak, kenyataannya begitu sangat mempengaruhi kepribadian bangsa. Globalisasi juga berusaha mengikis dan menghilangkan jati diri budaya bangsa untuk kemudian menggantinya dengan nilai-nilai baru yang berasal dari peradaban Barat.

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Hampir seluruh gaya dan pola hidup (*life style*) remaja masa kini merupakan produk penjajahan budaya Barat, yang selalu bersikap permisif dan berpenampilan jauh dari nilai-nilai luhur yang ditanamkan dalam keluarga. Hampir sulit ditemukan fashion remaja yang mendidik ke arah yang dapat memperkuat jati diri bangsa. Begitu banyak remaja masa kini yang tercermin dalam perilaku sehari-hari yang menelan mentah-mentah budaya Barat sebagai gaya hidup masa kini.

Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan adalah sebagai berikut.

- 1) Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
- 2) Penyebaran prinsip multikebudayaan (*multiculturalism*), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
- 3) Berkembangnya turisme dan pariwisata.
- 4) Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
- 5) Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
- 6) Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.

Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

3. Pengaruh Globalisasi Politik di Indonesia

Sesungguhnya, globalisasi dalam bidang teknologi, budaya, dan ekonomi merupakan hasil keputusan politik. Pengaruh globalisasi dalam bidang politik membawa jargon demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), dan pluralisme. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain, membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia. Pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai yang datang dari luar membawa dampak timbulnya kecurigaan untuk menerima dan mengakui nilai-nilai demokrasi dan kekacauan. Bagi negara berkembang, hal itu dapat membuat rasa tertekan karena cara berpikir dan cara pandang yang berasal dari budaya asing menjadi dominan di negeri sendiri. Perkembangan seperti itu juga mengakibatkan pemikiran para individu tentang nilai-nilai politik menjadi semakin kuat.

Berikut ini pengaruh yang ditimbulkan dari adanya globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara.

- a. Negara dunia ketiga (negara berkembang) semakin tergantung terhadap negara-negara maju, sehingga negara dunia ketiga semakin tidak berdaya dan tidak mandiri sebagai suatu bangsa.
- b. Negara maju dapat memaksakan kehendaknya kepada negara-negara berkembang atas nama demokrasi, HAM, dan pluralisme. Internasionalisasi masalah-masalah dalam negeri suatu negara, sehingga negara maju atau negara lain turut campur dalam masalah dalam negeri suatu negara.

Untuk itu, agar negara dunia ketiga tidak menjadi bulan-bulanan politik negara-negara Barat, hendaknya negara dunia ketiga melakukan hal-hal tersebut.

- a. Mampu membangun bangsanya atas kekuatan bangsa sendiri.
- b. Menghindari pinjaman luar negeri (hutang luar negeri) karena akan sulit dan tidak mampu membayarnya.
- c. Membangun diplomasi yang cerdas, bermartabat, dan berkualitas.
- d. Menjadi bagian dari solusi atau penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi dunia internasional.
- e. Menumbuhkan etos musyawarah sebagai sumber ajaran demokrasi yang lebih bermartabat dibandingkan demokrasi ala Barat yang selalu bermuara pada voting.
- f. Menegakkan HAM yang konsisten, sehingga Barat tidak mempunyai peluang untuk mengintervensi atas dasar pelanggaran HAM.
- g. Menjamin pluralisme dan heterogenitas sebagai dasar dari nilai-nilai demokrasi.

Paham demokrasi berasaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi negara. Demokrasi sebagai sistem politik harus mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan. Semua negara ingin disebut sebagai negara demokrasi. Negara-negara yang belum berpemerintahan demokrasi atau masih melakukan praktik pemerintahan otoriter banyak dikecam oleh negara lain. Negara-negara otoriter umumnya terkucilkan dari pergaulan internasional.

Masalah hak asasi manusia berkaitan erat dengan demokrasi. Sekarang ini dunia internasional sangat memperhatikan penegakan hak asasi manusia. Adanya berbagai perang, pertentangan, dan konflik antarbangsa dikarenakan adanya penindasan terhadap hak asasi manusia dan perilaku sewenang-wenang. Masalah hak asasi manusia sudah merupakan masalah internasional.

Transparansi atau keterbukaan terutama ditujukan pada penyelenggara pemerintahan negara. Pemerintahan yang tertutup tidak akan lama bertahan sebab kemajuan informasi telah mampu menerobos berbagai ketertutupan yang disembunyikan pemerintah. Pemerintahan yang tertutup juga dianggap tidak demokratis karena tidak ada pertanggungjawaban publik dan tidak mengikutsertakan rakyat dalam bernegara. Hal ini bertentangan dengan pesan demokrasi. Penyelenggaraan negara diharapkan berlaku terbuka dan transparan terhadap rakyatnya.

Dalam masyarakat global, hubungan antar manusia akan semakin intensif dan tidak hanya manusia sebangsa, tetapi manusia yang berbeda ras agama, nilai budaya dan adat. Sikap menghargai keberanekaan dan perbedaan (pluralisme) sangat dibutuhkan. Apabila suatu bangsa memaksakan nilai budayanya dan tidak menghargai budaya lain maka hubungan global akan rusak.

4. Pengaruh Globalisasi Ekonomi di Indonesia

Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, antara lain timbulnya krisis moneter yang dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia sehingga mengundang peran IMF untuk turut menentukan nasib bangsa dan negara. Keadaan yang demikian membawa dampak bagi terbukanya pasar dalam negeri dan ekonomi nasional terhadap ekonomi internasional. Akibatnya, kebijakan ekonomi nasional harus menyesuaikan dengan tujuan dan tekanan ekonomi internasional. Misalnya, calon penerima bantuan IMF harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu membatasi perluasan kredit, memotong belanja publik, mengurangi subsidi untuk kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk implementasi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah realisasi pasar bebas dengan berbagai piranti pendukungnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Hilangnya sekat penghalang bagi transaksi perdagangan bebas di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).
- b. Berlangsungnya perdagangan bebas bagi negara-negara industri maju pada tahun 2010, dan bagi negara-negara berkembang pada tahun 2030 yang berarti menawarkan sejuta barang dan jasa.
- c. Dibukanya jual beli tanpa proteksi.
- d. Menjamurnya konglomerasi perekonomian raksasa yang banyak dikuasai oleh negara-negara maju.
- e. Merebaknya perusahaan-perusahaan patungan antarnegara yang mampu mencengkeram perekonomian dunia (transnasional).
- f. Tumbuhnya investasi asing di negara-negara berkembang yang menguasai sumber kekayaan alamnya.

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri dari *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian WTO ditandatangani pada bulan April 1994 dan diratifikasi oleh DPR pada bulan November 1994. Hakikat dari perjanjian itu adalah dunia akan menuju kepada pasar bebas paling lambat sebelum tahun 2020. Isi perjanjian itu berisi kesepakatan antara lain sebagai berikut.

- 1) Bebas keluar masuk segala jenis barang yang melewati tapal batas negara.
- 2) Bebas keluar masuk jasa-jasa melewati tapal batas negara.
- 3) Bebas keluar masuk uang dan modal melewati tapal batas negara.
- 4) Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *intellectual property right* diakui oleh seluruh anggota negara anggota WTO.

Dampak negatif dan positif terhadap persoalan yang serius akibat adanya perdagangan bebas yang dirasakan oleh negara-negara berkembang, terutama Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Dampak Positif Globalisasi Bidang Ekonomi

- 1) Produksi global dapat ditingkatkan

Pandangan ini sesuai dengan teori ‘Keuntungan Komparatif’ dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan.

- 2) Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara

Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

- 3) Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri

Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri.

- 4) Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik

Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.

- 5) Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi

Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.

b. Dampak Negatif Globalisasi Bidang Ekonomi

1) Menghambat pertumbuhan sektor industri

Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang (*infant industry*). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.

2) Memperburuk neraca pembayaran

Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran.

3) Sektor keuangan semakin tidak stabil

Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

4) Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhannya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

Melihat dampak negatif tersebut, Indonesia harus menyatukan langkah untuk mengimbangi globalisasi dunia dengan jalan sebagai berikut.

- a. Membangun konglomerasi ekonomi syariah yang secara proaktif turut meramaikan percaturan zona ekonomi tingkat regional dan internasional.

- b. Meningkatkan kualitas produksi yang akan mendorong negara yang menganut ekonomi syariah mampu bersaing dalam kompetisi di era globalisasi.
- c. Peningkatan dan penyempurnaan kualitas produksi internal negara-negara yang menganut ekonomi syariah.
- d. Mampu meningkatkan frekuensi perdagangan bilateral antar negara-negara yang menganut ekonomi syariah.



KATA SANG TOKOH

Kita hidup di dunia yang penuh keindahan, pesona, serta petualangan. Semua itu tidak akan pernah berakhir selama kita mencarinya dengan mata terbuka

(Jawaharlal Nehru)

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru

Jawaharlal_Nehru

Bila negara Indonesia mampu merealisasikan agenda-agenda tersebut, paling tidak bangsa Indonesia tidak terlalu terpengaruh atas imbas atau pengaruh negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. Bumi Indonesia mengandung dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa, posisi geografis yang sangat strategis, SDM yang melimpah, dan faktor-faktor pendukung perekonomian lainnya yang memadai. Bila potensi-potensi sumber daya yang ada di Indonesia tersebut dikelola secara profesional dan efisien, niscaya Indonesia mampu mengimbangi arus globalisasi ekonomi yang sepadan.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 4–5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekolahmu mengenai dampak globalisasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat! Gunakan tabel di bawah ini!

Persepsi masyarakat mengenai dampak globalisasi terhadap tingkat kesejahteraan hidup masyarakat	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
- Sangat sejahtera												
- Cukup sejahtera												
- Tidak merasakan dampak apapun												
- Merugikan												
- Sangat merugikan												
- Tidak Tahu												

Catatan : P1 : Pendapatan 1

- c. Dari hasil jajak pendapat tersebut, bagaimana menurut pendapat kelompok Anda? Buatlah kesimpulannya secara singkat dan presenstasikan di depan kelas!



D. Menyikapi Adanya Pengaruh Globalisasi

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Anda harus dapat menerima munculnya globalisasi sebagai suatu kenyataan. Globalisasi merupakan tahap perkembangan dari kenyataan tahapan sejarah manusia. Jadi, jika Anda menghindari dari suatu kenyataan tersebut merupakan tindakan yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan, pilihan itu justru akan berlawanan dengan semangat modernisasi yang menuju ke arah kedinamisan dan perubahan.

Negara perlu turun tangan menyelesaikan masalah-masalah internasional dan peduli terhadap permasalahan internasional. Kepedulian ini merupakan bukti bahwa suatu bangsa adalah bagian tidak terpisahkan dari bangsa lain dalam pergaulan internasional.



Sumber : <http://i223.photobucket.com>

Gambar 4.3 Pengiriman Kontingen Pasukan Garuda Indonesia ke berbagai wilayah konflik di dunia adalah wujud kepedulian terhadap penyelesaian masalah-masalah internasional.

Bentuk-bentuk kepedulian suatu bangsa dapat dinyatakan dengan cara-cara berikut ini.

1. Pemerintah mengutuk atau mengecam segala bentuk tindak penindasan dan eksploitasi suatu bangsa terhadap bangsa lain. Misalnya, mengecam Israel yang telah melakukan tindakan semena-mena kepada bangsa Palestina tanpa mengiraukan seruan-seruan internasional.

2. Pemerintah membentuk forum-forum bersama, baik berskala regional atau internasional, guna memperkuat posisi dalam memberi resolusi, tekanan, dan tuntutan terhadap masalah-masalah internasional. Misalnya, Indonesia masuk dalam ASEAN dan AFTA.
3. Pemerintah menunjukkan dan memberikan rasa simpati terhadap perjuangan melawan penindasan hak asasi manusia. Misalnya, pemerintah Indonesia memberikan simpati dan dukungan moril terhadap perjuangan rakyat Tibet dalam menentang pendudukan China atas wilayah Tibet.
4. Pemerintah melakukan langkah kebijakan yang mengarah kepada pemenuhan asas-asas demokrasi, hak asasi manusia, keterbukaan, pelestarian lingkungan hidup, dan pasar global.
5. Pemerintah mengirimkan tenaga sukarelawan dan tenaga medis ke daerah-daerah konflik di luar negeri. Misalnya, pengiriman tenaga medis ke Afganistan pasca perang tahun 2002.
6. Pengiriman pasukan perdamaian atau pemeliharaan keamanan (Pasukan Garuda) dalam kordinasi Dewan Keamanan PBB ke wilayah-wilayah konflik.
7. Pemerintah mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan ke daerah yang dilanda kelaparan dan kekeringan ke daerah-daerah konflik atau bekas konflik.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, hendaknya Anda bersikap selektif terhadap arus globalisasi dengan mengambil unsur-unsur yang baik dan membuang unsur-unsur yang tidak baik. Bangsa Indonesia harus dapat bersikap selektif terhadap pengaruh masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau negatif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bangsa dan negara Indonesia. Sebagai contoh, perbuatan-perbuatan yang menyimpang/ melanggar moralitas, etika, dan kepatutan. Misalnya, merebaknya penyakit sosial, pemakaian obat terlarang, kriminalitas internasional, pornografi dan dekadensi moral, imbas krisis perekonomian dan moneter, dan membanjirnya produk-produk luar negeri.



KATA SANG TOKOH

Pendidikan adalah senjata paling dahsyat yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia.

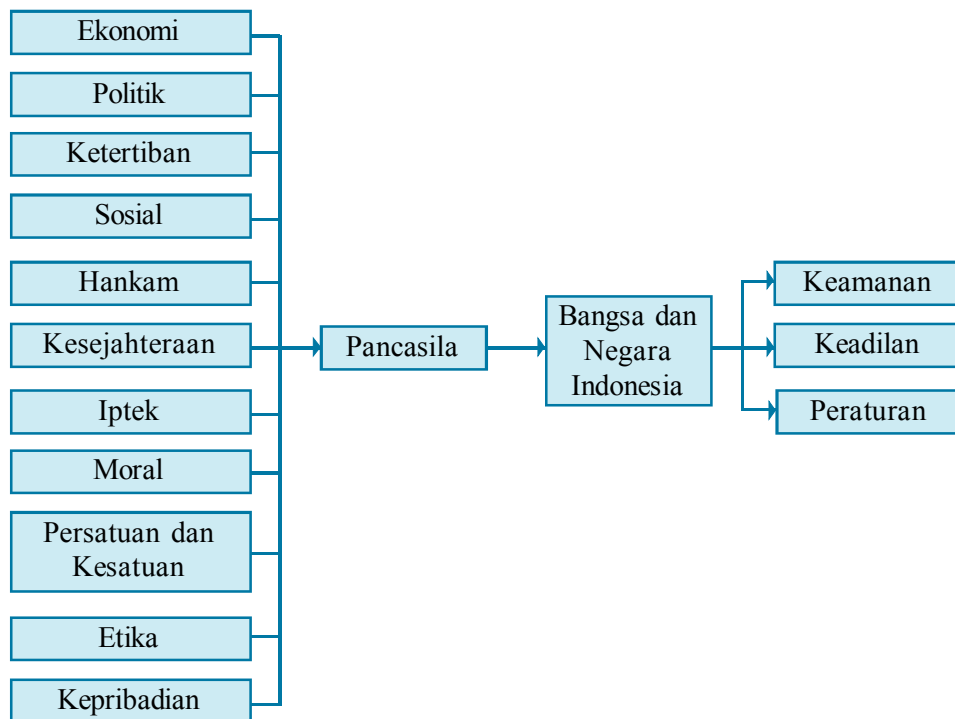
(Nelson Mandela)

Sumber: <http://arief.ngeblogs.com>

WAWASAN KEBANGSAAN

Pada prinsipnya nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

- a. menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan;
- b. menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara;
- c. bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri;
- d. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;
- e. menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;
- f. mengembangkan sikap tenggang rasa;
- g. tidak semena-mena terhadap orang lain;
- h. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
- i. senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- j. berani membela kebenaran dan keadilan;
- k. merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia; dan
- l. menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.



Gambar 4.2 Bagan Pancasila sebagai Filter

Tata nilai dan budaya asing yang masuk dengan deras ke Indonesia, seharusnya dapat diambil manfaat atau keuntungannya. Apabila tidak memiliki ideologi yang kuat, kewaspadaan nasional yang tangguh, sumber daya manusia yang baik, maka bangsa Indonesia tidak dapat memperoleh manfaat dan keuntungan dari globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan yang harus diantisipasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya

1. Pendidikan Nasional diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas guna dibutuhkan untuk memasuki kehidupan masyarakat yang penuh dengan persaingan. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), mampu mengembangkan potensi diri, mampu bersaing sesama manusia di masyarakat secara terbuka, memiliki kesadaran akan nilai positif dan negatif dari arus globalisasi serta memiliki daya tahan yang tangguh dengan suatu identitas budaya yang kuat dalam menghadapi dampak negatif globalisasi.



Sumber : <http://myfacede.files.wordpress.com>

Gambar 4.4 Mencintai identitas budaya nasional adalah merupakan “Benteng” yang kokoh dalam menangkal dampak negative dari arus Globalisasi yang masuk ke Negara kita.

2. Mewujudkan perangkat dan program perlindungan serta padat karya. Dalam setiap kompetisi selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk mengantisipasi yang kalah harus dipersiapkan program perlindungan dan padat karya agar tidak terjadi jurang kemiskinan.



Sumber : <http://tukangecuprus.files.wordpress.com>

Gambar 4.5 Dalam menghadapi dampak negative Globalisasi terhadap bangsa dan Negara kita, hendaknya pemerintah segera merencanakan dan melaksanakan program-program perlindungan, pengentasan kemiskinan dan padat karya agar kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat diminimalkan

3. Nilai-nilai kepribadian luhur pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia yang telah ditetapkan menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berpotensi membentuk iklim yang kondusif, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Kewajiban kita sebagai suatu bangsa ialah bagaimana kita mampu berinteraksi di era globalisasi ini secara positif. Kita juga wajib menyikapi globalisasi melalui aneka sikap dan perbuatan secara cerdas dan proporsional. Tindakan-tindakan yang harus kita lakukan selaku bangsa guna menghadapi pengaruh globalisasi, adalah :

1. Melakukan Lokalisasi (otonomi lokal dari tingkat rumah tangga, kelompok, dusun, sampai dengan wilayah) untuk berdikari (berdiri di atas kaki sendiri)
2. Melakukan gerakan stop perdagangan bebas (*pro-fair trade* dan proteksi produk harkat orang banyak) pada tingkatan Lokal dan Regional.
3. Melakukan stop privatisasi (pro-BUMN basis rakyat yang dikontrol buruh dan komunitas, bukan preman).

Sekarang kalian telah tahu bahwa, Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek tata kehidupan masyarakat. Dalam menyikapi Globalisasi ini ternyata ada masyarakat yang secara umum dapat menerima Globalisasi, seperti generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi, dan masyarakat perkotaan (ekonomi sedang ke atas). Namun, ada pula masyarakat yang sulit menerima atau bahkan menolak globalisasi seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua yang kehidupannya stagnan, dan masyarakat yang belum siap baik fisik maupun mental.

Unsur globalisasi yang sukar diterima masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Teknologi yang rumit dan mahal (tidak terjangkau).
2. Unsur budaya luar yang bersifat ideologi dan religi.
3. Unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Unsur globalisasi yang mudah diterima masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Unsur yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
2. Teknologi tepat guna, yaitu teknologi yang langsung dapat diterima oleh masyarakat.
3. Pendidikan formal di sekolah.

Jadi, jelaslah bahwa modernisasi dan globalisasi akan membawa dampak positif ataupun negatif terhadap perubahan sosial dan budaya suatu masyarakat.

WAWASAN KEBANGSAAN

Dampak Globalisasi 726 Bahasa Daerah Terancam Punah

Sebanyak 726 bahasa daerah di Indonesia terancam punah akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. Karena itu, tanpa ada upaya memperbanyak kosa kata sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi sesuai tuntutan masyarakat penuturnya, bahasa-bahasa daerah tersebut, sulit berkembang. Agar bahasa daerah tidak semakin tenggelam di tengah arus perubahan kehidupan masyarakat penuturnya, kosa katanya harus diperbanyak. Indonesia saat ini terdapat 726 bahasa daerah, namun dalam perkembangan perikehidupan bermasyarakat, telah terjadi berbagai perubahan, terutama akibat perkembangan tatanan baru kehidupan dunia dan teknologi informasi yang semakin sarat dengan tuntutan dan tantangan globalisasi.

Kondisi ini telah menempatkan bahasa asing pada posisi strategis yang memungkinkan memasuki berbagai sendi kehidupan bangsa sekaligus mempengaruhi perkembangan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa. Penggunaan bahasa asing makin mendapat tempat dalam kehidupan masa kini, sementara penggunaan bahasa daerah kian tersedak. “Sebagai lambang kedaerahan bahasa daerah inipun kian pudar. Dalam kehidupan masyarakat, bahasa daerah telah mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan teknologi informasi yang mampu menembus batas-batas ruang”. Berbagai kata dan istilah dalam bidang iptek tak tersedia dalam kosa kata bahasa daerah. Di samping itu, kosa kata dalam pergaulan masa kini juga amat dipengaruhi oleh keilmuan dan kemajuan teknologi.

Demikian pula media massa berbahasa daerah seperti surat kabar, majalah, radio bahkan televisi menyampaikan informasi tentang kehidupan masyarakat Jawa, Indonesia bahkan internasional juga tidak disampaikan dengan kosa kata bahasa daerah. Jika gejala perubahan yang terjadi ini jika tidak segera ditangani, akan menimbulkan dampak yang luar biasa, terhadap perikehidupan masyarakat Indonesia. Terutama di kalangan generasi muda. Karena itu, laju kosa kata bahasa daerah pun harus dipacu sesuai dengan kemajuan bidang tersebut.

Pengakuan terhadap bahasa daerah diakui konstitusi, yakni pasal 32 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Bahkan memiliki landasan politis dan sosiologis berupa Sumpah Pemuda 1928 yang menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahasa daerah memiliki hak hidup dalam tataran masyarakat Indonesia. Upaya yang harus dilakukan adalah mengembalikan kewibawaan bahasa daerah dengan penutur terbesar, termasuk bahasa Jawa yang kini dipakai lebih dari 80 juta orang di dunia. Pemeliharaan bahasa daerah berarti melindungi bahasa daerah agar tetap memainkan peran dalam kehidupan masyarakat, pada tatanan kehidupan masa kini dan masa mendatang. Pemeliharaan ini berupa pengembangan bahasa daerah agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat pendukungnya, diantaranya meliputi pemekaran kosa kata dan kodifikasi berupa penyusunan pedoman ejaan, kamus, dan tata bahasa.

Sedangkan pembinaan meliputi upaya mempertahankan ranah penggunaan bahasa daerah dan penerusan penggunaan bahasa tersebut untuk generasi berikut. Dengan demikian, pembinaan menyangkut upaya pemantapan peran bahasa dalam masyarakat dan pemutakhiran pengajaran bahasa daerah bagi generasi penerus yang lebih ditekankan pada pengembangan kurikulum, bahan kajian, media belajar, pengejar, dan lingkungan belajar yang disesuaikan dengan sistem pendidikan bahasa masa kini. Untuk melindungi bahasa daerah ini, pemerintah kini telah menyiapkan regulasi untuk mendorong upaya penyelamatan dan pelestarian bahasa.

E.

Implikasi Globalisasi terhadap Indonesia

Pada era globalisasi dewasa ini, tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri tanpa bekerja sama dan hubungan dengan negara lain. Amerika Serikat yang dikatakan sebagai negara “Adidaya” pun tetap membutuhkan negara-negara lain guna memenuhi segala kebutuhan hidup negaranya. Jika ada sikap ketidakpedulian dari suatu negara terhadap isu-isu internasional, justru mempersulit negara tersebut dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran bangsanya.

Sekarang ini telah terjadi dinamika yang cukup drastis dalam kehidupan masyarakat Indonesia bersamaan dengan masuknya teknologi modern. Hal ini juga dirasakan oleh negara-negara sedang berkembang lainnya. Kondisi seperti itu akan berpengaruh dalam kemampuan untuk berjuang mempertahankan kelangsungan hidup negara tersebut di tengah-tengah pergulatan negara-negara besar di dunia. Untuk dapat mengikuti proses alih teknologi tidaklah mudah, diperlukan kerja keras untuk mempersiapkan sumber daya manusia, kondisi sosial, dan kondisi fisik alamiah Indonesia. Tujuannya agar tidak kehilangan kepribadian di tengah-tengah kemajuan yang telah tercapai. Di sinilah perlunya dibangun tatanan kehidupan yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Posisi geografis Indonesia terletak pada posisi silang antara Benua Asia dengan Benua Australia, Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, dan antara paham/ideologi komunis dengan paham/ideologi liberal. Posisi Indonesia seperti ini sangat rentan terhadap dampak-dampak globalisasi yang sedang berjalan. Untuk menghadapi hal tersebut, bangsa Indonesia harus memantapkan sumber daya manusia, ideologi Pancasila sebagai filter, sosial budaya, ekonomi, politik, dan hankam yang kuat.

Beberapa contoh yang dapat dijadikan bahan analisis dalam membahas implikasi globalisasi terhadap bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Implikasi Globalisasi di Bidang Ekonomi

Akibat Globalisasi dewasa ini, bangsa Indonesia mengalami kesulitan untuk mempertahankan kebijaksanaan ekonomi yang independen dan otonom. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi semakin sulit dilakukan karena lambannya penanganan. Semua itu mengakibatkan segala kebijakan ekonomi dari pemerintah menjadi kurang menarik.

Program yang dilakukan oleh IMF merupakan contoh kasus yang jelas. Calon penerima bantuan IMF harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu perluasan kredit memotong belanja publik dan pengurangan program subsidi untuk kesejahteraan umum. Hal ini berarti mengaitkan bantuan ekonomi dengan politik dalam negeri yaitu prinsip-prinsip demokrasi dan kebijakan dari negara yang diberi bantuan.

Dalam penetapan persyaratan politik dan ekonomi yang diminta IMF seperti itu, banyak negara, termasuk Indonesia, harus mengadakan perubahan-perubahan kebijakan di bidang ekonomi ataupun politik. Investasi asing yang dahulu dipandang sebagai kekuatan ekonomi harus ditinjau ulang.

Globalisasi ekonomi dan pasar bebas sebetulnya dapat memberikan peluang lebih besar bagi konsumen untuk menggunakan produk-produk global yang berkualitas, di samping produk nasional. Hal ini juga dapat menciptakan daya kompetitif di bidang usaha dalam mengejar keuntungan. Namun, konsekuensinya jika produk nasional tidak mampu bersaing dengan produk-produk import, akan mati. Perusahaan yang memproduksinya pun akan bangkrut dan hasil akhirnya adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran para karyawannya.

Kini Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya, baik dalam bentuk kerja sama bilateral maupun multilateral (AFTA, NAFTA, dan APEC). Jaringan hubungan itu sudah mulai tumbuh dan berpengaruh bagi perkembangan ekonomi masing-masing negara. Jika hubungan itu dihentikan dengan alasan Indonesia tidak bersedia mengikuti tuntutan IMF, tentu akan terjadi kekacauan ekonomi pada beberapa negara. Misalnya, dalam menghadapi AFTA dan kondisi persaingan yang makin meningkat, kesadaran bangsa Indonesia di bidang ini bangkit untuk mencintai hasil produk Indonesia.

Globalisasi di bidang ekonomi akan mengakibatkan semakin besar tantangan atau problem kehidupan dengan peningkatan masalah kemiskinan yang semakin tinggi. Mengapa demikian? Hal ini karena globalisasi merupakan lanjutan kapitalisme yang memunculkan neoliberalisme. Pasar akan dikuasai oleh komoditas-komoditas dari negara maju sehingga meminggirkan negara-negara miskin dan berkembang. Berikut ini contoh-contoh dampak adanya globalisasi ekonomi terhadap Indonesia.

- a. Meskipun ekonomi Indonesia menjadi bagian ekonomi global, yang merasakan keuntungannya hanya para golongan ekonomi atas.
- b. Hutang luar negeri semakin membengkak, sehingga memaksa negara untuk menjual BUMN-BUMN guna membayar hutang. Selain itu, pelayanan-pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih/irigasi, dan komunikasi akan semakin mahal. Sementara itu, segala sesuatu harus disertai bayar pajak.
- c. Hutan, barang-barang hasil pertambangan, air, lahan-lahan potensial, yang semakin habis masih tetap akan dikaplingkan pada pengusaha nasional maupun internasional.
- d. Tenaga kerja kasar (nonahli) dan pembantu rumah tangga diekspor, tetapi tenaga kerja otak dan terampil (ahli) justru diimpor.
- e. Korupsi uang rakyat semakin merajalela dan kurang adanya penegakan hukum yang sepadan terhadap para koruptor.
- f. Ekonomi pasar gelap dan premanisme semakin marak dan menjadi kekuatan yang menakutkan dan menindas rakyat.



SEKILAS INFO

GATT

(General Agreement on Tariffs and Trade)

GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) atau perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di Genewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April 1994 jumlah negara penandatanganan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip berikut ini.

1. Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.
2. Prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.
3. Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Sesuai dengan perkembangannya, masing-masing negara anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas. Pada pertemuan di Marakesh, Maroko pada tanggal 5 April 1994 GATT diubah menjadi World Trade Organization (WTO) mulai tanggal 1 Januari 1995

Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/GATT>

2. Implikasi Globalisasi di Bidang Politik

Globalisasi di bidang ekonomi membawa pengaruh terhadap Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan politik sehingga berdampak pada bidang lainnya. Pengaruh globalisasi dalam bidang politik di Indonesia berpengaruh terhadap masuknya nilai-nilai demokrasi dari luar yang universal tersebut, diterima sebagian kalangan dengan sikap curiga dan apriori. Sikap ini wajar bagi Indonesia karena dikhawatirkan lama-kelamaan akan mempengaruhi kedaulatan negara. Ditengarai adanya maksud-maksud negatif negara-negara besar untuk menekan arah politik negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dengan menggunakan bantuan ekonomi.

Globalisasi di bidang politik mengakibatkan masalah politik nasional suatu negara dapat berkembang menjadi masalah internasional. Dengan demikian, negara lain turut campur terhadap masalah dalam negeri yang berakibat terancamnya integritas suatu negara.

Berikut ini merupakan implikasi globalisasi di bidang politik.

- a. Dampak globalisasi dalam sistem politik Indonesia adalah bergesernya sistem politik dari pemerintahan yang sentralistik (terpusat) pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru menjadi sistem desentralisasi pada masa reformasi, sekalipun tidak semata-mata sebagai pengaruh eksternal.
- b. Pengaruh globalisasi terhadap politik Indonesia tampak dalam privatisasi. Privatisasi merupakan ide kapitalisme beraroma politik yang terkait dengan imperialisme kapitalisme untuk mencari keuntungan di negara-negara lain. Caranya, dengan menggunakan lembaga-lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*), Bank Dunia (*International Bank of Reconstruction and Development/IBRD*), dan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).
- c. Pasca perang dingin antara Blok Barat (Amerika Serikat dan para sekutunya) dan Blok Timur (Uni Sovyet dan para sekutunya) ternyata membawa implikasi terhadap kebijakan politik luar negeri negara-negara Barat terhadap Indonesia. Faktanya, akan berujung pada keguncangan integritas nasional Indonesia. Sebagai contoh, lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi (1999) dan timbulnya konflik horizontal, seperti kasus Poso, Sambas, Ambon, dan konflik vertikal, seperti GAM, OPM, dan RMS, tidak terlepas dari akibat terjadinya embargo militer oleh Amerika Serikat terhadap militer Indonesia.

3. Implikasi Globalisasi di Bidang Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

IPTEK yang berkembang pesat di era globalisasi menggugah kesadaran para ilmuwan dan masyarakat umum bahwa penguasaan IPTEK merupakan keharusan masyarakat. Artinya, maju mundurnya suatu masyarakat di masa mendatang sangat ditentukan oleh penguasaan IPTEK. Sifat interdependensi globalisasi, terobosan teknologi dan keberanian inovasi dari negara-negara industri meningkatkan daya saing dalam mencari konsumen (user). Contohnya, dengan inovasi teknologi di bidang elektronika, televisi, komputer, audio-visual, ataupun *broadcasting* dari produk budaya global dapat memberikan manfaat pada dunia pendidikan, perekonomian, interaksi sosial, kebudayaan, dan Hankam.

Perubahan dan pengembangan IPTEK di era globalisasi terjadi pada bidang-bidang berikut.

- a. Ilmu kedokteran yang telah mengalami kemajuan sangat pesat, memandang bahwa lingkungan (area) tidak hanya sebagai salah satu aspek yang dapat menyebabkan penyakit, tetapi juga membantu penyembuhan (*therapy*) penyakit.



Sumber : <http://www.kaltimpost.co.id>

Gambar. 4.6 Ditemukannya alat-alat kesehatan modern yang berteknologi tinggi untuk melakukan scanning penyakit kanker merupakan bentuk kemajuan perkembangan teknologi bidang kesehatan.

- b. Kemajuan IPTEK berakibat lahirnya disiplin-disiplin ilmu baru. Contohnya, dalam ilmu Geografi .melahirkan ilmu Inderaja (Penginderaan Jauh), dalam ilmu Biologi melahirkan ilmu Biologi Molekuler.
- c. Komunikasi yang berkembang secara pesat telah menembus batas-batas negara, tradisi, dan pendidikan yang bersifat dinamis. Alat-alat teknologi canggih sebagai produk global, seperti komputer, internet, dan *Compac Disk* (CD) mempengaruhi para pemikir pendidikan. Bahkan tidak hanya diterapkan secara efektif sebagai media dan metode pembelajaran dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam dunia bisnis dan perbankan.
- d. Kemajuan bioteknologi membuat perubahan yang memukau, seperti teknologi bayi tabung, tansplantasi organ, penemuan serum atau vaksin-vaksin baru dan kloning.

Adapun contoh implikasi globalisasi terhadap bidang teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Saat era komputerisasi baru hadir, telepon dan faksimile banyak digunakan orang. Perkembangan itu mempengaruhi PT Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa layan-antar.
- b. Pada awal tahun 2000, volume pengiriman surat lewat pos menurun hingga 70%. Hal ini diakibatkan diketemukannya dan dimanfaatkannya hand phone oleh sebagian besar manusia di dunia. Mereka melakukan komunikasi langsung atau melakukan SMS (*Short Message Service*). Menghadapi hal tersebut, PT. Pos Indonesia (Posindo) menciptakan terobosan baru dengan memberikan layanan melalui program OPTIMA, di antaranya jaminan asuransi bagi surat atau paket yang hilang atau rusak saat yang dikirim secara *door to door* dan *part to part*, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Perusahaan Western Union (WU) pun digandeng untuk mendongkrak layanan pengiriman wesel ke luar negeri. Jaringannya bisa meliputi 136 negara dan 76 ribu cabang di dunia.

Jika bangsa Indonesia tidak mempedulikan masalah-masalah internasional maka dapat mempengaruhi juga terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi di Indonesia. Bahkan seperti sudah dijelaskan pada bagian depan, pengaruhnya dapat sampai kepada perkembangan pemikiran para individu, kebudayaan, bahkan agama. Pada akhirnya, kita harus menerima perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh adanya globalisasi. Tidak hanya oleh negara Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya melainkan juga oleh seluruh dunia. Kedaulatan nasional hanya akan memberi makna apabila memberikan keadilan kepada masyarakat.



KATA SANG TOKOH

Tertipulah yang melakukan tiga perkara, yaitu membenarkan apa yang tak terjadi, mengandalkan orang yang tidak dipercaya, dan menghasratkan apa yang tak dimiliki.

(John Maxwell)

Sumber: http://id.wikipedia.org/John_Maxwell

KEPEDULIAAN SOSIAL

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 3-4 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Cobalah kunjungi warnet yang ada di dekat tempat tinggalmu! Kemudian, lakukan aktivitas seperti pengguna internet.
3. Mintalah bantuan dan bimbingan instruktur yang ada di warnet tersebut. Praktik belajar dilakukan secara individu dengan mengisi lembar kerja yang telah disediakan di bawah ini :

Dampak Penggunaan Teknologi Internet

No	Kegiatan yang dilakukan dengan Internet	Dampak (positif atau negatif) yang Diperoleh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. Buatlah sebuah tulisan singkat tentang “Internet sebagai Dampak Globalisasi”
5. Presentasikanlah di depan kelas. Mintalah Gurumu bertindak sebagai penilai.

4. Implikasi Globalisasi di Bidang Budaya

Budaya materialistis pada era globalisasi sangat kontra produktif dengan budaya religius di masyarakat. Hal ini membuat munculnya kecenderungan menguatnya tradisi agama. Pertarungan kebudayaan global berimplikasi kepada pergeseran budaya, baik budaya spiritual maupun material. Implikasi dari budaya global tersebut terlihat pada hal-hal berikut.

- a. Kecenderungan (*trend*) dari masyarakat untuk mengantarkan putra-putrinya belajar di lembaga pendidikan mewah dan bergensi.
- b. Kecenderungan masyarakat yang lebih menghargai materialistis, yang mengukur kehidupan hanya berdasarkan nilai-nilai yang dapat diukur dengan uang atau materi. Hal ini membuat moralitas dan nilai-nilai luhur suatu bangsa menjadi menipis sebagai akibat dari sistem ekonomi global yang bebas nilai.
- c. Terjadinya kemungkinan konflik dalam nilai-nilai sosial dan terjadinya polarisasi budaya. Sebagian orang cenderung mengadopsi budaya luar yang disenangi, sebagian lagi tetap mempertahankan budaya lokal.
- d. Menguatnya hasrat berlebihan untuk berkuasa (*the will to power*), bersenang-senang mencari kenikmatan (*the will to pleasure*) yang melahirkan sikap hidup **Hedonisme**. Hedonisme ialah pandangan hidup yang hanya mengutamakan mencari kesenangan hidup belaka. Orang penganut Hedonisme, biasanya tercermin dalam perilaku yang berlebihan untuk mengumpulkan uang (*the will to money*), bekerja (*the will to work*), dan mencari kenikmatan seksual (*the will to sex*).

- e. Menjalarnya budaya *Permisif* (serba boleh) yang mengakibatkan orang melakukan hal-hal baru yang dianggap modern dan meninggalkan norma-norma dan adat istiadat yang sudah bertahan lama. Seperti, minum-minuman keras, narkoba, seks bebas.
- f. Norma-norma sosial lama yang sudah relatif mapan tercemari oleh budaya global yang cenderung mekanis dan efisien yang telah mengganti tenaga manusia dengan peralatan mekanis.
- g. Lembaga-lembaga yang memproduksi tenaga kerja yang tidak berkualitas akan kurang mendapat respons dari masyarakat.
- h. Munculnya sikap individualisme dan terjadinya krisis moral. Sikap ini akan melahirkan suatu pandangan bahwa suatu tindakan sosial yang tidak memiliki implikasi materi atau tidak produktif dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional.



SEKILAS INFO

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Bahasa Inggris: ASEAN Free Trade Area, AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.

Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, iaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA.

Tujuan dibentuknya AFTA :

1. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN
2. Menarik investasi asing langsung ke ASEAN

Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah skema "*Common Effective Preferential Tariff*" (CEPT). Anggota ASEAN memiliki pilihan untuk mengadakan pengecualian produk dalam CEPT dalam tiga kasus: Pengecualian sementara, produk pertanian sensitif dan pengecualian umum.

5. Implikasi Globalisasi di Bidang Hukum dan Pertahanan

Dalam era globalisasi, hukum nasional tidak mampu mengelak diri dari pengaruh global, konvensi-konvensi internasional dan perubahan sosial (masyarakat internasional) yang terjadi. Kondisi seperti ini akan memberikan inspirasi bagi hukum nasional untuk mengintegrasikan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional dan menjadi cermin utama bagi kehidupan yang beradab.

Dengan berkembangnya kejahatan internasional, seperti terorisme, genosida, perampok/bajak laut di jalur-jalur perdagangan dunia, perdagangan manusia, perdagangan obat bius, atau kejahatan lintas batas lainnya, ASEAN termasuk di dalamnya negara Indonesia berusaha membuka diri negara lain untuk menumpas atau memerangi kejahatan-kejahatan internasional itu. Misalnya sebagai berikut.

- a. Penandatanganan perjanjian memerangi terorisme pada akhir Juli 2002. Tindakan ini adalah sebagai bukti keseriusan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan “perang terhadap teroris” tanpa melibatkan pasukan AS di kawasan ASEAN. Namun demikian, AS bersedia memberi bantuan teknis pasukan keamanan dalam melacak para tersangka.
- b. Hukum nasional tidak hanya berisi materi hukum yang bersumber pada hukum lokal, melainkan dapat beradaptasi dengan kecenderungan global dengan cara meratifikasi konvensi-konvensi internasional menjadi hukum nasional.
- c. Kecenderungan politik di era globalisasi adalah Desentralisasi Politik. Desentralisasi Politik akan menyediakan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan yang sesuai dan seimbang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat lalu hanya mengatur kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendasar yang diatur oleh konstitusi, seperti politik luar negeri, hankam, ekonomi makro, peradilan, dan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Lahan operasi kerja para pekerja hukum (pengacara /Lawyer) sudah mengglobal. Para pengacara tidak lagi dibatasi oleh negara. Peranan mereka sebagai konsultan hukum yang profesional mampu menggeser dan mengungguli legislator dan para hakim dalam sistem hukum nasional.
- e. Pelayanan hukum sebagai produk yang dijual. Tim pengacara harus dibayar berdasarkan hitungan jam. Para pengacara yang mampu menangani kasus-kasus besar dan bertaraf internasional kemudian akan dikenal publik dan akan lebih dipercaya menangani banyak kasus.

6. Implikasi Globalisasi di Bidang Agama

Implikasi globalisasi terhadap agama nampak dalam beberapa hal berikut.

- a. Munculnya pola hidup materialistik yang mendorong orang mengejar kekayaan materi saja dan melemahkan nilai-nilai spiritual dan agama. Dalam hal ini, harkat manusia diukur dengan jumlah materi yang dimiliki, bukan dilihat dari kebaikan, kejujuran, dan nilai-nilai rohaniannya.

- b. Faham sekulerisme telah memberikan perubahan yang signifikan pada agama dan masyarakat. Doktrin agama dianggap bertentangan dengan pandangan ilmiah yang memiliki banyak kelebihan dan menjadi dasar teknologi dan ekonomi modern. Sehingga perlu dipisahkan antara Negara dan Agama.
- c. Munculnya gerakan-gerakan spiritual sempalan dari Agama-agama besar sebagai respons terhadap lemahnya struktur sosial dan tradisi agama yang diajarkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan beragam cara. Gerakan ini berpusat pada ketokohan seorang pribadi yang menarik, budaya pikat retorik yang memukau, dan dengan kesederhanaan namun penuh keteguhan serta menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan.
- e. Banyaknya konflik internal dalam tubuh umat beragama yang dipicu oleh keinginan memperoleh status sosial dan material. Agama tidak lagi mempunyai kekuatan pemersatu pada situasi dan kondisi ideologis masyarakat kosmopolitan.
- f. Munculnya fundamentalisme (radikalisme dalam suatu agama) yang anonim (tak berbentuk & bernama) dan tumbuh di atas tradisi, sebagai anggapan terhadap globalisasi yang berujung pada tindakan kekerasan (terorisme ataupun aksi Bom Bunuh diri yang mengatas namakan suatu agama).



KATA SANG TOKOH

Mendapatkan rasa hormat dari mereka yang Anda hormati lebih berharga daripada tepuk tangan banyak orang.

(Arnold Glasow)

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Arnold_Glasow

F.

Presentasi tentang Pengaruh Globalisasi bagi Indonesia

Dampak globalisasi yang bersifat positif banyak ditemukan pada berbagai bentuk sistem kenegaraan, antara lain: perkembangan IPTEK yang canggih dan pesat, kemajuan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam akan mendorong dan meningkatkan kemajuan di segala bidang, serta akan segera menyejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Bangsa Indonesia harus sudah siap menghadapi era keterbukaan dan globalisasi ini. Hidup di jaman ini adalah suatu kehidupan dalam suasana penuh persaingan (kompetitif), hubungan antarbangsa dan negara makin terbuka.

Wilayah negara Indonesia yang terletak pada posisi silang antara Benua Asia dan Benua Australia, antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dan antara paham komunis di utara dan paham liberal di selatan serta kemajuan iptek yang cepat dan canggih. Dengan demikian, jelas bahwa globalisasi akan membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Menghadapi Globalisasi di segala bidang kehidupan, bangsa Indonesia harus segera meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Dengan demikian, pengaruh yang bersifat negatif dari era globalisasi terhadap pola kehidupan bangsa Indonesia dapat dicegah ataupun dapat diminimalkan.

Saat ini, bangsa dan negara Indonesia sedang menghadapi masalah-masalah utama yang mengganggu stabilitas negara. Permasalahan itu antara lain sebagai berikut.

Aspek Kenegaraan	Dampak dan Pengaruh Globalisasi
1. Bidang Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Makin besarnya pengaruh paham liberalisme. b. Makin melemahnya ideologi komunis dalam kehidupan sosial politik. c. Makin menguatnya tuntutan rakyat untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis, bersih dan berwibawa. d. Makin menguatnya jaminan dan tuntutan penegakan HAM (hak asasi manusia) kepada pemerintah. e. Makin menguatnya tuntutan penyelesaian konflik pada wilayah perbatasan yang mempengaruhi stabilitas publik
2. Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Munculnya pasar global, AFTA (<i>Asean Free Trade Area</i>) b. Makin menguatnya mata uang Eropa, <i>euro</i>. c. Adanya persaingan pasar yang cukup tinggi baik tingkat Nasional, Regional dan Internasional. d. Makin berkurangnya peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi negara.
3. Bidang Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Makin cepatnya perubahan pola kehidupan suatu bangsa. b. Makin cepatnya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. c. Makin cepatnya perkembangan alat-alat Komunikasi dan transportasi menjadi semakin canggih.

Aspek Kenegaraan	Dampak dan Pengaruh Globalisasi
4. Bidang Hankam	a. Adanya hubungan kerja sama yang erat antar negara dalam menghadapi kejahatan dan gangguan keamanan internasional. b. Kerjasama dalam hal pengamanan zona teritorial dari bajak laut, arus perpindahan imigran gelap, atau perdagangan senjata. Misalnya, di Selat Malaka (RI, Malaysia, dan Singapura), di Selat Cina Selatan (RI, Malaysia, Indo-Cina, dan Thailand) c. Kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan negara

Dalam era globalisasi, setiap pelajar Indonesia harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, kamu sebagai pelajar Indonesia juga harus cermat dan cerdas dalam menganalisis keadaan dan perkembangan yang sedang terjadi, baik di lingkungan masyarakat, negara, ataupun dunia. Agar kamu lebih menguasai tentang materi globalisasi, maka lakukanlah kegiatan berikut:

1. Buatlah karya tulis dengan tema : *Pengaruh Globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia* untuk dipresentasikan di depan kelas dalam forum diskusi.
2. Tugas tersebut merupakan tugas kelompok. Setiap kelompok maksimal terdiri dari lima siswa (usahakan laki-laki & perempuan).
3. Karya tulis kelompokmu dipresentasikan di kelas. Kelompokmu sebagai kelompok penyaji. Penyajian presentasi akan lebih baik menggunakan program *Power Point*.
4. Karya tulis dibuat dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Bab 1. Pendahuluan

Pendahuluan menguraikan pokok persoalan, terdiri dari subbab berikut.:

- 1) Menguraikan tentang alasan kelompokmu memilih topik permasalahan yang bersangkutan.
- 2) Memberikan batasan yang jelas bagian mana dari persoalan yang dikaji dan bagian mana yang tidak.
- 3) Menggambarkan hasil-hasil yang diharapkan dari penelitian ini dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- 4) Memberikan gambaran umum dari bab ke bab isi dari penulisan karya tulis.

B. Bab 2. Pembahasan

Menguraikan pembahasan materi karya tulis yang dapat didukung dan dilengkapi oleh teori-teori yang menunjang penulisan. Kalian juga dapat melakukan studi pustaka baik dari buku-buku ilmiah, gambar-gambar dari internet, ataupun berita-berita teraaktual sebagai pelengkap dari koran ataupun majalah terkait.

C. Bab 3. Kesimpulan

- 1) Bab ini bisa terdiri dari kesimpulan saja atau bisa juga ditambahkan saran.
- 2) Berisi jawaban dari masalah yang diajukan kelompokmu. Jawaban tersebut diperoleh dari penelitian.
- 3) Ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan hasil penelitian.

D. Bagian Akhir

Berisi daftar referensi (buku, jurnal, majalah, dan lain-lain) yang digunakan dalam penulisan. Penjelasan tambahan, dapat berupa uraian, program, gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 3 kelompok dalam kelasmu (Kelompok Pemerintah, Kelompok Tokoh, Kelompok Pelajar), dimana tiap-tiap kelompok terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Masing-masing kelompok mempunyai tugas sendiri – sendiri untuk menganalisis suatu masalah. Selanjutnya, hasil analisis masing – masing kelompok didiskusikan bersama di kelas untuk mengambil kesimpulan bersama!
3. Tindakan ilmiah dilakukan secara per kelompok dengan mengisi lembar kerja yang telah disediakan (di bawah ini).

Rincian Tugas Kelompok

- Kel. Pemerintah : Bertugas menganalisis bentuk/sikap kepedulian pemerintah terhadap masalah-masalah globalisasi yang mempengaruhi kehidupan.
- Kel. Tokoh : Bertugas menganalisis bentuk/sikap kepedulian pemuka agama dan tokoh masyarakat terhadap masalah-masalah globalisasi yang memengaruhi kehidupan.
- Kel. Pelajar : Bertugas menganalisis bentuk/sikap kepedulian pelajar atau kaum intelektual terhadap masalah-masalah globalisasi yang mempengaruhi kehidupan.

Kesimpulan tiap-tiap Kelompok :

.....

.....

Kesimpulan seluruh kelompok (Kesimpulan Kelas)

.....

.....

4. Buatlah diskusi kelas yang melibatkan diskusi antarkelompok. Mintalah Guru Anda sebagai penilai.



Rangkuman

1. Globalisasi dapat diartikan mendunia. Maksudnya, komunikasi antarbangsa penuh keterbukaan dan jarak antarnegara menjadi makin dekat karena kemajuan iptek yang sangat cepat
2. Dalam era keterbukaan dan globalisasi sekarang ini bangsa Indonesia harus mempunyai ketahanan nasional yang tangguh dan menyiapkan sumber daya manusianya sehingga tidak menjadi korban globalisasi.
3. Bangsa Indonesia harus mampu bekerja sama dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dengan berwawasan persatuan dan kesatuan nasional serta dapat menyeleksi masuknya pengaruh budaya asing yang bersifat negatif sehingga tidak merusak kehidupan bangsa Indonesia.
4. Aspek-aspek positif dan negatif dari era globalisasi di Indonesia antara lain mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.
5. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia merupakan penuntun dan sikap perilaku bangsa Indonesia baik dalam hubungannya secara vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun secara horizontal dengan sesama manusia dan negaranya, Pancasila memberi petunjuk kepada bangsa Indonesia tentang yang benar dan yang tidak benar, yang adil dan tidak adil, dan seterusnya.
6. Masalah-masalah utama yang muncul dalam era globalisasi bagi bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut.
 - a. Konflik sosial dan menguatnya gejala-gejala disintegrasi bangsa di berbagai daerah.
 - b. Belum terwujudnya supremasi hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum.
 - c. Merebaknya penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di setiap daerah.
 - d. Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.
 - e. Gangguan kamtibmas dan pelanggaran HAM.
7. Masalah tersebut akibat pengaruh negatif globalisasi dalam kehidupan masyarakat.
8. Dampak pengaruh era keterbukaan dan globalisasi bagi bangsa Indonesia cukup luas dapat bersifat positif dan negatif. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus dapat memilah-milah dan menyeleksinya dengan cermat agar tidak merugikan bahkan merusak kehidupan bangsa Indonesia.
9. Institusi keuangan yang kuat dibantu dengan penggunaan perdagangan di bidang jasa-jasa yang lebih besar harus diprioritaskan dan diperkuat sebelum memasuki pasar modal internasional.

10. Dalam era Globalisasi muncul berbagai isu internasional, seperti demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, lingkungan hidup, dan pasar global. Apa yang terjadi di suatu negara terkait dengan masalah di atas telah menjadi masalah internasional dan perhatian masyarakat internasional. Suatu negara tidak dapat lagi menutup diri dari perhatian masyarakat internasional dalam rangka mengatasi masalah di atas. Bahkan, isu-isu internasional dijadikan persyaratan dalam mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain.
11. Teknologi komunikasi informasi telah memudahkan manusia dalam bertindak dan berhubungan dengan manusia lain. Teknologi komunikasi informasi memberikan kemudahan dan manfaat besar yang sebelumnya tidak banyak dinikmati manusia. Di negara-negara maju orang telah terbiasa dengan penggunaan teknologi komunikasi informasi tersebut.
12. Globalisasi juga memunculkan aktor selain negara di dalam pergaulan internasional. Aktor selain negara tersebut adalah lembaga-lembaga non negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Aktor non negara sangat aktif dalam menjalin hubungan dan kerja sama melintasi batas-batas negara bahkan mampu menekan negara-negara dalam lingkungan pergaulan internasional. Peranan yang dilakukan organisasi non pemerintah adalah dapat menciptakan opini internasional atas suatu kasus yang terjadi di negara. Opini negatif internasional yang terbentuk dapat merugikan nama baik suatu bangsa.
13. Substansi globalisasi adalah ideologi yang menggambarkan proses interaksi yang sangat luas dalam berbagai bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan budaya.
15. Setidaknya, terdapat tiga kekuatan yang menjadi pendorong perubahan ke arah globalisasi. Berikut ketiga kekuatan tersebut.
 - a. Produk nasional kotor tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara maju.
 - b. Perubahan yang cepat atau revolusi teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi.
 - c. Kekuatan-kekuatan yang mempermudah munculnya perusahaan-perusahaan besar skala global.
16. Globalisasi mengandung fenomena homogenisasi, ketergantungan (interdependensi), serta keterbukaan dan integrasi. Adapun pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi empat dimensi global, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pengaruh globalisasi teknologi.
 - b. Pengaruh globalisasi budaya.
 - c. Pengaruh globalisasi ekonomi (pasar bebas)
 - d. Pengaruh globalisasi politik.

A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e !

1. Pengaruh globalisasi bagi negara dan bangsa Indonesia, terutama pada aspek
 - a. ekonomi
 - b. hubungan internasional
 - c. politik
 - d. teknologi dan komunikasi
 - e. semua jawaban di atas benar
2. Dengan adanya sistem globalisasi sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya. . . .
 - a. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan
 - b. memanfaatkan potensi bangsa sendiri
 - c. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan
 - d. menyaring kemajuan dengan nilai-nilai Pancasila
 - e. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa Indonesia
3. Berikut ini faktor penghambat kemajuan dalam menyongsong abad 21, *kecuali* ...
 - a. sumber daya manusia rendah
 - b. budaya yang selalu menggantungkan pada pemerintah
 - c. suasana keterbukaan
 - d. kurangnya tenaga ahli
 - e. suasana ketertutupan
4. Agar pengaruh negatif globalisasi tidak mudah diserap oleh bangsa Indonesia, sebaiknya. . . .
 - a. menutup diri tidak berhubungan dengan bangsa lain
 - b. menolak nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan Pancasila
 - c. tidak menerima apa pun yang berasal dari Barat
 - d. hanya menerima nilai yang sesuai hati nurani
 - e. perlu melakukan seleksi terhadap nilai-nilai yang baru
5. Dalam kehidupan ini tidak dapat menghindari dari pengaruh globalisasi sehingga harus mau menerimanya dengan
 - a. memilih-milih hal yang disukai
 - b. sebaik mungkin agar tidak tertinggal dari bangsa lain
 - c. lapang dada untuk menerimanya dengan baik
 - d. sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu
 - e. tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa

6. Pengaruh globalisasi dalam hubungan internasional menjadi ... kontak antara bangsa-bangsa.
 - a. kendala
 - b. penting
 - c. mudah sekali
 - d. sukar sekali
 - e. larangan
7. Pemerintah lamban dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi karena
 - a. terlalu menyerah
 - b. tidak menguntungkan
 - c. birokrasi
 - d. kurang gigih
 - e. tidak semangat
8. Adanya globalisasi, Indonesia makin sulit untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang independen dan otonom sebab globalisasi menyebabkan... antara negara satu dan lainnya.
 - a. putusnya hubungan
 - b. permusuhan
 - c. adanya hubungan
 - d. eratnya hubungan
 - e. persaingan
9. Kebijakan ekonomi nasional harus menyesuaikan dengan ekonomi internasional. Hal itu dikarenakan pengaruh globalisasi dalam bidang....
 - a. hubungan internasional
 - b. teknologi dan komunikasi
 - c. ekonomi
 - d. politik
 - e. hak asasi manusia
10. Lahirnya globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan pesat dari....
 - a. majunya teknologi komunikasi dan transportasi
 - b. kerja keras dari manusia untuk maju
 - c. kemajuan manusia dalam hidupnya
 - d. takdir manusia sebagai makhluk Tuhan
 - e. kepandaian manusia dalam kehidupannya

11. Globalisasi sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada bidang
 - a. kebudayaan
 - b. keamanan
 - c. politik
 - d. ekonomi
 - e. pertahanan
12. Kebijakan ekonomi nasional harus menyesuaikan dengan ekonomi internasional. Hal itu disebabkan pengaruh globalisasi dalam bidang....
 - a. hubungan internasional
 - b. teknologi dan komunikasi
 - c. ekonomi
 - d. politik
 - e. hak asasi manusia
13. Pada era globalisasi iptek, yang harus dikembangkan adalah iptek yang....
 - a. mudah diserap oleh warga negara
 - b. dapat meningkatkan kemampuan seseorang
 - c. banyak berkembang di dunia
 - d. mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia
 - e. banyak disukai remaja
14. Pada era keterbukaan dan globalisasi, semua budaya dari negara-negara maju yang masuk ke negara Indonesia sebaiknya....
 - a. kebudayaan dari negara-negara maju bersifat negatif
 - b. masuknya kebudayaan asing hanya merusak kebudayaan asli
 - c. diseleksi dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa
 - d. semua budaya asing harus ditolak
 - e. kebudayaan dari negara-negara maju semua bersifat positif
15. Globalisasi tidak harus berpengaruh negatif dalam kehidupan, melainkan berpengaruh yang positif dengan cara....
 - a. mengubah nilai-nilai budaya lama yang sudah usang
 - b. mengadopsi nilai-nilai yang baru untuk dikembangkan
 - c. mempengaruhi tatanan nilai kehidupan yang merdeka
 - d. memperkuat norma sosial dan nilai budaya yang ada
 - e. membuang budaya yang ada untuk diganti yang baru

16. Kemudahan masuknya informasi dari luar ke dalam negara Indonesia disebabkan peran dari....
- para wisatawan mancanegara
 - penyebar agama
 - bangsa asing
 - teknologi dan komunikasi
 - para misionaris
17. Sikap selektif dalam menghadapi pengaruh globalisasi yang ampuh adalah....
- membuka diri agar mampu mengikuti arus globalisasi
 - mencintai budaya sendiri dan menolak budaya lain
 - tidak mau menerima hal-hal yang berbau globalisasi
 - mempertebal keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan
 - membentuk organisasi pengontrol pengaruh globalisasi
18. Bantuan di bidang ekonomi yang diberikan oleh pihak asing menimbulkan upaya bagi Indonesia untuk mengadakan penyesuaian kebijakan-kebijakan di dalam negeri, bahkan mempengaruhi juga pada bidang....
- budaya
 - keamanan
 - politik
 - sosial
 - pertahanan
19. Perubahan-perubahan pengaruh globalisasi, antara lain, terhadap investasi asing. Zaman dahulu investasi asing dicegah, tetapi sekarang....
- dikehendaki
 - dilirik
 - diharapkan
 - dihapus
 - ditarik
20. Perkawinan antarindividu yang berbeda bangsa ataupun warga negara bukan merupakan halangan karena....
- meluasnya hubungan internasional
 - merupakan hak asasi manusia
 - pengaruh ekonomi
 - pengaruh politik
 - faktor teknologi dan komunikasi

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Melihat beberapa potensi bangsa dan negara Indonesia, bagaimana sikap Anda untuk memperoleh peluang yang muncul pada era globalisasi?
2. Dengan globalisasi, batas antara negara yang satu dengan yang lain akan menjadi hilang. Bagaimana analisis Anda?
3. Buktikan bahwa Pancasila merupakan sarana yang tepat untuk menyeleksi pengaruh negatif dari luar bagi bangsa Indonesia!
4. Globalisasi menjadikan dunia sempit atau seolah-olah negara yang satu dengan yang lain berdekatan. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Tunjukkan contoh-contohnya!
5. Cobalah menganalisis peluang dan tantangan globalisasi bagi bangsa Indonesia!

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 2

A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Media massa dapat menjadi ajang debat publik dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, media massa dapat berfungsi sebagai saluran aspirasi....
 - a. dari pusat ke daerah
 - b. dari kota ke desa
 - c. dari atas ke bawah
 - d. dari bawah ke atas
 - e. dari desa ke kota
2. Jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur pada
 - a. Pasal 28 UUD 1945
 - b. Pasal 30 UUD 1945
 - c. Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945
 - d. Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945
 - e. Pasal 29 UUD 1945
3. Pers Indonesia selain berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial juga sebagai lembaga
 - a. sosial
 - b. seni
 - c. ekonomi
 - d. budaya
 - e. politik
4. Contoh media seni modern yang dapat menjadi alat komunikasi di masyarakat
 - a. tonil
 - b. ketoprak
 - c. sinetron
 - d. wayang
 - e. ludruk
5. Setiap kebijakan publik harus disosialisasikan kepada masyarakat luas. Usaha penyebarluasan ini merupakan bentuk
 - a. perencanaan
 - b. penilaian
 - c. pertanggungjawaban
 - d. pelaksanaan
 - e. pendelegasian
6. Ada berbagai cara pemerintah mensosialisasikan kebijakan publik, seperti tersebut di bawah ini, kecuali
 - a. diceramahkan melalui penyuluhan
 - b. dibicarakan dari mulut ke mulut
 - c. dimuat dalam surat kabar
 - d. disiarkan melalui radio
 - e. diceritakan melalui wayang kulit

7. Kebebasan pers yang baik adalah yang dapat dipertanggung jawabkan kepada....
- seluruh rakyat Indonesia
 - semua jawaban a, b, c, dan d benar
 - hati nurani sendiri dan Tuhan YME
 - para pembaca dan kebenaran
 - peraturan perundangan di Indonesia
8. Menerbitkan bahan yang aktual dan beraneka ragam dengan cepat dan secara berkala merupakan
- tanggung jawab penerbit
 - kemauan pers
 - isi surat kabar
 - ciri surat kabar
 - ciri khas pers
9. Penemu mesin cetak adalah
- James Watt
 - Jan Poeterszoon Coen
 - Julis Caesar
 - Johannes Guttenberg
 - Janszoon Kaster
10. Media massa bagi masyarakat adalah wahana untuk mewujudkan hak
- memiliki sesuatu
 - memeluk agama atau kepercayaan
 - mendapatkan jaminan hukum
 - memperoleh pekerjaan yang layak
 - menyatakan pendapat dan berbicara
11. Contoh media seni tradisional yang dapat menjadi alat komunikasi di masyarakat adalah
- film
 - teater
 - sinetron
 - drama
 - ludruk
12. Pers adalah bagian dari media massa. Berikut ini yang termasuk media pers adalah
- internet
 - surat kabar
 - radio
 - televisi
 - sinetron
13. Kebebasan yang bertanggung jawab dalam musyawarah adalah perwujudan demokrasi Pancasila, sila
- ketiga
 - kelima
 - pertama
 - kedua
 - keempat

14. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah perwujudan demokrasi Pancasila yang berkaitan dengan
- a. hidup bermasyarakat
 - b. pembagian kekuasaan
 - c. hak asasi manusia
 - d. hidup bernegara
 - e. kekuasaan negara
15. Yang termasuk dalam hak asasi manusia bidang hukum adalah
- a. memilih dan dipilih
 - b. mendirikan partai politik
 - c. menyatakan pendapat
 - d. mengadakan perjanjian
 - e. mendapatkan pengayoman
16. Date Line merupakan istilah yang sering dipakai dalam dunia pers, khususnya media cetak. Yang dimaksud dengan date line adalah
- a. batas akhir wartawan mengedit berita
 - b. wilayah liputan berita
 - c. batas akhir wartawan mengirim berita
 - d. batas akhir penerbit untuk mencetak
 - e. tempat, dan tanggal sumber berita
17. Ancaman globalisasi ekonomi terhadap negara-negara miskin muncul dalam bentuk ..
- a. keseragaman budaya
 - b. ketidakadilan
 - c. lunturnya nilai-nilai budaya
 - d. lunturnya peran bangsa
 - e. terciptanya demokrasi Internasional
18. Menurut teori pers tanggung jawab sosial, kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers. Sedangkan teori pers Libertarian, mengajarkan bahwa kebebasan pers adalah kebebasan ...
- a. mutlak
 - b. terbatas
 - c. tertutup
 - d. terbuka
 - e. terkontrol
19. Berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan adanya integrasi ekonomi dunia merupakan faktor penting dan utama yang mendukung proses ...
- a. sosialisasi
 - b. reformasi
 - c. modernisasi
 - d. westernisasi
 - e. globalisasi
20. Pers dalam sejarah Indonesia memiliki persamaan yang efektif sebagai jembatan komunikasi timbal balik antara Salah satu dampak penyalahgunaan kebebasan pers bagi kepentingan umum yaitu.....
- a. menimbulkan perpecahan
 - b. merusak nama baik seseorang
 - c. menurunnya kepercayaan
 - d. menghalangi karier seseorang
 - e. menurunkan pendapatan masyarakat

21. Salah satu dampak penyalahgunaan kebebasan pers bagi kepentingan pribadi yaitu.....
 - a. menimbulkan perpecahan
 - b. merusak nama baik seseorang
 - c. menurunnya kepercayaan
 - d. menghalangi karier seseorang
 - e. menurunkan pendapatan masyarakat
22. Berikut adalah pengaruh globalisasi di bidang politik terhadap Indonesia adalah.....
 - a. liberalisasi perdagangan, menguatnya modal asing
 - b. meningkatnya individualisme, konsumerisme, permisif di masyarakat
 - c. meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan masyarakat
 - d. peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan
 - e. mudahnya menjalin hubungan dengan warga belahan dunia lainnya melalui internet
23. Berikut adalah pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya terhadap Indonesia adalah.....
 - a. liberalisasi perdagangan, menguatnya modal asing
 - b. meningkatnya individualisme, konsumerisme, permisif di masyarakat
 - c. meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan masyarakat
 - d. peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan
 - e. mudahnya menjalin hubungan dengan warga belahan dunia lainnya melalui internet
24. Manfaat media massa bagi pelajar adalah wahana untuk mewujudkan hak....
 - a. mendapatkan jaminan hukum
 - b. memperoleh pekerjaan yang layak
 - c. memperoleh pengetahuan yang diperlukan
 - d. menyatakan pendapat dan berbicara
 - e. memeluk agama dan kepercayaan
25. Arti kata "pers" menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah sebagai berikut, *kecuali*...
 - a. alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar
 - b. surat menyurat
 - c. alat untuk menjepit, memadamkan
 - d. surat kabar dan majalah yang berisi berita
 - e. orang yang bekerja di bidang persuratkabaran
25. Sikap anda sebagai pelajar dalam menghadapi globalisasi
 - a. menerima dengan ikhlas
 - b. rajin belajar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila
 - c. memanfaatkan perkembangan yang ada
 - d. melakukan penolkan terhadap globalisasi yang dilakukan pemerintah
 - e. menjaga kebersihan lingkungan

26. Perhatikan pernyataan berikut
1. perubahan dalam konsep, ruang dan waktu
 2. adanya perdagangan antar manusia
 3. meningkatnya masalah bersama
 4. adanya penaklukan bangsa-bangsa di Asia-Afrika
- Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri globalisasi adalah...
- a. 1 dan 2
 - b. 3 dan 4
 - c. 1 dan 3
 - d. 2 dan 4
 - e. 2 dan 3
27. Salah satu fungsi pers adalah sebagai alat kontrol sosial yaitu....
- a. membantu masyarakat meningkatkan budayanya dan menambah pengetahuan masyarakat
 - b. pers menjadi sarana lalu lintas hubungan antar manusia sehingga terciptanya saling pengertian dan tukar pendapat bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia
 - c. memberikan pandangan atau pikiran kepada khlayak pembaca
 - d. melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang tidak dikehendaki oleh masyarakat
 - e. menjadi sarana promosi bagi produsen untuk mengenalkan barang/jasa kepada konsumen
28. Ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kesewang-wenangan merupakan.....
- a. fungsi pers
 - b. misi pers
 - c. peranan pers
 - d. visi pers
 - e. tanggung jawab pers
29. Upaya bangsa Indonesia dalam menanggulangi dampak globalisasi di bidang ekonomi adalah....
- a. membatasi barang yang masuk
 - b. memproteksi barang buatan sendiri
 - c. tidak ikut serta dalam forum dunia
 - d. revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya
 - e. memperkuat pertahanan dan keamanan
30. Berikut yang bukan merupakan peranan pers nasional menurut UUI No. 40 tahun 1999 tentang pers adalah..
- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
 - b. menegakkan demokrasi, mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia
 - c. mengembangkan setiap informasi yang diterima
 - d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
 - e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran

B. Jawablah Pertanyaan berikut dengan tepat

1. Apa yang dimaksud isu global itu? Berikan contohnya!
2. Sebutkan enam tahap globalisasi!
3. Mengapa Indonesia harus peduli terhadap isu-isu global/internasional?
4. Berikan lima contoh lembaga swadaya masyarakat!
5. Apa yang dimaksud pers melakukan investigasi? Jelaskan!
6. Berikan tiga contoh media komunikasi tradisional!
7. Apa fungsi penting pers bagi pemerintah? Jelaskan!
7. Apa yang dimaksud teori pers libertarian?
9. Apa dampaknya media yang menyalahgunakan kebebasan berpendapat?
10. Apakah arti dan makna globalisasi? Sikap dan perbuatan apa yang dapat dijadikan suri tauladan dalam menghadapi tantangan globalisasi?
11. Menurut Anda, bagaimana Anda menghadapi pasar bebas pada era globalisasi yang tidak bisa dihindari ini?
12. Berikan contoh pengaruh dari luar yang bersifat negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia, kemudian berikan pula tanggapan dan sikap Anda dalam menghadapi hal ini!
13. Mengapa kita harus menyeleksi masuknya budaya dari luar ke Indonesia?
14. Apakah yang harus kita lakukan agar dapat terhindar dari pengaruh negatif globalisasi? Berikan satu contohnya!
15. Sumber daya alam dan manusia negara Indonesia yang cukup besar memiliki potensi yang besar pula untuk dikembangkan. Bagaimana potensi yang ada itu dapat dimanfaatkan untuk menghadapi globalisasi?

AFTA	: Asean Free Trade Area, wilayah perdagangan bebas ASEAN.
Bio teknologi	: teknologi yang mengangkut jasad hidup.
Blend together	: saling terkait, menyatukan.
Deregulasi	: proses penghapusan pembatasan dan peraturan.
Digital	: sistem yang berkaitan dengan penomoran atau perhitungan angka.
Disintegrasi	: adalah keinginan atau usaha suatu daerah untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat.
Era	: adalah kurun waktu dalam sejarah atau sejumlah tahun dalam jangka waktu antar peristiwa penting dalam sejarah.
Etika	: adalah nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar atau salah.
Fitur	: tampilan (bentuk/gambar)
Globalisasi	: adalah berasal dari kata globe artinya peta dunia atau bola dunia. Yaitu arus keterbukaan, komunikasi, dan transportasi antar bangsa dan negara seolah-olah tidak ada jaraknya karena iptek yang sangat canggih.
IMF	: International Monetary Fund, lembaga pemberi bantuan dana internasional
Internet	: jaringan dunia maya, jaringan komputer yang saling berhubungan dalam skala global/dunia sehingga dapat berkomunikasi antar negara, antar bangsa, dan antar individu di seluruh dunia.
Konflik	: adalah pertentangan atau perselisihan antara dua kelompok atau lebih.
Literalisasi	: proses menerapkan paham liberal (kebebasan)
Micro chip	: rangkaian elektronik dalam bentuk kepingan kecil, terbuat dari bahan silikon dan mampu memproses logika.
Mikroelektronik	: teknologi pembuatan rangkaian dan alat (listrik ukuran sangat kecil).
Multiculturalism	: berbagai macam budaya.
NAFTA	: North Atlantic Free Trade Area, wilayah perdagangan bebas Atlantik Utara.
New world order	: tatanan dunia baru.
Pasar bebas	: Pelaksanaan pasar ekonomi melalui kompetisi bebas.
Pasar bebas terbuka	: Pasar sekuritas yang secara terbuka mencantumkan harga dan syarat.
Pluralism, pluralisme	: Keadaan masyarakat majemuk.
Privatisasi	: proses atau tindakan pemilikan aset negara ke perseorangan.
WTO	: World Trade Organisasi, organisasi perdagangan dunia.

Supremasi hukum	: adalah kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
Terorisme	: adalah suatu paham yang membenarkan dengan cara kekerasan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi pihak lain untuk mencapai tujuannya.
Anoni	: Pergeseran nilai budaya
APEC	: Asia Pasific Economic Corporation (Perdagangan Bebas Asia Pasifik)
ASEAN	: Association South East Asian Nation
Budaya permisif	: Budaya yang serba boleh.
Cultural shock	: Keguncangan budaya.
Cultural lag	: Ketimpangan budaya
Consumer culture	: Budaya konsumen
Equilibrium	: Keseimbangan
Global village	: Desa buana
IBRD	: International Bank of Reconstruction and Development
IMF	: International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)
Interdependensi	: Ketergantungan
Konfigurasi	: Wujud
Life style	: Gaya hidup
Personal space	: Ruang pribadi
Struggle of power	: Konflik kekuasaan/kekuatan
SEM	: Single European Market (Pasar tunggal Eropa)
Transnasional	: Multinasional

- Adam Jamrozik, 2004. *The Chains of Colonial Inheritance : Searching for Identity in a Subservient Nation*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Adnan Buyung Nasution. 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956 - 1959*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Ahmadi, Abu. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Ahmad Fauzan. 2004. *Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan*. Bandung : Yarama Widya.
- Alfian, Dr. 1980. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Azyumardi Azra. 2007. *Keragaman Suku, Agama, Ras, Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani: Resiko, Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta : Institute for Community Behavioral Change (ICBC) dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) .Yogyakarta, 13 Agustus, 2007
- C. de Rover. 2000. *To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- C. Khickhon. 1952. *Culture: A Critical Review of Concept and Definition*. Cambridge: Peabody Museum.
- Charles Himawan. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta : KOMPAS
- Cochrane A. Pain. 2000. *A Globalizing Society?* London: Routledge Ltd.
- David Beetham & Kevin Boyle. 2004. *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta : Kanisius.
- Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Eko Ernada. 2005. *Penyelesaian Sengketa Ambalat*. Published at: Jawa Pos/ Indo Pos, Rabu, 16 Mar 2005.
- Franz Magnis Suseno. 2000. *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- G. Bingham Powell.2000. *Liberal Democracy*. London : Cambridge University Press.
- GINANJAR Kartasmita, A. Prabowo, Bambang Kesowo ... et al. 1995. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Cet 1. Jakarta : Sekretariat Negara. ISBN 979-8300-04-1, 979-83000.
- Greta O. Wilson (ed.). 1998. *Regents, reformers, and revolutionaries: Indonesian Voices of Colonial Days*. *Asian Studies at Hawaii, no 21*. Honolulu : The University Press of Hawaii.
- Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Houlgate, Stephen. 2005. *An Introduction to Hegel. Freedom, Truth and Hystory*. Oxford: Blackwell Ltd.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD tahun 1945, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII*. Denpasar : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- _____. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- John Naisibitt dan Patricia Aburdence. 1990. *Megatrend 2000*. New York: William Morrow and Company.
- Kaelan, 2002, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Nagatirta.
- Kansil, Prof CST, 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Khor, Marttin. 2003. *Rethinking Globalization*. Jakarta: Zed Books. ISBN: 978-1-842277-055-9
- L. Friedman, Thomas. 1999. *The Lexus and The Olive Tree*. Amsterdam: Van der Werff Global, Ltd.
- Leslie Holme, "Communist and Post-Communist Systems," New York : Cambridge University Press.
- Lodge. 1996. *The Impact of Globalization*. London: Cambridge University Press.
- Mansour Fakih, Antonius M. Indianto. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta : Insist Press.
- Marpaung, Leden, S.H., 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Nursal Luth dan Daniel Fernandez. 2005. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Galaxy Puspa Mega.
- Poespowardojo, Soerjanto. 2000. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: UI ress.
- Robert, Emmanuel. 1998. *Politische Systeme and Comparative Politics*. Berlin: IPW
- Sastrapratedja. 2003. *Ide-ide Menerobos*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sumardjan, Selo. 2002. *Konflik-Konflik Sosial di Indonesia*. Jakarta: Analisis CSIS. Tahun XXX1/2002. No. 3
- Toffler, Alvin. 1990. *Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century*. Jakarta: Bantan Books ISBN: 0-553-29215-3
- Utrecht, SH, Dr. 1982. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Wijayono, Padmo. 2005. *Bunga Rampai Sejarah Sosial – Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Aditya Meli.

A

abolisi 67, 72, 74
 Agus Salim 102, 6, 25
 Akurasi 132
 akurasi 146
 Albert Camus 158
 Alfian 3, 32
 Amandemen 66, 69, 70
 amandemen 70, 75, 137
 amnesti 72, 74
 Aristokrasi 37, 40
 Aristoteles 37, 40, 96

B

Bianglala 100
 BMDiah 104
 Bromartani 100, 101
 Budi Utomo 101, 102

C

Cecil de Mille 127
 Check and Balance 51
 Check and balance 52
 check and balance 51, 52
 clean government 119, 152
 Congress 51, 52, 57, 81
 congress 52

D

Darmo Kondo 102
 Debat Publik 125
 debat publik 124, 148, 150
 Demokrasi 7, 8, 19, 31,
 37, 40, 43, 51, 62,
 63, 64, 83, 84, 85,
 95, 106, 107, 177
 demokrasi 15, 19, 20, 23,
 26, 39, 40, 41, 45,
 52, 54, 59, 62, 77,
 84, 96, 106, 107,
 111, 112, 113, 116,

117, 124, 125, 131,
 134, 138, 140, 142,
 145, 147, 149, 150,
 162, 168, 177, 178,
 183, 189, 191, 202

Destuct de Tracy 2, 30
 Diktum 61, 62
 diktum 61
 Dimensi Idealisme 4
 Dimensi Realita 4
 dimensi realita 33
 Diskriminasi 132
 diskriminasi 22, 23, 66, 133,
 137

E

Eksekutif 37, 39, 51, 53, 55,
 57, 77, 78, 79, 80,
 81
 eksekutif 38, 39, 40, 41, 44,
 45, 46, 47, 48, 51,
 52, 54, 55, 57, 58,
 64, 74, 76, 77, 78,
 83, 84, 85, 86, 124

F

facebook 154
 Federal 56, 57, 78, 81, 82,
 84, 86
 federal 51, 56, 57, 77
 Frans Magnis Suseno 10
 Fundamentalisme 7, 30
 fundamentalisme 197

G

Goenawan Mohammad 111

H

Hak Jawab 133, 144
 Hak jawab 133

hak jawab 126, 130, 136,
 144, 145
 Hak Tolak 144
 hak tolak 126, 130, 136, 144,
 145
 Hegel 2, 32
 House of Commons 53, 54,
 77, 79, 84, 86
 House of Representative
 51, 77, 78, 84, 86

I

IDEOLOGI 7, 8
 Ideologi 164, 141, 1, 2, 3,
 4, 5, 6, 7, 9, 11,
 24, 27, 30, 32
 ideologi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
 10, 11, 12, 15, 17,
 18, 20, 24, 27, 29,
 30, 31, 32, 33, 36,
 62, 106, 108, 109,
 110, 120, 138, 141,
 154, 162, 163, 185,
 186, 189, 197, 198,
 202
 Investigasi 122
 investigasi 96, 122, 123,
 126, 147, 150

J

John F. Kennedy 80
 Jurnalistik 95, 127, 128, 133
 jurnalistik 96, 110, 121,
 122, 125, 127, 128,
 129, 130, 133, 134,
 143, 144, 145, 147,
 148

K

Kabinet Koalisi 50
 Kabinet Ministerial 49, 58, 84

Kabinet ministerial 49
 kabinet ministerial 50
 Kabinet Nasional 50
 Kabinet Parlementer 50, 84
 Kabinet parlementer 58
 kabinet parlementer 50, 52
 Kabinet Partai 50
 Kabinet Presidensial 49,50,58
 Kabinet presidensial 49
 Kode Etik 71, 95, 128, 129,
 130, 133, 134, 135,
 137
 Kode etik 128, 129, 130,
 133, 137, 148
 kode etik 125, 128, 129, 130,
 133, 134, 135, 136,
 143, 144, 145, 148
 Kode Praktik 130
 kode praktik 129, 130
 Kolonial 95, 97, 98, 99,
 110, 147, 150
 kolonial 160, 97, 101, 103
 kolusi 201, 64, 118
 Komite Nasional Pusat 58
 Konferensi pers 131
 konferensi pers 123
 Konstituante 61, 62
 konstituante 61
 KONSTITUSI 183, 187
 Konstitusional 41, 43, 54, 79
 konstitusional 28, 32, 35, 41,
 46, 47, 53, 54, 71,
 74, 75, 80
 Korupsi 190
 korupsi 64, 75, 83, 118,
 122, 135, 201

L

Legislatif 37, 39, 51, 55,
 56, 57, 59, 77,
 78, 79, 80, 81
 legislatif 38, 39, 40, 44,
 45, 46, 47, 48,
 51, 52, 53, 54,
 55, 58, 76, 77,
 78, 83, 84, 85,
 86, 119, 124

LIBERALISME 7, 8
 Liberalisme 5, 7
 liberalisme 5, 8, 10, 30, 190,
 198, 138,
 Lodge 156

M

Mahatma Gandhi 52
 Manipol 62, 108
 manipol 107
 Martin Khor 164
 mass education 118
 Miriam Budiardjo 5
 Monarki Absolut 41, 43
 monarki absolut 41
 Monarki Konstitusional 41,
 54, 79
 Monarki konstitusional 41
 monarki konstitusional 41, 54
 Monarki Parlementer 41, 49
 monarki parlementer 42

N

Nasionalisme 183, 3, 6, 30
 nasionalisme 157, 183, 6,
 14, 23
 Negarakertagama 13, 31
 nepotisme 201, 64, 118, 120
 Nilai 186, 139, 1, 4, 10, 11,
 12, 13, 14, 15, 16,
 17, 24, 27, 28, 30,
 31, 33, 34
 nilai 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11,
 12, 13, 14, 15, 16,
 17, 20, 21, 22, 23
 24, 25, 26, 27, 28,
 29, 30, 31, 33, 34,
 35, 36, 43, 53, 69,
 73, 76, 82, 110,
 112, 113, 122, 123,
 125, 132, 133, 134,
 138, 139, 142, 143,
 146, 149, 156, 158,
 159, 162, 163, 164,
 166, 168, 169, 171,
 172, 173, 174, 176,
 177, 178, 180, 183,

184, 185, 186, 188,
 191, 194, 196, 198,
 200, 203, 205,

Nilai Dasar 1, 11

Nilai dasar 11

nilai dasar 113, 125, 4, 9,
 10, 11, 14, 27,
 31, 33, 34, 36

Nilai Instrumen 1, 11

Nilai instrumen 11

nilai instrumen
 10, 11, 31, 33, 34, 36

O

Oligarki 37, 40, 83, 85

Opini 125, 202

opini 96, 113, 124, 126,
 130, 136, 139, 143,
 144, 146, 148, 150
 152, 202

Orde Baru 63, 64, 65, 86,
 109, 110, 111, 112,
 152, 153, 160, 191,

orde baru 109

Otonomi 66

otonomi 186, 69, 72, 78,
 79, 80, 138

P

Parlemen 37, 39, 41, 43,
 46, 49, 50, 53,
 54, 55, 58, 76,
 77, 79, 81, 84,
 85, 86

parlemen 39, 40, 41, 42, 44,
 45, 46, 47, 48, 49,
 50, 52, 53, 54, 55,
 57, 58, 77, 81, 82,
 83, 84, 85, 86,
 102, 106, 150

Parlementer 37, 41, 43, 46,
 49, 50, 53, 58,
 79, 81, 84, 85

parlementer 41, 42, 44,
 46, 47, 48, 50, 52,
 53, 54, 58, 77, 82,
 83, 84, 86, 106, 150

Plato 77, 4

pluralisme 169, 177, 178

Presidensial 37, 39, 44, 49,
50, 58, 64, 69, 78,
79, 80, 81, 84, 85

presidensial 42, 44, 45, 46,
48, 49, 51, 56, 57,
58, 66, 70, 77, 79,
82, 83, 84, 86, 150

R

Reformasi 12, 15, 24, 27,
65, 66, 86, 112,
129, 133, 152,

reformasi 66, 112, 113, 191

rehabilitasi 67, 74

reporter 96, 123, 144

Republik Absolut 43

Republik Konstitusional 43

Republik Parlementer 43

rule of law 120, 138

S

Sentralisme 62

sentralisme 52, 80

Soejatmiko 158

soft drink 154

supremasi hukum 64, 23, 66,
13, 117, 125, 140,
142, 145, 201

Sutan Syahrir 102

T

Theodore Levitte 155

Thomas Jefferson 54

Thomas L. Friedman 163

Tirani 40

tirani 120

Transparansi 178

transparansi 190, 202

Trias Politica 39, 41, 51, 78

U

Unikameral 77, 80

unikameral 52, 61, 85

Y

Yudikatif 37, 39, 51, 55,
56, 57, 59, 75, 78,
79, 80, 81

yudikatif 38, 39, 45,
46, 51, 53, 54, 55,
57, 67, 75, 76, 78,
83, 85, 86, 120, 124

Kunci Jawaban PKn Kelas XII

BAB 1

- A
1. E
 2. C
 3. B
 4. B
 5. B
 6. A/C
 7. B
 8. E
 9. A
 10. C
 11. C
 12. B
 13. C
 14. E
 15. E
 16. A
 17. D
 18. E
 19. D
 20. D

- B
1. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil bersifat mutlak yang tidak mungkin dapat diubah lagi. Contohnya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai instrumental adalah pelaksanaan nilai umum dari nilai dasar berujud norma sosial dan hukum merupakan penjabaran nilai dasar dalam wujud konkret sesuai zaman. Contoh undang-undang baik tingkat pusat maupun daerah.
 2. Cara membangun manusia Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan sikap perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila secara utuh dan bulat
 3. Ideologi memiliki arti penting suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena suatu negara akan kukuh dan kuat berdiri harus memiliki ideologi.

4. Sudah
 Dalam sila 1 Ketuhanan YME
 Contoh mengembangkan sikap toleransi yaitu memberi kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah
 Dalam sila ke 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab
 Contoh menghormati hak asasi orang lain, mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesama manusia
 Dalam sila ke 3 Persatuan Indonesia
 Contoh cinta tanah air, cinta perdamaian dan persatuan tidak mengagung-agungkan bangsa sendiri
 Dalam sila ke 4
 Contoh suka musyawarah, cinta demokrasi, tidak mementingkan diri sendiri.
 Dalam sila ke 5
 Contoh suka bekerja keras, menganggap bangsa lain sederajat, mencintai keadilan sosial
5. Hidup bergotong royong dengan tetangga, toleransi, beragama, tidak membedakan status sosial.

BAB 2

- A
1. C
 2. C
 3. B
 4. C
 5. C
 6. A
 7. D
 8. D
 9. E
 10. B
 11. A
 12. D
 13. D
 14. A
 15. E
 16. C

17. D
18. B
19. E
20. E

B. 1. Kelebihan:

- Sistem check and balance dapat menghasilkan keseimbangan antara organ yang disertai tugas
- Dapat mencegah terjadinya kekuasaan absolut
- Kedudukan badan eksekutif lebih stabil
- Penyusunan program mudah disesuaikan dengan masa jabatan eksekutif

Kelemahan

- Setiap keputusan adalah hasil tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif sehingga sering kurang tegas
- Pengambilan keputusan relatif lebih lama

2. a. UU No 2/1999 tentang partai politik
- b. UU No 3/1999 tentang Pemilu
- c. UU No 4/1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
- d. UU No 22/1999 tentang pemerintahan daerah
- e. UU No 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- f. UU No 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapainya diperlukan suatu pedoman demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Pedoman yang digunakan adalah Pancasila.
4. Senate adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara yang bersangkutan setiap negara bagian punya 2 orang wakil, masa jabatan 6 tahun

House representative adalah perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih langsung untuk masa jabatan 2 tahun.

5. Badan legislatif adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Badan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif yang disebut eksekutif adalah kabinet.

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 1

- A 1. D
2. C
3. E
4. B
5. D
6. D
7. B
8. B
9. A
10. A
11. D
12. D
13. D
14. B
15. C
16. E
17. A
18. B
19. C
20. C
21. A
22. B
23. B
24. B
25. B
26. B
27. B
28. E
29. C
30. D
31. C
32. D
33. C
34. E
35. B
36. C
37. E
38. E

39. B
40. C

- B. 1. Sistem pemerintahan semi presidensial adalah sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Presiden dalam menjalankan kekuasaan bekerja sama dengan perdana menteri
2. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
- Indonesia adalah negara hukum
 - Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD
 - MPR sebagai lembaga permusyawaratan/majelis saja
 - Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi dipilih langsung oleh rakyat
 - DPR memegang kekuasaan membentuk UU dan tidak dapat dibubarkan oleh presiden
 - Menteri negara adalah pembantu presiden
 - Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
 - MA dan MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman
3. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan atau sangat erat karena dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 memuat dasar negara
4. Karena teori pembagian kekuasaan mengusulkan pembentukan tiga badan politik saling independen, namun saling mengawasi satu sama lain untuk mencegah kekuasaan absolut yang berada di tangan satu pihak tertentu maka banyak negara yang menggunakan teori ini.
5. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR masih sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam hubungan dengan DPR khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan untuk memberhentikan presiden dan/atau

wakil presiden. Proses tersebut dapat dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR diajukan pada MPR.

Dalam hubungan dengan DPD dalam mengubah UUD harus dihadiri 2/3 anggota MPR dan memberhentikan presiden harus dihadiri 3/4 anggota MPR

6. Kelemahan bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
- Semua kebijakan diputuskan di tingkat pusat saja, daerah hanya sekedar “pelaksana” keputusan dari pusat. Hal ini menyebabkan tidak menumbuhkembangkan “kreativitas” pembangunan bagi daerah
 - Terkadang kebijakan yang hanya diambil di tingkat pusat saja (tanpa melibatkan peran serta daerah)
 - Kebijakan-kebijakan pusat yang selalu dipaksakan akan menyebabkan rasa “tidak puas” pada daerah yang lama kelamaan akan berpotensi memicu desintegrasi bangsa
7. Anggota MPR terdiri anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan masa orba, jumlah anggota MPR kurang lebih 1000 orang dengan rincian 500 (400 anggota dipilih melalui pemilu, 100 diangkat lewat fraksi 15 utusan daerah diambil dari masing-masing provinsi yang dipilih oleh DPRD dari 27 provinsi, utusan golongan 340 orang.
8. Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi kedalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga tertentu yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam hubungan atas bawah

9. Perubahan pertama sidang MPR 1999
 - Membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR
 - Sidang MPR Tahun 2000 Rumusan perubahan pasal-pasal dalam UUD
 - Sidang MPR tahun 2001 Mengubah dan atau menambah ketentuan "pasal hingga asas" landasan negara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga serta ketentuan pemilu
 - Sidang MPR tahun 2002 Kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga penghapusan DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan sosial.
10. DI Indonesia menurut UUD 1945 presiden ikut membahas dan memberikan persetujuan atas suatu rancangan UU di AS. Presiden tidak ikut membahas suatu rancangan UU tetapi memiliki hak veto atas rancangan UU yang sudah disetujui kongres.
18. B
19. B
20. E
- B. 1. Manfaat perkembangan teknologi dan informasi
 - a. Bidang pendidikan
 - Terbuka dengan modus belajar jarak jauh
 - b. Bidang ekonomi
 - Transaksi perbankan secara online
 - Perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet
 - Aplikasi perangkat lunak mencakup sistem manajemen dalam perbankan
 - c. Bidang pemerintah
 - Dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain
2. Opini internasional yang memojokkan Indonesia adalah dari negara AS umat Islam Indonesia dinilai ekstrim oleh publik AS padahal umat Islam Indonesia sangat jauh dari kesan ekstrim
3. Tindakan selain pers harus mendukung penguasa, kalau kebijakan penguasa memang jelas-jelas melanggar hukum, konstitusi serta rasa keadilan masyarakat maka disinilah peran pers sebagai kontrol sosial. Pers harus berani mengkritik, memberi masukan, memberikan ruang publik seluas-luasnya untu mengemukakan opininya. Namun sebaliknya jika kebijakan penguasa tersebut memang telah sesuai dengan hukum, konstitusi, dan bertujuan demi kebaikan bangsa dan negara, maka pers harus mendukungnya dan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.
4. Kebebasan pers dalam orde baru
 - otoriter
 - perizinan ketat
 - mematikan kreativitas dalam kontrol pers

BAB 3

- A. 1. B
2. D
3. E
4. D
5. D
6. B
7. A
8. A
9. D
10. D
11. D
12. D
13. C
14. E
15. D
16. D
17. E

- Kebebasan pers masa reformasi
- sebagai media penyampai informasi yang efektif
 - sarana komunikasi yang bertanggung jawab
 - berita yang bersumber pada fakta yang benar
 - merupakan pers yang bebas
5. Ludruk, wayang kulit, lenong, tonil.

BAB 4

- A.
1. E
 2. D
 3. C
 4. E
 5. E
 6. C
 7. C
 8. D
 9. C
 10. A
 11. A
 12. C
 13. D
 14. C
 15. D
 16. D
 17. D
 18. D
 19. C
 20. E

- B.
1.
 - a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan
 - b. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila
 - c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan
 - d. Meningkatkan pendidikan
 2. Globalisasi adalah suatu proses yang akan membawa seluruh bangsa dan negara makin terikat antara satu dengan yang lain, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi, dan budaya masyarakat, maka bisa jadi batas antara negara satu dengan negara lain akan hilang dengan adanya globalisasi.

3. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar yang mana tidak dapat diubah oleh siapapun dan oleh apapun, maka dengan pengaruh negatif yang ada Pancasila mampu menyeleksi nilai-nilai yang mana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
4. Globalisasi dapat berarti peningkatan keterikatan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia. Adanya globalisasi mampu membuat dunia semakin sempit. Contohnya menonton sepak bola kita tidak harus datang ke negara tersebut dengan melihat televisi kita bisa menyaksikan secara langsung siaran pertandingan sepak bola
5. Globalisasi bangsa Indonesia adalah peluang dan tantangan.
 - a. Peluang
Untuk bangsa Indonesia mestinya dapat meningkatkan dan memanfaatkan aspek-aspek positif dari globalisasi itu sendiri artinya:
 - Kita semakin harus meningkatkan kualitas produk-produk kita sendiri karena pasar luar negeri adalah sangat terbuka lebar untuk produk-produk kita
 - Memanfaatkan adanya barang-barang berkualitas bagus namun murah dalam harga untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
 - b. Tantangan
Meskipun demikian tantangan globalisasi bangsa Indonesia adalah:
 - Kalau kita tidak mampu membangun etos kerja dan penjaminan mutu terhadap barang-barang produksi kita akan berakibat matinya kegiatan produksi dalam negeri dan kita hanya menjadi "bangsa pemakai"

- Kalau kita tidak mengamankan budaya dan tradisi kita sendiri, maka kita akan mengonsumsi budaya asing sebagai identitas diri bangsa kita.

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 2

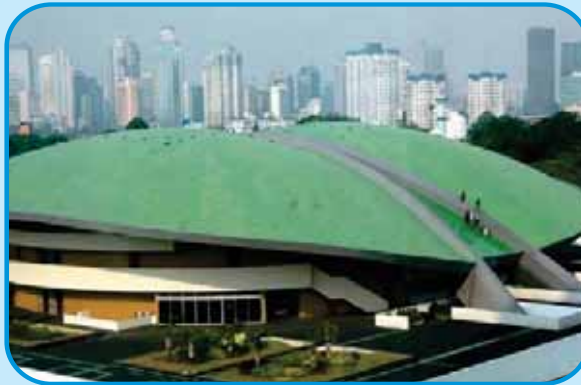
- A.
1. D
 2. C
 3. A
 4. C
 5. C
 6. B
 7. B
 8. C
 9. D
 10. E
 11. E
 12. B
 13. E
 14. C
 15. E
 16. C
 17. B
 18. A
 19. E
 20. A
 21. D
 22. C
 23. B
 24. C
 25. B
 26. B
 27. E
 28. D
 29. C
 30. A

- B.
1. Isi global adalah suatu isu atau pendapat atau pemikiran yang mudah dianut dan dijalankan oleh masyarakat dunia.
Contoh: demokratisasi, kebebasan pers, persamaan gender

2. Enam tahap globalisasi
 - a. Tahap embrional (1500-1800)
 - b. Tahap pertumbuhan (1810-1870)
 - c. Tahap take off (1870-1920)
 - d. Tahap perjuangan hegemoni (1920-1960)
 - e. Tahap ketidakpastian (1960-1990)
 - f. Tahap kebudayaan global (pasca 1990)
3. Indonesia harus peduli terhadap isu-isu global/internasional sebab jika negara Indonesia sekarang ini dengan tingkat kehidupan dan pembangunannya masih dalam taraf tradisional, sehingga kondisi semacam ini bisa akan menimbulkan kerawanan hubungan internasional dan akan berpengaruh buruk kepada kondisi dalam negeri.
4. ICW (Indonesia Corruption Watch), Gita Pertiwi, Imparsial, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Rotary Club.
5. Pers menjadi sarana untuk mengungkapkan masalah-masalah publik secara luas, seperti kebijakan pejabat, masalah pembangunan, program dan usaha-usaha pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang sebelumnya tertutup dan terbatas di kalangan pemerintah dapat menjadi terbuka dan diketahui masyarakat. Pers dapat melakukan laporan dan penyidikan secara mendalam terhadap masalah publik yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat menjadi diketahui masyarakat.
6. Bedug, kentongan, api unggun
7. Arti penting pers bagi pemerintah
 - a. Sebagai media sosialisasi
Lewat pers, pemerintah bisa menjabarkan langkah-langkah atau program-program kebijakannya agar dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat secara luas

- b. Sebagai wahana kontrol sosial
Lewat pers, pemerintah dapat mengetahui pendapat, gagasan, opini, kritik dari masyarakat terhadap kebijakan program-program pembangunan yang akan, sedang, dan telah diterapkannya.
 8. Teori pers libertarian:
Pers memberi penerangan dan hiburan dengan menghargai sepenuhnya individu. Pers harus benar-benar bebas sebeb-bebasnya tanpa ada campur tangan pengontrol terhadap media di dalamnya. Teori ini adalah merupakan media massa yang bercorak free press. Pers menjadi alat kontrol masyarakat kepada pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 9. Dampak media yang menyalahgunakan kebebasan pers:
 - a. Terjadi keresahan diantara komponen masyarakat akibat suatu pemberitaan yang kurang akurat
 - b. Terjadi salah persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah akibat data yang disajikan kurang lengkap atau kurang akurat
 10. Globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan hidup.
 11. Menghadapi pasar bebas pada era globalisasi
 - Melakukan stop privatisasi (pro-BUMN basis rakyat yang dikontrol rakyat)
 - Menguatkan sumbu daya manusia Indonesia yang menguasai IPTEK, mengembangkan potensi diri, dan mampu bersaing sesama manusia secara terbuka secara global
 - Menguatkan kualitas terhadap produk-produk dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar bebas dunia.
 12. Contoh pengaruh negatif globalisasi
 - Menjalankan semangat konsumerisme dan budaya primitif (serba boleh)
 - Sektor keuangan negara yang semakin tidak stabil
 - Akibat banjirnya barang-barang luar negeri yang murah akan mengakibatkan (jika tidak bersaing) akan menyebabkan banyaknya pabrik-pabrik yang menghentikan produksi (tutup), ini akan berakibat banyaknya PHK, berarti jumlah pengangguran semakin meningkat.
 13. Akibat globalisasi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan terpenuhi. Negara Indonesia telah mempunyai landasar atau pedoman yang tangguh dan baik yaitu Pancasila. Dengan Pancasila inilah, bangsa Indonesia seharusnya mampu menyeleksi nilai-nilai budaya asing sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju, tertib, tenteram, adil, makmur tanpa mengurangi atau menghilangkan kepribadian bangsa Indonesia
 14. Yang harus kita lakukan agar dapat terhindar dari pengaruh negatif globalisasi antara lain:
 - Mencintai dan menggunakan produk-produk buatan/karya bangsa sendiri
 - Tetap memegang teguh dan mencintai budaya warisan nenek moyang kita
- Contoh kongkrit
- Gemar dan senantiasa menggunakan baju batik karya bangsa kita sendiri
 - Menonton pementasan ludruk, ketoprak, lenong, wayang orang, dan aenka pertunjukan budaya tradisional lainnya.

15. Pemanfaatam SDA dan SDM yang ada di tanah air dalam menghadapi globalisasi, perlu langkah-langkah konkrit guna pemanfaatan potensi SDA dan SDM adalah:
- Pemanfaatan SDA (terutama yang menyangkut hajat orang banyak) harus benar-benar diperuntukkan untuk rakyat dan penguasaannya oleh negara (bukan swastanisasi)
 - Peningkatan potensi SDM manusia dengan peningkat dan pengembangan kualitas pendidikan nasional.



ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-095-679-7 (jil.3)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.**

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.18.043,00